



**PERATURAN DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029**





BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi Daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
16. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapperida.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RTRW.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD yang memuat masalah dan isu strategis, tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati dan wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 6

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B. HK.06.068.25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka menengah selanjutnya.

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu 2025-2029 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 13



KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



Kata Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirobbilalamin,*

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izin-Nya, pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Secara umum, penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029 berjalan dengan baik. Penyusunan RPJMD ini telah melibatkan berbagai pihak dari Perangkat Daerah, masyarakat dan akademisi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang lebih baik menuju Pangkep Hebat Berkelanjutan.

Pangkajene, Mei 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	xvi
Daftar Gambar	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	15
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	15
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	15
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	15
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	36
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Geopark	59
2.1.1.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Terbarukan.....	61
2.1.1.5. Potensi Industri	63
2.1.1.6. Potensi Kuliner	63
2.1.1.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	65
2.1.1.8. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	70
2.1.1.9. Lingkungan Hidup Berkualitas	76
2.1.1.10. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	82
2.1.1.11. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	84
2.1.1.12. Indeks Risiko Bencana.....	85
2.1.1.13. Indeks Ketahanan Daerah.....	90
2.1.1.14. Demografi	90
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	98
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	99
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua.....	108
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	116
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	122
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	123
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	124

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	129
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	129
2.1.3.2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	140
2.1.3.3. Transformasi Digital.....	144
2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	148
2.1.3.5. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	149
2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro	157
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	162
2.1.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif	162
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	168
2.1.4.3. Perda yang merupakan Inisiatif DPRD	171
2.1.4.4. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan .	171
2.1.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	175
2.1.6. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah.....	178
2.1.7. Kerjasama Daerah	208
2.1.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	208
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	209
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	210
2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	211
2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah	211
2.2.1.1.2. Belanja Daerah	219
2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah	224
2.2.2. Neraca Daerah	225
2.2.2.1. Aset	226
2.2.2.2. Kewajiban	229
2.2.2.3. Ekuitas Dana	229
2.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	230
2.2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	230
2.2.3.2. Proporsi Belanja Daerah	231
2.2.3.3. Analisis Pembiayaan	232
2.2.4. Analisis Keuangan Daerah	233
2.2.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	233
2.2.4.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)	234
2.2.4.3. Dana Bagi Hasil	235
2.2.5. Kerangka Pendanaan	235
2.2.5.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah	236
2.2.5.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	237
2.2.5.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	237
2.2.5.2.2. Proyeksi Belanja Daerah	241

2.2.5.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah	245
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	247
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	247
2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi	248
2.3.1.2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	250
2.3.1.3. Permasalahan dari Aspek daya Saing Daerah	254
2.3.1.4. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum	255
2.3.1.5. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	256
2.3.2. Isu Strategis Daerah	264
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	274
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	274
3.1.1. Visi	274
3.1.2. Misi.....	275
3.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	280
3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	286
3.2.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	286
3.2.2. Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	306
3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan.....	328
3.3.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional.....	328
3.3.2. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan	335
3.3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	345
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	379
4.1. Program Perangkat Daerah	379
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	435
BAB V PENUTUP	484

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW / RK dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	17
Tabel 2.2.	Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	18
Tabel 2.3.	Klasifikasi Sudut Lereng Masing-Masing Kecamatan (Ha) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	20
Tabel 2.4.	Klasifikasi Ketinggian Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2025	22
Tabel 2.5.	Kondisi Geologi (Jenis Batuan) di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	25
Tabel 2.6.	Hidrogeologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	28
Tabel 2.7.	Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2025	30
Tabel 2.8.	Keadaan Angin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	30
Tabel 2.9.	Keadaan Iklim/Cuaca di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	31
Tabel 2.10.	Tutupan Lahan (Ha) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	33
Tabel 2.11.	Luas Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan...	38
Tabel 2.12.	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	39
Tabel 2.13.	Areal Persawahan Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	40
Tabel 2.14.	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (ha) Tahun 2021–2024.....	41
Tabel 2.15.	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (kuintal) Tahun 2021–2024.....	42
Tabel 2.16.	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (kuintal) Tahun 2021–2024	43
Tabel 2.17.	Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	44
Tabel 2.18.	Jenis Populasi Ternak Besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2024	45

Tabel 2.19.	Jenis Populasi Unggas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	46
Tabel 2.20.	Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021–2024.....	46
Tabel 2.21.	Lokasi dan Potensi Luas Area Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	48
Tabel 2.22.	Data Potensi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	49
Tabel 2.23.	Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	49
Tabel 2.24.	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	50
Tabel 2.25.	Komoditi Perikanan Budidaya Potensial di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	50
Tabel 2.26.	Persebaran Lokasi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	51
Tabel 2.27.	Kadar Salinitas dan Parameter Lainnya	52
Tabel 2.28.	Jenis Prasarana Perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	52
Tabel 2.29.	Potensi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	54
Tabel 2.30.	WUP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	57
Tabel 2.31.	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	58
Tabel 2.32.	Kelas Penggunaan Lahan yang diperkenankan berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan.....	65
Tabel 2.33.	Luas Wilayah Menurut Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	66
Tabel 2.34.	Profil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025.....	68
Tabel 2.35.	Profil Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	69
Tabel 2.36.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	71
Tabel 2.37.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 2.38.	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	73
Tabel 2.39.	Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	73
Tabel 2.40.	Kondisi Kapasitas Air Baku Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	73

Tabel 2.41.	Kondisi Air Baku yang Dikelola Berbasis Masyarakat maupun Non Berbasis Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	74
Tabel 2.42.	Akses Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan terhadap Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	75
Tabel 2.43.	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Tahun 2020-2024	77
Tabel 2.44.	Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	78
Tabel 2.45.	Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	78
Tabel 2.46.	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	79
Tabel 2.47.	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	80
Tabel 2.48.	Kategori dan Angka Rentang IKLH	80
Tabel 2.49.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	81
Tabel 2.50.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024	82
Tabel 2.51.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020- 2024	83
Tabel 2.52.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020- 2024	84
Tabel 2.53.	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.54.	Indeks Risiko Berbagai Bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	87
Tabel 2.55.	Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	87
Tabel 2.56.	Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	88
Tabel 2.57.	Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	88
Tabel 2.58.	Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	89
Tabel 2.59.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.60.	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.61.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	92
Tabel 2.62.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	95

Tabel 2.63.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	96
Tabel 2.64.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	98
Tabel 2.65.	PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 (Persen).....	103
Tabel 2.66.	Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan Status Pekerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024	104
Tabel 2.67.	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2024	107
Tabel 2.68.	Kategori Indeks Keluarga Sehat	110
Tabel 2.69.	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	111
Tabel 2.70.	Persalinan di Fasilitas kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	111
Tabel 2.71.	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	112
Tabel 2.72.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	113
Tabel 2.73.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024....	114
Tabel 2.74.	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	116
Tabel 2.75.	Indeks Literasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	118
Tabel 2.76.	Indeks Numerasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	119
Tabel 2.77.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	120
Tabel 2.78.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	122
Tabel 2.79.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	123
Tabel 2.80.	Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	124
Tabel 2.81.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	124
Tabel 2.82.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2024	125

Tabel 2.83.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	126
Tabel 2.84.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	128
Tabel 2.85.	Angka Ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	130
Tabel 2.86.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	132
Tabel 2.87.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	133
Tabel 2.88.	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	134
Tabel 2.89.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	134
Tabel 2.90.	Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	135
Tabel 2.91.	<i>Return on Aset (ROA)</i> BUMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	136
Tabel 2.92.	Produktivitas Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	136
Tabel 2.93.	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	137
Tabel 2.94.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	138
Tabel 2.95.	TPAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	138
Tabel 2.96.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	139
Tabel 2.97.	Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	140
Tabel 2.98.	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	141
Tabel 2.99.	Status Mutu Air Sungai Pangkajene dan Sungai Bantimala Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	142
Tabel 2.100.	Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	142
Tabel 2.101.	Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	142
Tabel 2.102.	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	144
Tabel 2.103.	Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	144

Tabel 2.104. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	145
Tabel 2.105. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	146
Tabel 2.106. Lokasi Blankspot di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	147
Tabel 2.107. Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	148
Tabel 2.108. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	149
Tabel 2.109. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	154
Tabel 2.110. Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	154
Tabel 2.111. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	154
Tabel 2.112. Jumlah Desa yang Berstatus menurut Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	155
Tabel 2.113. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	155
Tabel 2.114. Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024	156
Tabel 2.115. Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDB Nasional Tahun 2020-2024.....	157
Tabel 2.116. Realisasi Pajak Daerah, PAD, PDRB dan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	158
Tabel 2.117. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	160
Tabel 2.118. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	161
Tabel 2.119. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024	163
Tabel 2.120. Indeks SPBE Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	163
Tabel 2.121. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024	165
Tabel 2.122. Penilaian MCP KPK Tahun 2020-2024 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	165

Tabel 2.123. Kategori Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	166
Tabel 2.124. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	166
Tabel 2.125. Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	167
Tabel 2.126. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	169
Tabel 2.127. Persentase Perempuan Pengurus Politik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	170
Tabel 2.128. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	171
Tabel 2.129. Jumlah Kerjasama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	172
Tabel 2.130. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024	174
Tabel 2.131. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024	175
Tabel 2.132. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	181
Tabel 2.133. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	186
Tabel 2.134. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	202
Tabel 2.135. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	212
Tabel 2.136. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	214
Tabel 2.137. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	216
Tabel 2.138. Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	218
Tabel 2.139. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	220
Tabel 2.140. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	221
Tabel 2.141. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	222
Tabel 2.142. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	223

Tabel 2.143. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	224
Tabel 2.144. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	224
Tabel 2.145. Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	225
Tabel 2.146. Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	225
Tabel 2.147. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	225
Tabel 2.148. Pertumbuhan Aset Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	226
Tabel 2.149. Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	229
Tabel 2.150. Ekuitas Dana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	230
Tabel 2.151. Proporsi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	231
Tabel 2.152. Proporsi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	232
Tabel 2.153. Proporsi Jenis Penerimaan Pembiayaan Terhadap Total Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	233
Tabel 2.154. Proporsi Jenis Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	233
Tabel 2.155. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	234
Tabel 2.156. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	234
Tabel 2.157. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Pemerintah Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	235
Tabel 2.158. Indikator Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	236
Tabel 2.159. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030	239
Tabel 2.160. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030	242
Tabel 2.161. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030	246

Tabel 3.1.	Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029, Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029	275
Tabel 3.2.	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029	278
Tabel 3.3.	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dengan Astacita/Misi RPJMN Tahun 2025-2029	278
Tabel 3.4.	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	279
Tabel 3.5.	Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2045 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	280
Tabel 3.6.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	282
Tabel 3.7.	Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029	289
Tabel 3.8.	Strategi Pembangunan Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	292
Tabel 3.9.	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah.....	308
Tabel 3.10.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025-2029.....	308
Tabel 3.11.	Rumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	312
Tabel 3.12.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	326
Tabel 3.13.	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029.	331
Tabel 3.14.	Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	340
Tabel 3.15.	Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029	349
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	380
Tabel 4.2.	Indikator Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	436
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	437

Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	439
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	448
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	472
Tabel 4.7.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030	475

Daftar Grafik

Grafik 2.1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.2.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	76
Grafik 2.3.	Akses Sanitasi Aman Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	82
Grafik 2.4.	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	93
Grafik 2.5.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	94
Grafik 2.6.	Piramida Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	96
Grafik 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	100
Grafik 2.8.	Persentase Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	100
Grafik 2.9.	Pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	101
Grafik 2.10.	Perkembangan PDRB/Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	102
Grafik 2.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	105
Grafik 2.12.	Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	106
Grafik 2.13.	Perkembangan IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	107
Grafik 2.14.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	109
Grafik 2.15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024.....	115
Grafik 2.16.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024	117
Grafik 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024	118
Grafik 2.18.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	127
Grafik 2.19.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	128

Grafik 2.20. Volume (kg) dan Nilai Ekspor (US\$) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020 - 2024	149
Grafik 2.21. Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2024	152
Grafik 2.22. Tingkat Inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	160
Grafik 2.23. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	164
Grafik 2.24. Tren Realisasi PAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	213
Grafik 2.25. Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024	215
Grafik 2.26. Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.....	217
Grafik 2.27. Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	219

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ..	4
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan..	19
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	21
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	24
Gambar 2.4.	Peta Geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	27
Gambar 2.5.	Peta Hidrogeologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	29
Gambar 2.6.	Peta Curah Hujan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	32
Gambar 2.7.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	36
Gambar 2.8.	Peta Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	40
Gambar 2.9.	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024	59
Gambar 2.10.	Deliniasi Geopark Maros Pangkajene dan Kepulauan.....	61
Gambar 2.11.	Peta sebaran kelas kemampuan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	67
Gambar 2.12.	Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	68
Gambar 2.13.	Peta Risiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	85
Gambar 3.1.	Posisi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan Penjabarannya ke RKPD	287
Gambar 3.2.	Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2026-2030	288
Gambar 3.3.	Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam RPJMN 2025-2029	329



BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan disusun dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui berbagai tahapan dan proses yang melibatkan identifikasi, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai kegiatan dengan mengarahkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan diperlukan. Penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari hasil analisis situasi yang mendalam berdasarkan identifikasi masalah yang ada, sumber daya yang tersedia, dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Perencanaan pembangunan yang baik dan dapat diukur adalah perencanaan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipantau untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Bulan November tahun 2024 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, dan telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan telah dilantik oleh Presiden-RI pada tanggal 20 Februari 2025.

Dengan telah dilantiknya **Dr. H. Muhammad. Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si.** sebagai Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan **Drs. H. Abd Rahman Assagaf, M.I. Kom.** sebagai Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan pada Tanggal 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa Jabatan 2025-2030 maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disusun berdasarkan pada amanat yang tertuang dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

Pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu 2020 hingga 2024 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih menyisakan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2029. Gambaran capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan yang telah mencapai 71,22 pada tahun 2024 atau naik sebesar 2,5 poin dari tahun 2020, masih berada di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun demikian, persebaran capaian IPM antar kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dan terdapat kesenjangan IPM penduduk laki-laki dan perempuan. Dari aspek kesejahteraan penduduk, tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurun sepanjang 2020 hingga 2024 sebesar 1,55 persen, dari 13,96 di tahun 2020 menjadi 12,41 pada Tahun 2024.

Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Triwulan Empat Tahun 2024 tumbuh sebesar 6,69 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5 (lima) tahun sebelumnya yang hanya mencapai -1,69 persen karena kondisi pandemi Covid-19. Gini Ratio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024, karena hanya turun sebesar 0,028 dari angka 0,345 menjadi 0,317 Tahun 2024. Pada sektor ketenagakerjaan, pembangunan di

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memberi manfaat bagi kesempatan kerja penduduk yang membaik dengan berkurangnya pengangguran terbuka dari tahun 2020 yang mencapai angka 5,18 menjadi 3,99 pada tahun 2024 turun sebesar 1,19 periode 2020 hingga 2024.

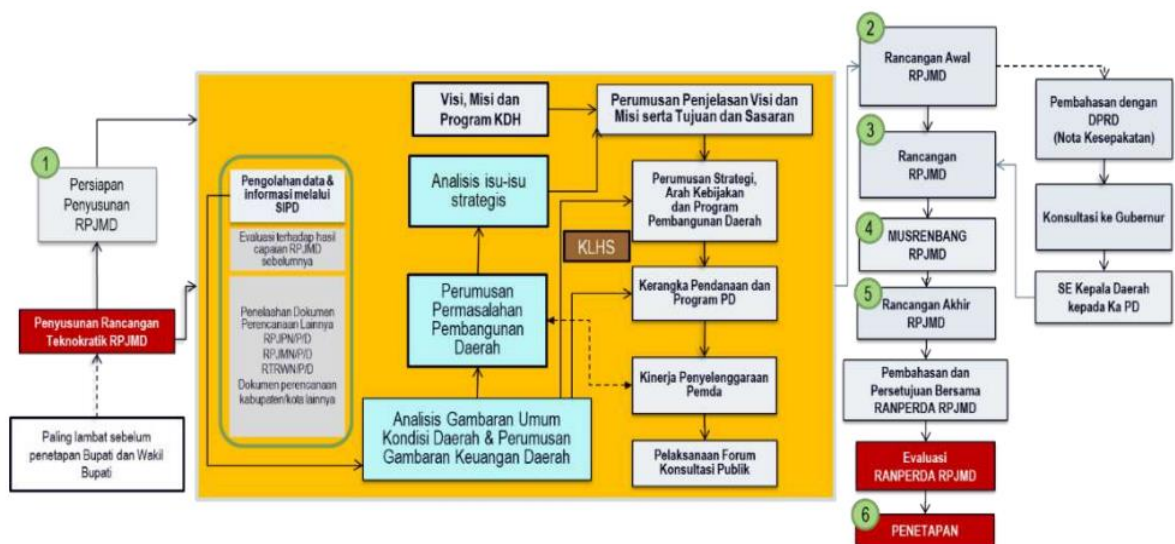
Tahapan proses penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 diawali dengan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Penyusunan RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis sebagaimana amanat pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mendasari RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, dan menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, serta merupakan wujud pengejawantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan bahwa setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 selaras dengan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 tahun 2024 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene

Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.2.Dasar Hukum

Pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

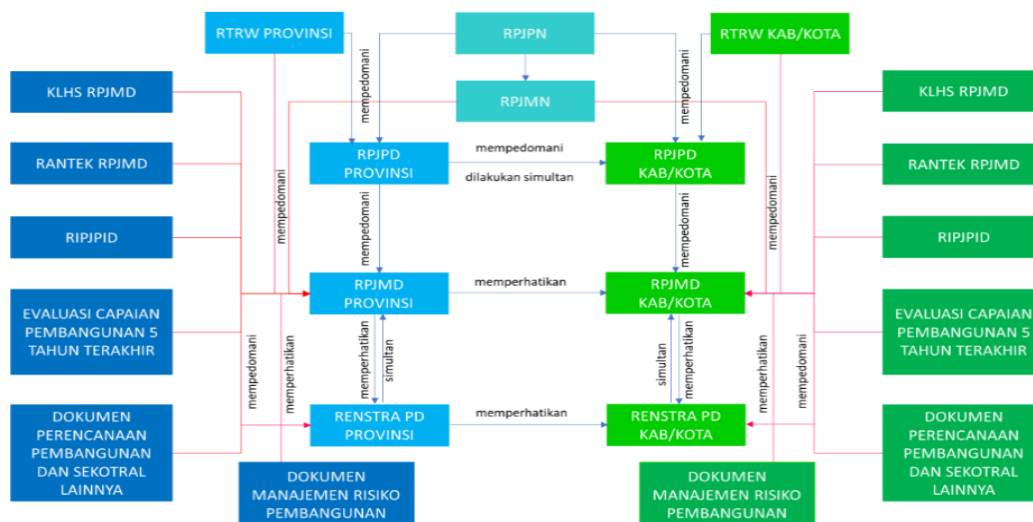
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2041 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, di mana proses penyusunannya dilakukan secara simultan. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang ada dilingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RIPJPID, hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir dan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang bersifat sektoral. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. RPJMD Selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan manajemen risiko level kabupaten, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah. Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, khususnya pentahapan periode pertama dari pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2041. RTRW mengatur tata ruang suatu wilayah dalam jangka panjang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperhatikan dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang yang telah ditetapkan.
- d. Dokumen KLHS RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.
- e. Dokumen Perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4.Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan memberikan kerangka serta arah pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan.

Tujuan dari disusunnya RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029, yaitu:

- Sebagai bahan untuk penyelarasan substansi arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Sebagai bahan untuk penyelarasan arah kebijakan keuangan daerah 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

1.5.Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah, memuat

1. Gambaran umum kondisi daerah
 - a. Aspek geografi dan demografi,
 - b. Aspek kesejahteraan masyarakat,
 - c. Aspek daya saing dan
 - d. Aspek pelayanan umum, termasuk Standar Pelayanan Minimal dan Kerjasama daerah.
2. Gambaran keuangan daerah, memuat:
Penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, memuat:

1. Visi dan Misi;
2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat:

1. Program Perangkat Daerah, Memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab V Penutup, memuat:

1. Menjelaskan secara singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Menekankan pada pentingnya menterjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan.
3. Kaidah pelaksanaan yang perlu memperhatikan manajemen resiko dan pengendalian evaluasi.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkajene dan Kepulauan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 883,553 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) memiliki posisi dan peran strategis di wilayah Sulawesi Selatan, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Terletak di jalur strategis yang menghubungkan Kota Makassar dengan kabupaten-kabupaten di utara Sulawesi Selatan. Pangkajene dan Kepulauan juga menjadi pintu gerbang ke wilayah kepulauan di Laut Flores. Terdiri dari ratusan pulau kecil yang tersebar di Laut Flores, menjadikan Pangkajene dan Kepulauan sebagai wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor maritim dan pariwisata bahari. Kabupaten ini berada di jalur ekonomi regional, mempermudah distribusi barang dan jasa dari dan ke daerah lain.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga merupakan kawasan geopark yang diusulkan membentang dari daratan hingga perairan (lautan), dengan total area seluas 5,257.3 km² yang terdiri atas 60.3% perairan dan 39.7% daratan. Secara administratif berada di 2 wilayah kabupaten, 24 kecamatan yang terdiri dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, 9 kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bagian daratan, dan 1 kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bagian perairan. Deliniasi kawasannya berbatasan dengan Kabupaten Barru pada sisi utara, Kabupaten Bone pada sisi timur, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada sisi selatan dan Selat Makassar pada sisi timur. Jarak dari batas utara ke selatan sejauh ± 60 km, dan dari batas timur ke barat sejauh ± 118 km. Khusus kawasan perairan, jarak tegak lurus garis pantai menuju batas barat kawasan sejauh ± 65 km, dengan panjang garis pantai sejauh 88.5 km. Dan merupakan Batas terluar dari Taman Wisata Perairan Kapoposang dan batas terluar dari Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Banabanawang.

Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai salah satu produsen utama hasil perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya (seperti bandeng dan rumput laut). Selain itu, sektor pertanian, terutama padi, juga mendukung perekonomian

lokal. Pangkajene dan Kepulauan memiliki industri semen yang besar serta potensi tambang lainnya, seperti marmer dan batu kapur, yang menjadi penggerak ekonomi regional. Destinasi wisata seperti Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya adalah kawasan konservasi perairan yang terletak di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, yang mencakup Pulau Kapoposang dan pulau-pulau di sekitarnya. Gua karst di Maros-Pangkajene dan Kepulauan, serta pulau-pulau kecil yang eksotis menjadikan Pangkajene dan Kepulauan memiliki daya tarik wisata alam yang besar. Kabupaten ini memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, seperti Bugis, Makassar, dan Mandar, yang hidup berdampingan dengan tradisi dan kearifan lokal yang kuat. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Pangkajene dan Kepulauan memiliki budaya maritim yang kaya, termasuk tradisi pelayaran dan pembuatan perahu.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi maritim Sulawesi Selatan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Dengan pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di kepulauan, Pangkajene dan Kepulauan menjadi simpul penting dalam rantai logistik dan transportasi antarwilayah. Dengan keberadaan kawasan karst yang unik serta ekosistem laut yang kaya, Pangkajene dan Kepulauan berperan penting dalam konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan potensi wilayah maritim yang sangat besar, tentunya menjadi peluang untuk mengembangkan industri di sektor kemaritiman. Hal ini tentunya sejalan dengan rencana strategis nasional di bidang kemaritiman sebagai poros maritim dunia. Oleh karena arahan rencana pola ruang kawasan peruntukan industri, dititikberatkan pada pengembangan kawasan industri kemaritiman dengan konsep industri terpadu, yaitu galangan kapal, industri pembuatan kapal, industri pengolahan hasil perikanan, pelabuhan peti kemas, serta kawasan perkantoran.

Pada sisi lain di wilayah daratan, potensi sumber daya alam di sektor pertambangan saat ini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu wilayah pertambangan khusus untuk produksi semen yang dikelola oleh PT. Semen Indonesia (Persero), begitupula untuk jenis batuan marmer yang terdapat di beberapa lokasi sumber bahan baku untuk tambang marmer. arahan rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, direncanakan di 3 (tiga) wilayah kecamatan baik kegiatan industri eksisting ataupun kawasan yang direncanakan. Luas lahan kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan seluas 463,13 (empat ratus enam puluh tiga koma tiga belas) Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Secara geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada posisi 4°40'LS-8°00'LS dan 110°BT-119°48'67"BT. Sementara itu secara administratif wilayah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berbatasan dengan beberapa kabupaten disekitarnya untuk wilayah daratan, dan untuk wilayah kepulauan berbatasan dengan beberapa pulau/provinsi, berikut ini rinciannya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar (Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali).

Wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi dalam 13 (tiga belas) kecamatan dan 103 (seratus tiga) desa/kelurahan dengan luas 891,740 Km². Dari 13 (tiga belas) kecamatan, 4 (empat) kecamatan merupakan wilayah kepulauan, dan 9 (sembilan) kecamatan berada di daratan. Kecamatan Tondong Tallasa merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yakni 140,000 Km² atau sekitar 15,700% dari total luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian Kecamatan Balocci dengan luas 130,000 Km² (14,58%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring dengan luas 1,740 Km² atau sekitar 0,200% dari luas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan 133 pulau. Berikut ini rincian luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW / RK dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	% Terhadap Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jumlah Desa	Jumlah Kel.	Jumlah Lingk.	Jumlah Dusun	Jumlah RW/RK	Jumlah RT
1.	Lk. Tangaya	120.00	10,79	72	5	8	1	2	29	35	74
2.	Lk. Kalmas	91.50	8,23	17	5	6	1	2	16	23	53
3.	Lk. Tupabbiring	54.44	4,89	14	5	7	2	0	18	32	92
4.	Lk. Tupabbiring Utara	85.56	7,69	29	5	7	0	0	21	32	75
5.	Pangkajene	47.39	4,26	1	10	0	9	11	0	48	119
6.	Minastene	76.48	6,88	-	50	2	6	10	4	57	140
7.	Balocci	143.48	12,90	-	700	1	4	8	2	25	77
8.	Tondong Tallasa	111.20	10,00	-	625	6	0	0	13	30	75
9.	Bungoro	90.12	8,10	-	150	5	3	10	13	54	149
10.	Labakkang	98.46	8,85	-	100	9	4	9	26	97	136
11.	Ma'rang	75.22	6,76	-	100	6	4	10	18	19	171
12.	Segeri	78.28	7,04	-	100	2	4	8	5	6	117
13.	Mandalle	40.16	3,61	-	100	6	0	0	14	31	80

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	% Terhadap Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jumlah Desa	Jumlah Kel.	Jumlah Ling.	Jumlah Dusun	Jumlah RW/RK	Jumlah RT
	Pangkajene dan Kepulauan	1.112,29	100,00	133	350	65	38	70	179	489	1.358

Sumber: Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.2.
Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

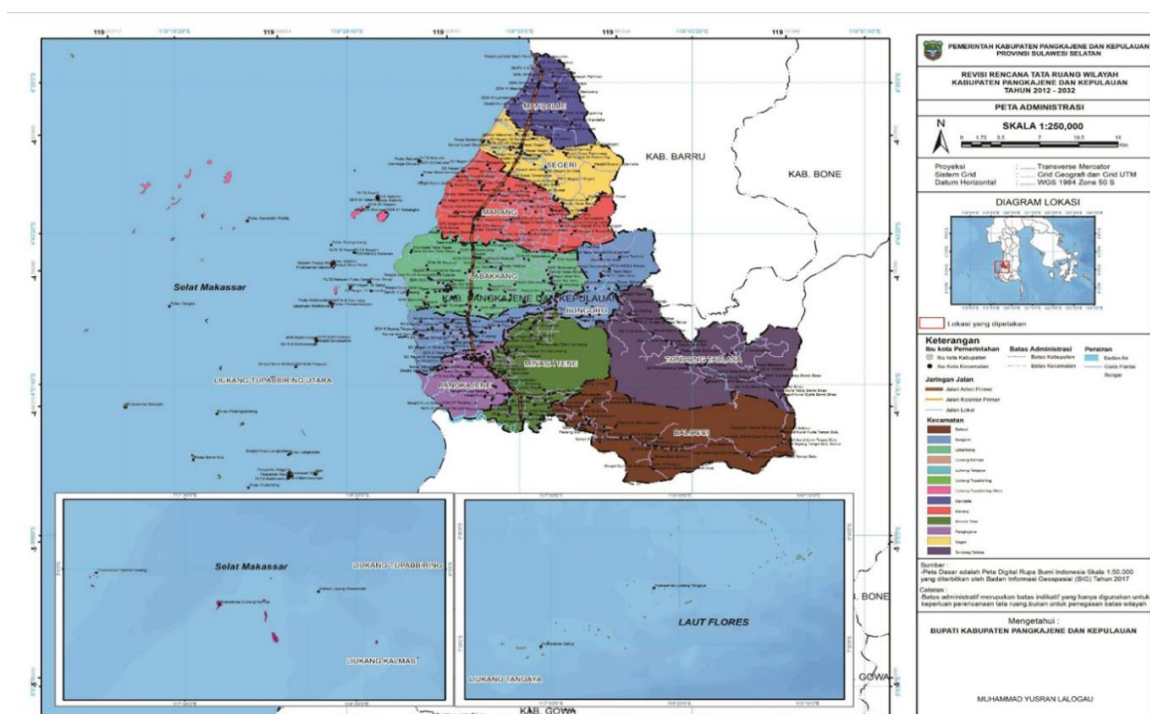
No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Pangkajene	Jagong, Tumampua, Anrong Appaka, Sibatua, Pabundukang, Bonto Perak, Mappasaile, Paddoang Doangan, Tekolabbua.	-
2	Minasate'ne	Biraeng, Bontokio, Bontoa, Kalabbirang, Minasate'ne, Bonto Langkasa	Kabba, Panaikang
3	Balocci	Balleangin, Balocci Baru, Kassi, Tonasa.	Tompo Bulu
4	Tondong Tallasa	-	Bantimurung, Bonto Birao, Bulu Tellue, Lanne, Malaka, Tondong Kura.
5	Bungoro	Boriappaka, Samalewa, Sapanang	Biring Ere, Bowong Cindea, Bulu Cindea, Mangilu, Tabo-Tabo.
6	Labakkang	Borimasunggu, Mangallekana, Labakkang, Pundata Baji	Bara Batu, Batara, Bonto Manai, Gentung, Kanaungan, Kassi Loe, Manakku, Patallassang, Taraweang.
7	Ma'rang	Bonto-Bonto, Talaka, Marang, Attang Salo	Alesipitto, Padang Lampe, Pitu Sunggu, Pitue, Punranga, Tamangapa.
8	Segeri	Bawasalo, Bone, Bonto Matene, Segeri.	Baring, Parenreng
9	Mandalle		Benteng, Boddie, Coppo Tompong, Mandalle, Manggalung, Tamarupa.
10	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bintang, Mattiro Sompe	Mattiro Bone, Mattiro Deceng, Mattiro Dolangeng, Mattiro Langi, Mattiro Matae, Mattaro Adae, Mattiro Ujung.
11	Liukang Tupabbiring Utara		Mattiro Baji, Mattiro Bombang, Mattiro Bulu, Mattiro Kanja, Mattiro Labangeng, Mattiro Uleng, Mattiro Walie
12	Liukang Tangaya	Sapuka	Balo Baloang, Kapoposan Bali, Poleonro, Sabalana, Sabaru Sailus, Satanger, Tampaang.

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
13	Liukang Kalmas	Kalu-Kalukuang	Dewakang, Doang Doangan lombo, Kanyurang, Marasende, Pammas, Sabaru.

Sumber: DPMD, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2025

Secara spasial, orientasi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan serta batas wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan, masing-masing wilayah memiliki jarak tempuh yang berbeda menuju ibukota kabupaten. Kecamatan yang jarak tempuhnya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya, yaitu sejauh 291,29 km. Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pangkajene disusul Kecamatan Minasatene, masing-masing berjarak 2 km dan 2,5 km.

Berdasarkan Topografi Pangkajene dan Kepulauan kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan data kontur dari citra satelit Spot

6/7 tahun 2019, diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori sudut kemiringan yang dirincikan tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

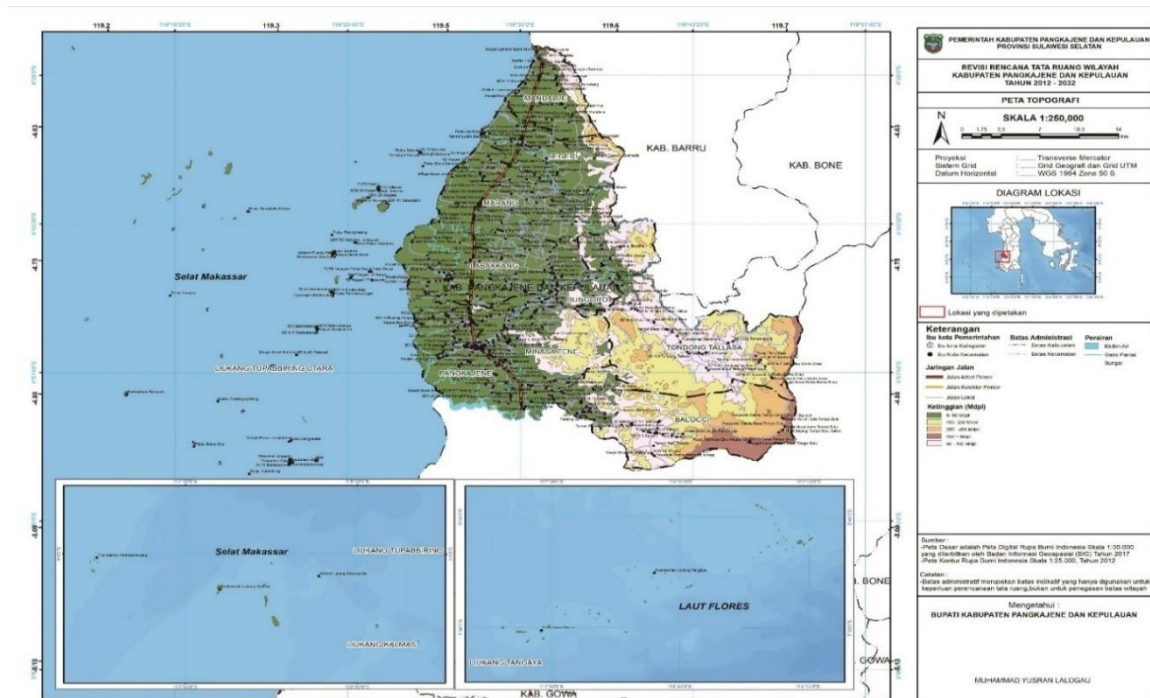
Tabel 2.3.
Klasifikasi Sudut Lereng Masing-Masing Kecamatan (Ha) di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Klasifikasi Kemiringan Lereng						Luas (Ha)
		>40%	0 - 2%	15-25%	2-5 %	25-40%	5-15%	
1.	Lk. Tangaya	-	4.795,26	-	-	-	-	4.795,26
2.	Lk. Kalmas	-	3.581,86	-	-	-	-	3.581,86
3.	Lk. Tupabiring	-	174,31	-	-	-	-	174,31
4.	Lk. Tupabbiring Utara	-	407,13	-	-	-	-	407,13
5.	Pangkajene	1,05	4.086,21	1,75	-	4,14	-	4.093,15
6.	Minaste'ne	1.611,42	5.078,23	559,63	23,15	1,189,0	139,81	8.601,28
7.	Balocci	2.439,16	2.839,30	3,017,37	246,09	3,134,32	1,714,65	13.390,89
8.	Tondong Tallasa	3.096,49	2.314,22	3,201,01	206,96	2,858,86	2,253,18	13.930,72
9.	Bungoro	1.110,01	5.054,83	995,07	328,04	922,16	613,35	9.023,46
10.	Labakkang	72,37	10.086,14	82,44	73,57	83,58	107,78	10.505,88
11.	Ma'rang	345,04	8.192,10	321,12	146,08	333,98	222,45	9.560,77
12.	Segeri	492,19	4.493,90	441,31	128,61	433,16	369,41	6.358,58
13.	Mandalle	424,69	3.128,40	335,29	118,00	376,26	195,52	4.578,16
	Total Luas	9.592,42	54.231,89	8.954,99	1.270,50	9.335,50	5.616,15	89.001,45

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi sudut kelerengan antara 0-2% dengan luas 54.231,890 Ha mendominasi wilayah Kabupaten Pangkajene dan tersebar secara luas di Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Ma'rang, kemudian sudut kelerengan di atas 40% dengan luas 9.592,420 Ha yang dominan berada di Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Balocci. Sementara itu klasifikasi sudut kelerengan antara 2-5% merupakan klasifikasi sudut kelerengan terkecil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu seluas 1.270,500 Ha yang berada di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Balocci, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1) Wilayah Daratan

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

2) Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- Kecamatan Liukang Tupabiring
- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
- Kecamatan Liukang Kalmas
- Kecamatan Liukang Tangaya

Morfologi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa dataran rendah, membentang dari pantai barat, perbukitan di bagian timur dan pulau-pulau kecil. Bentuk morfologi tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga dataran tinggi. Dataran rendah, dan pesisir berada di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle. Sementara itu wilayah kepulauan berada di Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Wilayah dataran tinggi, seperti Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Tabel 2.4.
Klasifikasi Ketinggian Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2025

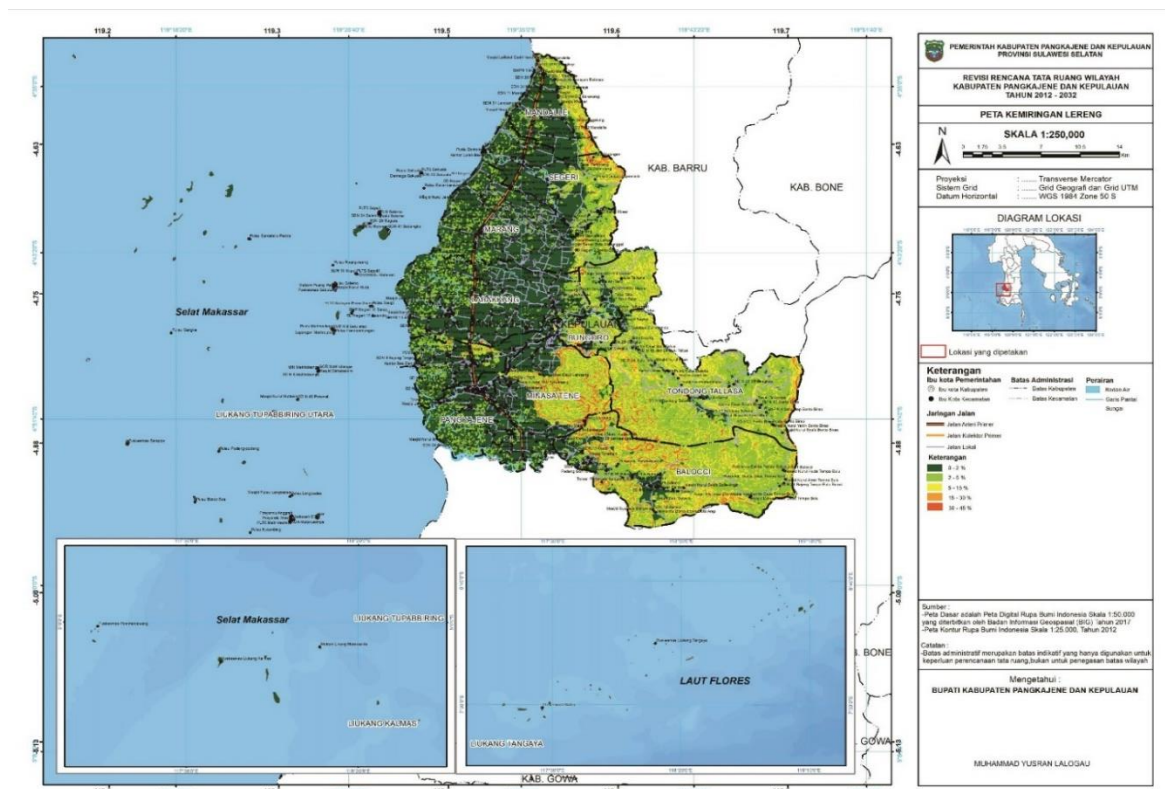
Kelas Ketinggian, Persebaran Lokasi dan Luas			
No.	Klasifikasi Ketinggian	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Ketinggian 000-100 Mdpl	Kec. Liukang Tangaya	4,795.26
		Kec. Liukang Kalmas	3,581.86
		Kec. Liukang Tupabbiring	174.31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407.13
		Kec. Pangkajene	4,093.15
		Kec. Minasatene	5,672.33
		Kec. Balocci	2,275.41
		Kec. Tondong Tallasa	1,799.38
		Kec. Bungoro	6,966.84
		Kec. Labakkang	10,456.14
		Kec. Ma'rang	9,041.80
		Kec. Segeri	5,562.64
		Kec. Mandalle	3,680.31
2.	Ketinggian 100 - 200 Mdpl	Kec. Minasatene	934.46
		Kec. Balocci	2,580.75
		Kec. Tondong Tallasa	3,360.41
		Kec. Bungoro	1,202.72
		Kec. Labakkang	41.60
		Kec. Ma'rang	418.50
		Kec. Segeri	426.56
		Kec. Mandalle	532.91
3.	Ketinggian 200-300 Mdpl	Kec. Minasatene	1,043.56

Kelas Ketinggian, Persebaran Lokasi dan Luas			
No.	Klasifikasi Ketinggian	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Balocci	2,070.98
		Kec. Tondong Tallasa	2,941.16
		Kec. Bungoro	501.35
		Kec. Labakkang	8.14
		Kec. Ma'rang	91.62
		Kec. Segeri	127.93
		Kec. Mandalle	183.08
4.	Ketinggian 300-400 Mdpl	Kec. Minasatene	747.07
		Kec. Balocci	1,523.14
		Kec. Tondong Tallasa	2,513.67
		Kec. Bungoro	212.62
		Kec. Ma'rang	8.84
		Kec. Segeri	76.02
		Kec. Mandalle	98.86
5.	Ketinggian 400-500 Mdpl	Kec. Minasatene	199.48
		Kec. Balocci	1,244.39
		Kec. Tondong Tallasa	2,165.77
		Kec. Bungoro	122.03
		Kec. Segeri	63.97
		Kec. Mandalle	47.65
6.	Ketinggian 500-600 Mdpl	Kec. Minasatene	4.38
		Kec. Balocci	1,135.12
		Kec. Tondong Tallasa	2,165.77
		Kec. Bungoro	17.89
		Kec. Segeri	57.60
		Kec. Mandalle	33.60
7.	Ketinggian 600-700 Mdpl	Kec. Balocci	1,167.39
		Kec. Tondong Tallasa	724.31
		Kec. Segeri	41.48
		Kec. Mandalle	1.74
8.	Ketinggian 700-800 Mdpl	Kec. Balocci	495.89
		Kec. Tondong Tallasa	206.61
		Kec. Segeri	2.39
9.	Ketinggian 800-900 Mdpl	Kec. Balocci	382.72
		Kec. Tondong Tallasa	94.68
10.	Ketinggian 1.000-1.100 Mdpl	Kec. Balocci	322.71
		Kec. Tondong Tallasa	71.50
11.	Ketinggian 1.100-1.200 Mdpl	Kec. Balocci	46.53
		Kec. Tondong Tallasa	2.65
12.	Ketinggian 1.200-1.300 Mdpl	Kec. Balocci	14.06
		Total Luas	90.984,82

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Ketinggian 100-200 Mdpl merupakan kelas ketinggian yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tersebar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 49.548,000 Ha, kemudian kelas ketinggian 200-300 Mdpl, tersebar di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 9.497,900 Ha. Sementara itu kelas ketinggian 1.200-1.300 Mdpl merupakan kelas ketinggian terkecil, berada di Kecamatan Balocci dengan luas 14,060 Ha.

Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi batuan Gunung Api Formasi Camba, batuan Gunung Api Lompobattang, batuan Gunung Api Terpropilitkan, batuan terobosan, batugamping formasi Camba, endapan alluvium dan pantai, formasi Camba, formasi Sekala, formasi Tonasa, kompleks Melange, dan kompleks tektonik Bantimala.

Berdasarkan hasil analisis geologis menunjukkan bahwa jenis batuan endapan aluvium dan pantai mendominasi jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana luasnya mencapai 27.520,710 Ha, kemudian disusul formasi Tonasa dengan luas 19.713,410 Ha. Sementara itu jenis batuan batugamping Formasi Camba merupakan jenis batuan yang hanya terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas hanya 45,250 Ha dan merupakan jenis batuan terkecil. Berikut ini rincian formasi batuan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirinci tiap kecamatan.

Tabel 2.5.
Kondisi Geologi (Jenis Batuan) di Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Struktur Geologi, Lokasi dan Luas			
No.	Klasifikasi / Struktur Geologi	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Batuan Gunung api Formasi Camba	Kec. Balocci	2.449,18
		Kec. Tondong Tallasa	1.184,92
		Kec. Bungoro	174,94
		Kec. Labakkang	278,02
		Kec. Ma'rang	635,58
		Kec. Segeri	596,08
		Kec. Mandalle	1.563,71
2.	Batuan Gunungapi Lompobattang	Kec. Balocci	1.292,97
		Kec. Tondong Tallasa	1.282,68
		Kec. Bungoro	126,21
		Kec. Segeri	117,18
3.	Batuan Gunungapi Terpropilitkan	Kec. Tondong Tallasa	947,47
4.	Batuan Terobosan	Kec. Minasatene	104,44
		Kec. Balocci	1.128,03
		Kec. Tondong Tallasa	1.532,80
		Kec. Bungoro	241,93
		Kec. Labakkang	1,81
5.	Batugamping Formasi Camba	Kec. Tondong Tallasa	45,25
		Kec. Segeri	1.221,63
6.	Endapan Aluvium dan Pantai	Kec. Pangkajene	4.080,92
		Kec. Minasatene	3.659,42
		Kec. Balocci	870,40
		Kec. Bungoro	3.501,83
		Kec. Labakkang	5.722,92
		Kec. Ma'rang	4.191,94
		Kec. Segeri	3.177,31
		Kec. Mandalle	2.315,97
7.	Kompleks Tektonik Bantimala	Kec. Tondong Tallasa	1.529,97
		Kec. Bungoro	1.279,84
		Kec. Ma'rang	494,49

Struktur Geologi, Lokasi dan Luas			
No.	Klasifikasi / Struktur Geologi	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Segeri	270,80
8.	Formasi Tonasa	Kec. Pangkajene	12,23
		Kec. Minasatene	4.178,22
		Kec. Balocci	7.650,31
		Kec. Tondong Tallasa	5.013,80
		Kec. Bungoro	1.814,97
		Kec. Labakkang	554,48
		Kec. Ma'rang	40,73
		Kec. Segeri	412,49
		Kec. Mandalle	36,18
9.	Kompleks Melange	Kec. Tondong Tallasa	2.393,83
		Kec. Bungoro	1.242,02
		Kec. Ma'rang	484,53
10.	Formasi Sekala	Kec. Minasatene	659,19
		Kec. Bungoro	641,70
		Kec. Labakkang	3.948,65
		Kec. Ma'rang	3.713,50
		Kec. Segeri	563,09
		Kec. Mandalle	595,60
11.	Formasi Camba	Kec. Segeri	1.221,63
		Kec. Mandalle	66,70
12.	Tidak Ada Data	Kec. Liukang Tangaya	4.795,26
		Kec. Liukang Kalmas	3.581,86
		Kec. Liukang Tupabbiring	174,31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407,13
		Total Luas	89.001,44

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 4 (empat) bagian besar dari kondisi struktur geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

- Endapan Permukaan: jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
- Batuan Sedimen: jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
- Batuan sedimen bercampur batuan gunung api: jenis struktur batuan ini terbentuk dari formasi camba: terdiri dari batuan sedimen laut berselingan dengan

batuan gunung api, breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm alihan.

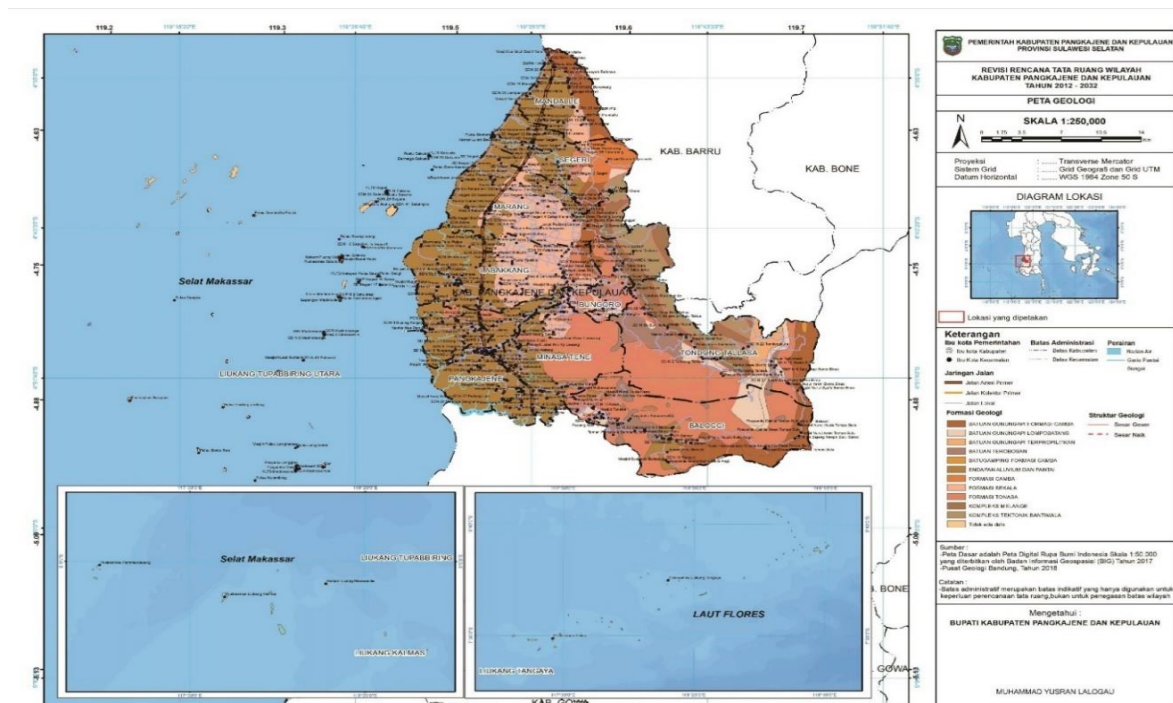
- d. Batuan Terobosan: jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit, dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.

Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari:

- Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang bagian pesisir.
- Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian dataran rendah.
- Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa dan Ma'rang.

Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, feldspar, lempung, marmer, batu bara dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Secara umum wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki iklim laut sehingga tingkat curah hujan relatif tinggi. Keadaan iklim ini pada dasarnya hampir sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan banyaknya tersebar badan-badan air yang besar yang seperti sungai, dan air bawah tanah. Akan tetapi sebaran dari badan air tersebut memiliki perbedaan di setiap wilayah tergantung perbedaan dari curah hujan dan faktor lainnya di wilayah tersebut.

Kondisi hidrogeologi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tercermin dari potensi air tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di daerah dataran rendah bagian barat. Berikut ini rincian kondisi hidrogeologi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.6.
Hidrogeologi Dirinci Tiap Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

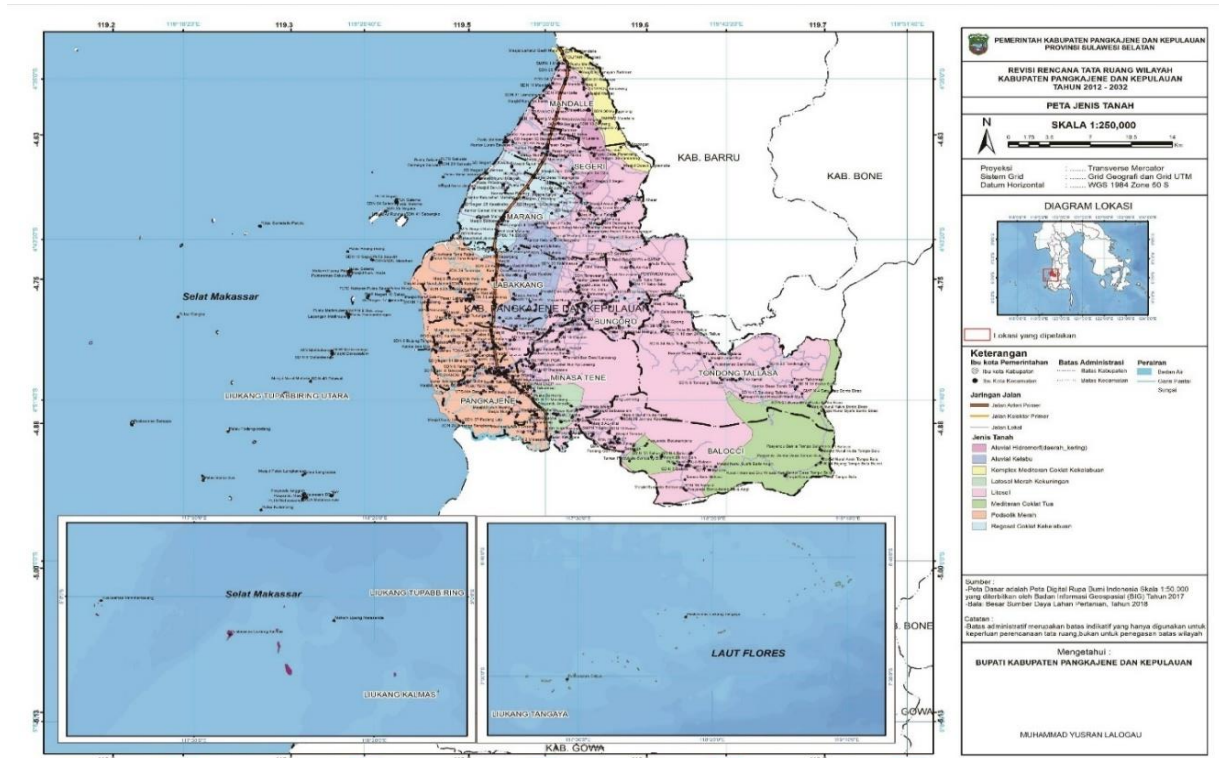
No.	Klasifikasi Hidrogeologi	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Daerah endapan batugamping Ang. Taccipi F. Walanae & F. Tonasa, wilayah air tanah pada daerah karst.	Kec. Balocci	8.304,20
		Kec. Bungoro	18,89
		Kec. Minasatene	13,31
		Kec. Tondong Tallasa	12.146,14
2.	Daerah pegunungan berfungsi sebagai imbuhan air tanah.	Kec. Balocci	0,01
		Kec. Tondong Tallasa	0,01
3.	Wilayah dataran endapan aluvial & endapan hasil gunungapi F. Camba, Wil. Air tanah cukup dalam dgn 1 – 3 lapisan akuifer.	Kec. Balocci	4.783,35
		Kec. Bungoro	5.963,36
		Kec. Labakkang	4.782,81
		Kec. Mandalle	197,52
		Kec. Ma’rang	4.249,79
		Kec. Minasatene	6.517,62
		Kec. Pangkajene	109,11
		Kec. Segeri	3.280,49
		Kec. Tondong Tallasa	1.784,58
4.	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, di beberapa tempat tersusupi air laut.	Kec. Balocci	323,40
		Kec. Bungoro	3.041,22
		Kec. Labakkang	5.723,07
		Kec. Mandalle	4.380,65
		Kec. Ma’rang	5.310,98
		Kec. Minasatene	2.070,35
		Kec. Pangkajene	3.984,04
		Kec. Segeri	3.078,09
5.	Tidak Ada Data.	Kec. Liukang Kalmas	3.581,86
		Kec. Liukang Tangaya	4.795,26
		Kec. Liukang Tupabbiring	174,31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407,13
		Total Luas	89.021,50

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Potensi air tanah dalam pada khususnya di daerah dataran rendah bagian barat wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dibagi menjadi 6 (enam) berdasarkan sebaran ke dalam lapisan pembawa air yaitu:

- Potensi air tanah pada kedalaman 25 meter, tahapan jenis lapisan batuan 11-62 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 50 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter. Potensi air tanah pada kedalaman 75 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 100 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 125 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 150 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.

Gambar 2.5.
Peta Hidrogeologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Curah hujan di suatu wilayah (tempat) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Hari hujan paling banyak terjadi pada bulan januari yaitu 30 hari hujan dengan curah hujan 839,9 mm³, sementara itu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan desember dengan curah hujan sebesar 860,3

mm3 dan jumlah 28 hari hujan. Secara rinci berikut ini keadaan hujan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025.

Tabel 2.7.
Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024-2025

Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan							
No.	Bulan	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan (Hari)		Penyinaran Matahari (%)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1.	Januari	757	649,70	25	30	43,0	3,2
2.	Februari	1035	552,80	26	21	34,0	5,3
3.	Maret	204	454,90	20	25	62,0	4,7
4.	April	329	150,60	21	23	62,0	5,3
5.	Mei	63	71,20	12	17	70,0	6,4
6.	Juni	139	109,70	11	16	65,0	7,1
7.	Juli	151	109,10	10	27	82	6,1
8.	Agustus	0	1,70	1	31	98,0	7,7
9.	September	-	-	-	30	98,0	7,4
10.	Oktober	2	65,60	1	31	97,0	7,3
11.	November	317	246,30	16	30	76,0	5,7
12.	Desember	305	1045,80	25	31	60,0	2,1

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Keadaan angin di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercermin dari kondisi kecepatan angin dan tekanan udara pada wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), menunjukkan bahwa kecepatan angin rata-rata tertinggi pada tahun 2025 terjadi pada bulan Januari yaitu mencapai 10,30 Knot, kemudian pada bulan juli yaitu 4,63 knot, dan pada bulan januari, dan bulan desember kecepatan angin rata-rata berkisar 2,0 knot.

Sementara itu rata-rata tekanan udara di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertinggi terjadi pada bulan september yaitu sebesar 13,0 mbar. Berikut ini tabel data keadaan angin di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.8.
Keadaan Angin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025

No.	Bulan	Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1.	Januari	0,0	1,85	10,30	1005,90	1009,72	1014,30
2.	Pebruari	0,0	1,67	8,70	1005,80	1010,79	1015,00
3.	Maret	0,0	1,48	6,20	1005,60	1009,68	1013,50
4.	April	0,0	1,60	5,70	1004,50	1008,23	1012,20
5.	Mei	0,0	1,54	5,70	1004,30	1008,32	1011,50

No.	Bulan	Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
6.	Juni	0,0	1,45	4,60	1006,80	1010,61	1013,50
7.	Juli	0,0	1,37	4,63	1007,70	1011,75	1014,40
8.	Agustus	0,0	2,27	6,17	1011,50	1013,04	1014,70
9.	September	0,0	2,52	7,72	1009,90	1012,13	1013,60
10.	Oktober	0,0	2,36	7,20	1011,10	1012,32	1014,20
11.	Nopember	0,0	1,69	6,69	1009,10	1011,30	1013,70
12.	Desember	0,0	1,64	7,20	1008,90	1010,79	1013,60

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

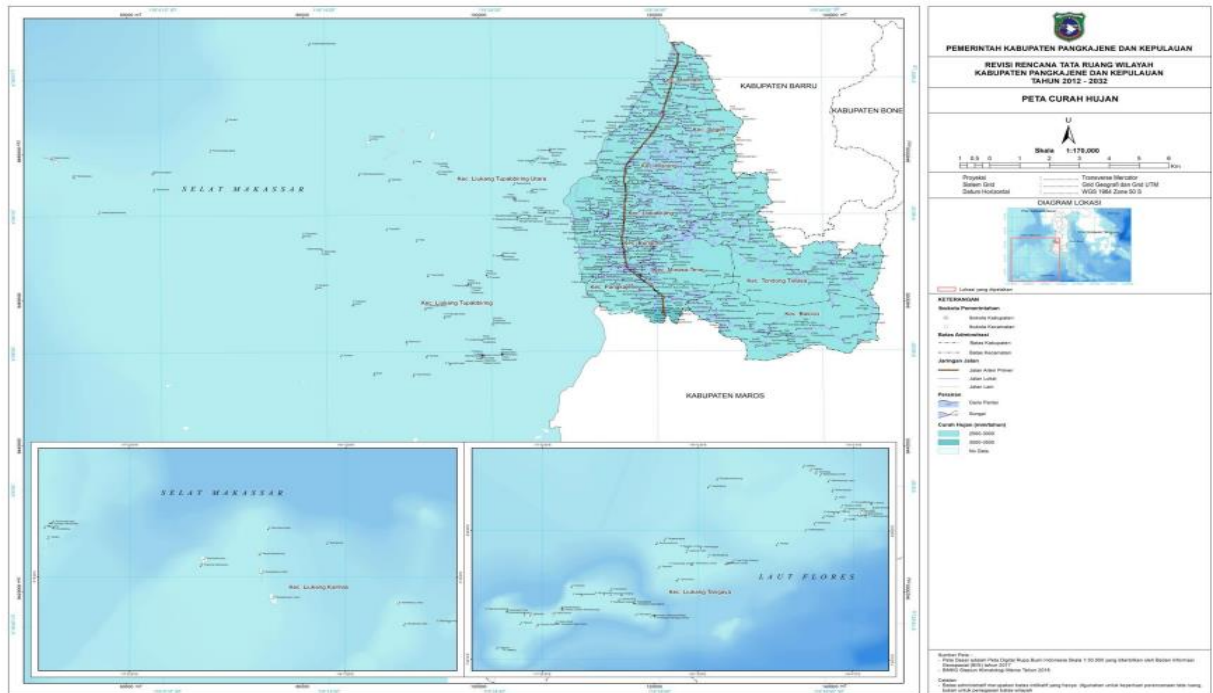
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis basah (tipe B) dengan musim kemarau. Suhu udara tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025 sebesar 36,60°C terjadi pada bulan oktober dengan kelembaban udara sebesar 87,50%, sedangkan, suhu terendah terjadi pada bulan desember yaitu sebesar 31,90°C dengan kelembaban udara sebesar 97%. Secara rinci berikut ini keadaan udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025.

Tabel 2.9.
Keadaan Iklim/Cuaca di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025

No.	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1.	Januari	23,60	27,18	32,80	68,00	89,81	99,00
2.	Pebruari	23,50	27,34	32,40	67,00	88,50	98,00
3.	Maret	24,40	27,57	32,90	69,00	89,54	98,00
4.	April	25,00	28,09	33,30	52,00	87,18	98,00
5.	Mei	24,20	28,65	34,20	51,00	82,33	98,00
6.	Juni	21,60	27,41	33,80	56,00	84,25	96,00
7.	Juli	22,10	27,01	33,60	64,00	83,65	97,00
8.	Agustus	21,00	27,77	35,30	57,50	73,46	83,00
9.	September	22,10	28,61	36,50	62,00	74,61	83,25
10.	Oktober	22,40	28,56	36,60	63,50	78,41	87,50
11.	Nopember	23,40	27,73	33,40	81,00	86,58	89,75
12.	Desember	23,90	31,90	31,90	85,00	90,47	97,00

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Gambar 2.6.
Peta Curah Hujan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Secara garis besar tutupan lahan di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masih didominasi oleh tutupan lahan hutan rimba, persawahan maupun tambak. Tutupan lahan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara garis besar terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan seperti di Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat perkotaan kabupaten, ibukota-ibukota kecamatan. Pola tutupan lahan pada dasarnya merupakan gambaran sejauh mana aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial ekonominya.

Berdasarkan data hasil pengolahan citra satelit menggunakan GIS, menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan hutan rimba mendominasi tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu seluas 31.626,290 Ha atau sekitar 35,520% dari total luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian disusul tutupan lahan sawah seluas 17,585.17 Ha atau sekitar 19,750%. Sementara itu jenis tutupan lahan yang paling kecil yaitu jenis tutupan lahan yang tidak terdata (blank) dengan luas 9,230 Ha atau sekitar 0,010%. Berikut ini secara rinci diuraikan jenis tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.10.
Tutupan Lahan (Ha) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025

No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Danau/Situ	Kec. Balocci	3,69
		Kec. Liukang Kalmas	38,75
		Kec. Liukang Tangaya	6,25
2.	Empang	Kec. Labakkang	0,32
		Kec. Liukang Tangaya	0,05
		Kec. Ma'rang	227,38
		Kec. Segeri	7,05
3.	Hutan Bakau/Mangrove	Kec. Bungoro	21,82
		Kec. Labakkang	49,93
		Kec. Liukang Kalmas	154,93
		Kec. Liukang Tangaya	1.827,89
		Kec. Liukang Tupabbiring	4,57
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	98,72
		Kec. Mandalle	35,69
		Kec. Ma'rang	17,12
		Kec. Pangkajene	19,52
		Kec. Segeri	23,34
4.	Hutan Rawa/Gambut	Kec. Liukang Tangaya	24,22
5.	Hutan Rimba	Kec. Balocci	11.017,03
		Kec. Bungoro	3.282,98
		Kec. Labakkang	179,74
		Kec. Liukang Kalmas	14,78
		Kec. Liukang Tangaya	320,81
		Kec. Mandalle	1.155,76
		Kec. Ma'rang	1.360,01
		Kec. Minasatene	287,40
		Kec. Segeri	1.942,81
		Kec. Tondong Tallasa	12.064,97
6.	Perkebunan/Kebun	Kec. Balocci	466,94
		Kec. Bungoro	205,01
		Kec. Labakkang	825,13
		Kec. Liukang Tangaya	1,352,70
		Kec. Liukang Tupabbiring	9,77
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	25,04
		Kec. Mandalle	673,09
		Kec. Ma'rang	2,184,70
		Kec. Minasatene	308,86
		Kec. Pangkajene	208,76
		Kec. Segeri	551,05
		Kec. Tondong Tallasa	26,56

No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
7.	Permukiman	Kec. Balocci	130,35
		Kec. Bungoro	213,29
		Kec. Labakkang	303,02
		Kec. Liukang Kalmas	236,91
		Kec. Liukang Tangaya	227,63
		Kec. Liukang Tupabbiring	70,13
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	21,64
		Kec. Mandalle	53,85
		Kec. Ma'rang	172,32
		Kec. Minasatene	177,88
		Kec. Pangkajene	254,67
		Kec. Segeri	98,00
		Kec. Tondong Tallasa	31,67
8.	Rawa	Kec. Bungoro	26,43
		Kec. Liukang Tangaya	2,07
		Kec. Minasatene	26,44
9.	Sawah	Kec. Balocci	1.710,16
		Kec. Bungoro	2.480,87
		Kec. Labakkang	3.902,05
		Kec. Mandalle	349,79
		Kec. Ma'rang	1.719,96
		Kec. Minasatene	2.846,66
		Kec. Pangkajene	1.010,77
		Kec. Segeri	2.162,63
		Kec. Tondong Tallasa	1.402,28
10.	Sawah Tadah Hujan	Kec. Mandalle	1.141,97
11.	Semak Belukar	Kec. Balocci	23,97
		Kec. Bungoro	686,74
		Kec. Labakkang	1.365,03
		Kec. Liukang Kalmas	353,67
		Kec. Liukang Tangaya	412,53
		Kec. Liukang Tupabbiring	20,36
		Kec. Mandalle	129,28
		Kec. Ma'rang	2,85
		Kec. Minasatene	3.677,52
		Kec. Pangkajene	7,97
		Kec. Segeri	137,71
		Kec. Tondong Tallasa	132,02
12.	Sungai	Kec. Balocci	0,23
		Kec. Bungoro	93,87
		Kec. Labakkang	100,27
		Kec. Liukang Tangaya	0,60
		Kec. Mandalle	0,16

No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Ma'rang	52,17
		Kec. Minasatene	97,88
		Kec. Pangkajene	201,23
		Kec. Segeri	65,94
		Kec. Tondong Tallasa	50,81
13.	Tambak	Kec. Bungoro	1.339,72
		Kec. Labakkang	3.507,50
		Kec. Liukang Tangaya	2,99
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	92,96
		Kec. Mandalle	951,99
		Kec. Ma'rang	3.478,77
		Kec. Minasatene	1.037,03
		Kec. Pangkajene	2.230,02
		Kec. Segeri	1.258,84
14.	Tanah Kosong/Gundul	Kec. Balocci	23,40
		Kec. Bungoro	672,73
		Kec. Labakkang	272,90
		Kec. Liukang Kalmas	904,16
		Kec. Liukang Tangaya	47,12
		Kec. Liukang Tupabbiring	30,90
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	6,41
		Kec. Mandalle	69,71
		Kec. Ma'rang	345,48
		Kec. Minasatene	141,61
		Kec. Pangkajene	160,21
		Kec. Segeri	110,53
		Kec. Tondong Tallasa	35,47
15.	Tegalan/Ladang	Kec. Balocci	15,11
		Kec. Liukang Kalmas	1.877,97
		Kec. Liukang Tangaya	593,96
		Kec. Liukang Tupabbiring	38,59
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	162,36
		Kec. Mandalle	16,87
		Kec. Segeri	0,69
		Kec. Tondong Tallasa	186,94
16.	Blank	Kec. Liukang Kalmas	0,69
		Kec. Liukang Tangaya	8,54
	Jumlah		89.033,52

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Gambar 2.7.



2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Potensi-potensi tersebut dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, serta kondisi geografis lainnya. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pola ruang serta rencana pengembangan komoditas di setiap wilayah.

Potensi kawasan budidaya berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2036 adalah seluas 58.387,46 Ha atau sebesar 65,73% dari total luas wilayah kabupaten. Sebagian besar dari lahan budidaya tersebut merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian. Sebesar 32,07% lahan dialokasikan untuk pertanian. Selain itu, lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga didominasi oleh peruntukan perikanan yaitu sebesar 13,50% dari total wilayah. Luasnya alokasi lahan untuk pertanian dan perikanan tersebut merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mendorong perekonomian.

Tidak hanya dipengaruhi oleh luasan Pangkajene dan Kepulauan, topografi dan bentang alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memperkaya variasi komoditas pertanian dan perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masing-masing wilayah memiliki komoditas yang unik dan unggul sesuai dengan kondisi geografisnya. Komoditas unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini tidak hanya unggul di tingkat kabupaten saja melainkan juga di tingkat provinsi dan nasional. Bahkan untuk beberapa komoditas sudah mampu dipasarkan ke pasar internasional. Keunggulan tersebut dikarenakan jenisnya dan juga besarnya produksi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Beberapa komoditas pertanian dan perikanan yang menjadi unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain padi, jagung, kacang tanah, kedelai, jeruk pamel, kelapa, kakao, jambu mete, ikan bandeng, rumput laut, udang vaname, udang windu, garam dan produk turunannya.

Selain potensi pertanian dan perikanan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki potensi di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ialah potensi pertambangan dan potensi pariwisata. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki berbagai potensi energi sumber daya terbarukan dan juga berbagai galian tipe B dan tipe C. Berbicara mengenai sektor pariwisata, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi yang sangat banyak baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, maupun kawasan pertambangan. Identifikasi potensi pengembangan wilayah ini dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar dapat menjadi sektor penggerak perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1.1.2.1. Pertanian

Potensi pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar adalah petani selain sebagai nelayan. Luasnya areal pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi potensi untuk ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Mengacu pada kondisi tersebut, dalam arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 13.156,41 Ha. Areal lahan KP2B tersebut didominasi oleh areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Berbagai komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, kacang-

kacangan, begitupula tanaman buah-buahan, seperti jeruk, ataupun ternak besar dan unggas.

a. Luas Baku Sawah (LBS)

Luas baku sawah merupakan salah satu indikator penting dalam sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, karena secara langsung memengaruhi kapasitas produksi beras dan ketahanan pangan daerah. Keberadaan sawah tidak hanya berfungsi sebagai lahan produksi pertanian, tetapi juga memiliki peran ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi rumah tangga petani.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Penetapan Luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2022, Luas Baku Sawah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas 16.863,53 Ha. Luasan ini tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Lebih jelasnya berikut ini rincian Luas Baku Sawah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirinci tiap kecamatan.

Tabel 2.11.
Luas Baku Sawah (LBS) di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Balocci	1.309,19
2	Bungoro	2.052,75
3	Labakkang	3.436,63
4	Mandalle	1.443,59
5	Ma'rang	1.529,43
6	Minasatene	2.129,92
7	Pangkajene	920,23
8	Segeri	2.264,75
9	Tondong Tallasa	1.777,04
	Jumlah	16.863,53

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 1095 Tahun 2022

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Pengembangan wilayah menyebabkan pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk dan secara signifikan meningkatkan kebutuhan lahan serta mengakibatkan tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. UU. No. 41 Th. 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) merupakan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengendalikan laju konversi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan

apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Kawasan Pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai KP2B seluas 11.808,93 Ha.

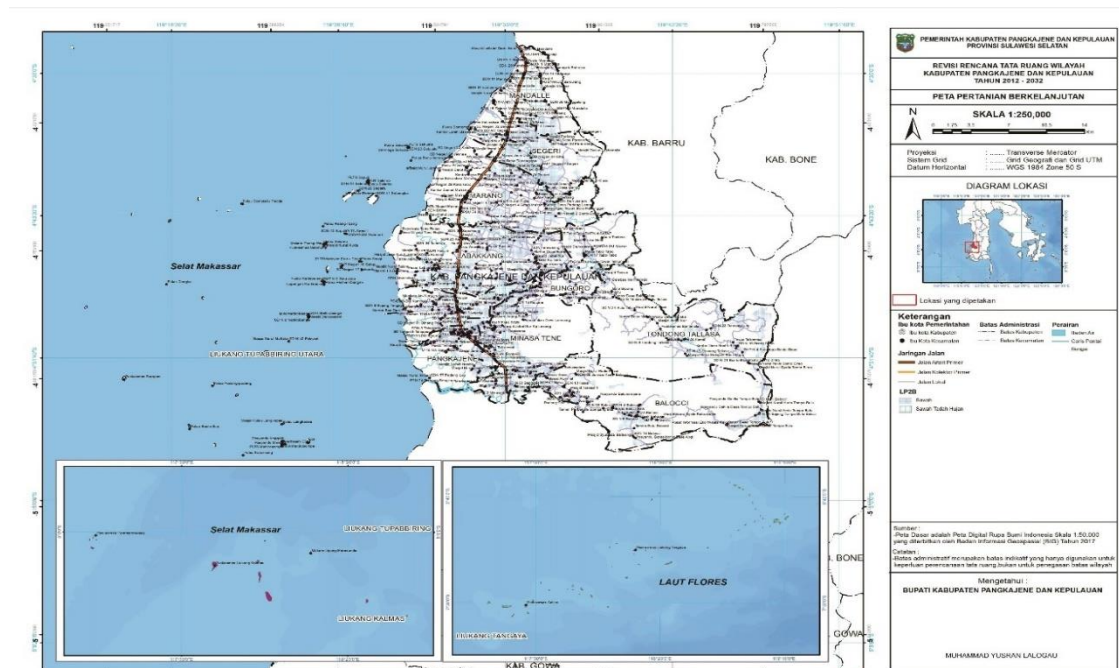
Adapun berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Penetapan Luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2022, Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 13.326,96 Ha. Kawasan ini tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Lebih jelasnya berikut ini rincian luas KP2B di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirinci tiap kecamatan.

Tabel 2.12.
Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Balocci	1.112,65	8,35
2	Bungoro	1.657,59	12,44
3	Labakkang	2.784,69	20,90
4	Mandalle	1.286,09	9,65
5	Ma'rang	920,61	6,91
6	Minasatene	1.723,00	12,93
7	Pangkajene	675,36	5,07
8	Segeri	1.952,36	14,65
9	Tondong Tallasa	1.214,63	9,11
	Jumlah	13.326,96	100,00

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 1095 Tahun 2022

Gambar 2.8.
Peta Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

c. Tanaman Pangan

Tanaman pangan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh tanaman padi di areal persawahan yang sebagian telah menggunakan irigasi teknis, namun masih terdapat pula areal sawah non irigasi. Selain itu terdapat pula areal lahan kering untuk pemanfaatan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Untuk tanaman pangan didominasi oleh areal persawahan yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan khususnya wilayah daratan, dan bahkan terdapat pula areal persawahan di beberapa pulau terluar. Berikut ini data luas areal persawahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan jenis pengairan pada areal persawahan tersebut.

Tabel 2.13.
Areal Persawahan Menurut Jenis Pengairan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Luas Areal Lahan Persawahan				
No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Luas (Ha)
1.	Liukang Tangaya	-	-	-
2.	Liukang Kalmas	-	-	-
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-
5.	Pangkajene	1.169	368	1.537

Luas Areal Lahan Persawahan				
No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Luas (Ha)
6.	Minasatene	2.357	381	2.738
7.	Balocci	1.183	36	1.219
8.	Tondong Tallasa	596	780	1.376
9.	Bungoro	1.235	1.130	2.365
10.	Labakkang	2.168	800	2.968
11.	Ma'rang	1.000	456	1.456
12.	Segeri	100	1.629	1.729
13.	Mandalle	150	1.194	1.344
	Total Luas	9.958	6.774	16.732

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan & BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2018

d. Tanaman Hortikultura

Potensi pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat besar, hal ini didukung oleh potensi lahan pengembangan yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Bungoro, dan beberapa kecamatan lainnya. Tanaman hortikultura yang diusahakan masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu hortikultura sayuran dan hortikultura buah-buahan. Hortikultura sayuran yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah kangkung, dari 131,15 Ha mampu menghasilkan 1.752,40 kuintal pada tahun 2024. Berikut ini rincian luas areal panen dirinci tiap kecamatan.

Tabel 2.14.
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim
menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (ha)
Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Sayuran				
Bawang Daun	-	-	-	-
Bawang Merah	4,00	3,00	3,00	2,00
Bawang Putih	-	-	-	-
Bayam	141,00	115,50	102,35	118,10
Buncis	-	-	-	-
Cabai Besar/TW/Teropong	42,00	27,00	24,00	29,80
Cabai Keriting	-	6,00	1,00	6,25
Cabai Rawit	75,00	79,50	58,15	82,30
Jamur Tiram	509,00	169,00	8,00	2,00
Jamur Merang	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	0,50	1,00
Kacang Panjang	108,00	102,50	97,40	96,75

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Kangkung	160,00	135,75	150,70	131,15
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Ketimun	79,00	64,25	47,10	48,60
Kubis	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	2,00	5,00
Petsai	21,00	34,00	37,75	47,50
Terung	90,00	71,70	61,90	71,85
Tomat	71,00	51,00	48,20	44,05
Wortel	1,00	-	-	-
Buah-buahan				
Melon	-	-	-	-
Semangka	1,00	2,00	21,00	35,00

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.15.
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim
menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (kuintal)
Tahun 2021–2024

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Sayuran				
Bawang Daun	-	-	-	-
Bawang Merah	150,00	125,00	440,00	102,00
Bawang Putih	-	-	-	-
Bayam	1.608,00	1.359,00	1.043,20	1.385,90
Buncis	-	-	-	-
Cabai Besar/TW/Teropong	546,00	313,00	385,20	1.087,00
Cabai Keriting	-	36,00	6,00	83,00
Cabai Rawit	1.059,00	667,00	1.042,55	2.148,70
Jamur Tiram	258,00	157,00	9,00	1,00
Jamur Merang	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	0,50	0,50
Kacang Panjang	1.073,00	1.295,50	1.012,30	2.597,20
Kangkung	1.349,00	1.525,50	1.242,05	1.752,40
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Ketimun	1.891,00	814,95	958,60	2.878,55
Kubis	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	21,00	25,00
Petsai	725,00	506,75	456,75	762,95
Terung	1.100,00	987,00	1.327,50	1.489,05
Tomat	695,00	539,00	1.246,40	1.898,85
Wortel	1,00	-	-	-

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Buah-buahan				
Melon	-	-	-	-
Semangka	15,00	16,00	219,00	298,00

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Sementara itu jenis hortikultura buah-buahan yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah jeruk besar yang produksinya mencapai 492.906,74 kuintal di tahun 2024. Jenis komoditi buah-buahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi jenis buah mangga, durian, jeruk besar, pisang, nanas, dan jeruk siam. Berikut ini rincian jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 2.16.
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (kuintal)
Tahun 2021–2024

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Buah-buahan				
Alpukat	242,00	380,00	480,00	425,22
Anggur	-	-	3,00	5,68
Apel	-	-	-	-
Belimbing	155,00	134,00	217,00	170,74
Buah Naga	5,00	1.300,00	1.962,00	2.752,30
Duku	16,00	17,00	12,00	11,00
Durian	122,00	192,84	220,72	287,20
Jambu air	4.921,00	4.122,50	5.752,00	4.104,32
Jambu biji	5.278,00	5.521,02	6.738,41	25.208,50
Jeruk pamelor	295.670,00	271.995,46	193.725,94	492.906,74
Jeruk Lemon	1,50	10,20	21,60	45,28
Jeruk Siam	89,00	130,40	54,50	67,30
Lengkeng	-	12,50	59,40	209,96
Mangga	36.690,00	34.071,22	22.052,00	12.850,56
Manggis	42,00	34,00	11,00	8,00
Nenas	94,90	116,90	70,80	72,36
Nangka	5.426,00	4.421,10	1.985,60	1.942,60
Pepaya	6.467,00	4.491,08	2.767,74	3.627,44
Pisang	32.951,00	33.500,42	26.951,60	19.102,59
Rambutan	3.200,50	3.012,98	2.445,69	7.508,10
Salak	9,40	13,00	37,40	39,00
Sawo	142,00	108,85	213,61	485,95
Sirsak	851,00	883,22	558,74	659,56
Sukun	7.555,00	9.782,91	9.736,42	10.821,27

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024*
Sayuran				
Melinjo	-	-	-	500,00
Petai	-	-	2,00	1,23

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

e. Perkebunan

Subsektor perkebunan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan komoditi yang potensial dikembangkan. Beberapa jenis komoditi saat ini yang ada seperti kelapa, kakao, kopi, dan berbagai jenis komoditi perkebunan lainnya. Produksi hasil perkebunan jenis komoditi kelapa sebesar 857 ton, produksi kopi sebesar 26,79 ton dan produksi kakao sebesar 22,08 ton. Ketiga jenis komoditi tersebut merupakan hasil produksi perkebunan yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditi perkebunan yaitu Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Balocci. Berikut ini luas areal perkebunan dan jenis komoditinya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.17.
Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha)
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha)		
		Kelapa	Kopi	Kakao
1.	Liukang Tangaya	2.367	-	-
2.	Liukang Kalmas	1.687	-	-
3.	Liukang Tupabbiring	46	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	21	-	-
5.	Pangkajene	39	-	-
6.	Minasatene	50	-	-
7.	Balocci	23	7	-
8.	Tondong Tallasa	60	101	12
9.	Bungoro	137	-	4
10.	Labakkang	212	-	-
11.	Ma'rang	181	3	4
12.	Segeri	57	2	20
13.	Mandalle	63	1	25
Total		4.943	14	65

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

f. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu usaha ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Potensi pengembangan peternakan di wilayah ini sangat dimungkinkan mengingat areal wilayahnya yang cukup luas ditunjang dengan kondisi bentang alam yang cocok untuk pengembangan budidaya peternakan, seperti di wilayah Kecamatan Kecamatan Labakkang, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Balocci, dan beberapa kecamatan lainnya.

Jenis populasi ternak yang diusahakan oleh masyarakat secara individual, seperti ternak sapi, kerbau, kuda, maupun kambing. Jenis populasi ternak besar yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat yaitu sapi dengan jumlah populasi sebanyak 28.246 ekor, kemudian populasi kambing sebanyak 4.088 ekor. Berikut ini rincian jumlah dan jenis populasi ternak besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.18.
Jenis Populasi Ternak Besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Populasi Ternak Besar			
		Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
1.	Liukang Tangaya	-	-	35	234
2.	Liukang Kalmas	-	-		117
3.	Liukang Tupabbiring	-	-		219
4.	Liukang Tupabbiring Utara	-	-		194
5.	Pangkajene	605	48	1	225
6.	Minasatene	2.810	162	36	562
7.	Balocci	3.612		15	155
8.	Tondong Tallasa	4.002	23	194	234
9.	Bungoro	3.824	215	8	407
10.	Labakkang	4.106	259	25	610
11.	Ma'rang	3.546	12	2	366
12.	Segeri	3.138	55	7	378
13.	Mandalle	2.603	5	-	387
Total		28.246	779	323	4.088

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Populasi unggas yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan itik manila. Populasi ternak terbanyak yaitu ayam pedaging sebanyak 941.462 ekor kemudian ayam kampung sebanyak 757.500 ekor dan itik sebanyak 589.994 ekor. Berikut ini rincian jumlah ternak unggas dan persebarannya di setiap kecamatan.

Tabel 2.19.
Jenis Populasi Unggas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Populasi Ternak Unggas				
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila
1.	Liukang Tangaya	23.482	-	-	7.965	270
2.	Liukang Kalmas	14.052	-	-	10.089	370
3.	Liukang Tupabbiring	13.446	-	-	18.585	630
4.	Lk. Tupabbiring Utara	10.567	-	-	16.815	320
5.	Pangkajene	33.708	2.598	26.078	26.078	889
6.	Minasatene	92.036	9.588	100.736	71.330	2.428
7.	Balocci	74.613	1.299	30.315	58.586	2.004
8.	Tondong Tallasa	95.255	762	20.524	77.702	2.652
9.	Bungoro	80.673	11.514	131.616	62.126	2.129
10.	Labakkang	110.216	53.762	472.144	78.823	2.768
11.	Ma'rang	62.686	4.704	54.511	48.734	1.669
12.	Segeri	88.817	4.167	85.673	68.734	2.343
13.	Mandalle	57.949	1.210	19.865	44.427	1.514
Total		757.500	89.604	941.462	589.994	19.986

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Berikut adalah beberapa komoditi pertanian unggulan dan data produksi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 2.20.
Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021–2024

No.	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	187.602	198.091	198.010	182.090	171.594
2.	Jagung	12.096	3.919	3.922	3.248	6.344
3.	Kedelai	1.560	1.574	1.575	1.183	797
4.	Ubi Kayu	1.260	668	668	182	1.527
5.	Ubi Jalar	741	932	925	4.792	560
6.	Kacang Tanah	3.330	3.001	2.998	1.330	4.095
7.	Kacang Hijau	456	566	565	618	315
8.	Jeruk Besar Pangkep	23.980,40	29.561	27.199	48.903	49.393
9.	Bawang Merah		14	13	96	102
10.	Jambu Mete	1.835	1.834	1.834	1.879	1.119
11.	Kelapa	906	906	906	1.206	1.037
12.	Daging Ternak Besar dan Kecil	833,78	833,78	329.26	932,55	553,93
13.	Daging Ternak Unggas	4.662	509,05	564,47	1.323,70	4.338,09

No.	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
14.	Telur	73.661	4.662	4.380	46.367	989,62

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

2.1.1.2.2. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan daerah tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Memiliki potensi laut yang cukup luas, dengan luasnya potensi laut tersebut menjadikan sektor perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu sektor unggulan wilayah ini. Luasnya areal perairan dan laut serta banyaknya penduduk yang bergerak di sektor perikanan menjadikan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah sentra perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perikanan Tangkap

Lokasi untuk kegiatan perikanan tangkap adalah wilayah laut daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu dimana banyak digunakan oleh nelayan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti bagang, rumpun dan *purse seine* serta penangkapan dengan jenis-jenis alat tangkap lainnya.

Masalah yang umum dihadapi nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahwa dalam keberadaan daerah penangkapan ikan yang selalu bersifat dinamis, berubah/berpindah mengikuti pergerakan ikan. Secara alami, ikan memilih habitat yang sesuai, sedangkan habitat tersebut sangat dipengaruhi kondisi oseonografi perairan. Dengan demikian daerah potensial penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh faktor oseonografi perairan. Ikan cenderung berkumpul pada lingkungan tertentu, seperti adanya peristiwa upwelling, dinamika arus pusaran (eddy), dan front gradien pertemuan dua massa air yang berbeda baik itu salinitas, suhu atau klorofil-a.

Nilai kesesuaian yang dipakai dalam melakukan wilayah penangkapan antara lain suhu, salinitas dan klorofil-a. Di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Selat Makassar secara umum keseluruhan variabel tersebut berada pada kisaran yang sesuai yaitu suhu 27-30oC, salinitas 28-34oC serta klorofil-a rata-rata 0,2-0,6 (dimana tingkat klorofil yang baik untuk perikanan tangkap 0,3 mg/m³ (Zainuddin 2006). Kesesuaian lahan untuk kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencakup keseluruhan wilayah laut yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya. Wilayah dengan luasan yang paling besar untuk penangkapan adalah Kecamatan Liukang Tangaya dengan luas 599.837,38 Ha, dan Kecamatan Liukang Kalmas dengan luas 267.888,25 Ha, kemudian Kecamatan Liukang Tupabiring dengan luas 94.883,23 Ha dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara dengan luas 105.466,74 Ha.

a) Potensi WPPNRI

Berdasarkan SK. Kemen-KP 47 Th. 2016, tentang Estimasi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berada di Selat Makassar berada dalam WPPNRI 713 memiliki potensi WPPNRI.

b) Komoditas Tangkapan dan Unggulan

Komoditas tangkapan unggulan di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki 10 (sepuluh) jenis ikan unggulan, yaitu ikan rajungan, ikan kerapu karang, ikan teri, ikan kakap merah, cumi-cumi, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tengiri, kepiting bakau, dan ikan layang.

c) Jumlah dan Lokasi Penangkapan

Kondisi jumlah dan lokasi penangkapan ikan di wilayah perairan untuk perikanan tangkap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Lokasi dan Potensi Luas Area Penangkapan Ikan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No.	Potensi Perikanan Tangkap	
	Area Penangkapan Ikan	Luas (Ha)
1.	Kecamatan Liukang Kalmas	267.888,25
2.	Kecamatan Liukang Tangaya	599.837,38
3.	Kecamatan Liukang Tupabbiring	94.883,23
4.	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	105.466,74
5.	Kecamatan Bungoro	345,67
6.	Kecamatan Labakkang	937,26
7.	Kecamatan Ma'rang	1.635,02
8.	Kecamatan Pangkajene	1.466,34
9.	Kecamatan Mandalle	1.222,84
10.	Kecamatan Segeri	773,34
Jumlah		1.674.456,07

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

b. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki potensi lahan perikanan yang cukup luas, baik budidaya air tawar, air payau maupun air laut. Begitupula komoditas perikanan unggulan, serta lokasi persebarannya meliputi seluruh wilayah.

a) Potensi Lahan Perikanan Budidaya (Tawar, Payau dan Laut)

Kegiatan budidaya air payau dapat dilihat hampir di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dari mulai Kecamatan Pangkajene hingga Kecamatan Mandalle. Kegiatan budidaya yang dikembangkan adalah jenis air payau, seperti budidaya udang, ikan bandeng dan kepiting. Jika

dilihat dari segi kapasitas usaha yang ada, maka dapat digolongkan sebagai usaha golongan skala kecil dan menengah dengan modal yang terbatas. Berikut ini potensi perikanan budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.22.
Data Potensi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Potensi Perikanan Budidaya				
No	Jenis Budidaya	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Peluang Pengembangan (Ha)
1.	Air Payau	13.494,80	10.755,47	2.739,33
2.	Air Tawar	251,50	27,70	223,80
3.	Air Laut	7.900,00	1.421,80	6.478,20
Jumlah		21.646,30	12.204,97	9.441,33

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Berdasarkan data pemanfaatan, kegiatan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu tambak, kolam dan budidaya laut, dengan total luasan pemanfaatan untuk ketiganya seluas 12.204,97 Ha. Luasan ini terdiri dari luas areal budidaya air payau 10.755,47, luas areal budidaya air tawar 27,70 Ha dan budidaya air laut seluas 1.421,80 Ha. Persentase pemanfaatan lahan untuk areal tambak berkisar 88,10%, 11,60% untuk budidaya laut dan 0,22% untuk kolam. Berikut ini rincian tingkat pemanfaatan lahan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.23.
Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Budidaya		
		Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Budidaya Laut (Ha)
1.	Liukang Tangaya	-	-	655,60
2.	Liukang Kalmas	-	-	713,70
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	135,80	-	10,00
5.	Pangkajene	2.276,40	-	3,70
6.	Minasatene	674,72	-	-
7.	Balocci	-	3,70	-
8.	Tondong Tallasa	-	-	-
9.	Bungoro	1.086,77	-	2,50
10.	Labakkang	2.569,63	-	5,70
11.	Ma'rang	2.457,39	12,00	7,50

No.	Kecamatan	Jenis Budidaya		
		Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Budidaya Laut (Ha)
12.	Segeri	1.074,24	10,00	3,10
13.	Mandalle	480,52	2,00	20,00
Jumlah		10.755,47	27,70	1.421,80

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

b) Komoditas Unggulan (Tawar, Payau dan Laut)

Komoditas unggulan perikanan budidaya untuk 3 (tiga) jenis perikanan budidaya, yaitu budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan potensi produksi sebesar 606,750 ton dengan rincian untuk budidaya air tawar sebesar 450 ton, budidaya air payau sebesar 45.800 ton, dan budidaya air laut sebesar 560.500 ton. Berikut ini rincian jenis komoditi unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.24.

Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No.	Jenis Ikan Budidaya		
	Tawar	Payau	Laut
1.	Lele	Bandeng	Rumput Laut <i>Cottoni</i>
2.	Mas	Windu	Lobster
3.	-	Vaname	Kerapu
4.	-	Nila	-
5.	-	Rumput Laut <i>Gracilliria</i>	-

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Sementara itu jenis komoditi yang berpotensi dikembangkan untuk usaha budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti ikan hias, kerang mutiara, dan kuda laut.

Tabel 2.25.

Komoditi Perikanan Budidaya Potensial
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No.	Jenis Ikan Budidaya		
	Jenis Komoditi	Lokasi	Nama Pulau
1.	Ikan Hias	Kec. Liukang Tupabbiring	- Balang Lompo - Sarappo Lompo - Pajenekang
2.	Kerang Mutiara	Kec. Liukang Tupabbiring	Bontosua
3.	Kuda Laut	Kec. Liukang Tupabbiring	Badi

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

c) Jumlah dan Lokasi Perikanan Budidaya

Persebaran lokasi perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi seluruh wilayah kecamatan. Namun dari 3 (tiga) jenis perikanan budidaya yang dimaksud yaitu budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut, tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Berikut ini rincian jumlah dan persebaran lokasinya.

Tabel 2.26.
Persebaran Lokasi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Perikanan Budidaya					
		Tawar		Payau		Laut	
		Jml Lokasi	Luas (Ha)	Jml Lokasi	Luas (Ha)	Jml Lokasi	Luas (Ha)
1.	Lk. Tangaya	-	-	-	-	5	857,77
2.	Lk. Kalmas	-	-	-	-	4	1.288,35
3.	Lk. Tupabbiring	-	-	-	-	7	21,00
4.	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	2	135,80	3	136,00
5.	Pangkajene	1	0.01	6	2.283,79	1	6,20
6.	Minasatene	3	0.07	4	674,72	-	-
7.	Balocci	2	7,10	-	-	-	-
8.	Tondong Tallasa	3	0,31	-	-	-	-
9.	Bungoro	1	0,01	4	1.042,04	-	-
10.	Labakkang	-	-	9	2.594,63	2	163,00
11.	Ma'rang	4	35,39	8	2.480,69	4	589,68
12.	Segeri	4	1,23	4	1.295,44	3	83,00
13.	Mandalle	2	0,34	6	508,34	3	285,00
Jumlah		20	44,46	43	11.015,45	32	3.430,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

c. Tambak Garam

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah penghasil garam di Sulawesi Selatan. Produksi garam di daerah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 2 (dua) wilayah yang menjadi sentra garam, yakni Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang. Potensi lahan tambak garam di kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 844 Ha. Potensi lahan tambak garam di Kecamatan Bungoro adalah Desa Bulu Cindea, sedangkan di Kecamatan Labakkang berada pada Desa Bontomanai, Kelurahan Pundata Baji dan Kelurahan Borimasunggu.

Tingginya produksi garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang dipengaruhi oleh kadar salinitas dan parameter kualitas air lainnya yang mendukung pengembangan produksi garam. Lebih jelasnya berikut ini tabel rincian kadar salinitas dan

parameter lainnya sebagai indikasi potensi produksi dan areal tambak garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.27.
Kadar Salinitas dan Parameter Lainnya

No.	Parameter	Nilai
1.	Salinitas (permil)	>30
2.	pH	7-8
3.	Viscositas	>17
4.	Evaporasi	>22
5.	Ketinggian Air (cm)	5-10
6.	Amoniak (mg/l)	0
7.	Asam belerang (mg/l)	0

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Potensi produksi garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 90-100 ton/Ha, sehingga dengan potensi lahan sebesar 844 Ha, maka potensi produksi garam yang dapat dihasilkan pertahun adalah 75.960-84.400 ton/Ha.

d. Prasarana Perikanan

Prasarana perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini cukup banyak tersedia, seperti pasar ikan, pabrik es, tempat pelelangan ikan, tempat pembenihan ikan, dan berbagai prasarana perikanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai prasarana perikanan ini tentunya dapat meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan masyarakat di wilayah ini. Berikut ini tabel rincian jumlah dan jenis prasarana perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.28.
Jenis Prasarana Perikanan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No.	Jenis, Lokasi dan Jumlah Prasarana Perikanan		
	Jenis Prasarana Perikanan	Lokasi	Jumlah
1.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)		
	a. SPBN Pundata Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	b. SPBN Tekolabua, dan SPBN Mappasaile	Kec. Pangkajene	2 Unit
	c. SPBN Bawasalo	Kec. Segeri	1 Unit
2.	Pasar Ikan		
	a. Pasar Kalibone, Pasar Tanete, dan Pasar Kabba	Kec. Minasatene	3 Unit
	b. Pasar Balleanging, Pasar Balocci, Pasar Majennang, dan Pasar Kassi	Kec. Balocci	4 Unit
	c. Pasar Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
	d. Pasar Tabo-Tabo, Pasar Sapanang, Pasar Taraweang	Kec. Bungoro	

Jenis, Lokasi dan Jumlah Prasarana Perikanan			
No.	Jenis Prasarana Perikanan	Lokasi	Jumlah
	e. Pasar Erasa, dan Pasar Bontoa	Kec. Labakkang	2 Unit
	f. Pasar Bonto-Bonto	Kec. Ma'rang	1 Unit
	g. Pasar Segeri	Kec. Segeri	1 Unit
	h. Pasar Mandalle	Kec. Mandalle	1 Unit
	i. Pasar Malaka	Kec. Tondong Tallasa	1 Unit
3.	<i>Cold Storage</i>	Kec. Liukang Tupabiring Utara (Pulau Sabutung)	1 Unit
4.	Pabrik Es		
	a. Pabrik Es Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
	b. Pabrik Es Maccini Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	c. Pabrik Es Kalibone	Kec. Minasatene	1 Unit
	d. <i>Ice Flake Machine (IFM)</i>	Kec. Pangkajene	1 Unit
5.	Gudang Pengolahan	Kec. Labakkang	1 Unit
6.	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. TPI Maccini Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	b. TPI Kalibone	Kec. Minasatene	1 Unit
	c. TPI Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
7.	Pos Kesehatan Ikan Terpadu	Kec. Labakkang	1 Unit
8.	Pembenihan Ikan		
	A. Balai Benih Ikan Air Tawar	Kec. Balocci	1 Unit
	B. Pembenihan/ <i>Hatchery</i> Ikan	Kec. Liukang Tupabiring Utara (Pulau Sabutung)	1 Unit
9.	Gudang Rumput Laut	Pulau Salemo, Kec. Liukang Tupabbiring Utara	1 Unit
		Pulau Sabalana Kec. Liukang Tangaya	1 Unit
		Kel. Pundata Baji, Kec. Labakkang	1 Unit

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

2.1.1.2.3. Pariwisata

Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas, berupa perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahannya, baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.

Perkembangan suatu kawasan wisata tergantung pada apa yang dimiliki oleh kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Kesuksesan dari suatu kawasan wisata sangat tergantung atraksi (attraction), mudah dicapai (accessibility),

dan fasilitas (amenities), serta beberapa faktor pendukung lainnya. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian dari wilayah darat dan kepulauan, menyimpan berbagai potensi dan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Berdasarkan SK. Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 407 Th. 2009, ditetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu) lokasi obyek wisata. Penetapan lokasi obyek wisata ini mengacu pada kondisi eksisting obyek wisata yang dikelola saat ini serta potensi pengembangan di masa mendatang. Berikut ini rincian obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.29.
Potensi Pariwisata di Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Potensi Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
No.	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
1.	Wisata Bahari	
	a. Pulau Cambang-Cambang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	b. Pulau Saugi	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	c. Pulau Samatellu Pedda	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	d. Pulau Bana-Banawang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	e. Pulau Reang-Reang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	f. Pulau Salemo	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	g. Pulau Sabutung	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	h. Pulau Kapoposang	Kec. Liukang Tupabbiring
	i. Pulau Saranti	Kec. Liukang Tupabbiring
	j. Pulau Pammanggangan	Kec. Liukang Tupabbiring
	k. Pulau Langkadea	Kec. Liukang Tupabbiring
	l. Pulau Badi	Kec. Liukang Tupabbiring
	m. Pulau Pajenekang	Kec. Liukang Tupabbiring
	n. Pulau Cangke	Kec. Liukang Tupabbiring
	o. Pulau Tambakulu	Kec. Liukang Tupabbiring
	p. Pulau Podang-Podang	Kec. Liukang Tupabbiring
	q. Pulau Kulambing	Kec. Liukang Tupabbiring
	r. Pulau Pannambungan	Kec. Liukang Tupabbiring
	s. Pulau Bonto Sua	Kec. Liukang Tupabbiring
2.	Wisata Sungai	
	a. Sungai Pangkajene	Kec. Pangkajene
	b. Sungai Kalibone	Kec. Minasatene
3.	Wisata Agro Boledong	
	a. Jeruk Padang Lampe	Kec. Ma'rang
	b. Ekowisata Tana Rajae (Bandeng, Udang)	Kec. Labakkang
4.	Wisata Budaya	
	a. Arajang Bissu	Kec. Segeri
	b. Rumah Adat	Kec. Labakkang

Potensi Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
No.	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
5.	Wisata Religi	
	a. Situs Makam Somba Labakkang	Kec. Labakkang
	b. Situs Makam Andi Mauraga	Kec. Pangkajene
	c. Makam Arung Sabila	Kec. Minasatene
	d. Makam Andi Maruddani	Kec. Labakkang
	e. Makam Raja Siang	Kec. Bungoro
	f. Makam Puang Awalli dan Meriam	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	g. Makam Lipang Marasende	Kec. Liukang Kalmas
6.	Wisata Alam	
	a. Kalibbong Aloa	Kec. Minasatene
	b. Dewi Lamsang	Kec. Minasatene
	c. Leang Lonrong	Kec. Minasatene
	d. Goa/Leang Bulu Sipong	Kec. Minasatene
	e. Desa Wisata Berkasi	Kec. Bungoro
	f. Taman Wisata Ciddokang	Kec. Bungoro
	g. Kawasan Wisata Alam Mattampa	Kec. Bungoro
	h. Desa Wisata Tana Rajae	Kec. Labakkang
	i. Rest Area Wisata Limbangan	Kec. Ma'rang
	j. Pungkalawaki Pitu Sunggu	Kec. Ma'rang
	k. Bukit Teletubies Bulu Pao	Kec. Ma'rang
	l. Bulu Sorongan	Kec. Segeri
	m. Amputtang	Kec. Segeri
	n. Baruttunga	Kec. Tondong Tallasa
	o. Ere Tallasa	Kec. Tondong Tallasa
	p. Bendungan Tagari	Kec. Tondong Tallasa
	q. Air Terjun Golae	Kec. Tondong Tallasa
	r. Padang PA'bo	Kec. Tondong Tallasa
	s. Desa Wisata Tompobulu	Kec. Balocci
	t. Bulusaraung	Kec. Balocci
	u. Air Terjun Tombolo	Kec. Balocci
	v. Sumpang Bitu	Kec. Balocci
	w. Taman Batu	Kec. Balocci
	x. Suangga	Kec. Balocci
	y. Salo Mettie Cambang Cui)	Kec. Balocci
	z. Galaggara	Kec. Balocci
7.	Wisata Kuliner	
	a. Palampang	Kec. Pangkajene
	b. Bambu Runcing	Kec. Pangkajene
	c. Gasebo	Kec. Pangkajene

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal juga sebagai daerah yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang indah di kawasan Kepulauan Spermonde, pesisir pantai yang memukau, serta ekosistem laut yang masih alami. Kondisi geografis ini menjadikan Pangkep sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari.

1. Keindahan Gugusan Pulau

Pangkep memiliki lebih dari 100 pulau kecil yang tersebar di Laut Spermonde, sebagian di antaranya berpenghuni dan sebagian lagi masih alami. Pulau-pulau ini menyimpan panorama pasir putih, air laut jernih, dan kekayaan biota laut. Pulau-pulau seperti Pulau Camba-Camba, Pulau Saugi, Pulau Sapuli, Pulau Kapoposan, hingga Pulau Gondong Bali menjadi destinasi potensial untuk wisata bahari dan ekowisata.

2. Ekosistem Laut yang Kaya

Keanekaragaman hayati laut di Pangkep sangat tinggi, termasuk terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan aneka jenis ikan hias maupun konsumsi. Potensi ini mendukung pengembangan wisata snorkeling, diving, dan wisata edukasi bahari. Kawasan laut Pangkep juga dikenal sebagai bagian penting dari jalur migrasi biota laut, sehingga menambah daya tarik wisata berbasis ekosistem.

3. Aktivitas Wisata Bahari

Selain menikmati panorama pulau dan bawah laut, wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas bahari, seperti:

- Snorkeling dan diving untuk menikmati keindahan terumbu karang.
- Island hopping menjelajahi pulau-pulau kecil.
- Memancing di perairan laut yang kaya ikan.
- Wisata budaya nelayan, seperti mengikuti aktivitas melaut, memanen rumput laut, hingga menikmati kuliner khas berbasis hasil laut.

4. Potensi Ekowisata dan Eduwisata

Dengan ekosistem laut yang unik, Pangkep memiliki peluang besar mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, seperti wisata edukasi mangrove, pengamatan burung laut, hingga wisata penelitian biota laut. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem bahari.

5. Dukungan Aksesibilitas dan Konektivitas

Lokasi Pangkep yang tidak jauh dari Kota Makassar memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan wisata bahari. Wisatawan dapat menjangkau kawasan kepulauan dengan perahu motor dari pelabuhan lokal. Penguatan aksesibilitas darat dan laut akan semakin memperbesar peluang wisata bahari sebagai sektor unggulan daerah.

Potensi wisata bahari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat besar, dengan kekuatan utama berupa gugusan pulau Spermonde, ekosistem laut yang kaya, dan budaya masyarakat pesisir. Jika dikelola dengan baik, wisata bahari dapat menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat identitas Pangkep sebagai daerah kepulauan yang kaya keindahan alam dan budaya maritim.

2.1.1.2.4. Pertambangan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertambangan, seperti marmer, pasir/kuarsa, diorit, basal, trakit, sirtu, feldspar, kaolin, lempung, batu gamping, batu sabak dan trass prolipit, serta berbagai jenis potensi tambang lainnya. Jenis tambang untuk bahan baku semen dan marmer merupakan jenis tambang yang sangat besar potensinya dan saat ini sudah dikelola, begitupula jenis tambang lainnya seperti pasir, sirtu, maupun batu gamping. Lebih jelasnya berikut ini rincian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.30.
WUP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Wilayah Usaha Pertambangan yang Ditetapkan							
No	Kecamatan	WPN	WUP Batubara	WUP Bukan Logam & Batuan	WUP Logam	WUP Radioaktif	Total Luas
1	Balocci	-	423,59	3141,41	-	833,26	4398,26
2	Bungoro	-	2425,57	6441,10	156,45	-	9023,11
3	Labakkang	-	-	10505,88	-	-	10505,88
4	Liukang Kalmas	-	-	2,25	-	-	2,25
5	Liukang Tangaya	-	-	-	-	-	0,00
6	Liukang Tupabbiring	-	-	6,07	-	-	6,07
7	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	222,52	-	-	222,52
8	Mandalle	-	-	547,51	3544,91	485,75	4578,17
9	Marang	-	1096,80	7986,53	477,43	-	9560,77
10	Minasa Tene	-	-	4969,96	40,54	-	5010,49
11	Pangkajene	-	-	4078,60	-	-	4078,60
12	Segeri	-	31,43	2678,95	3647,04	1,17	6358,58
13	Tondong Tallasa	41,95	3625,27	2532,53	2345,60	475,77	9021,12

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sul-Sel, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh potensi WUP Batubara yang tersebar di wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 3.625,27 Ha. Sementara itu WUP Bukan Logam dan Batuan seluas

2.532,53 Ha. Saat ini terdapat jenis tambang yang telah dieksploitasi yaitu jenis tambang bukan logam untuk bahan baku semen yang dikelola oleh PT. Semen Indonesia (Semen Tonasa), dan tambang marmer yang dikelola oleh beberapa perusahaan swasta.

2.1.1.2.5. Kehutanan

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, kawasan konservasi dan area penggunaan lain. Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan berdasarkan SK. Kemenhut. No. 434 Th. 2009, menunjukkan bahwa terjadi perubahan luas kawasan hutan, begitupula nomenklatur perubahan jenis kawasan hutan. Berdasarkan SK. Kemenhut. No. 434 Th. 2009, luas kawasan hutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 104.227.464 Ha.

Sementara itu berdasarkan SK. KemenLHK No. 362 Th. 2019, luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 89.001,140 Ha. Berikut ini rincian peruntukan kawasan hutan dan luasannya berdasarkan SK. KemenLHK No. 362 Th. 2019, di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.31.
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan					Total Luas (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Konservasi	Area Penggunaan Lainnya	
1.	Balocci	1.081,899	247,327	-	7.636,887	4.425,550	13.391.663
2.	Bungoro	1.994,737	83,996	123,174	-	6.821,550	9.023.457
3.	Labakkang	-	-	64,814	-	1.0441,060	10.505.874
4.	Lk. Kalmas	-	-	-	-	3.581,860	21.688.160
5.	Lk. Tangaya	-	-	-	-	4.795,260	4.795.260
6.	Lk. Tupabbiring	-	-	-	-	174,310	174.310
7.	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	-	-	407,130	407.130
8.	Mandalle	1.339,236	-	-	-	3.238,930	4.578.166
9.	Ma'rang	776,291	31,773	365,214	-	8.387,520	9.560.798
10.	Minasatene	-	972,000	-	2.880,068	4.749,210	5.721.210
11.	Pangkajene	-	-	-	-	4.093,150	4.093.150
12.	Segeri	1.005,880	-	177,315	-	5.173,090	6.356.285
13.	Tondong Tallasa	1.736,497	1.426,306	1878,024	3.732,524	5.158,650	13.932.001
Total Luas		7.934,540	2.761,402	2.608,541	14.249,479	61.872,420	104.227.464

Sumber: Surat Keputusan Menteri LHK No. 362 Th. 2019

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa kawasan hutan dengan fungsi areal penggunaan lainnya (APL) merupakan areal hutan terluas di wilayah Kabupaten

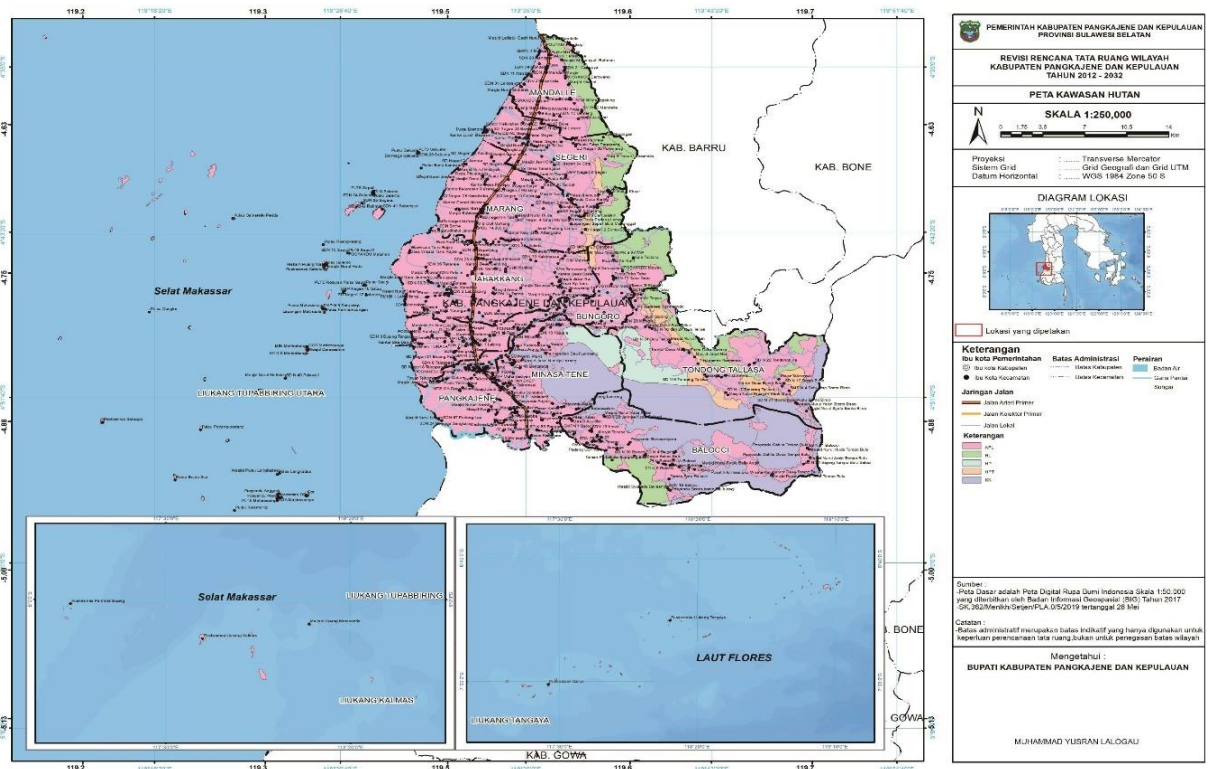
Pangkajene dan Kepulauan yaitu 61.872,42 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Sementara itu kawasan hutan produksi terbatas.

Hanya sebagian kecil di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu seluas 2.608,541 Ha terdapat di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, dan Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Untuk kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. 362 Th. 2019, seluas 7.934,540 Ha. Hutan lindung ini tersebar di 6 (enam) kecamatan, meliputi Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Gambar 2.9.

Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Geopark

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki posisi strategis sebagai salah satu wilayah inti dalam kawasan UNESCO Global Geopark Maros–Pangkajene dan Kepulauan. Geopark ini tidak hanya memiliki nilai geologis yang mendunia melalui bentang alam karst yang unik dan spektakuler, tetapi juga mengandung nilai ekologi, sejarah, budaya, dan sosial-ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam kerangka pembangunan daerah.

Dari aspek geologi dan keanekaragaman hayati, kawasan karst Pangkajene dan Kepulauan menyimpan formasi batuan kapur purba yang menjadi salah satu yang terbesar dan terindah di dunia, lengkap dengan gua-gua prasejarah yang memiliki lukisan dinding berusia puluhan ribu tahun. Keberadaan situs ini bukan hanya sebagai aset warisan dunia, tetapi juga menjadi modal besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pendidikan.

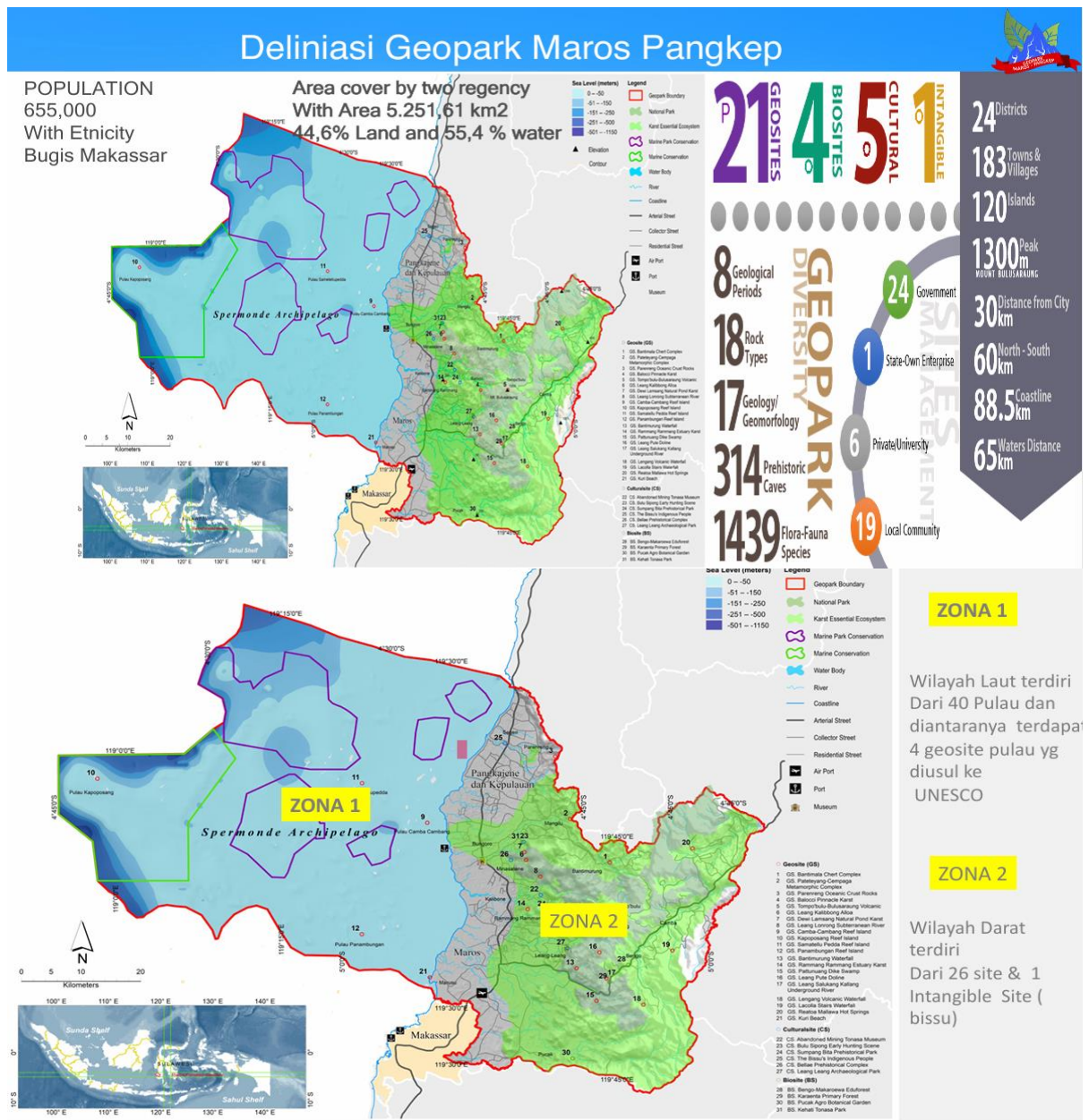
Pada aspek pariwisata berkelanjutan, potensi Geopark Maros–Pangkajene dan Kepulauan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan edukasi. Pangkajene dan Kepulauan memiliki daya tarik wisata gua, tebing karst, kawasan konservasi, serta wisata bahari di gugusan kepulauan. Hal ini menjadi peluang untuk mengintegrasikan wisata darat dan laut yang memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan destinasi, homestay, ekowisata, serta produk kreatif berbasis kearifan lokal.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, Geopark Maros–Pangkajene dan Kepulauan membuka ruang pengembangan ekonomi inklusif melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan kawasan, baik sebagai pemandu wisata, pelaku UMKM, maupun penjaga kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan *community-based tourism*, pengembangan geopark akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal.

Selain itu, Geopark juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kawasan karst berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan ekosistem penting yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengembangan geopark dapat diarahkan tidak hanya untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga untuk konservasi lingkungan, ketahanan air, dan mitigasi bencana.

Melalui pengelolaan yang terencana dalam RPJMD 2025–2029, pengembangan Geopark Maros–Pangkajene dan Kepulauan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat menjadi salah satu motor pembangunan daerah yang menggabungkan aspek konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Gambar 2.10.
Deliniasi Geopark Maros Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Dokumen Road Map Pengembangan Geopark Maros-Pangkep

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Terbaru

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar untuk dikembangkan dalam mendukung transisi energi nasional serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Potensi ini mencakup energi surya, tenaga air, tenaga angin, hingga biomassa yang tersebar di daratan maupun kepulauan.

Dari aspek energi surya, letak geografis Pangkajene dan Kepulauan yang berada di kawasan tropis dengan intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun menjadi modal utama untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Teknologi ini sangat potensial diterapkan di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sekaligus mendukung elektrifikasi 100% wilayah kepulauan.

Selain itu, potensi energi air di Pangkajene dan Kepulauan cukup besar, terutama melalui pemanfaatan aliran sungai dan sumber daya air di daerah pegunungan dan karst. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dapat menjadi solusi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Pada sektor energi angin, wilayah pesisir dan kepulauan Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi kecepatan angin yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Pemanfaatan energi ini dapat menjadi alternatif penyediaan listrik bagi masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau, dengan biaya operasional yang rendah setelah terpasang.

Sementara itu, sektor biomassa juga memiliki peluang besar seiring dengan aktivitas pertanian, perikanan, dan perkebunan di Pangkajene dan Kepulauan. Limbah pertanian, sampah organik, serta hasil samping kegiatan perikanan dapat diolah menjadi sumber energi baru, baik berupa biogas maupun biofuel, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun skala industri kecil.

Pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejalan dengan agenda nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan bauran energi bersih, dan memperkuat ketahanan energi daerah. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan juga akan mendorong kemandirian energi di wilayah kepulauan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Potensi energi terbarukan ini dapat diarahkan melalui pembangunan infrastruktur energi berbasis teknologi ramah lingkungan, peningkatan investasi sektor energi bersih, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi alternatif. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi terbarukan di Sulawesi Selatan yang mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1.5. Potensi Industri

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat industri berbasis sumber daya mineral di Sulawesi Selatan. Salah satu sektor unggulan yang telah lama berkembang di daerah ini adalah industri semen dan marmer, yang didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa batu gamping dan batu marmer dengan kualitas tinggi.

Dari sisi industri semen, Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah dengan cadangan batu kapur terbesar di Sulawesi Selatan. Keberadaan industri semen telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penyedia kebutuhan material konstruksi di kawasan timur Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur nasional maupun regional, kebutuhan semen diproyeksikan terus meningkat. Hal ini membuka peluang pengembangan kapasitas produksi, inovasi produk semen ramah lingkungan (*low carbon cement*), serta diversifikasi produk turunan industri bahan bangunan.

Sementara itu, potensi industri marmer di Pangkajene dan Kepulauan juga sangat menjanjikan. Batu marmer dari Pangkajene dan Kepulauan dikenal memiliki kualitas estetika dan ketahanan yang baik, sehingga memiliki nilai jual tinggi di pasar domestik maupun internasional. Industri ini berpotensi dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dan dekorasi bangunan, tetapi juga untuk produk-produk bernilai tambah seperti kerajinan, ornamen arsitektur, dan peralatan rumah tangga berbasis marmer.

Dari aspek daya dukung wilayah, keberadaan jalur transportasi darat, pelabuhan laut, serta kedekatan dengan Kota Makassar memperkuat posisi Pangkajene dan Kepulauan sebagai pusat distribusi hasil industri semen dan marmer. Hal ini mempermudah akses bahan baku, efisiensi distribusi produk, serta menarik minat investor dalam pengembangan industri turunan maupun klaster industri berbasis mineral.

Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah dan lapangan kerja, pengembangan industri semen dan marmer di Pangkajene dan Kepulauan juga harus diarahkan pada prinsip industri hijau. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pemrosesan limbah industri, reklamasi area tambang, serta integrasi dengan pengembangan energi terbarukan untuk mendukung target pengurangan emisi karbon.

2.1.1.6. Potensi Kuliner

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi kuliner yang sangat kaya dan beragam, yang bersumber dari karakter wilayahnya yang unik, yaitu perpaduan antara kawasan daratan, pesisir, laut, dan gugusan pulau-pulau kecil. Kekayaan kuliner Pangkep tidak hanya mencerminkan keberagaman sumber daya alam, tetapi

juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

1. Potensi Kuliner Berbasis Hasil Laut

Sebagai daerah kepulauan, Pangkep memiliki sumber daya ikan dan hasil laut yang melimpah. Potensi ini melahirkan berbagai kuliner khas berbahan dasar seafood, seperti ikan bakar, cumi-cumi, kepiting, udang, hingga hasil olahan seperti ikan kering dan abon ikan. Salah satu yang populer adalah ikan bolu bakar (bandeng bakar) khas Pangkep, yang dikenal gurih dan memiliki cita rasa otentik. Kuliner ini telah menjadi ikon daerah yang banyak dicari wisatawan maupun perantau asal Pangkep.

2. Potensi Kuliner Tradisional Berbasis Darat

Selain hasil laut, Pangkep juga memiliki aneka kuliner khas berbasis hasil pertanian dan pangan lokal, songkolo bagadang (ketan hitam dengan taburan kelapa parut), dan onde-onde khas Pangkep yang menjadi jajanan tradisional populer. Cita rasa yang sederhana namun otentik menjadikan kuliner ini tetap bertahan dan digemari masyarakat lintas generasi.

3. Kuliner Khas Pesisir dan Pulau-Pulau

Di wilayah kepulauan, masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti rumput laut, kerang, serta olahan ikan asin yang menjadi menu khas sehari-hari. Lawa bale (ikan mentah yang diolah dengan kelapa parut dan jeruk nipis) merupakan salah satu kuliner tradisional yang menjadi simbol kearifan lokal dalam mengolah hasil laut segar.

4. Potensi Pengembangan Wisata Kuliner

Kekayaan kuliner Pangkep tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Wisata kuliner dapat dikembangkan seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik yang berkunjung ke kawasan pegunungan, gua, maupun destinasi wisata bahari di kepulauan Spermonde. Pusat-pusat kuliner berbasis hasil laut segar, warung tradisional, hingga pengembangan restoran modern dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

5. Peluang Inovasi dan Pemasaran

Selain pengembangan wisata kuliner, potensi kuliner Pangkep juga bisa diarahkan pada inovasi produk olahan dan pemasaran digital. Produk olahan seperti bandeng presto, kerupuk ikan, abon ikan, dan sambal khas Pangkep dapat dikembangkan untuk memperluas pasar, baik secara lokal maupun nasional. Dukungan UMKM dan promosi melalui festival kuliner daerah akan semakin menguatkan branding kuliner Pangkep sebagai salah satu identitas ekonomi kreatif daerah.

Kuliner Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kekhasan karena memadukan hasil laut segar, pangan lokal berbasis sagu, serta tradisi kuliner Bugis-Makassar. Keanekaragaman kuliner ini bukan hanya bernilai budaya, tetapi juga potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata kuliner, oleh-oleh khas daerah, dan produk UMKM unggulan yang bisa memperkuat identitas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1.1.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator dan tolok ukur pada masing-masing unit analisis tersebut. Mengingat daya dukung dan daya tampung bersifat dinamis dan kompleks dan sangat tergantung kepada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk dan kondisi eksisting sumber daya alam di wilayahnya masing-masing.

Kebijakan strategis berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang direkomendasikan untuk diintegrasikan kedalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029, antara lain:

1. Penguatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peningkatan kapasitas mitigasi dan penanganan dampak bencana;
3. Pengembangan industri yang berkelanjutan yang menerapkan industri hijau;
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar yang inklusif;
5. Peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan kesehatan dan keluarga berencana yang inklusif;
6. Peningkatan kapasitas dan akses layanan air mium layak dan berkelanjutan;
7. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan yang inklusif;
8. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif;
9. Optimalisasi perlindungan sosial yang berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.1.7.1. Daya Dukung Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian atas kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu yang dinilai dari masing-masing faktor penghambat. Kemampuan lahan mencakup sejauh mana lahan dapat menjalankan fungsi ekologisnya, mempertahankan produktivitas pertanian, dan memenuhi kebutuhan manusia serta masyarakat lokal tanpa menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan yang signifikan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak diikuti dengan usaha konservasi tanah yang baik akan mempercepat terjadi erosi. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.32.

Kelas Penggunaan Lahan yang diperkenankan berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan lahan yang diperkenankan
1.	I	Semua jenis penggunaan lahan
2.	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan lahan yang diperkenankan
3.	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4.	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5.	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgds, Pgt), semua jenis hutan
6.	VI	Pgds, Pgt, semua jenis hutan
7.	VII	Pgt, hutan
8.	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan Fonton (2014)

Ket: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensitas sedang; Pt: Pertanian terbatas, Pgi: Pengembangan intensif; Pgds: Penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan terbatas

Berdasarkan sistem klasifikasi kemampuan lahan, maka kelas kemampuan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh kelas V dengan faktor pembatas utama adalah batuan dengan luas 160 persebarannya sebesar 41.757,35 Ha atau sekitar 46,92% dari luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tingkat kemampuan lain yang cukup besar Persentase tutupannya adalah kelas VIII dengan faktor pembatas utama tingkat kelerangan yang menempati area sekitar 20.790,09 Ha atau 23,36% dari total luas wilayah. Tanah-tanah pada kelas V dengan pembatas lereng tersebar pada semua wilayah kecamatan, kecuali di Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, dimana jenis kelas kemampuan lahan ini terletak di wilayah Kecamatan Labakkang, Ma'rang, Minasatene, dan Bungoro Sebaran kelas kemampuan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada Tabel berikut.

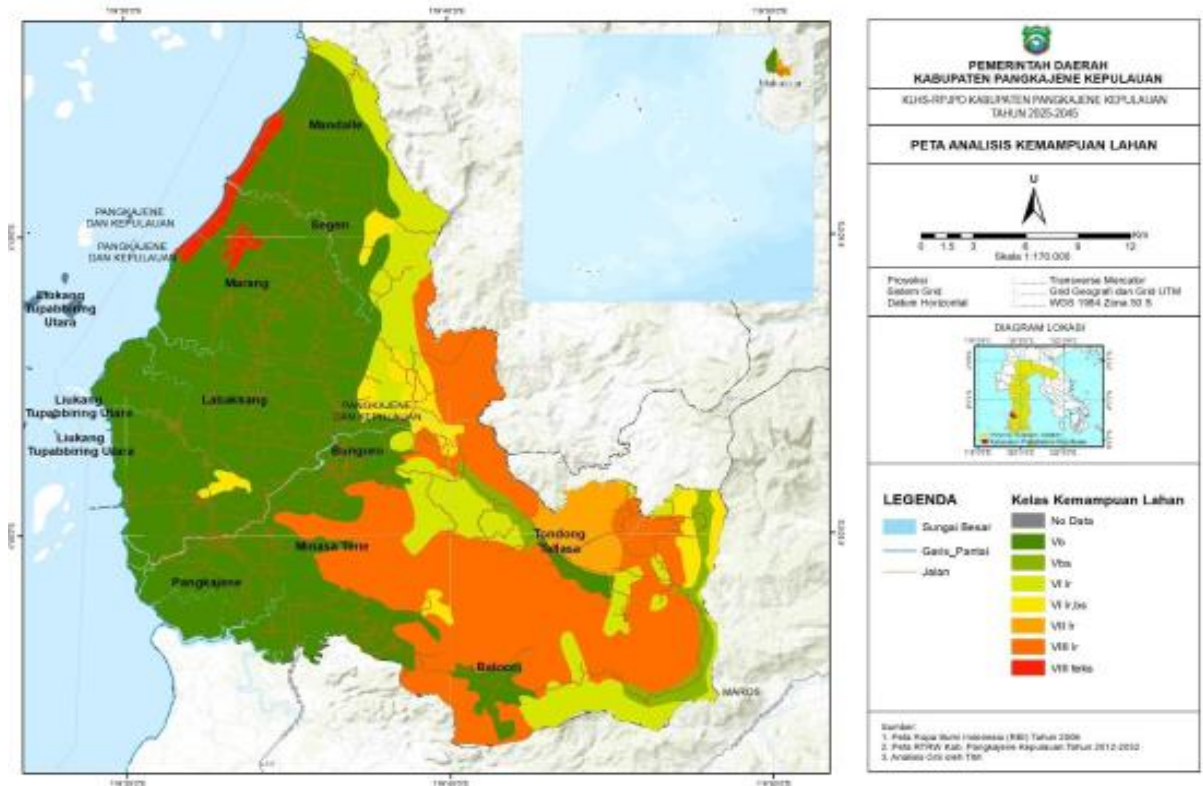
Tabel 2.33.

Luas Wilayah Menurut Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan								Grand Total
	No Data	Vb	Vbs	VI Ir	VI Ir,bs	VII Ir	VIII Ir	VIII teks	
Balocci	-	2.141,13	723,69	2.267,04	207,44	-	8.051,58	-	13.390,89
Bungoro	-	4.780,39	-	804,33	1.171,44	-	2.267,31	-	9.023,46
Labakkang	-	10.059,18	-	115,90	330,79	-	-	-	10.505,88
Lk. Kalmas	3.581,86	-	-	-	-	-	-	-	3.581,86
Lk. Tangaya	4.795,26	-	-	-	-	-	-	-	4.795,26
Lk. Tupabbiring	174,31	-	-	-	-	-	-	-	174,31
Lk. Tup. Utara	407,13	-	-	-	-	-	-	-	407,13
Mandalle	-	3.408,72	-	1.034,58	-	-	-	134,87	4.578,16
Ma'rang	-	7.603,21	-	907,19	2,95	-	399,93	647,49	9.560,77
Minasatene	-	5.116,22	-	338,06	-	-	3.147,00	-	8.601,28
Pangkajene	-	4.093,15	-	-	-	-	-	-	4.093,15
Segeri	-	4.093,83	-	1.596,97	328,57	-	-	339,21	6.358,58
Tondong Tallasa	-	461,51	1.180,40	2.288,41	1.033,53	2.042,59	6.924,27	-	13.930,72
Total	8.958,56	41.757,35	1.904,09	9.352,48	3.074,71	2.042,59	20.790,09	1.121,57	89.001,44

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Gambar 2.11.
Peta sebaran kelas kemampuan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.2. Daya Dukung Pangan

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mempunyai dampak terhadap daya dukung penyediaan pangan. Dampak terhadap lingkungan dapat diindikasikan dengan penurunan kualitas daya dukung penyediaan pangan dari pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat dari akibat semakin meningkatnya aktivitas dari berbagai kegiatan manusia. Sedangkan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan mengikuti kapasitas penyediaan pangan yang memiliki keterbatasan.

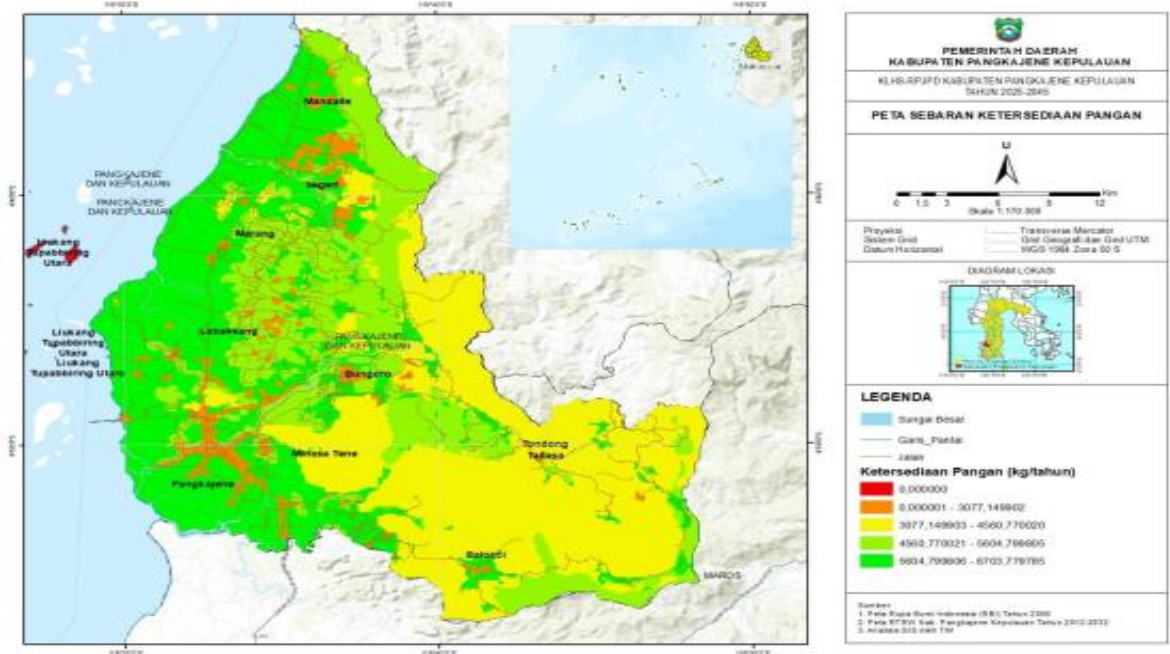
Daya dukung penyediaan pangan dianalisis berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Secara umum daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kemampuan penyediaan pangan yang sudah terlampaui, namun masih terdapat wilayah kecamatan yang kapasitas daya dukung pangannya belum memenuhi kebutuhan pangan, yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara. Sebaran proyeksi status daya dukung pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.
Profil Proyeksi Daya Dukung Pangan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2025	Kebutuhan Pangan 2025 (kg/tahun)	Ketersediaan Pangan 2025 (kg/tahun)	Ambang Batas 2025	Nilai Status Kebutuhan Pangan 2025
Balocci	16.846	106.368,43	28.823.222,65	414.085,70	270,98
Bungoro	45.777	383.452,84	21.911.586,28	310.427,27	57,14
Labakkang	55.012	622.576,99	27.262.147,00	384.132,20	43,79
Lk. Kalmas	15.264	38.088,07	7.909.852,30	113.507,76	207,67
Lk. Tangaya	19.545	48.373,18	-	-679,52	0,00
Lk. Tupabbiring	17.847	1.834,20	-	-26,45	0,00
Lk. Tupabbiring Utara	13.965	1.112,95	-	-16,05	0,00
Mandalle	13.871	56.054,80	11.557.540,35	165.846,99	2061,18
Ma'rang	36.202	320.760,19	24.056.582,56	342.261,35	75,00
Minasate'ne	41.515	2.879.065,15	20.571.323,42	155.115,42	7,15
Pangkajene	51.569	232.134,40	11.302.196,87	159.626,00	48,69
Segeri	23.160	1.606.143,07	15.952.031,96	206.862,14	9,93
Tondong Tallasa	1.105	76.625,54	28.663.534,96	412.212,03	374,07
Total	351.679	6.372.589,80	198.010.027,35	2.763.336,84	1.300,60

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Gambar 2.12.
Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025



Sumber: KLHS RPMPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.3. Daya Dukung Air

Lingkungan mempunyai fungsi untuk menopang aktivitas manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Kemampuan tersebut merupakan salah satu parameter dalam daya dukung lingkungan untuk mendapatkan kesetimbangan lingkungan. Peningkatan dari pertumbuhan penduduk berdampak kepada peningkatan penggunaan sumberdaya alam, diantaranya pemanfaatan sumberdaya air bagi aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak dari hal tersebut dapat mengakibatkan kualitas dan kuantitas air mengalami penurunan.

Analisis daya dukung ketersediaan air dan kebutuhan air dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan yang diperoleh dari data curah hujan. Secara kuantitatif perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) perhitungan ketersediaan air, (2) perhitungan kebutuhan air, (3) perhitungan ambang batas penduduk, dan (4) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid.

Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 1.099.656.000 m³/tahun, dimana ketersediaan air tinggi terdapat di Kecamatan Balocci, Bungoro, Labakkang, Marang, Minasa Tene, dan Tondong Tallasa.

Tabel 2.35.
Profil Proyeksi Daya Dukung Air
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2025	Kebutuhan Domestik 2025 (m ³ /tahun)	Kebutuhan Lahan 2025 (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan 2025 (m ³ /tahun)	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Ambang Batas 2025
Balocci	16.846	1.455.536,29	29.087.864,53	30.543.401,59	145.207.600	160.176,76
Bungoro	45.777	3.955.152,82	50.747.977,92	54.703.122,28	115.461.600	121.725,33
Labakkang	55.012	4.753.070,02	92.047.298,55	96.800.426,38	142.568.400	112.222,29
Lk. Kalmas	15.264	1.318.839,46	10.078.722,56	11.397.582,23	38.118.000	48.664,88
Lk. Tangaya	19.545	1.688.659,83	7.146.478,62	8.835.124,15	63.202.000	87.503,29
Lk. Tupabbiring	17.847	1.542.011,12	256.015,13	1.798.026,22	3.358.000	19.797,31
Lk. Tupabbiring Utara	13.965	1.206.593,19	-	1.206.593,19	6.526.800	20.615,45
Mandalle	13.871	1.198.478,44	26.430.917,53	27.629.389,53	59.627.200	53.868,53
Ma'rang	36.202	3.127.839,65	77.970.164,81	81.097.943,43	125.771.600	92.043,98
Minasate'ne	41.515	3.586.895,23	40.109.638,86	43.696.513,31	104.766.800	117.852,84
Pangkajene	51.569	4.455.528,39	34.542.792,87	38.998.320,30	59.750.800	77.509,16
Segeri	23.160	2.001.020,34	41.572.496,40	43.573.524,95	84.660.800	74.519,05
Tondong Tallasa	1.105	920.565,49	39.773.851,43	40.694.420,83	150.636.400	148.082,17
Total	351.678	31.210.190,25	449.764.219,19	480.974.388,40	1.099.656.000	1.134.581,04

Sumber: KLHS PJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

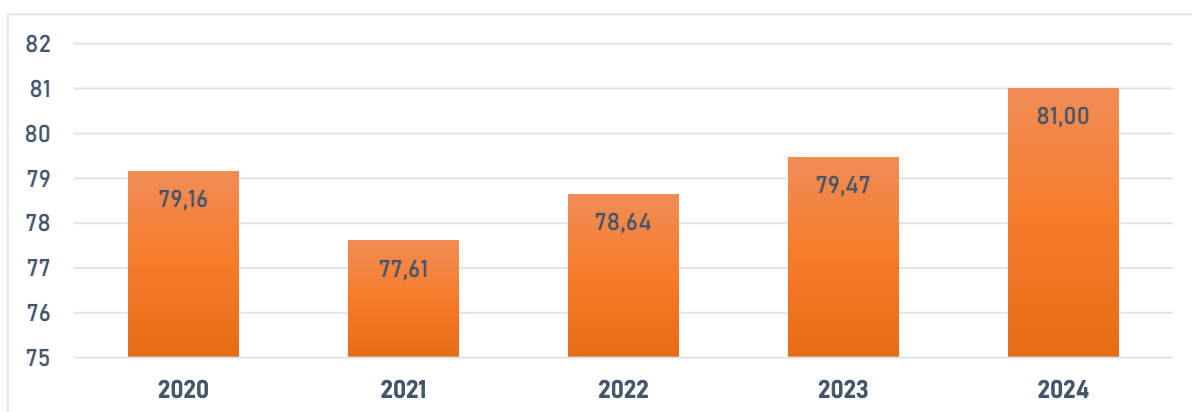
2.1.1.8. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan air, pangan, dan energi saling terkait dan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu daerah untuk memproduksi pangan yang cukup. Kemandirian energi adalah kemampuan suatu daerah untuk tidak mengimpor bahan bakar energinya. Kondisi energi, air dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan

2.1.1.8.1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dalam suatu sistem pangan. Secara umum, IKP digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah dapat memastikan bahwa penduduknya memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi dan aman sepanjang waktu. Adapun gambaran trend peningkatan realisasi Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan dalam grafik berikut;

Grafik 2.1.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Nasional Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian ketahanan pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan yang positif hingga mencapai 81 % di tahun 2024

2.1.1.8.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator ketahanan pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH berkisar antara 0 sampai 100, di mana semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin sesuai dengan standar gizi seimbang.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, skor PPH masih menunjukkan tantangan dalam hal keragaman konsumsi pangan. Konsumsi masyarakat masih didominasi oleh sumber karbohidrat terutama beras, sementara konsumsi sayur, buah, dan protein hewani relatif lebih rendah dibandingkan dengan komposisi ideal. Kondisi ini berdampak pada kualitas gizi masyarakat dan berhubungan erat dengan permasalahan gizi seperti stunting maupun gizi kurang.

Sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkomitmen untuk meningkatkan skor PPH melalui penguatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bergizi seimbang. Upaya yang ditempuh antara lain:

- 1. Diversifikasi pangan lokal dengan mendorong pemanfaatan potensi pangan non-beras seperti jagung, ubi, pisang, dan sagu.
- 2. Peningkatan produksi pangan bergizi terutama sayuran, buah-buahan, ikan, dan hasil ternak.
- 3. Kampanye gizi seimbang dan edukasi masyarakat terkait pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi.
- 4. Penguatan program ketahanan pangan dan gizi yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menargetkan peningkatan skor PPH secara bertahap hingga mendekati angka ideal 100. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menghapus kelaparan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut data Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tabel 2.36.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan	Angka	89	80,4	90,2	92,5	91,4

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

2.1.1.8.3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara NFA dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS. PoU dihitung berdasarkan distribusi konsumsi energi pangan dalam populasi, kebutuhan energi minimum rata-rata, variasi distribusi konsumsi energi antar individu dalam populasi.

Persentase Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebanyak 9,84 % terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 hanya tersisa sebanyak 4,00 %. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,17 % dari tahun sebelumnya serta penurunan sebesar 5,84 % dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap akses yang memadai terhadap asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar energi dan gizi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.37.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	9.84	6.60	6.15	4.17	4,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.1.8.4. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan rata-rata oleh setiap individu dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilowatt jam (kWh) per tahun. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan ekonomi, kualitas hidup, dan efisiensi energi suatu negara atau wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi listrik per kapita dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan konsumsi menjadi 1.184,30 kWh/jiwa. Adapun jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 81.502 pelanggan di tahun 2024.

Tabel 2.38.
Konsumsi Listrik Per Kapita
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/jiwa	638,91	1.179,45	1.847,16	1.852,22	1.184,30

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Tabel 2.39.
Jumlah Pelanggan Listrik
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan Listrik	orang	70.034	73.009	76.216	79.017	81.502

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan akses listrik kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang sebelumnya sulit dijangkau. Melalui berbagai program inovatif seperti implementasi program SuperSUN (Sorong Ultimate for Electrifying Surya untuk Negeri), yaitu pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan kapasitas 900 VA yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi dan meter Prabayar. Pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero) telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dan jumlah pelanggan listrik di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mencerminkan upaya serius dalam mewujudkan pemerataan akses energi.

2.1.1.8.5. Ketahanan Air

Kondisi ketahanan air di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dari indikator Kapasitas Air Baku (liter/detik). Penyediaan air baku untuk pengelolaan air minum penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari sungai dan mata air.

Tabel 2.40.
Kondisi Kapasitas Air Baku
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (Liter/detik)	Kapasitas Terpakai (Liter/detik)
1.	Mata Air Leang Kassi	-	Mata Air	85	45
2.	Mata Air Mattampa	-	Mata Air	30	20
3.	Mata Air Ciddokang	-	Mata Air	35	15
4.	Mata Air Amputtang	-	Mata Air	25,5	17,5
5.	Mata Air Jatie	-	Mata Air	60	52,5
6.	Mata Air Uluwere	-	Mata Air	30	7,5
7.	Sungai Padang Lampe	-	Sungai	20	10

No.	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (Liter/detik)	Kapasitas Terpakai (Liter/detik)
8.	Mata Air Ulu Salo Manggalung	-	Mata Air	35	35

Sumber: SIMSPAM Kementerian PU Tahun 2025

Tabel 2.41.

Kondisi Air Baku yang Dikelola Berbasis Masyarakat maupun Non Berbasis Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Kondisi SPAM	Satuan	Jumlah /Kapasitas
1.	Jumlah Unit SPAM	Unit	53
2.	Alokasi Air Baku	Liter/detik	277,57
3.	Kapasitas Terpasang	Liter/detik	277,57
4.	Kapasitas Produksi	Liter/detik	161,20
5.	Kapasitas Distribusi	Liter/detik	145,94
6.	Kapasitas Air Terjual	Liter/detik	108,61
7.	Idle Cap Terpasang	Liter/detik	50
8.	Idle Cap Produksi	Liter/detik	66,37

Sumber: SIMSPAM Kementerian PU Tahun 2025

2.1.1.8.6. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan dan kualitas hidup. Akses terhadap air minum yang aman dan berkualitas menjadi bagian dari ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang mendukung berbagai aktivitas kehidupan, termasuk konsumsi pangan.

Dalam mendorong peningkatan akses air minum ini, pemerintah telah melakukan sejumlah program di tingkat hulu maupun hilir. Program itu, antara lain, membangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk masyarakat perdesaan, program nasional penyediaan air minum di perkotaan dan sejumlah program pendanaan seperti dana alokasi khusus maupun hibah.

Untuk mencapai air minum aman, kita masih perlu melakukan program rencana pengamanan air minum. Ini dilakukan untuk mengetahui titik risiko dan kontaminasi sehingga bisa mengontrol serta mencegah terjadinya rekontaminasi air minum yang sudah diolah dengan baik dan disalurkan ke rumah tangga.

Adapun Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020, dari 61,65% tahun 2020 meningkat terus hingga 67,87 % di tahun 2024.

Tabel 2.42.
Akses Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan terhadap Air Minum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum	(%)	61,65	63,68	65,31	66,39	67,87
Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Jaringan Perpipaan Perkotaan	(%)				15,15	17,57
Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Jaringan Perpipaan Perdesaan	(%)					3,88
Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman	(%)					21,45

Sumber: SIMSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel

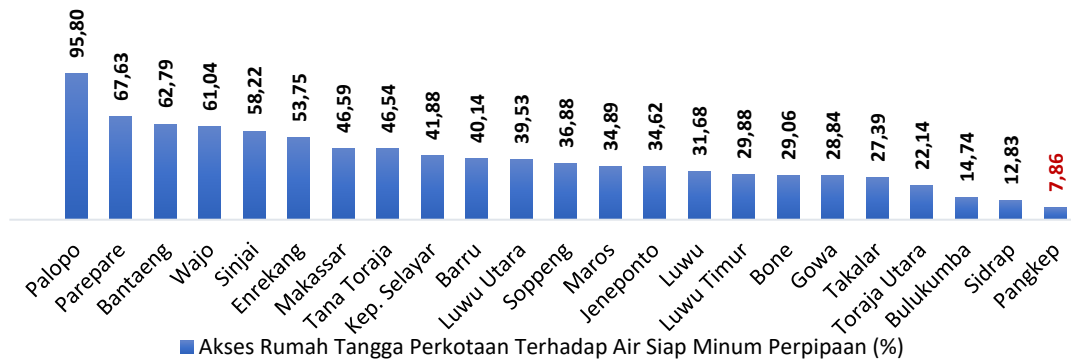
2.1.1.8.7. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pemenuhan kebutuhan air bersih dan layak minum masih menjadi tantangan, mengingat kondisi geografis daerah yang terdiri dari wilayah daratan serta kepulauan dengan karakteristik ketersediaan sumber daya air yang berbeda.

Di kawasan perkotaan, layanan air perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah menjangkau sebagian besar rumah tangga. Namun demikian, tingkat cakupan layanan belum sepenuhnya merata. Pada tahun 2024, Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 7,86%. Masih terdapat sejumlah rumah tangga perkotaan yang bergantung pada sumber air non-perpipaan seperti sumur gali, sumur bor, maupun air kemasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi, jaringan distribusi yang belum optimal, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang cukup pesat.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas produksi PDAM, serta penguatan tata kelola pelayanan. Dengan peningkatan akses terhadap air siap minum perpipaan, diharapkan angka cakupan pelayanan dapat meningkat secara signifikan selama periode RPJMD, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara lebih layak dan berkelanjutan. Adapun Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024

2.1.1.9. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas mengacu pada kondisi di mana ekosistem, sumber daya alam, dan kualitas udara, air, serta tanah mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang berkualitas tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan alam, tetapi juga untuk mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1.9.1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia merupakan salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penggunaan pupuk organik telah dioptimalkan sebagai alternatif sekaligus pendamping pupuk kimia dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Selama 5 tahun terakhir, penyaluran pupuk kimia masih mendominasi kebutuhan petani, mengingat sifatnya yang lebih cepat memberikan hasil terhadap pertumbuhan tanaman. Namun demikian, Pemerintah Daerah berupaya mendorong peningkatan proporsi penggunaan pupuk organik agar kualitas lahan tetap terjaga, kesuburan tanah meningkat, serta ketergantungan terhadap pupuk kimia dapat berangsur berkurang.

Melalui program penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam, distribusi pupuk organik diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Peningkatan proporsi pupuk organik dibanding pupuk kimia diharapkan mampu mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, seperti penurunan kesuburan tanah jangka panjang dan pencemaran lingkungan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menargetkan adanya peningkatan gradual dalam realisasi penyaluran pupuk organik melalui dukungan kebijakan, fasilitasi produksi pupuk organik lokal, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Dengan demikian, keberlanjutan sistem pertanian dan daya saing produk pertanian daerah dapat semakin ditingkatkan.

Tabel 2.43.
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	Angka	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.9.2. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan. Ketersediaan lahan sawah yang terhubung dengan jaringan irigasi memungkinkan peningkatan intensitas pertanaman, stabilitas produksi, serta ketahanan pangan masyarakat. Proporsi sawah irigasi terhadap total luas sawah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana infrastruktur irigasi mampu menopang sektor pertanian, khususnya padi sebagai komoditas strategis daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi sawah irigasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Di satu sisi, keberadaan jaringan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana telah mendukung sebagian besar sawah produktif. Namun di sisi lain, masih terdapat lahan sawah tadah hujan yang bergantung pada kondisi iklim, sehingga rentan terhadap fluktuasi musim kemarau maupun curah hujan yang tidak menentu.

Upaya pemerintah daerah ke depan diarahkan untuk meningkatkan proporsi sawah beririgasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, baik primer maupun sekunder. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi diperlukan untuk memperkuat investasi infrastruktur pertanian, terutama pada kawasan sentra produksi padi. Dengan demikian, peningkatan proporsi sawah irigasi diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian, menekan ketergantungan terhadap pola tadah hujan, serta memperkuat posisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Berikut Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44.
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Sawah Irigasi	%	56,09	56,36	53,10	53,52	53,52

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.9.3. Indeks Pertanaman (IP Padi)

Indeks Pertanaman (IP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur intensitas penanaman padi dalam setahun di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IP, maka semakin tinggi pula frekuensi tanam yang dilakukan petani dalam setahun. Hal ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan lahan, ketersediaan air irigasi, serta penerapan teknologi pertanian.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, IP padi masih menghadapi tantangan karena keterbatasan infrastruktur irigasi, distribusi air yang belum merata, serta kondisi iklim yang berpengaruh terhadap pola tanam. Sebagian besar lahan sawah di wilayah ini masih mengandalkan irigasi teknis dan tadah hujan, sehingga kemampuan tanam lebih dari dua kali dalam setahun masih terbatas. Nilai IP padi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 5 tahun terakhir berada pada angka 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata petani mampu menanam padi lebih dari satu kali, namun belum sepenuhnya dua kali dalam setahun. Kondisi ini mencerminkan adanya variasi kemampuan lahan sawah dalam memanfaatkan musim tanam, di mana sebagian lahan masih bergantung pada curah hujan (sawah tadah hujan) dan sebagian lainnya sudah ditunjang oleh jaringan irigasi yang memungkinkan penanaman dua kali setahun.

Upaya peningkatan IP padi menjadi salah satu strategi penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui program pembangunan pertanian berupaya memperkuat jaringan irigasi, mendorong penggunaan varietas unggul, serta meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelompok tani dalam pengelolaan pola tanam yang lebih produktif. Berikut data Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Tabel 2.45.
Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pertanaman (IP) Padi	kali/tahun	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.9.4. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar, baik di perairan darat, pesisir, maupun laut, yang jika dikelola secara optimal mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor budidaya perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Produk unggulan seperti udang windu, rumput laut, dan kerapu dihasilkan melalui tambak dan marikultur di pesisir serta kepulauan Spermonde. Pemerintah daerah mendukung pengembangan komoditas ini melalui subsidi pakan lokal bagi tambak udang, peningkatan praktik budidaya berkualitas, serta program pendampingan yang telah berhasil menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Adapun produksi perikanan budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 smapai 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	599.149	472.963,2	427.486,3	311.560,7	417.612,10

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.9.5. Angka Konsumsi Ikan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai wilayah kepulauan dan pesisir memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi keunggulan dalam meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan peningkatan angka konsumsi ikan sebagai salah satu indikator dalam pembangunan sektor kelautan, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini didukung melalui program edukasi gizi dan promosi konsumsi ikan, seperti program Gerakan Makan Ikan, penguatan rantai pasok perikanan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Adapun Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47.
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	46,49	47	58	54	56,5

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.9.6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Keterpeliharaan kualitas lingkungan dapat dianalisa melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Kondisi ini dapat diukur melalui variabel Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diukur berdasarkan 3 indikator komposit yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu:

- Indikator Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.
- Indikator Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO_2 dan NO_2 .
- Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan (Hutan Primer dan Hutan Sekunder).

Kategori interval Nilai IKLH yang digunakan untuk menilai kualitas atau predikat lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri LHK, sebagai berikut:

Tabel 2.48.
Kategori dan Angka Rentang IKLH

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: MENLHK No.27 Tahun 2021

Tabel 2.49.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,43 (Sedang)	68,04 (Sedang)	67,69 (Sedang)	66,39 (Sedang)	75,44 (Baik)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Berdasarkan data Tabel di atas, diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir dan pada tahun 2024 mencapai nilai 75,44. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kategori **Baik**.

2.1.1.9.7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Sedangkan, akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Dalam rangka menuju akses sanitasi aman, pembangunan tangki septik yang sesuai dengan standar sangat penting untuk diperhatikan. Pemilihan jenis tangki septik baik secara konvensional maupun pabrikasi dapat menyesuaikan lingkungan dan kondisi masyarakat. Keberadaan tangki septik yang memenuhi standar sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu kesadaran akan pentingnya tangki septik yang sesuai standar dan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal harus mulai diterapkan.

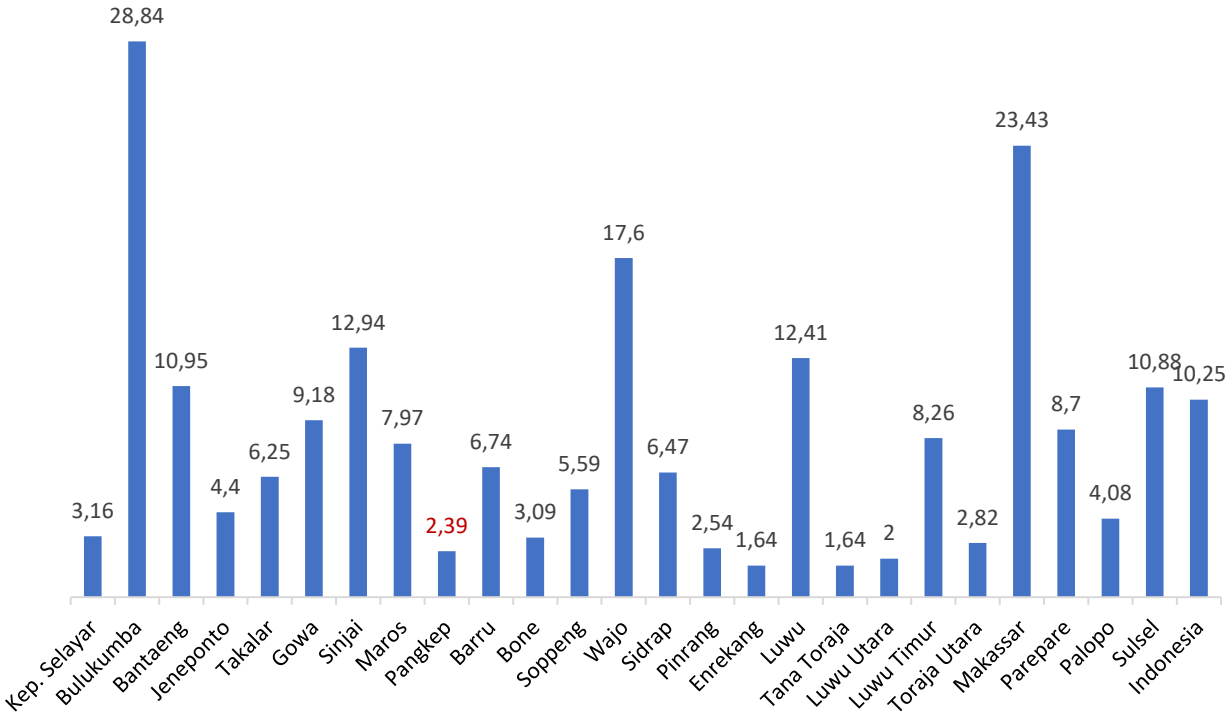
Realisasi capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rentang tahun 2020 – 2024 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 0,59 % meningkat menjadi 1,80 % di tahun 2021 dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,50 % hingga 3,72 % di tahun 2024.

Tabel 2.50.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0.59%	1.80%	2.50%	2.97%	2,39%

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Grafik 2.3.
Akses Sanitasi Aman Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS data diolah Tim Penyusun RoadMap Sanitasi Aman Prov. Sulsel Tahun 2025

2.1.1.10. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Sumber sampah biasanya berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit. Pasar dan sebagainya. Jenis sampah di sekitar kita sangat banyak sampah medis, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah pertanian, sampah peternakan dan masih banyak lainnya.

Bila sampah tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang ke lingkungan maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakit (lalat, tikus, nyamuk, kecoa) menurunkan kualitas lingkungan (pencemaran udara, pencemaran tanah dan sumber air) dampak polutan B3 (limbah industri, pertambangan, cat, buangan gas kendaraan bermotor, baterai bekas, kaleng). Hal tersebut secara akumulasi menyebabkan gangguan kesehatan antara lain kanker, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal dan gangguan syaraf.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah membangun Plant Badriah di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang. Fasilitas ini memiliki kapasitas optimal 50–60 ton per hari dengan enam mesin, namun saat ini baru mampu mengolah sekitar 24 ton per hari. Hasil olahan sampah berupa *Refuse Derived Fuel (RDF)* digunakan oleh PT Semen Tonasa sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rentang tahun 2022 – 2024 cenderung mengalami peningkatan yang positif dimana pada tahun 2022 Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 11,62 % meningkat hingga 28,62 % di tahun 2024.

Tabel 2.51.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	6.8	16,16	11,62	11,79	28,62

Sumber: SIPSN, data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel

2.1.1.10.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator yang digunakan juga untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah adalah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, baik dari pintu ke pintu rutin secara berkala maupun melalui penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara terpisah yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 11,69 %

Tabel 2.52.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020- 2024

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	N/A	0,39	0,98	1,04	11,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.11. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di suatu daerah merujuk pada kemampuan daerah tersebut untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim atau peristiwa bencana lainnya. Resiliensi ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, mencegah kerugian lebih besar, dan memastikan pemulihan yang cepat serta berkelanjutan. Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda dalam mengembangkan resiliensi tergantung pada faktor geografi, ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang ada.

2.1.1.11.1. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pembangunan Rendah Karbon/ *Low Carbon Development* (PRK/LCD) adalah platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon menempatkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 13 (Aksi Perubahan Iklim) sebagai dasar utama untuk mendukung SDGs.

Proyek PRK/LCD adalah inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK yang secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, limbah dan blue carbon sesuai dengan sektor prioritas PRK/LCD. Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang telah diterima pada platform AKSARA dari periode 2010 – sekarang adalah total 66 kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan, dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 1339.17 Ton CO2EQ, sedangkan kontribusi pada capaian provinsi sebanyak 0.07%.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 60.920,01 Ton CO₂ eq. Data capaian potensi penurunan emisi GRK dengan satuan Ton CO₂ eq yang digunakan, karena indicator Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif dan tahunan) dan Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK merupakan indicator baru, baseline data 2024 dan tahun sebelumnya belum tersedia.

Tabel 2.53.
Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

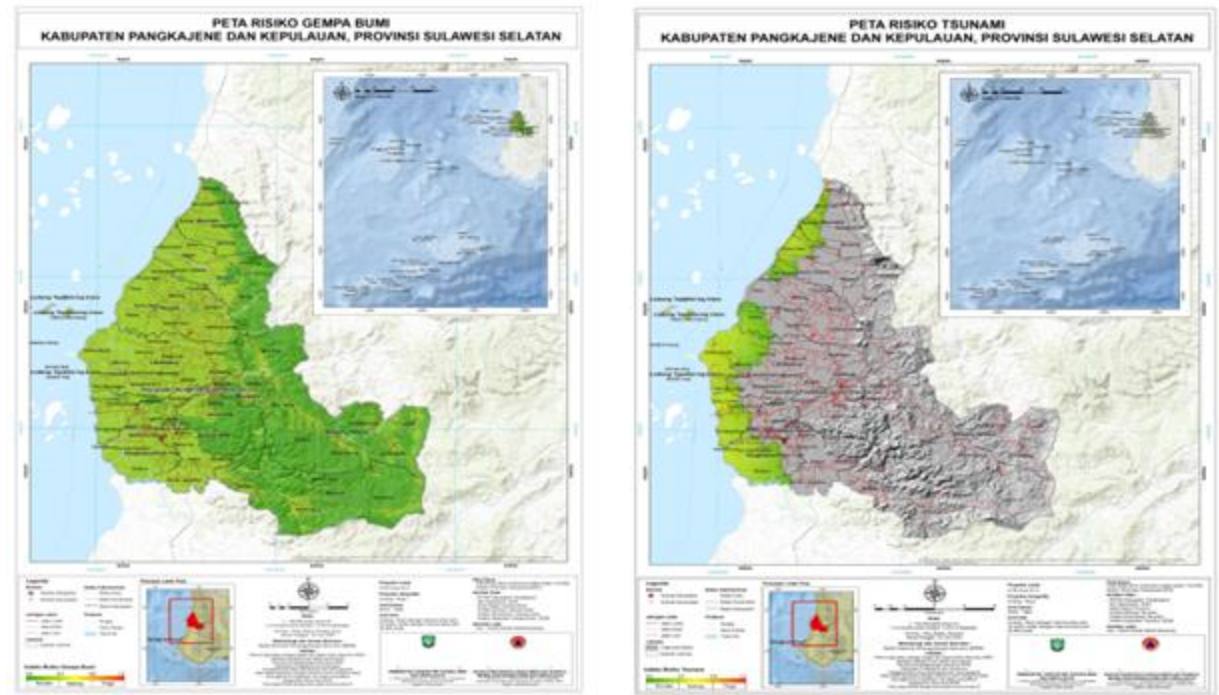
Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Insensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq	n/a	n/a	n/a	n/a	60.920,01

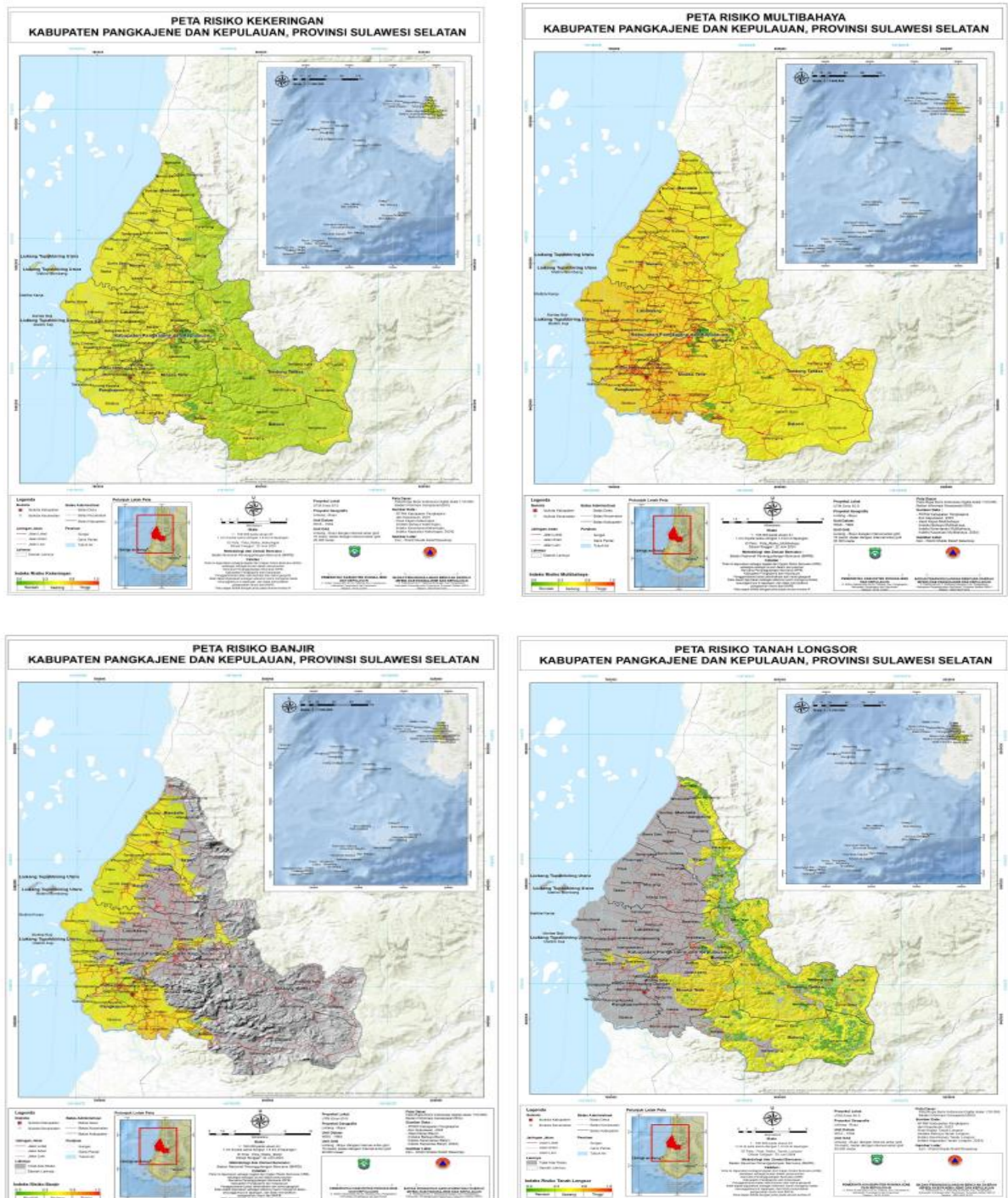
Sumber: Aplikasi Aksara

2.1.1.12.Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan uraian gambaran umum wilayah dan sejarah bencana, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki beragam potensi bencana. Jika diselaraskan dengan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan data Pusdalops BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2023 dalam rentang tahun 2013-2023 terdapat 5 (lima) jenis bencana, yaitu banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, dan cuaca ekstrim (putting beliung dan angin kencang). Melihat kejadian dan dampak bencana tersebut maka membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana untuk meminimalkan kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan.

Gambar 2.13.
Peta Risiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan





Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2028

Potensi bencana dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Penentuan potensi bencana dapat mengacu pada IRBI-BNPB (2024) dan metodologi Kajian Risiko Bencana (KRB). Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko, sedangkan potensi bencana yang belum pernah terjadi dilihat berdasarkan kondisi daerah yang

dipadukan dengan metodologi KRB. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi 7 (tujuh) potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Potensi bencana tersebut memiliki indeks risiko Sedang, dan Tinggi, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Indeks Risiko Berbagai Bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

No.	Jenis Bencana	Skor-IRBI BNPB	Urutan Nasional (IRBI-BNPB)	Kelas Risiko
1.	Banjir	11.35	347	Sedang
2.	Gempabumi	10.21	360	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	12.86	136	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	22.70	108	Tinggi
5.	Tanah Longsor	22.70	99	Tinggi
6.	Tsunami	22.70	28	Tinggi
7.	Kekeringan	34.05	19	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) - BNPB Tahun 2024

Berdasarkan uraian kajian bahaya, hasil rekapitulasi potensi seluruh bahaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
1. Banjir	1,53	17.197,56	9.344,61	26.543,70	Sedang
2. Tanah Longsor	8.467,65	10.126,89	19.959,66	37.663,20	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	3.634,83	4.277,79	43.269,48	51.182,10	Tinggi
4. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0,00	910,17	1.868,22	2.778,39	Tinggi
5. Gempabumi	88.828,00	0,00	0,00	88.828,00	Rendah
6. Tsunami	11.406,06	2.107,08	0,00	13.513,14	Rendah
7. Kekeringan	0,00	82.026,29	6.801,71	88.828,00	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2028

Tabel di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokkan kelas bahaya Rendah, Sedang, dan Tinggi. Bencana yang termasuk tingkat bahaya Rendah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah bencana Tsunami dan Gempabumi, dan tingkat bahaya Sedang diantaranya adalah bencana Banjir dan Kekeringan. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya Tinggi adalah bencana Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi.

Berdasarkan uraian kajian kerentanan, hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan yaitu penduduk terpapar, kerugian fisik dan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Rekapitulasi dari komponen kerentanan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.56.
Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan (jiwa)			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1. Banjir	182.341	19.850	95.891	344	Tinggi
2. Tanah Longsor	24.460	3.056	15.937	42	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	297.274	31.865	165.937	545	Tinggi
4. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	38.850	3.127	28.874	71	Tinggi
5. Gempabumi	356.846	37.222	209.569	665	Tinggi
6. Tsunami	47.448	4.904	29.873	74	Sedang
7. Kekeringan	356.846	37.222	209.569	665	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2028

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya hampir semua berada pada Tinggi. Kelas penduduk terpapar Tinggi terdapat pada bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, dan Kekeringan. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh Gempabumi, dan Kekeringan yang mencakup seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.57.
Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jenis Bencana	Kerugian Fisik	Kelompok Rentan (jiwa)			Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1. Banjir	447.908,46	2.248.089,81	2.695.089,91	Tinggi	26.103,42	Tinggi
2. Tanah Longsor	70.135,70	277.774,70	347.910,40	Tinggi	29.172,33	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	1.648.814,90	5.138.138,13	6.786.953,03	Tinggi	-	-
4. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	119.782,50	130.507,25	250.289,75	Tinggi	2.737,26	Tinggi
5. Gempabumi	0,00	0,00	0,00	Rendah	-	-
6. Tsunami	6.029,26	26,277,26	32.306,52	Tinggi	2.078,37	Tinggi
7. Kekeringan	-	2.946.148,13	2.946.148,13	Tinggi	87.752,52	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2028

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua jenis bencana memiliki kelas kerugian Tinggi. Sementara itu, untuk kerusakan lingkungan bencana Cuaca Ekstrim dan Gempabumi tidak memiliki dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dampak kerusakan lingkungan berpotensi ditimbulkan oleh bencana lainnya seperti Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tsunami, dan Kekeringan.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jenis Bencana		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
2.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Rendah
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5.	Gempabumi	Tinggi	Rendah	-	Rendah
6.	Tsunami	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2028

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tingkat kerentanannya terhadap berbagai jenis bencana. Berdasarkan data tahun 2024, IRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 159,47, yang menempatkannya dalam kategori **risiko tinggi**.

Tabel 2.59.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Kelas Resiko
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Resiko Bencana	168,40	168,40	168,40	165,66	159,47	Tinggi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

2.1.1.13. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian digabungkan dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Dari hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Untuk kabupaten pangkajene dan Kepulauan penilainya IKD baru di lakukan di tahun 2021, adapun hasil Penilaian IKD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.60.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	N/A	N/A	N/A	0,27	0,37

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022-2026

2.1.1.14. Demografi

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

2.1.1.14.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.

Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumber daya alam yang tersedia tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari penduduk. Dengan adanya penduduk, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhannya saja, tetapi lebih menekankan ke arah perbaikan kualitas hidup penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya rasio tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Tinjauan terhadap aspek kependudukan, pada dasarnya merupakan hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, mengingat pentingnya data/informasi terkait dengan perkembangan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah/kawasan, yang dijadikan dasar dalam menetapkan fungsi-fungsi kawasan, distribusi sarana dan prasarana, serta dasar melakukan estimasi/proyeksi kebutuhan pembangunan dalam wilayah/kawasan tersebut.

Pertambahan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Pertambahan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Dalam konteks Jumlah penduduk pada

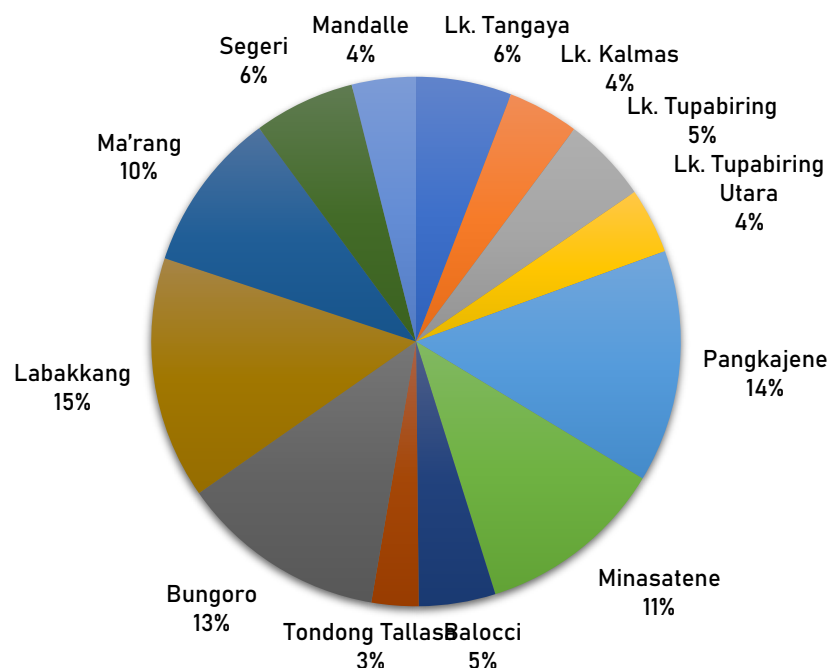
tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 357.846 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Dalam konteks Jumlah penduduk pada tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun memiliki jumlah penduduk sebanyak 361.791 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Labakkang yaitu 53.622 jiwa yang berarti kecamatan Labakkang menyumbang 14,82% dari total populasi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan Kecamatan Tondong Tallasa memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10.382 jiwa atau 2,87% dari total populasi penduduk.

Tabel 2.61.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lk. Tangaya	19.349	20.437	19.403	20.579	21.112
2	Lk. Kalmas	14.618	15.143	14.855	15.314	15.720
3	Lk. Tupabiring	17.728	18.371	17.754	18.879	19.036
4	Lk. Tupabiring Utara	13.565	14.195	13.707	14.500	14.519
5	Pangkajene	48.656	49.544	49.740	50.537	51.210
6	Minasatene	38.940	39.889	39.901	40.955	41.611
7	Balocci	16.560	16.770	16.653	16.915	16.943
8	Tondong Tallasa	10.099	10.423	10.305	10.382	10.382
9	Bungoro	43.879	44.549	44.574	45.167	45.558
10	Labakkang	51.616	52.593	52.884	53.197	53.622
11	Ma'rang	34.401	34.426	35.068	35.232	35.545
12	Segeri	22.339	21.914	22.636	22.095	22.371
13	Mandalle	14.025	13.975	13.946	14.094	14.162
Pangkajene dan Kepulauan		345.775	352.229	351.426	357.846	361.791

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Grafik 2.4.
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



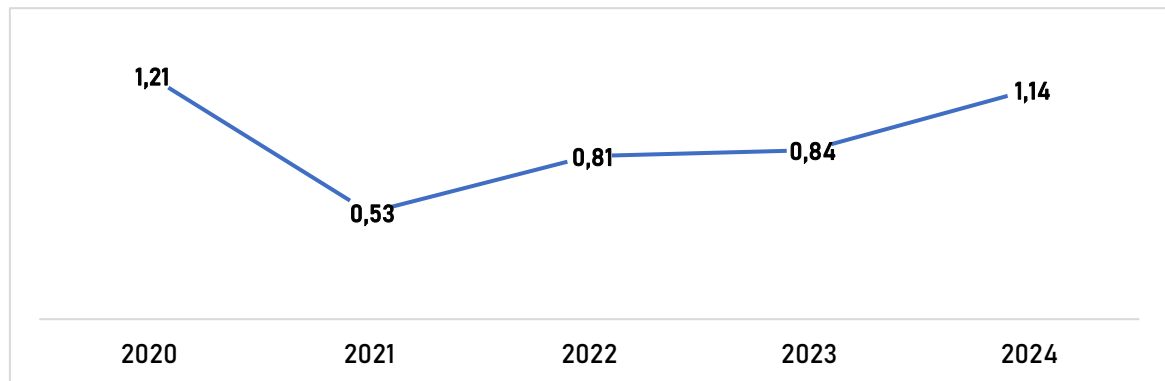
Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.14.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa.

Definisi dari laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah angka rata-rata yang menunjukkan jumlah tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Pertambahan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 ke 2024 sebesar 1,14.

Grafik 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.

Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

2.1.1.14.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan

wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020-2024 dapat menunjukkan jumlah yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62.
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lk. Tangaya	161	161	162	171,49	175,93
2	Lk. Kalmas	160	160	162	167,37	171,80
3	Lk. Tupabiring	326	326	269	286,05	288,42
4	Lk. Tupabiring Utara	159	159	185	195,95	196,20
5	Pangkajene	1.027	1027	1050	1066,41	1080,61
6	Minasatene	509	509	522	535,30	544,08
7	Balocci	115	115	116	117,89	118,09
8	Tondong Tallasa	91	91	93	93,36	93,36
9	Bungoro	487	487	495	501,19	505,53
10	Labakkang	524	524	522	540,29	544,61
11	Ma'rang	457	457	466	468,39	472,55
12	Segeri	285	285	289	282,26	285,78
13	Mandalle	349	349	347	350,95	352,64
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		311	316	317	321,72	325,27

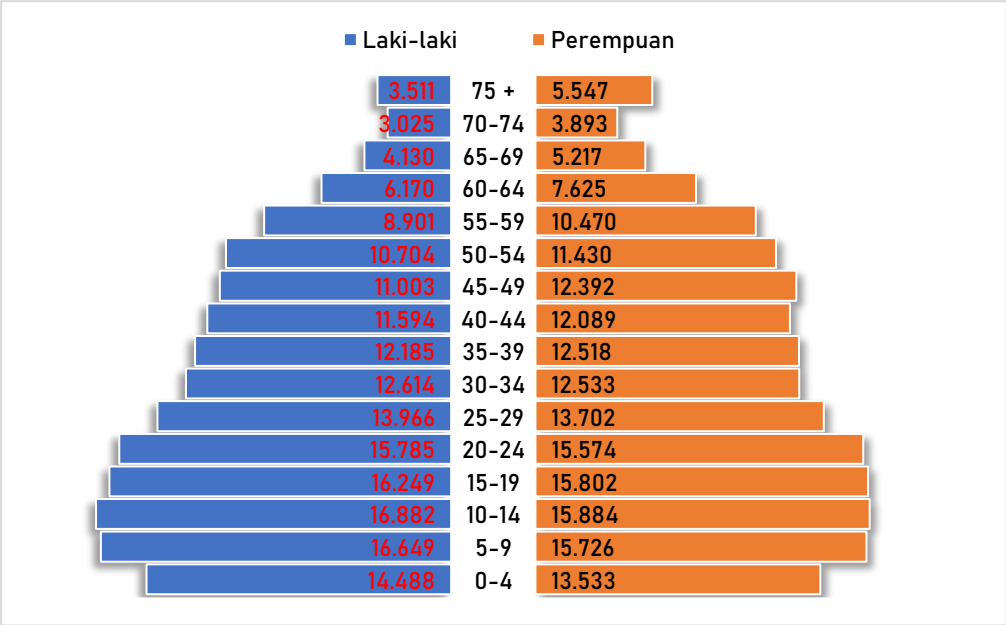
Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.14.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur (interval 5 tahunan) dan jenis kelamin: Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu jumlah penduduk sebelum mencapai usia genap 5 tahun. Kelompok umur ini sering disebut balita (bawah lima tahun). Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan pembulatan ke bawah. Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-

laki 177.856 jiwa atau 49,16% dan jumlah penduduk perempuan 183.935 jiwa atau 50,84%. Komposisi umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Grafik 2.6.
Piramida Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2025, (data diolah Bapperida Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

Pada piramida penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 10-14 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 8,58% dan penduduk perempuan 9,06% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 16.882 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun dengan Persentase penduduk laki laki sebesar 0,83% dan penduduk perempuan 1,07%.

Tabel 2.63.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2021			2022			2023			2024		
	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah
0-4	15.132	14.663	29.795	14.615	13.828	28.443	14.899	14.024	28.923	14.488	13.533	28.021
5-9	14.074	13.461	27.535	16.442	15.530	31.952	16.384	15.591	31.976	16.649	15.726	32.375
10-14	15.848	15.253	31.101	16.876	15.769	32.645	16.946	15.760	32.706	16.882	15.884	32.766
15-19	16.736	15.895	32.631	16.861	16.602	33.463	15.964	15.575	31.539	16.249	15.802	32.051
20-24	16.290	15.435	31.725	16.339	15.708	32.047	15.886	15.884	31.770	15.785	15.574	31.359
25-29	14.083	14.028	28.111	13.302	13.172	26.474	13.568	13.284	26.852	13.966	13.702	27.668

Kelompok Umur	2021			2022			2023			2024		
	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah
30-34	13.070	13.487	26.557	12.452	12.877	25.329	12.626	12.650	25.276	12.614	12.533	25.147
35-39	11.472	12.103	23.575	11.926	12.439	24.365	12.089	12.396	24.485	12.185	12.518	24.703
40-44	11.164	12.357	23.521	11.294	12.377	23.671	11.584	12.354	23.938	11.594	12.089	23.683
45-49	10.276	11.222	21.498	10.857	12.014	22.871	10.781	11.975	22.756	11.003	12.392	23.395
50-54	9.509	10.748	20.257	10.408	11.417	21.825	10.887	11.820	22.707	10.704	11.430	22.134
55-59	7.513	8.813	16.326	7.160	8.654	15.814	8.070	9.626	17.696	8.901	10.470	19.371
60-64	5.702	6.582	12.284	5.534	6.656	12.190	5.895	7.258	13.153	6.170	7.625	13.795
65-69	4.224	5.198	9.422	3.598	4.252	8.123	3.980	5.005	8.985	4.130	5.217	9.347
70-74	2.950	3.907	6.857	2.603	3.523	6.126	2.831	3.711	6.542	3.025	3.893	6.918
75 +	2.634	4.401	7.035	2.944	4.667	7.611	3.310	5.232	8.542	3.511	5.547	9.058
Jumlah	170.677	177.553	348.230	173.191	179.758	352.949	175.700	182.146	357.846	177.856	183.935	361.791

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahunnya bertambah dan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 6 (enam) tahun ini disebabkan belum baiknya sistem pelaporan kematian berjenjang dari desa/kelurahan dan kecamatan, mengakibatkan data-data penduduk yang sudah lama meninggal namun datanya masih aktif.

2.1.1.14.5. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Ketepatan atau ketajaman proyeksi penduduk sangat tergantung pada ketajaman asumsi tren komponen perubahan penduduk yang digunakan. Asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa yang akan datang, ditentukan oleh gambaran tren di masa yang lampau sampai dengan saat ini serta target yang hendak dicapai dimasa yang akan datang. Penentuan target dimasa yang akan datang tersebut tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen seperti perkembangan sosial ekonomi, pencapaian program kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Secara terperinci proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama tahun 2025 – 2029 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Penduduk	Jiwa	363.671	367.847	372.070	376.342	380.664	384.799

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diuraikan dalam kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju dan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari aspek ekonomi dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, antara lain pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, serta akses terhadap layanan ekonomi dan peluang usaha. Berikut adalah gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup stabil, didukung oleh sektor perikanan, kelautan, dan pertanian. Pengembangan sektor pariwisata juga mulai memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah. Pendapatan Per Kapita rata-rata masyarakat meningkat seiring waktu, meskipun masih ada disparitas antara desa dan kota serta antar wilayah tertentu. Upaya peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) terus dilakukan. Tingkat pengangguran relatif rendah, namun tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas tetap ada, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro. Akses terhadap Layanan Ekonomi Masyarakat cukup baik terhadap pasar lokal dan distribusi hasil pertanian serta perikanan. Pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, turut mendukung aktivitas ekonomi. Program-program pemerintah daerah dan kerjasama swasta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat membantu meningkatkan kesejahteraan, termasuk melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha.

Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari aspek ekonomi menunjukkan tren yang positif, namun masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan akses, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

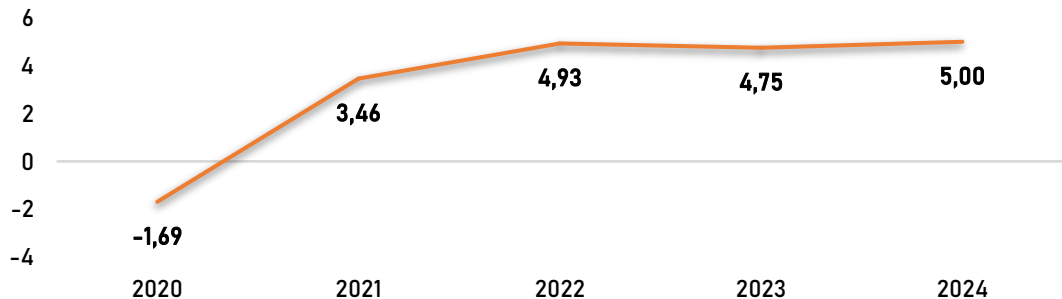
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat perekonomian suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu dan biasanya diukur dalam bentuk persentase. Laju pertumbuhan ini sering kali dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari satu periode ke periode berikutnya. PDB riil itu sendiri adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, disesuaikan dengan inflasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi global dan nasional, pandemi COVID-19, perubahan iklim, serta perkembangan sektor-sektor unggulan di daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah terus mendorong pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal, penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong investasi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam program-program strategis yang pro-rakyat, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Upaya ini juga didukung oleh sinergi antar sektor dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam jangka menengah, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan terus mengalami peningkatan secara stabil, seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya produktivitas sektor-sektor utama.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan menunjukkan tren positif dengan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 mencapai 5,00 yang menunjukkan ketahanan ekonomi yang semakin membaik.

Grafik 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

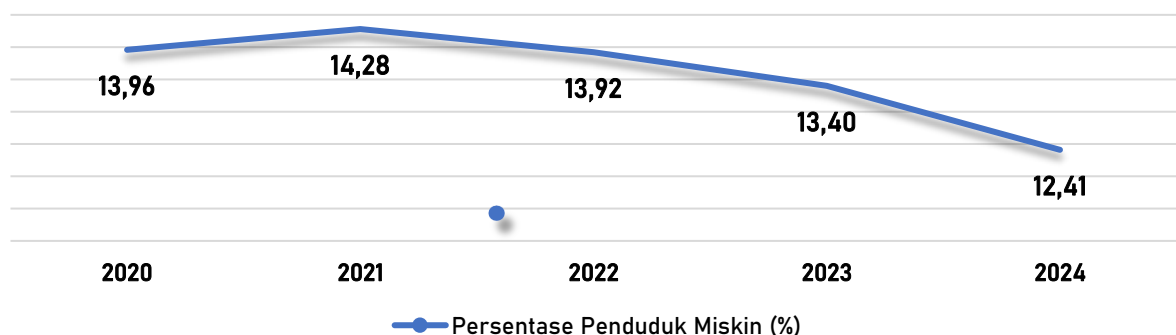


Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, Tahun 2025

2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selama periode tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjumlah 42,94 ribu orang yaitu 12,41 % dari seluruh penduduk. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut:

Grafik 2.8.
Persentase Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

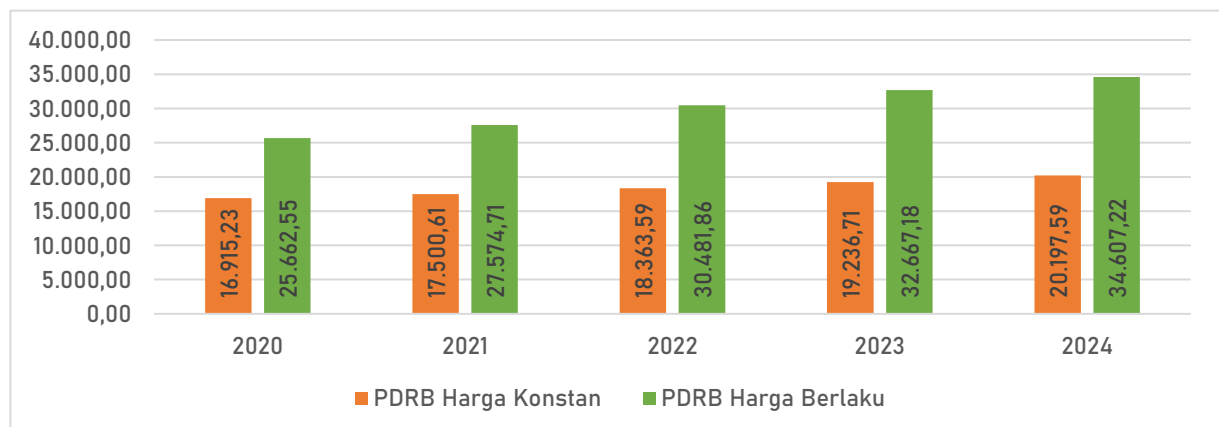


Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, Tahun 2025

2.1.2.1.3. PDRB per Kapita

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2024, angka PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 34.607,22 miliar rupiah dengan kontribusi dari Kategori C (Industri pengolahan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 42,44 %. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 % dimana angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 2.9.
Pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

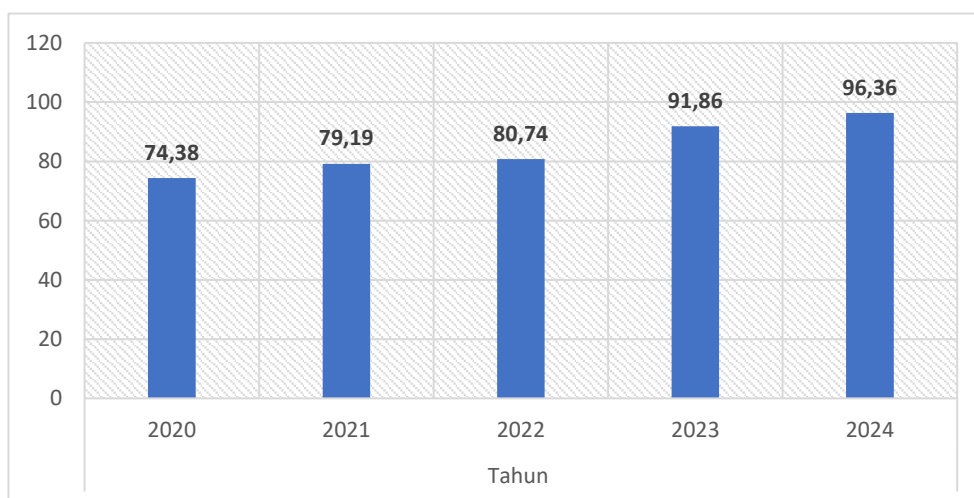


Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah diperlukan indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi daerah tersebut berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun.

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 90,37 juta dan terealisasi sebesar 96,33 juta atau dengan tingkat capaian sebesar 106,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjalan sangat baik yang mengindikasikan peningkatan kemakmuran masyarakat dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat. Adapun gambaran trend kenaikan digambarkan pada grafik berikut;

Grafik 2.10.
Perkembangan PDRB/Kapita
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Selama enam tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh 5 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Konstruksi dan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan. Diikuti oleh lapangan usaha sektor konstruksi. Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Distribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65.
PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024 (Persen)

NO	SEKTOR	2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	18,79	11,91	21,13	5,00	21,07	-6,33	18,04	9,18	17,55
2	Pertambangan dan Penggalian	0,49	10,52	8,49	10,79	4,95	10,97	4,84	11,03	3,52	10,75
3	Industri Pengolahan	-3,99	45,86	-2,45	42,85	2,92	42,44	10,30	45,66	3,92	45,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,79	0,04	17,21	0,05	35,47	0,06	0,79	0,05	0,81	0,05
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,59	0,03	4,41	0,03	8,69	0,03	-0,05	0,03	3,18	0,03
6	Konstruksi	2,82	5,47	9,88	5,83	6,23	5,94	2,21	5,87	2,78	5,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,16	5,55	8,21	5,71	9,88	5,92	4,27	5,86	6,16	5,98
8	Transportasi dan Pergudangan	-13,66	2,76	7,35	2,81	16,91	3,06	5,55	3,25	3,81	3,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,7	0,39	5,84	0,39	22,14	0,44	0,07	0,42	6,19	0,43
10	Informasi dan Komunikasi	11,83	1,56	8,81	1,59	7,13	1,56	3,07	1,51	3,00	1,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	0,83	7,88	0,88	-1,76	0,85	-7,10	0,75	0,30	0,72
12	Real Estat	4,06	1,68	4,17	1,63	6,37	1,61	2,48	1,57	8,01	1,63
13	Jasa Perusahaan	-7,44	0,01	7,14	0,01	15,83	0,01	7,80	0,00	9,93	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,19	3,21	-0,19	2,99	3	2,8	3,18	2,73	5,22	2,81
15	Jasa Pendidikan	9,72	1,83	5,57	1,8	3,62	1,71	3,62	1,68	6,79	1,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,86	1,44	8,95	1,49	9,78	1,51	3,67	1,49	7,21	1,55
17	Jasa Lainnya	-8,6	0,03	8,77	0,03	10,33	0,03	9,14	0,04	9,36	0,04
	PDRB	- 1,69	100	3,46	100	4,93	100	4,75	100	5,00	100

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator yang bisa dipakai dalam melihat atau menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang ada. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti Persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah.

Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja.

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 sebesar 3,99 %, turun 1,06 % poin dibandingkan dengan tahun 2023. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Berikut perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

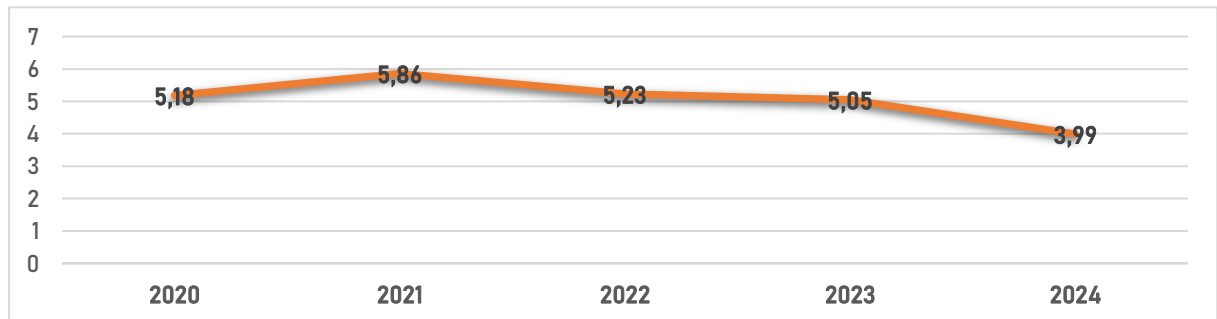
Tabel 2.66.
Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan Status Pekerjaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	161.910	165.108	193.279	188.189	194.139
Bekerja	153.521	155.435	183.176	178.680	186.391
Tidak Bekerja	8.389	9.673	10.103	9.509	7.748
Bukan Angkatan Kerja	91.649	91.135	65.608	80.711	78.634
Sekolah	14.524	15.729	-	15.047	-
Mengurus Rumah Tangga	65.507	62.481	-	59.639	-
Lainnya	11.618	12.925	-	6.025	-
Jumlah	253.559	256.243	258.887	268.900	272.773
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,85	64,43	74,66	69,98	71,17
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

Secara lebih lengkap, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 -2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

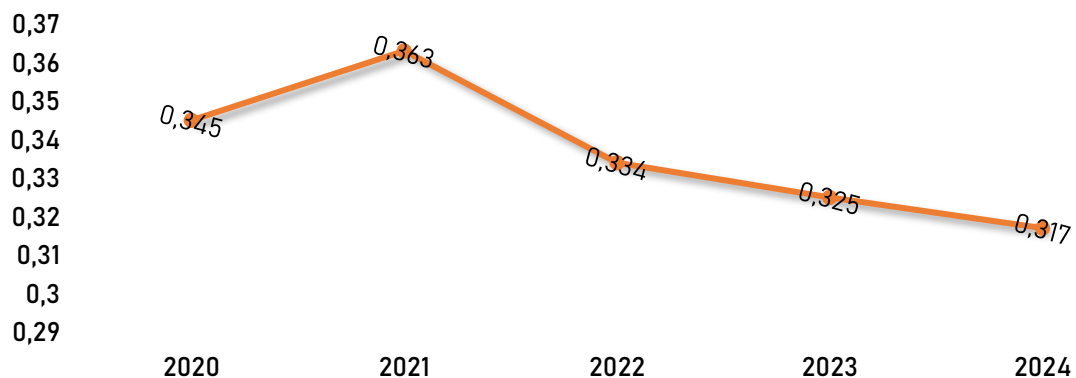
2.1.2.1.5. Rasio Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Rasio Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 sebesar 0,317, angka ini menunjukkan adanya penurunan Rasio Gini dari tahun sebelumnya dan berada pada kategori rendah, yakni di bawah 0,4. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan relatif terkendali.

Berbagai program pembangunan yang bersifat inklusif dan pro-rakyat, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah berkontribusi terhadap perbaikan distribusi pendapatan. Upaya pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis perekonomian daerah turut membantu mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Berikut grafik perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Grafik 2.12.
Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, Tahun 2025

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long healthy life*), dimensi pengetahuan (*knowledge*) dan dimensi standar hidup layak (*descent standard of living*).

Indikator pembentuk IPM meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020-2024. Indeks komponen IPM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.67.
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2024

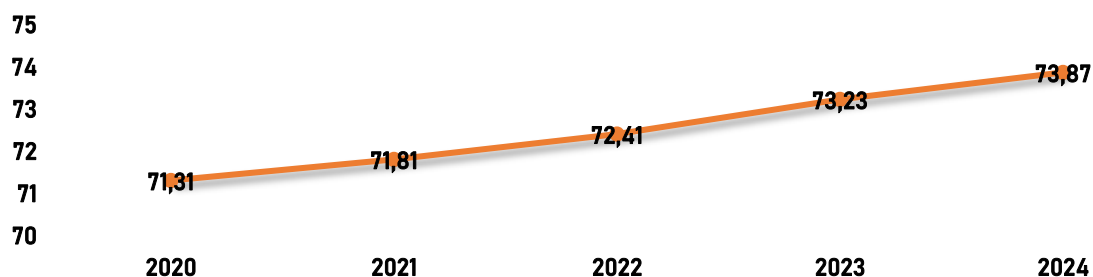
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Indeks Kesehatan	80,18	80,38	80,95	81,34	81,71
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,12	72,75	72,62	72,87	73,11
B. Indeks Pendidikan	60,98	61,87	62,33	63,26	63,82
Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77	12,78	12,80	12,81
Rata-rata Lama Sekolah	7,66	7,92	8,05	8,31	8,47
C. Indeks Pengeluaran	74,15	74,46	75,24	76,32	77,30
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	11.405	11.519	11.817	12.241	12.643
IPM (AHH Hasil Long Form SP2020)	71,31	71,81	72,41	73,23	73,87

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Dengan IPM sebesar 73,87 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami pertumbuhan IPM sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya yang bernilai 73,23. Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah indikator angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024

Grafik 2.13.
Perkembangan IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Pada Sub bahasa kesehatan untuk semua akan dijelaskan mengenai kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Penghitungan Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

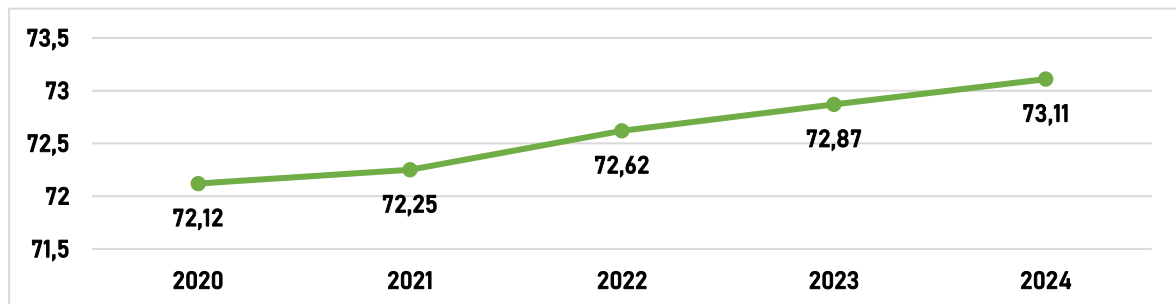
Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Pada rumus perhitungan UHH diketahui bahwa umur semua orang yang meninggal dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut, dengan dasar tersebut maka: 1). Kematian ibu dan bayi menurunkan UHH; 2). Kematian Balita Menurunkan UHH; 3). Kematian karena penyakit menular pada orang remaja, dewasa, dan usia produktif menurunkan UHH; 4). Kematian karena kecelakaan menurunkan UHH; 5). Umur penduduk diatas 76 tahun menaibanggaan UHH. Apabila ditemukan angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan

program social lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan angka harapan hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

Grafik 2.14.
Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Long Form SP 2020

2.1.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah suatu indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk mengukur derajat kesehatan keluarga di suatu wilayah. IKS dikembangkan dalam rangka pendekatan keluarga sehat, yang merupakan bagian dari program penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak. Ke 12 indikator tersebut adalah:

1. Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak.
4. Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tabel 2.68.
Kategori Indeks Keluarga Sehat

Kategori	Rentang Nilai IKS	Keterangan
Tidak Sehat	$< 0,500$	Keluarga hanya memenuhi < 6 dari 12 indikator.
Pra-Sehat	$0,500 - 0,799$	Keluarga memenuhi 6–9 indikator.
Sehat	$\geq 0,800$	Keluarga memenuhi ≥ 10 indikator.

Adapun Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.69.
Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,20	0,22	0,24	0,38	0,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Secara umum Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan yang signifikan, meskipun masih dalam kategori “Tidak Sehat” namun mulai mendekati kategori Pra-Sehat, menunjukkan bahwa upaya intervensi kesehatan keluarga mulai menunjukkan hasil.

2.1.2.2.3. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang kedua adalah Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Ini menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk itu Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga capaian kinerja dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 %. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengusahakan minimal 100% ibu melahirkan mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Adapun Capaian persalinan di fasilitas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.70.
Persalinan di Fasilitas kesehatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persalinan di fasilitas kesehatan	%	61,57	89,9	94,55	97,46	98,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Dari capaian tersebut menunjukkan kenaikan signifikan hingga mendekati 100% ditahun 2024 telah membuktikan upaya pemerintah secara terus menerus selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam memberikan perhatian yang penuh bagi ibu bersalin dalam memberikan pelayanan kesehatan masa persalinan hingga melahirkan

2.1.2.2.4. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) untuk usia dan jenis kelamin tertentu. Stunting biasanya disebabkan oleh malnutrisi kronis, infeksi berulang, dan faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan anak.

Prevalensi Stunting didefinisikan sebagai Persentase balita yang mengalami stunting dalam populasi tertentu. Dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, prevalensi stunting dapat diukur dengan menghitung jumlah balita berusia 0-59 bulan yang memiliki tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah 2 Tahun deviasi standar dari median pertumbuhan anak sehat yang ditetapkan oleh WHO.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

- Peningkatan Kesadaran Gizi: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi yang baik untuk pertumbuhan anak.
- Intervensi Kesehatan: Program-program kesehatan dan gizi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah.
- Perbaikan Akses Layanan Kesehatan: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi.

Tabel 2.71.
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting	Persen	-	33,10	34,20	30,00	25,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari data table di atas, dapat dilihat bahwa prevalensi stunting pada balita mengalami penurunan yang konsisten setiap tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam menangani masalah gizi buruk dan stunting di wilayah tersebut. Penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menurun sebanyak 7,59 %, merupakan pencapaian yang signifikan dan menunjukkan kemajuan dalam program kesehatan dan gizi yang diterapkan.

2.1.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Coverage)

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (TB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas program kesehatan dalam mendeteksi dan mengobati penderita TB di suatu daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, cakupan ini mencakup dua aspek utama:

- Penemuan Kasus: Proses identifikasi individu yang terinfeksi TB melalui pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan metode diagnostik lainnya.
- Pengobatan Kasus: Proses pemberian terapi yang sesuai untuk penderita TB, termasuk pengawasan dan tindak lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap pengobatan.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis merupakan indikator penting dalam upaya mengendalikan penyakit ini. Dengan pemantauan yang baik, diharapkan angka keberhasilan dalam penemuan dan pengobatan kasus TB dapat terus meningkat.

Tabel 2.72.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	n/a	62	62	64	65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas program kesehatan di suatu daerah. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, data cakupan ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan hasil yang bervariasi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat pencapaian yang baik pada tahun 2021 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, penurunan pada tahun 2021. Upaya penanganan TB oleh pemerintah daerah terus dilakukan sehingga pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami kenaikan dan dipertahankan sebesar 66 %. Tentunya dengan capaian ini masih diperlukan perhatian dan strategi yang lebih baik dalam pengendalian TB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1.2.2.6. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam konteks Program DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) merujuk pada persentase jumlah pasien yang terdiagnosis dengan Tuberkulosis (TB) dan menerima pengobatan yang sesuai, yang berhasil mencapai kesembuhan setelah menyelesaikan regimen pengobatan yang direkomendasikan oleh program tersebut.

- Kasus Tuberkulosis:

- Merujuk pada individu yang didiagnosis dengan TB, baik melalui pemeriksaan klinis maupun laboratorium. Kasus ini dapat berupa TB paru atau bentuk TB lainnya.
- Diobati:
Mengacu pada individu yang menerima pengobatan anti-TB sesuai dengan protokol yang ditetapkan dalam program DOTS. Pengobatan ini biasanya berlangsung selama enam bulan dan meliputi kombinasi beberapa jenis obat.
 - Sembuh:
Dinyatakan sembuh jika pasien menyelesaikan regimen pengobatan sesuai dengan protokol DOTS dan tidak menunjukkan tanda-tanda TB pada pemeriksaan lanjutan (misalnya, pemeriksaan dahak negatif setelah pengobatan).

Tabel 2.73.
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS	%	88	88	88	87	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2024

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan perkembangan yang positif namun masih menghadapi tantangan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan angka kesembuhan dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

2.1.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

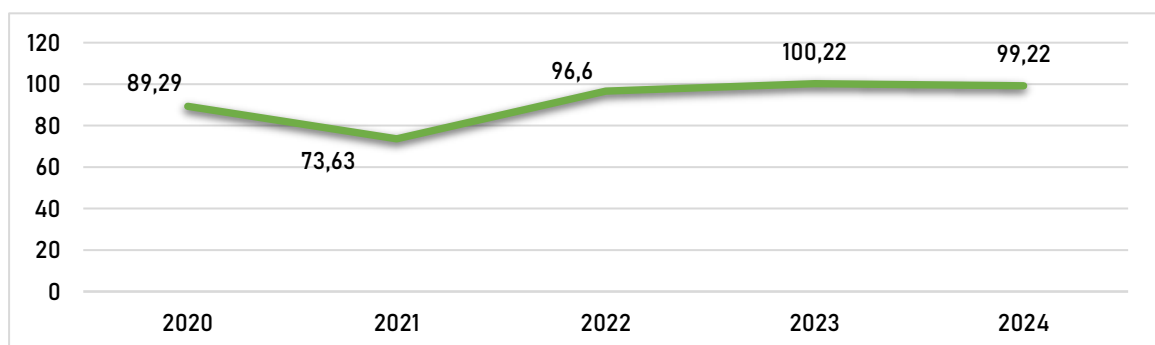
JKN bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Negara Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin. Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan bahwa Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Besarnya Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tidak terlepas dari karakteristik demografis, karakteristik rumah tangga, kondisi keuangan dipilih untuk pemeriksaan berdasarkan investigasi masa lalu dengan penyesuaian tertentu karena aksesibilitas informasi. Selain itu juga di tentukan oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan, biaya, sikap dan dukungan keluarga, usia, wilayah, riwayat penyakit kronis, status ekonomi, tempat tinggal, kemampuan membayar, kesediaan membayar, rata-rata pengeluaran bulanan, penghindaran resiko, jumlah kerugian, pendapatan, infoemasi religiusitas, keyakinan, pendidikan, pendapatan, motivasi, niat, kebijakan kelambagaan, persepsi, dukungan social, jarak dan sosialisasi.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024 masih mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebesar 89,29 % kemudian menurun menjadi 73,63% di tahun 2021. Namun kemudian tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan dari 73,63% menjadi 99,22%.

Grafik 2.15.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

2.1.2.2.8. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, jumlah kematian ibu masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi pada masa kehamilan, persalinan,

maupun nifas, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini, akses pelayanan kesehatan yang memadai, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Selama periode beberapa tahun terakhir, jumlah kematian ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren yang fluktuatif. Faktor penyebab kematian ibu antara lain perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, serta keterlambatan dalam penanganan kasus di fasilitas kesehatan. Kondisi geografis daerah kepulauan juga turut menjadi kendala dalam mempercepat rujukan dan akses terhadap pelayanan kesehatan darurat ibu hamil dan bersalin.

Upaya pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan telah dilakukan melalui peningkatan cakupan kunjungan antenatal care (ANC), program persalinan di fasilitas kesehatan, penguatan jejaring rujukan maternal neonatal, serta penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten hingga ke wilayah kepulauan dan terpencil. Meskipun demikian, masih diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih intensif dalam mempercepat penurunan jumlah kematian ibu

Dengan demikian, penurunan jumlah kematian ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi prioritas pembangunan daerah di bidang kesehatan, melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan maternal serta kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan geografis dan sosial masyarakat setempat.

Tabel 2.74.
Jumlah Kematian Ibu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Ibu	kasus	6	8	8	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

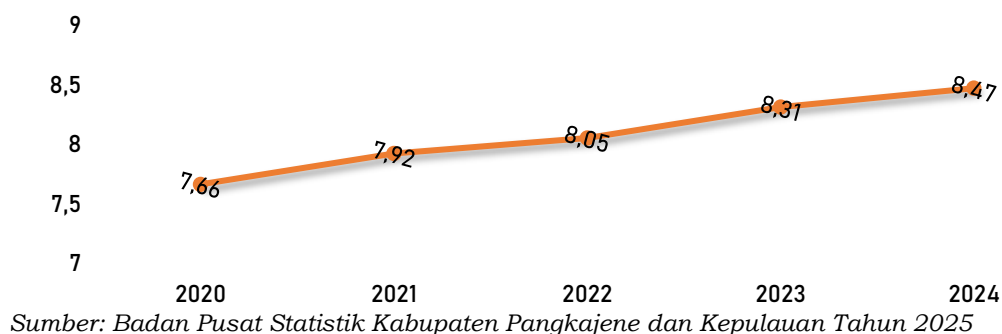
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan besar masih harus diatasi agar tujuan ini dapat tercapai sepenuhnya. Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat kesenjangan antara kota dan desa, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Faktor geografis, infrastruktur, dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk di suatu daerah dalam pendidikan formal, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. RLS menggambarkan tingkat pendidikan yang tercapai oleh masyarakat dan berfungsi sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial di suatu daerah. RLS memberikan gambaran mengenai perkembangan pendidikan di suatu daerah, serta mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Adapun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 adalah 8,47 tahun.

Grafik 2.16.
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024

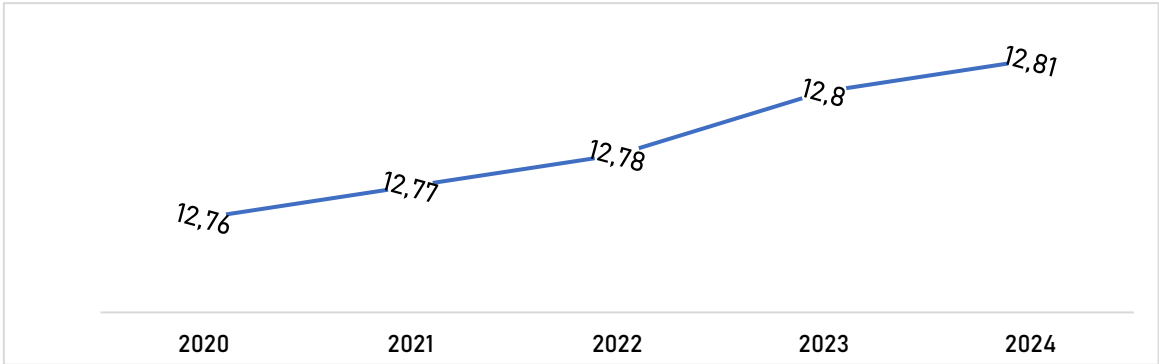


2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak di suatu daerah sepanjang hidup mereka, berdasarkan data yang ada mengenai tingkat kelulusan dan partisipasi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. HLS memberikan gambaran tentang seberapa besar akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh generasi muda di masa depan dan seberapa baik sistem pendidikan di suatu daerah mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan data tingkat partisipasi pendidikan dan tren kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Secara umum, HLS dihitung dengan memperkirakan jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah dalam kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan tingkat kelulusan, rata-rata lama sekolah, dan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan pada tahun 2024 mencapai angka 12,81. Harapan Lama Sekolah 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2.17.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 -2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.3.3. Indeks Literasi SD dan SMP

Indek Literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Pada indeks Literasi ada 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi siswa, yaitu:

- a) Kategori Rendah dengan nilai Rentang **0 s.d. 40**
- b) Kategori Sedang dengan nilai rentang **41 s.d. 60**
- c) Kategori Tinggi dengan nilai rentang **61 s.d. 80**
- d) Kategori Sangat Tinggi dengan nilai rentang **81 s.d. 100**

Adapun indeks Literasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sebagai berikut:

Tabel 2.75.
Indeks Literasi SD dan SMP
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Literasi SD	%	N/A	41,76	47,40	53,11	55,52
Indeks Literasi SMP	%	N/A	49,21	46,10	49,81	62,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Dilihat dari data diatas pada jenjang SD dam SMP capaiannya di atas 50 % dengan kategori sedang dan tinggi, dapat diartikan bahwa murid-murid di

jenjang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah mampu menemukan informasi eksplisit pada bacaan dan mampu membuat tafsiran sederhana tentunya mereka membutuhkan bimbingan untuk memahami bacaan agar mampu menganalisis bacaan dengan baik.

2.1.2.3.4. Indeks Numerasi SD dan SMP

Indeks numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pada Indeks Numerasi ada 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur kemampuan Numerasi siswa, yaitu:

- 1) Kategori Rendah dengan nilai Rentang **0 s.d. 40**
- 2) Kategori Sedang dengan nilai rentang **41 s.d. 60**
- 3) Kategori Tinggi dengan nilai rentang **61 s.d. 80**
- 4) Kategori Sangat Tinggi dengan nilai rentang **81 s.d. 100**

Adapun Indeks Numerasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sebagai berikut:

Tabel 2.76.
Indeks Numerasi SD dan SMP
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Numerasi SD	%	N/A	27,08	37,33	45,17	51,85
Indeks Numerasi SMP	%	N/A	36,29	34,95	55,24	58,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Jika melihat dapat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa siswa/murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP kabupaten pangkajene dan kepulauan kemampuan numerasinya masuk kategori tinggi pada tahun 2024.

2.1.2.3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

- Pemerataan layanan perpustakaan
- Ketercukupan koleksi
- Ketercukupan tenaga perpustakaan
- Tingkat kunjungan masyarakat per hari
- Jumlah perpustakaan ber-SNP

- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
- Anggota perpustakaan

Adapun hasil indeks Pembangunan Literasi Masyarakat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.77.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	MHA	12,32	11,91	83,22	93,66	93,99

Sumber: Perpusnas, laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan literasi Masyarakat

2.1.2.3.6. Indeks Literasi Digital

Secara lebih luas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki skor tertinggi dengan 88,24 poin. Meskipun data spesifik untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak tersedia, tingkat literasi digital di provinsi ini dapat mencerminkan upaya dan perkembangan yang terjadi di tingkat kabupaten.

Indeks Literasi Digital (ILD) mengukur kemampuan individu atau masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, ILD merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pendidikan, pekerjaan, atau interaksi sosial.

Indeks Literasi Digital biasanya mencakup beberapa aspek, seperti:

- a) Akses dan Penggunaan Teknologi: Mengukur seberapa sering dan bagaimana seseorang mengakses teknologi, baik itu perangkat komputer, smartphone, maupun akses internet.
- b) Keterampilan Digital: Menilai sejauh mana seseorang memiliki keterampilan untuk menggunakan berbagai aplikasi dan alat digital untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
- c) Etika dan Keamanan Digital: Mengukur pemahaman dan penerapan etika di dunia maya, termasuk perlindungan data pribadi, kewaspadaan terhadap informasi hoaks, dan perilaku aman di internet.
- d) Kemampuan Kritis dan Analisis: Mengukur kemampuan untuk menganalisis informasi yang didapatkan melalui internet dan media sosial secara kritis.

2.1.2.3.7. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menunjukkan bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan data angkatan kerja penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan, terlihat bahwa tingkat partisipasi kerja cenderung tinggi di semua jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, terdapat 194.139 orang dalam angkatan kerja, dengan 186.391 orang di antaranya bekerja, sehingga tingkat partisipasi bekerja mencapai 96,01%.

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, kelompok lulusan Sekolah Dasar (SD) mencatat jumlah pekerja tertinggi, yaitu 83.327 orang dari total 84.408 angkatan kerja, dengan tingkat bekerja sebesar 98,72%, yang merupakan persentase tertinggi di antara semua kelompok. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tingkat pendidikan dasar, banyak individu tetap terlibat aktif dalam pasar kerja, terutama di sektor informal.

Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga menunjukkan tingkat bekerja yang cukup tinggi, yakni 95,98% dari total angkatan kerja sebanyak 24.827 orang. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan kelompok kedua terbanyak yang bekerja, dengan 55.170 orang dari total 59.101 orang angkatan kerja, atau 93,35%.

Untuk kelompok pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi), tercatat sebanyak 24.065 orang yang bekerja dari 25.803 angkatan kerja, dengan tingkat bekerja 93,26%. Walaupun proporsi ini sedikit lebih rendah dibanding kelompok berpendidikan dasar, angka ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi tetap memiliki peran penting dalam struktur tenaga kerja, terutama dalam sektor formal dan profesional.

Adapun Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.

Tabel 2.78.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang
Ditamatkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Indikator	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran		
SD	83.327	n/a	84.408	98,72
SMP	23.829	n/a	24.827	95,98
SMA	55.170	n/a	59.101	93,35
Perguruan Tinggi	24.065	n/a	25.803	93,26
Total	186.391	7.748	194.139	96,01

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) adalah program yang membantu masyarakat menghadapi guncangan dan mengurangi kerentanan. PSA dapat berupa bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pasar kerja. Tujuan PSA Membantu masyarakat menghadapi guncangan, Mengurangi kerentanan masyarakat, Melindungi kelompok rentan dari bahaya yang tidak terduga, Memperkuat ketahanan rumah tangga terhadap berbagai krisis.

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan tunjangan lainnya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Oleh karena itu, cakupan kepesertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

Saat ini, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di daerah masih mengalami tantangan, terutama dalam menjangkau pekerja di sektor informal. Pekerja formal yang bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah, maupun BUMN/BUMD umumnya telah terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun, bagi pekerja sektor informal, seperti pekerja mandiri, buruh tani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja lepas, masih banyak yang belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai. Adapun hasil Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.79.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja/Buruh Jamsostek	Orang	13.780	21.977	21.155	21.329	18.362
Jumlah Pekerja/Buruh (BPS-PDA)	orang	60.760	65.739	74.593	74.593	73.705
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	22,68	33,43	31,04	28,59	24,91

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah salah satu arah prioritas pembangunan nasional, menurut Kementerian PPN/Bappenas. Konsep ini sejalan dengan visi RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan, berkeadaban, dan berdaya saing. Sebagai penjabaran dari salah satu dari tujuh agenda pembangunan, yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Agenda ini dilakukan, di antaranya, dengan cara “memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial”.

2.1.2.5.1. Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai religius, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi kegiatan keagamaan. Keberadaan kegiatan keagamaan yang didukung oleh pemerintah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan daerah mendorong kehidupan yang harmonis, toleran, dan berbasis nilai-nilai moral.

Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah menjadi ukuran strategis dalam dokumen perencanaan. Dukungan yang diberikan mencakup aspek pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitasi dalam bentuk koordinasi antar-umat beragama. Peningkatan cakupan dukungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Adapun Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80.
Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2025

2.1.2.5.2. **Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi**

Pelestarian cagar budaya merupakan bagian penting dalam menjaga identitas dan warisan sejarah suatu daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menginventarisasi, menetapkan, serta melestarikan benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi menjadi indikator kunci dalam dokumen perencanaan untuk menilai efektivitas kebijakan perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Penetapan status cagar budaya tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai historis dan kultural, tetapi juga untuk meningkatkan potensi wisata budaya serta memperkuat identitas daerah. Adapun Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81.
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan
terhadap Total Registrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	18,52	28,70	39,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.6. **Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif**

Salah satu tujuan Indonesia Emas itu adalah keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

2.1.2.6.1. **Indeks Perlindungan Anak**

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah

indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, sejalan dengan komitmen nasional dan internasional terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Indeks Perlindungan Anak menjadi indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan perlindungan anak di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan hingga 73,49 di tahun 2024. Adapun data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82.
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPA (Indeks Perlindungan Anak)	61,36	58,25	60,37	57,67	73,49

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan iBangga merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan Kualitas Keluarga.

iBangga menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indicator keberhasilan pembangunan Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pendataan iBangga ditujukan untuk menemukenali permasalahan Kualitas Keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

iBangga menjadi tolok ukur peningkatan Kualitas Keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks yaitu:

1. iBangga yang “kurang responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;

- 2. iBangga yang “cukup responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai antara 50-75; dan
- 3. iBangga yang “responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai di atas 75.

iBangga merupakan suatu pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu: 1). dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator; 2). dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator; 3). dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator; 4). dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator; dan 5). dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator.

Penghitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Adapun Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.83.
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	54,19	51,7	61,55	61,20

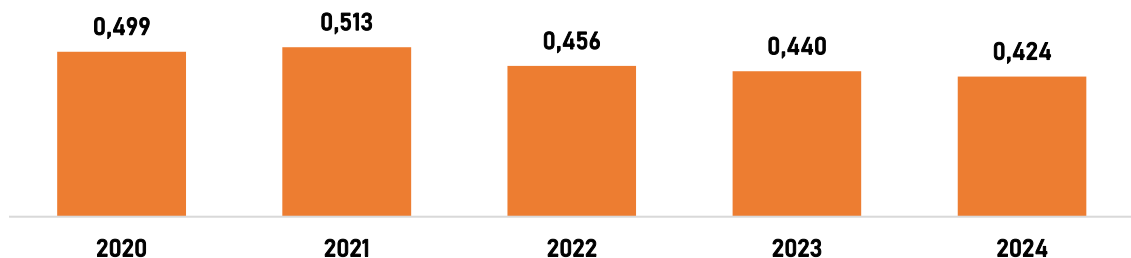
Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025.

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tahun 2023 sebesar 0,440, turun 0,05 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,456 dan jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami penurunan yang fluktuatif. Indeks Ketimpangan Gender terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi pemberdayaan dan kesehatan reproduksi. Semakin kecil nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, IKG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Ketimpangan gender adalah satu hambatan besar dalam pembangunan manusia. Ketika anak perempuan, remaja perempuan maupun perempuan dewasa tidak mendapatkan pendidikan dengan baik, sulit mengakses fasilitas kesehatan dan tidak terlibat dalam panggung politik, maka kondisi ini menunjukkan ada ketimpangan bagi perempuan dalam proses pengembangan kapabilitas dan kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator Persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.18.
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.2.6.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Adapun Dimensi Pengukuran IPG, antara lain: Keterwakilan di parlemen: proporsi perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif, Pengambilan keputusan: proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi, serta distribusi pendapatan: upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian. Adapun skor Indeks Pemberdayaan Gender seperti pada Tabel berikut.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, capaian IPG menunjukkan komitmen daerah dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPG secara umum mengalami peningkatan, yang mencerminkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pendidikan, serta keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, termasuk di lembaga legislatif.

Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kesetaraan gender dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan afirmatif, seperti pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan, serta peningkatan representasi perempuan dalam kelembagaan pemerintahan dan politik lokal. Dukungan terhadap pendidikan perempuan juga turut meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek pembangunan. Berikut tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.84.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	59,44	59,94	64,12	66,36	58,40

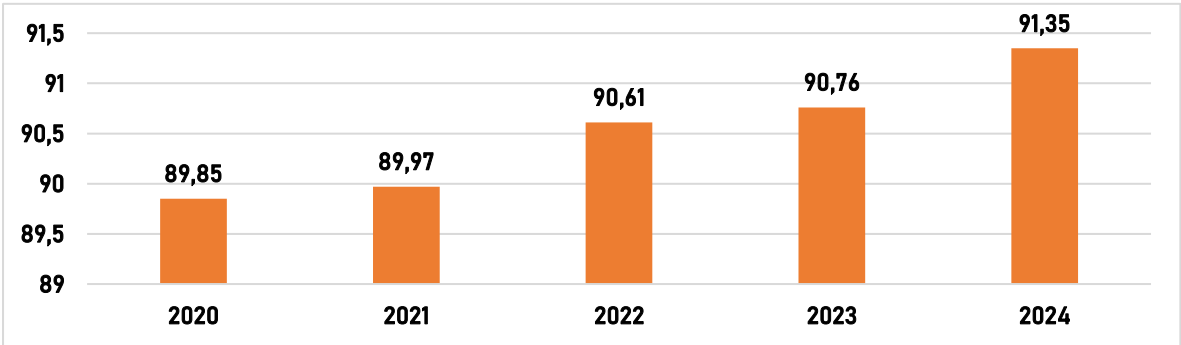
Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, berdasarkan dimensi-dimensi kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG dihitung dengan membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki.

Adapun Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.19.
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan penggerak utama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi indikator penting dalam RPJMD untuk mengukur efektivitas kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan kapasitas dan kesejahteraan pemuda.

Indeks Pembangunan Pemuda mencerminkan sejauh mana pemuda memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi sosial dan politik, serta perlindungan dari berbagai risiko sosial. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas kehidupan dan kontribusi pemuda terhadap pembangunan daerah.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Sumber daya Manusia adalah faktor Penentu daya saing Suatu daerah, tetapi Sumber daya manusia yang dimaksud bukan dalam artian jumlah melainkan lebih kepada kualitas. Inilah yang menjadi penjelasan mengapa suatu daerah dengan SDM yang berlimpah tetapi tidak mempunyai daya saing yang tinggi di karnakan kualitasnya yang rencah. Adapun indikator yang digunakan dalam meningkatkan Daya Saing SDM Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator demografi yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena mencerminkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam memenuhi kebutuhan penduduk usia tidak produktif. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah menunjukkan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Angka atau Rasio ketergantungan dapat dikaitkan dengan komposisi umur penduduk di suatu daerah. Perhitungan rasio ketergantungan dapat menjadi gambaran indikator keadaan ekonomi negara, apakah sudah maju atau masih dalam tahap negara berkembang. Disebutkan dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk

angkatan kerja. Selain itu, negara yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya prosentase Dependency Ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Sementara itu, untuk rasio beban ketergantungan yang dapat diartikan sebagai perbandingan antara penduduk usia non-produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur di atas 65 ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 16 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah Dependency Ratio, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Angka Ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan secara konsisten dari 47,77% pada tahun 2020 ke 45,65% pada tahun 2024, artinya bahwa 100 penduduk produktif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menanggung 45,65 penduduk usia non-produktif Hal ini menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif menurun relatif terhadap penduduk usia produktif. Adapun Angka Ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.85.
Angka Ketergantungan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	%	47,77	47,04	46,43	45,95	45,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Penurunan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sedang mengalami fase bonus demografi, ditandai oleh proporsi besar penduduk usia produktif (tenaga kerja berlimpah); beban tanggungan ekonomi lebih

ringan (potensi peningkatan tabungan dan konsumsi produktif); peluang pertumbuhan ekonomi jika penduduk produktif memiliki akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan.

2.1.3.1.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Iptek berperan dalam menciptakan solusi berbasis teknologi, inovasi memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, dan produktivitas ekonomi mengukur efisiensi serta daya saing sektor usaha di suatu wilayah.

Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Iptek memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penerapan teknologi dapat difokuskan pada:

- Pertanian dan Perikanan, Teknologi modern seperti Internet of Things (IoT) untuk monitoring tambak dan penggunaan drone untuk pemetaan lahan.
- Pariwisata, Pengembangan aplikasi digital untuk mempromosikan destinasi wisata di kepulauan seperti Pulau Samalona atau Pulau Kapoposang.
- Pengolahan Hasil Laut, Teknologi pascapanen untuk memperpanjang umur simpan produk perikanan dan meningkatkan nilai tambah.

Inovasi adalah kunci untuk menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat mendorong, Produk Unggulan Lokal: Mengembangkan produk berbasis sumber daya lokal seperti rumput laut, kerang mutiara, atau hasil tangkapan laut lainnya. Ekowisata: Inovasi dalam menciptakan paket wisata berbasis pengalaman, yang menggabungkan budaya lokal dan eksplorasi alam. Energi Terbarukan: Pemanfaatan energi surya dan angin untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kepulauan.

Peningkatan produktivitas ekonomi di Pangkajene dan Kepulauan dicapai dengan: Penguatan UMKM: Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran digital. Diversifikasi Ekonomi: Tidak hanya bergantung pada sektor perikanan, tetapi juga mengembangkan sektor lain seperti manufaktur ringan atau teknologi informasi. Peningkatan Infrastruktur: Mengembangkan konektivitas darat, laut, dan internet untuk mempermudah akses pasar dan distribusi.

2.1.3.1.3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian daerah yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah, yang mencerminkan tingkat industrialisasi dan daya saing ekonomi wilayah. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat peran industri

pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan melalui berbagai kebijakan strategis.

Industri pengolahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu sektor basis yang signifikan dalam perekonomian daerah. Berbagai jenis industri pengolahan berkembang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, termasuk PT. Semen Tonasa yang bergerak di bidang produksi semen dan juga yang berkaitan dengan pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Pemerintah daerah telah menetapkan strategi penguatan sistem inovasi daerah berbasis komoditas unggulan, dengan prioritas pada pengembangan industri pengolahan komoditas tersebut.

Selain itu, upaya pengembangan infrastruktur pendukung industri juga dilakukan, seperti pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk pengelolaan garam di Kecamatan Labakkang. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan berbagai inisiatif tersebut, sektor industri pengolahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan terus berkembang, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut kami sajikan tabel Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.86.
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	45,86	42,85	42,44	45,66	42,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.1.4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan, dan Minum merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB suatu daerah. Sektor ini mencakup layanan penginapan (hotel, losmen, wisma), restoran, kafe, rumah makan, dan industri kuliner lainnya yang berperan dalam perekonomian daerah. Rasio sangat penting untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari sektor pariwisata dan kuliner, merancang kebijakan peningkatan daya saing sektor ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jika rasio PDRB sektor ini meningkat, menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kuliner berkembang pesat, meningkatkan lapangan kerja dan investasi. Jika rasio PDRB sektor ini meningkat, menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kuliner

berkembang pesat, meningkatkan lapangan kerja dan investasi. Jika rasio PDRB sektor ini menurun, bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti menurunnya jumlah wisatawan, daya beli masyarakat yang melemah, atau kurangnya inovasi dalam bisnis kuliner dan perhotelan. Adapun gambaran tentang Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum Tahun 2020-2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 2.87.
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum	%	0,39	0,39	0,44	0,42	0,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.1.5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Ekonomi Kreatif merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB suatu daerah. Ekonomi kreatif mencakup berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, desain, film, animasi, musik, kuliner, fashion, serta aplikasi dan pengembangan permainan. rasio PDRB sektor Ekonomi Kreatif digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif dalam perekonomian daerah guna meningkatkan daya saing sektor ekonomi kreatif. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika rasio PDRB sektor Ekonomi Kreatif meningkat, berarti ada pertumbuhan positif dalam industri kreatif, baik dari sisi inovasi, lapangan kerja, maupun ekspor produk kreatif. Namun jika rasio PDRB sektor ini menurun, bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan infrastruktur, keterbatasan akses pasar, atau minimnya kolaborasi antara pelaku usaha kreatif dan pemerintah.

2.1.3.1.6. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi pariwisata yang signifikan, terutama dengan keberadaan gugusan pulau-pulau yang indah dan destinasi bahari yang menarik, sektor pariwisata tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Upaya promosi dan pengembangan infrastruktur pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Adapun data jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.88.
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	%	11,55	14,59	42,41		

Sumber:

2.1.3.1.7. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, IKM berkembang di berbagai subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Dalam lima tahun terakhir, sektor IKM terus mengalami peningkatan. Meskipun menghadapi tantangan global dan domestik seperti fluktuasi harga bahan baku, akses pasar, dan keterbatasan teknologi, IKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Adapun data jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89.
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Angka	3.025	3.032	3.042	3.984	4.148

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.8. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip gotong royong dan keanggotaan sukarela, koperasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Seiring dengan perkembangan ekonomi daerah, jumlah koperasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak sedikit, mulai dari kelembagaan yang belum optimal, rendahnya kapasitas manajerial, hingga masih terbatasnya penerapan prinsip koperasi secara sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan koperasi sehat menjadi salah satu arah kebijakan strategis. Koperasi sehat diartikan sebagai koperasi yang aktif, memiliki tata kelola yang baik, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berkala, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggotanya. Adapun data persentase koperasi sehat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami pertumbuhan dari Tahun 2020-2024, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.90.
Persentase Koperasi Sehat
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	Angka	251	86	86	97	100
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Angka	68	233	234	235	232
Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	Angka	27	37	40	45	50
Jumlah Koperasi	Angka	319	319	320	332	332
Persentase Koperasi Sehat	%	8,46	11,60	12,50	13,55	15,06

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.9. *Return on Aset (ROA) BUMD*

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan barang dan jasa publik. Untuk mengukur kinerja keuangan dan efisiensi penggunaan aset BUMD, salah satu indikator yang digunakan adalah Return on Assets (ROA).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa BUMD mampu mengelola aset secara efektif untuk menghasilkan keuntungan, sementara ROA yang rendah atau negatif menjadi indikator adanya masalah dalam efisiensi operasional atau profitabilitas.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, BUMD memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, khususnya di sektor-sektor strategis seperti air bersih, perdagangan, dan pengelolaan hasil kelautan serta potensi sumber daya lokal lainnya. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam aspek tata kelola, profesionalisme manajemen, dan optimalisasi aset, ini terlihat dengan nilai ROA 3 tahun terakhir cenderung menurun bahkan minus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan, perlunya strategi penguatan pengelolaan aset daerah, peningkatan efektivitas pemungutan PAD, serta efisiensi belanja daerah, sehingga ke depan aset yang ada dapat lebih produktif dan memberikan kontribusi positif bagi kemandirian fiskal daerah. Adapun

data Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91.
Return on Aset (ROA) BUMD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,27	1,64	-26,91	-22,50	

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.10. Produktivitas Padi

Pertanian masih menjadi sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan komoditas padi sebagai salah satu tanaman pangan utama yang menopang ketahanan pangan lokal serta sumber penghidupan masyarakat, khususnya di wilayah daratan dan daerah irigasi teknis serta tadah hujan.

Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas padi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren meningkat meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, ketersediaan air irigasi, penggunaan sarana produksi yang belum optimal, serta keterbatasan adopsi teknologi oleh petani.

Produktivitas padi yang dicapai saat ini rata-rata sebesar 6,60 ton/ha yang masih dapat ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan modernisasi pertanian. Adapun data Produktivitas Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Produktivitas Padi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Padi	Ton/ha	6,40	6,55	6,65	6,94	6,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.11. Nilai Tukar Nelayan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Oleh karena itu, kesejahteraan nelayan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi maritim daerah.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh nelayan (dari hasil tangkapan/budidaya) dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan (untuk membeli barang dan jasa konsumsi maupun produksi). NTN di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan nelayan lebih besar dari pengeluarannya, sementara NTN di bawah 100 mengindikasikan penurunan daya beli dan kesejahteraan nelayan.

Dalam beberapa tahun terakhir, NTN nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim penangkapan, perubahan harga ikan, biaya operasional melaut, hingga kondisi cuaca ekstrem. Selain itu, tantangan klasik seperti akses terhadap bahan bakar, permodalan, teknologi tangkap, dan pasar hasil perikanan juga turut memengaruhi stabilitas pendapatan nelayan.

Tabel 2.93.
Nilai Tukar Nelayan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan	Persen	n/a	n/a	107,62	105,8	104,03

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Salah satu dimensi yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah partisipasi angkatan kerja perempuan, yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, dan keadilan sosial.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Faktor seperti beban ganda perempuan, keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, serta dominasi sektor informal, berpengaruh terhadap rendahnya TPAK perempuan dibandingkan laki-laki.

Meskipun demikian, tren partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga pada tahun 2024 mencapai nilai 58,16, seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan telah terlibat aktif di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, serta industri rumah tangga dan usaha mikro. Dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis gender, diharapkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendukung pembangunan daerah yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Tabel 2.94.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	48,71	46,55	61,30	55,64	58,16

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.1.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja serta merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) cenderung fluktuatif. Berikut perkembangan penduduk angkatan kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.95.
TPAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,85	64,43	74,66	69,98	71,17

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

2.1.3.1.14. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas dan kinerja inovasi suatu daerah dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menciptakan, mengadopsi, dan mengembangkan inovasi guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun

inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tiap tahunnya sebagai upaya mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan judul inovasi dan inovator dalam Surat Keputusan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 623 Tahun 2020. Salah satu capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 18 Desember 2020 meraih Piagam Penghargaan dan Piala sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 62,48 untuk klaster kabupaten dengan kategori sangat inovatif. Yang merupakan nilai tertinggi diantara 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut Tabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Tabel 2.96.
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah (Angka)	2.276 (Sangat Inovatif)	60,02 (Sangat Inovatif)	56,90 (Inovatif)	62,48 (Sangat Inovatif)	65,82 (Sangat Inovatif)

Sumber: Bapperida Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.1.15. Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kapasitas dan kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan, mengelola, serta mengimplementasikan inovasi di berbagai sektor pembangunan. Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, dan ekosistem inovasi yang mendukung terciptanya kebijakan dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

Bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peningkatan kapabilitas inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong daya saing daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika pembangunan yang menuntut adanya terobosan baru. Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan berupaya menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan terus menunjukkan tren positif. Dengan demikian, penguatan kapabilitas inovasi bukan hanya menjadi sarana dalam memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97.
Indeks Kapabilitas Inovasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	2,00	2,14	1,23	2,46	2,65

Sumber: Bapperida Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial. Penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ekonomi Biru adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, serta pemanfaatan energi terbarukan dari laut guna mendukung pertumbuhan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya agar penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi hijau dan biru dapat menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

2.1.3.2.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau mencerminkan keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus berupaya untuk meningkatkan indeks ini dengan strategi yang tepat, memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif

karena dengan penerapan ekonomi hijau yang optimal akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, berdaya saing, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Tabel 2.98.
Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Hijau	n/a	n/a	n/a	66,85	Belum Tersedia

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk mengetahui kualitas air sungai dan air permukaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pengujian terhadap kualitas air Sungai Pangkajene dan Sungai Bantimala. Parameter yang diuji sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perhitungan Indeks kualitas air di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan mengacu kepada hasil uji laboratorium tersebut. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dimana pedoman ini juga mengatur tentang tata cara perhitungan Indeks Pencemaran Air.

Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukkan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. Indeks Pencemaran (IP) mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna. Jika L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j), dan C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, maka PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} .

Masalah terkait kualitas air sungai ini tidak hanya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan saja melainkan juga memerlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait baik dalam level kabupaten maupun koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel 2.99.
Status Mutu Air Sungai Pangkajene dan Sungai Bantimala
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No	Sungai	Status Mutu	
		I	II
1	S. Pangkajene Hulu	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
2	S. Pangkajene Tengah	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
3	S. Pangkajene Hilir	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
4	S. Bantimala Hulu	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
5	S. Bantimala Tengah	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu
6	S. Bantimala Hilir	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Tabel 2.100.
Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang memenuhi mutu air	PersentasePemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	11	92%	70	64,17
Ringan	1	8%	50	4,17
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	12		IKA	68,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

Berdasarkan Pengukuran kualitas air yang dilakukan pada dua sungai meliputi Sungai Pangkajene dan Sungai Bantimala di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 menunjukkan air sungai tersebut pada masing dua titik pengukuran masih memenuhi baku mutu, kecuali pada daerah tengah Sungai Bantimala mengalami pencemaran ringan. Berdasarkan data status mutu air tersebut diperoleh Indek Kualitas Air sebesar 68,33 di tahun 2024. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Indeks Kualitas Air Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kategori **Sedang**. Berikut nilai Indeks Kualitas Air sungai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air Sungai yang dipantau setiap tahun.

Tabel 2.101.
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualias Air (IKA)	57,50	63,33	61,67	58,33	68,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada didalam wilayah Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara, dimana data hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk mengetahui tingkat pencemaran atau untuk menilai keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang sedang dilaksanakan.

Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi atau komponen lain yang ada di udara bebas. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi atau komponen yang ada dan atau ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambien.

Kualitas udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri, khususnya industri besar. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran bahan bakar fosil. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa SO_2 , NO_2 , dan CO .

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dengan metode Passive Sampler. Jumlah lokasi yang diamati sebanyak 8 titik dengan sebanyak 2 kali pemantauan yaitu pada Bulan April dan Oktober. Lokasi pemantauan terdiri dari Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), Daerah/ kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk (urban background), dan Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya sulfur dioksida (SO_2) dan senyawa nitrogen dioksida (NO_2).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya pada periode 2020-2024 menunjukkan angka yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102.
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara (IKU)	persen	81,32	81,84	82,54	82,74	95,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.2.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru adalah suatu konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan. Komponen ekonomi biru meliputi pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, pengelolaan lingkungan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan daerah tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Memiliki potensi laut yang cukup luas, dengan luasnya potensi laut tersebut menjadikan sektor perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu sektor unggulan wilayah ini. Luasnya areal perairan dan laut serta banyaknya penduduk yang bergerak di sektor perikanan menjadikan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah sentra perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.103.
Indeks Eknomi Biru
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Biru	persen	n/a	n/a	n/a	85,3 (Kategori Tinggi)	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.3.3. Transformasi Digital

Digital Transformation atau lebih dikenal juga dnegan istilah Transformasi Digital merupakan segala jenis proses yang memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada. Teknologi digital ini meliputi teknologi virtualisasi, komputasi bergerak (*mobile computing*), komputasi awan (*cloud computing*), integrasi semua sistem yang ada disuatu daerah, dan sebagainya.

Transformasi digital adalah penggunaan teknologi dalam mentransformasikan proses analog menjadi digital. Seluruh bidang dalam kehidupan manusia telah mengalami digitalisasi. Tranformasi digital ini sendiri telah mengacu pada cara teknologi melakukan revolusi pada bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti

pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk banyak hal. Saat ini, hampir semua bisnis terlepas dari ukurannya telah bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi dengan lebih efisien dan memberikan nilai kepada pelanggan. Inisiatif transformasi digital sendiri memungkinkan daerah untuk mendapatkan nilai dengan secara signifikan meningkatkan apa yang telah dilakukannya, mendapatkan nilai dengan memperkenalkan hal-hal baru yang dapat dilakukan, serta memastikan daerah dapat melakukan hal-hal baru tersebut dengan sangat baik. Sehingga dengan demikian, transformasi digital dapat memperkenalkan pola pikir baru, budaya baru, struktur organisasi baru, prioritas baru, teknologi baru, serta risiko dan tantangan baru pada daerah.

2.1.3.3.1. Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator kemajuan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, upaya digitalisasi layanan publik terus didorong guna mempercepat akses pelayanan, mengurangi praktik birokrasi yang tidak efisien, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan, administrasi kependudukan, perpajakan daerah, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat.

Saat ini, sejumlah layanan publik telah mulai diselenggarakan secara digital, baik melalui aplikasi daring, website resmi perangkat daerah, maupun platform terpadu seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun demikian, capaian persentase layanan publik online masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, serta kapasitas SDM aparatur. Berikut data Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.104.
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.3.2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Akses terhadap internet menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di suatu daerah. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai pintu gerbang menuju pendidikan, layanan publik, peluang usaha, serta keterlibatan dalam ruang digital yang semakin berkembang.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, persentase rumah tangga dengan akses internet masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk antara daratan dan wilayah kepulauan. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kemampuan ekonomi, dan literasi digital turut memengaruhi tingkat penetrasi internet di tingkat rumah tangga.

Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, keterbukaan informasi, pelayanan publik digital, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.105.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	n/a	61,59	64,12	68,09	70,07

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.3.3. Jumlah dan Lokasi Blankspot

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masih dijumpai beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori *blankspot area* atau daerah tanpa akses jaringan telekomunikasi. Kondisi ini banyak dijumpai di wilayah dengan topografi sulit, seperti pegunungan, perbukitan, serta pulau-pulau kecil terpencil. Selain faktor geografis, jumlah penduduk yang relatif sedikit di beberapa wilayah juga menyebabkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi belum menjadi prioritas bagi penyedia layanan.

Keberadaan lokasi blankspot memberikan dampak signifikan terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, komunikasi, maupun layanan publik berbasis teknologi digital. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas pendidikan, perekonomian, hingga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis, baik melalui pembangunan menara BTS, pemanfaatan teknologi satelit, maupun kerjasama dengan pemerintah

pusat dan operator telekomunikasi, guna mempercepat pemerataan akses jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun jumlah dan lokasi blankspot di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.106.
Lokasi Blankspot
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No	Kecamatan	Wilayah
1.	Kecamatan Balocci	Kampung Bonto-Bonto
		Kampung Bulu-Bulu
		Batunapara
2.	Kecamatan Liukang Kalmas	Dusun Dewakang Caddi
		Pulau Bangko-Bangkoang
		Pulau Butung-Butungan
		Dusun Barat Marasende
		Pulau Padoang-Doangan Lompo
		Pulau Pammantauang/Desa Pammas
		Pulau Pamalikang / Desa Sabaru
		Pulau Saliriang Desa Pammas
		Pulau Masalima / Dusun Masalima
		Pulau Sabaru / Dusun Sabaru
3.	Kecamatan Liukang Tupabbiring	Pulau Kalukuang
		Pulau Padoang-Doangan Caddi
4.	Kecamatan Tondong Tallasa	Pulau Dewakang Lompo
		Pulau Gondong Bali
5.	Kecamatan Liukang Tangaya	Desa Bulu Tellue, Kampung Bunnea
		Desa Lanne, Kantor Desa
		Sabaru
		Balo Baloang
		Sabalana
		Sapuka
		Tampaang
		Sailus Besar
		Sailus Kecil
		Satanger
		Kapoposan Bali

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses pengurangan hambatan perdagangan antar negara dan wilayah untuk memajukan tujuan ekonomi. Integrasi ekonomi domestik fokus pada integrasi di dalam negeri, sedangkan integrasi ekonomi global melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Integrasi ekonomi domestik adalah upaya untuk menciptakan pasar tunggal dan harmonisasi kebijakan ekonomi di dalam suatu negara tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat melalui liberalisasi perdagangan, investasi, dan pergerakan modal di dalam negeri.

2.1.3.4.1. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun. PMTB merupakan salah satu komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi PMTB dalam PDB merupakan cerminan dari kegiatan investasi. Oleh karena itu, investasi merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aset lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Total realisasi investasi selama tahun 2020 sampai tahun 2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terus mengalami kenaikan. Berikut data realisasi penanaman modal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.107.
Pertumbuhan Investasi Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	348.739.340.598	204.402.173.148	4.406.422.739.596	5.534.270.221.683	4.472.021.692.243

Sumber: DPMPSTP, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Pada Tabel dapat dilihat bahwa total realisasi investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020 PMDN/PMA yang tercatat adalah Rp.348 Milyar, kemudian meningkat menjadi 5 Triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2024 penanaman modal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan menjadi 4 Triliun. Penurunan ini diakibatkan adanya pelemahan ekonomi global.

2.1.3.4.2. Net Ekspor Barang dan Jasa

Volume dan Nilai Ekspor adalah indikator penting dalam perdagangan dan ekonomi suatu daerah. Volume ekspor menunjukkan seberapa besar produk yang keluar, sedangkan nilai ekspor mencerminkan nilai ekonomis dari ekspor tersebut. Kenaikan nilai ekspor tidak selalu sejalan dengan kenaikan volume, karena harga barang juga memengaruhi nilai tersebut.

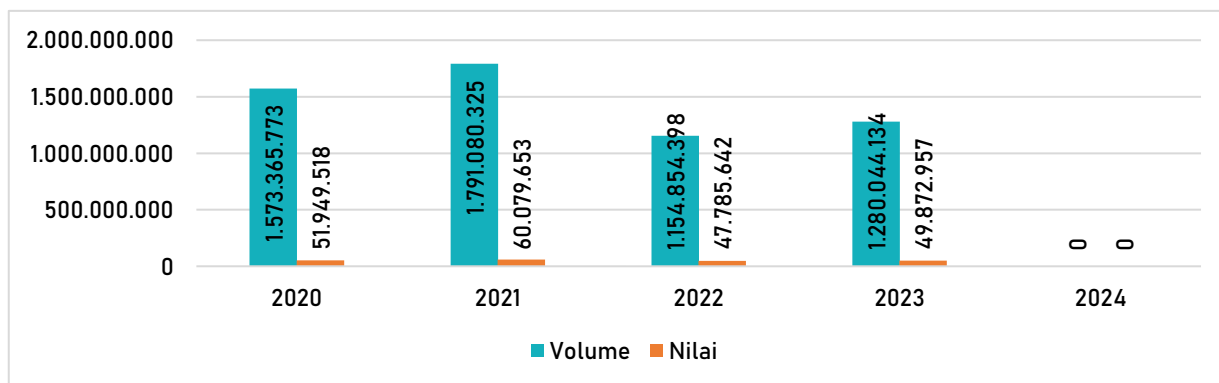
Tabel 2.108.
Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rupiah	9.230,68	9.959,48	10.725,94	11.120,90	11.383,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Volume dan Nilai Ekspor menurut Pelabuhan Muat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berada di Pelabuhan Biring Kassi. Volume dan Nilai Ekspor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 Volume yang dimuat sebanyak 1.280.044.134 kg dan Nilai FOB sebesar 49.872.957 US\$. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.20.
Volume (kg) dan Nilai Ekspor (US\$)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.3.5. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi secara keseluruhan, perlu ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup baik wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, kedua wilayah ini dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Penting untuk diingat bahwa pengembangan wilayah perkotaan tidak boleh

mengabaikan perdesaan. Pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan juga perlu diperkuat agar masyarakat di daerah ini tidak tertinggal.

Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, perdesaan dapat berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan. Pembangunan berbasis potensi lokal, seperti pertanian yang berkelanjutan atau pariwisata desa, juga dapat menjadi sumber pertumbuhan yang signifikan.

Salah satu arah kebijakan yang perlu diterapkan adalah peningkatan keterkaitan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital. Infrastruktur transportasi yang baik akan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa antara kota metropolitan dan kabupaten di sekitarnya. Selain itu, konektivitas digital yang meningkat akan memperkuat integrasi antara daerah perkotaan dan perdesaan, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis.

Dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan antarkota dalam metropolitan dan antarkota dengan kabupaten, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hubungan yang kuat antara kota dan desa tidak hanya akan meningkatkan produktivitas tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi.

2.1.3.5.1. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja infrastruktur di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan drainase.

Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi diantaranya jalan, jaringan irigasi, ketersediaan air minum secara merata di semua wilayah agar seluruh potensi sumberdaya ekonomi khususnya sektor unggulan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur akan berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan, yang juga ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian, perikanan dan unggulan lokal kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka

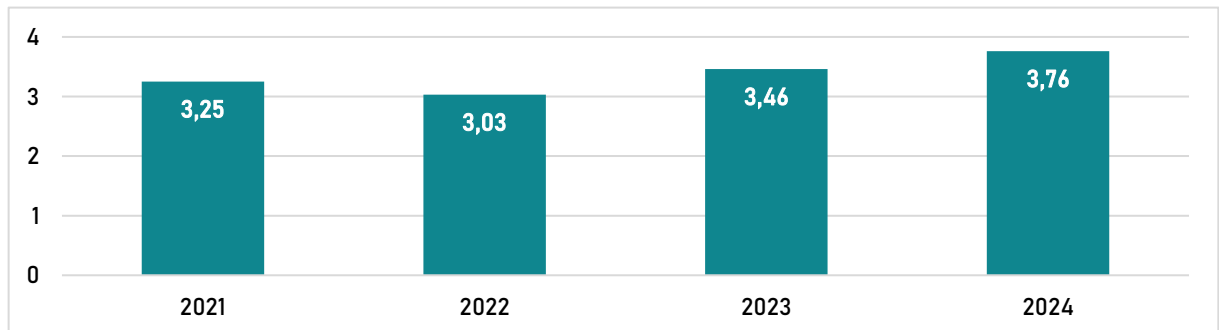
pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (forward linkage) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia yaitu dengan membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.

Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik.

Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja. Sejatinya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lingkaran kemakmuran.

Penyediaan infrastruktur yang memadai dengan melakukan pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, dan pengembangan wilayah terpencil maupun wilayah perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. Dimana kualitas pembangunan daerah salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur, karena kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor utama/penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Grafik 2.21.
Indeks Infrastruktur Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2024



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 3,25 menjadi 3,03, ini menunjukkan adanya sedikit penurunan daya saing infrastruktur, yang disebabkan oleh kendala investasi, pembangunan, atau kebijakan infrastruktur. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,46 yang mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur daerah, akibat peningkatan anggaran atau proyek pembangunan yang mulai berjalan. Pada tahun 2024 tren positif berlanjut dengan kenaikan indeks mencapai 3,76 dari target 3,32 atau capaian 113,25%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 3,46 maka terdapat peningkatan 0,3 poin, menandakan bahwa pembangunan infrastruktur semakin baik dan daya saing daerah meningkat secara signifikan.

Tren keseluruhan menunjukkan perbaikan setelah penurunan di tahun 2022, di mana faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini bisa berupa perbaikan kebijakan infrastruktur, peningkatan investasi, atau proyek strategis yang mulai berjalan dan berdampak positif.

2.1.3.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Urusan perumahan merupakan amanat undang-undang dasar kepada pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bertindak sebagai sarana tumbuh kembang individu, sehingga perkembangan individu juga ditentukan dari seberapa layak tempat tinggal yang dihuninya. Rumah yang layak huni, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pemenuhan rumah yang layak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersifat wajib sekaligus mendasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pembagian urusan pemerintahan.

Rumah layak huni adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Dengan rumah yang layak huni, keluarga yang tinggal di dalamnya dapat tinggal secara nyaman. Selain itu, rumah layak huni juga berkaitan erat dengan kesehatan anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Rumah layak huni juga merupakan salah satu tujuan yang harus dipenuhi dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemenuhan rumah layak huni tertuang dalam salah satu indikator dalam tujuan nomor 11 SDGs yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Di dalam indikator tujuan nomor 11, ada empat kriteria yang wajib dipenuhi agar tempat tinggal dapat dikatakan sebagai rumah layak huni.

Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Ketahanan bangunan Ketahanan bangunan rumah tangga diukur melalui bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bangunan atap, dinding, dan lantai rumah dinyatakan tahan, yaitu Bahan bangunan atap rumah terluas berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng. Bahan bangunan dinding rumah terluas berupa tembok, plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu. Bahan bangunan lantai rumah terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah.
2. Luas tempat tinggal Luas rumah layak huni minimal 7,2 meter persegi per kapita. Kecukupan luas tempat tinggal yang diukur melalui luas lantai per kapita minimal 7,2 meter persegi. Misalkan ada empat anggota keluarga, maka kecukupan luas lantai minimal agar layak huni adalah 28,8 meter persegi.
3. Akses air minum layak Rumah layak huni juga harus memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Sumber air minum dikatakan layak jika rumah tangga memiliki sumber air minum utama berupa air terlindungi, yaitu: Leding Sumur bor/pompa Sumur terlindung Mata air terlindung Air hujan Jika sumber air minum utama rumah tangga bersifat tidak berkelanjutan yaitu air kemasan bermerek atau air isi ulang, rumah tangga perlu memiliki sumber air mandi atau cuci berupa air terlindungi agar dapat dikatakan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Akses sanitasi layak Rumah layak huni wajib memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak diukur melalui kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak perlu memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, atau di fasilitas mandi cucu kakus (MCK) komunal. Jenis kloset yang memenuhi syarat sanitasi layak adalah leher angsa. Tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi syarat sanitasi layak adalah tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akan tetapi, untuk daerah perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja dapat berupa lubang tanah.

Tabel 2.109.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	43,31	47,49	50,32	49,50	53,07

Sumber: Susenas yang diolah Bappenas Tahun 2025

Tabel 2.110.
Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Komponen	Capaian (%)
Ketahanan Bangunan	60,18
Kecukupan Luas	95,40
Air Minum Layak	95,07
Sanitasi Layak	94,51

Sumber: Susenas yang diolah Bappenas Tahun 2025

2.1.3.5.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga

Sebagian besar pengeluaran bukan makanan keluarga di Indonesia diperuntukkan perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal itu berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Sebagai pembuka, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar Rp 1,5 juta. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu Rp 1,33 juta. Dari jumlah pengeluaran Rp 1,5 juta, 50,10 persen atau Rp 751.789 di antaranya merupakan pengeluaran makanan. Sisanya 49,90 persen atau Rp 748.767 untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran bukan makanan yang dimaksud meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; barang tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Besarnya pengeluaran perumahan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Meski demikian, persentase pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga terhadap total pengeluaran juga mengalami penurunan, yaitu dari 28,55 persen menjadi 27,51 peprsen di tahun 2024.

Tabel 2.111.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	%	50,70	51,98	24,99	28,55	27,51

Sumber: Kabupaten/ Kota dalam Angka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.3.5.4. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa mandiri dengan jumlah desa keseluruhan di suatu wilayah. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun yang mencakup 65 Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasar data potensi Desa Tahun yang telah dipublikasikan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil Perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) dikelompokkan berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Pulau-Pulau Besar dan Kawasan atau Kecamatan. Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai dengan kepentingan Pengguna IDM.

Perhitungan Indeks Desa Membangun secara Nasional diperoleh dari Indeks rata-rata Nasional. Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara Nasional dalam status Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal serta Desa Sangat tertinggal. Berikut gambaran Perkembangan IDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024;

Tabel 2.112.
Jumlah Desa yang Berstatus menurut Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

No.	Satus Desa	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sangat Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tertinggal	Desa	5	0	0	0	0
3.	Berkembang	Desa	53	57	41	21	10
4.	Maju	Desa	7	7	22	38	42
5.	Mandiri	Desa	0	1	2	6	13
Jumlah Desa			65	65	65	65	65

Sumber: DPMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan perkembangan IDM, maka untuk Persentase perkembangan Persentase Desa Mandiri tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.113.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	Persen	0	1,54	3,08	9,23	20,00

Sumber: DPMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.3.5.5. Kontribusi PDRB terhadap PDRB Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencerminkan peran strategis daerah ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi, baik dari sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap PDRB provinsi. Selain itu, sektor industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi juga menunjukkan tren pertumbuhan positif sehingga turut memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Meskipun kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan belum sebesar daerah metropolitan seperti Makassar, namun peranan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup strategis karena mendukung ketahanan pangan, pasokan hasil perikanan, serta basis industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Hal ini menandakan bahwa penguatan sektor unggulan daerah akan berdampak langsung terhadap peningkatan kontribusi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam struktur ekonomi provinsi.

Ke depan, peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditempuh melalui penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan produktivitas, serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Dengan demikian, peran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam perekonomian provinsi akan semakin signifikan dan berkelanjutan. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024:

Tabel 2.114.
Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	%	5,07	5,05	5,03	5,00	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.3.5.6. Kontribusi PDRB terhadap PDB Nasional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB menggambarkan besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu. Dalam konteks nasional, PDRB suatu kabupaten atau kota menunjukkan kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi ekonomi yang beragam, antara lain di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, industri pengolahan, serta pariwisata. Namun demikian, sebagai wilayah dengan karakter geografis kepulauan dan sebagian besar masyarakatnya berada pada sektor primer, kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDB Nasional masih tergolong kecil dibandingkan dengan daerah-daerah metropolitan dan pusat industri besar di Indonesia.

Meskipun kontribusi secara nominal masih terbatas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan kawasan Sulawesi Selatan, khususnya sebagai penyangga pangan, hasil laut, serta bahan baku industri dari sektor primer. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDB Nasional Tahun 2020-2024:

Tabel 2.115.
Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDB Nasional
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDB Nasional	%	0,166	0,162	0,156	0,156	0,156

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi ketika hubungan antara variabel ekonomi utama berada dalam keseimbangan. Stabilitas ini dicapai ketika tidak ada fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro merupakan landasan yang vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan jangka panjang suatu daerah.

2.1.3.6.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar, hal ini dikarenakan jenis pajak daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih banyak dibandingkan sumber PAD lainnya. Jumlah penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-

transaksi yang terjadi di antaranya. Dalam praktiknya sangat dimungkinkan PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah akan sangat bervariasi baik dilihat dari cara pendekatan pengukuran, jenis kegiatan ekonomi, lingkup data, asumsi yang digunakan maupun sumber data. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi PDRB, PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.116.
Realisasi Pajak Daerah, PAD, PDRB dan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	PAD	PDRB (Milyar Rupiah)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	80.514.014.162,05	196.530.900.657,27	25.662,55	0,31
2021	90.323.492.905,46	159.407.687.393,01	27.574,74	0,33
2022	90.906.902.478,70	163.602.765.323,44	30.481,86	0,30
2023	94.937.575.968,44	176.623.383.839,89	32.667,18	0,29
2024	136.543.303.074,16	228.702.852.036,76	34.607,22	0,39

Sumber: Bapenda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025, Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan di atas maka dapat diketahui bahwa PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan, PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 34.607,22 Milyar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 juga mengalami peningkatan secara signifikan. Naik turunnya PDRB dalam hal ini memiliki keterikatan dengan peningkatan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tentunya memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Membuktikan bahwa pembangunan dan juga pertumbuhan perekonomian yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 136.543.303.074,16.

Selain memiliki potensi pada struktur perekonomian, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat dari data realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020-2025.

2.1.3.6.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi

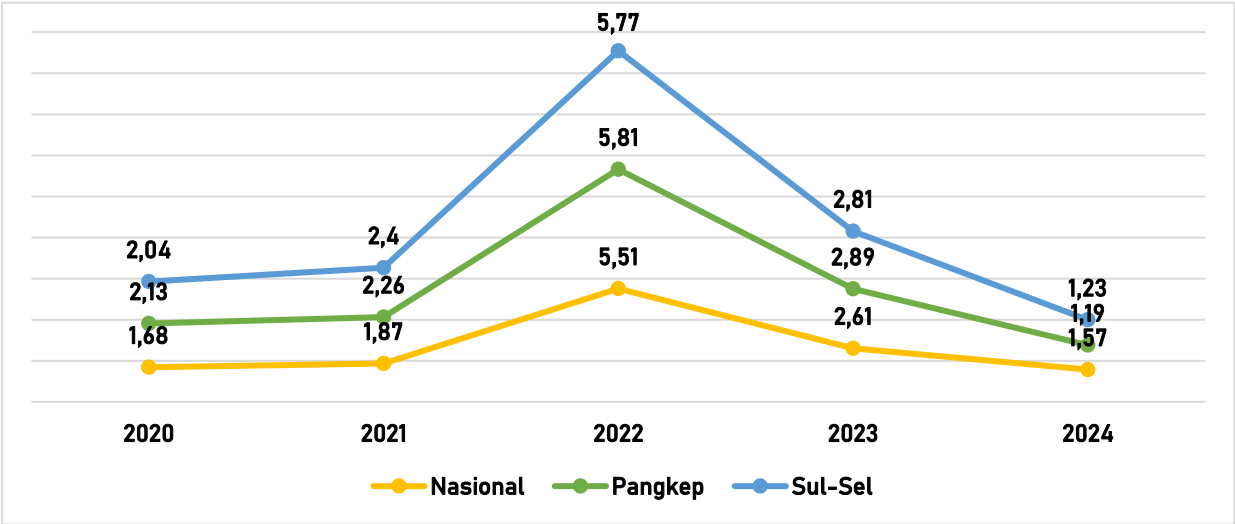
barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Infasi yang terjadi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diwakili oleh Kota Makassar sangat dinamis dari tahun 2020– 2024, dan pada tahun 2024 laju inflasi kota makassar yang berdampak pada laju inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 1,77 %. Setidaknya mempengaruhi kondisi laju inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masuk dalam Zona Makassar.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 %. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih baik dibandingkan Sulawesi Selatan dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,26 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember tahun 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,26 %. Laju inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

Inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,81 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,69 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,73 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,21 %; kelompok kesehatan sebesar 3,56 %; kelompok transportasi sebesar 17,42 %; kelompok rekreasi, Pangkajene dan Kepulauan, dan budaya sebesar 3,23 %; kelompok pendidikan sebesar 2,06 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,62 %; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,99 %. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 %.

Penyebab inflasi lain adalah adanya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Laju inflasi Indonesia bulan Desember 2022 sebesar 5,63 % (y-o-y), laju inflasi Sulawesi Selatan sebesar 5,77 % (y-o-y), sedangkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah yaitu sebesar 5,81 % (y-o-y). Inflasi di Indonesia masih terkendali dan menjadi terbaik kedua setelah negara Jepang dibandingkan inflasi negara yang tergabung dalam G-20.

Grafik 2.22.
Tingkat Inflasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.3.6.3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen evaluatif yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara objektif, terukur, dan komprehensif. Indeks ini mencerminkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama, yaitu:

- a. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran,
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,
- c. Pengawasan keuangan daerah,
- d. Transparansi keuangan daerah,
- e. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Adapun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.117.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	76,81	74,1197	77.707	83,6261	70

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.3.6.4. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di daerah. IKAD mencerminkan seberapa besar masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan, seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun layanan keuangan berbasis digital. Tingkat akses keuangan yang memadai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peningkatan IKAD memiliki arti strategis mengingat karakteristik wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan. Kondisi geografis ini seringkali menjadi tantangan dalam penyediaan layanan keuangan yang merata, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta dominannya sektor informal menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada mekanisme keuangan tradisional.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempatkan peningkatan IKAD sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif. Melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga perbankan, serta penyedia layanan keuangan digital, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah membuka rekening, memperoleh akses pembiayaan, serta memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan. Selain itu, program literasi dan inklusi keuangan akan terus diperkuat, khususnya bagi kelompok perempuan, pelaku UMKM, nelayan, dan masyarakat kepulauan, sehingga manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara lebih luas.

Dengan meningkatnya Indeks Akses Keuangan Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menargetkan terbentuknya ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Tabel 2.118.
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	n/a	n/a	3,72	3,73	4,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun indikator yang digunakan dalam Aspek Pelayanan Umum:

2.1.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tata kelola yang berintegritas mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.

Publikasi anggaran daerah secara rutin dan terbuka melalui situs resmi atau media lain. Penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 berada pada angka 65,75 dengan kategori “B” dan Predikat Cukup Baik. Sedangkan pada tahun 2023 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada angka 96,86 atau kategori Istimewa, Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119.
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024

Tahun	Kategori	Nilai / Angka	Predikat
2022	B	65,75	Cukup Baik
2023	AA	96,86	Istimewa
2024	AA	96,52	Istimewa

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh sebagian besar Instansi Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya, namun dalam penyelenggaraannya belum efektif, efisien, dan terpadu.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2024.

Tabel 2.120.
Indeks SPBE
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	n/a	2,11 (cukup)	2,12 (cukup)	2,31 (cukup)	2,64 (Baik)

Sumber: Laporan Hasil SPBE Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

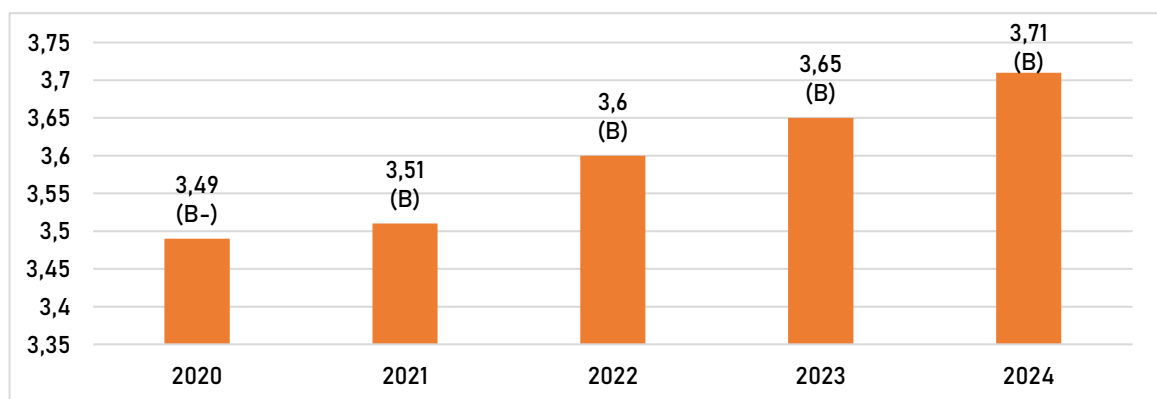
2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara berkewajiban meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Sedangkan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka dilakukan evaluasi melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini akan menghasilkan angka Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM). Angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan kemudian diakumulasi menjadi angka untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Adapun capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.23.
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Hasil SPBE Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Untuk mendapatkan angka Indeks Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Utama yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan (3). Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang.

2.1.4.1.4. Indeks Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Kuesioner elektronik SPI diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) di gadget enumerator. Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baru mulai dihitung pada tahun 2021 dengan nilai 72,1 namun pada tahun 2022 turun menjadi 70,77 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 74,41. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Survey Penilaian Integritas (SPI)	n/a	72,1	70,77	74,41	69,4

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.1.5. Nilai MCP KPK

Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan antara lain melalui implementasi pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Dalam mewujudkannya perlu adanya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Melalui pengukuran IPKD MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention), KPK berupaya mendorong pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan penilaian pada aspek Transparansi, Regulasi dan Kebijakan, dan Akuntabilitas.

Untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan upaya tersebut dilakukan dengan memenuhi 7 (tujuh) aspek penilaian mulai dari area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan public, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Penerimaan Daerah dan Penguatan APIP. Adapun hasil skoring penilaian MCP-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.122.
Penilaian MCP KPK Tahun 2020-2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penilaian MCP KPK	82	84	85,6	76,12	74,76

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya trend kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serius dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Di Tahun 2023 dan 2024

mengalami penurunan disebabkan karena adanya komponen penilaian yang tidak mencapai target disamping bertambahnya komponen penilaian yang dipersyaratkan oleh KPK. Sehingga hal ini menjadi tantangan dan perhatian untuk kedepannya dalam upaya penanganan pencegahan korupsi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.4.1.6. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan,
2. Keandalan pelaporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara/daerah, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP berperan penting dalam memastikan tercapainya efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keandalan pelaporan keuangan dan kinerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Tabel 2.123.
Kategori Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level	Deskripsi
Level 1	Belum terkelola
Level 2	Rintisan
Level 3	Terdefinisi (sudah dilaksanakan dan terdokumentasi)
Level 4	Terkelola dan terukur
Level 5	Optimum (melekat dalam budaya organisasi)

Tabel 2.124.
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,96 (Level 2)	3,24 (Level 3)	2,82 (Level 2)	3,00 (Level 3)	3,10 (Level 3)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Indeks SPIP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada **Level 3 (Terdefinisi)** selama periode 2020–2024. Level ini mencerminkan bahwa proses pengendalian intern telah diterapkan secara formal dan terdokumentasi dengan baik, meskipun

belum sepenuhnya terintegrasi dan terukur secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.

2.1.4.1.7. Nilai Evaluasi SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Pada tahun 2024, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 64,03, mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 63,53. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun saat ini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kategori B, pemerintah daerah menargetkan untuk mencapai kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai minimal 70. Untuk mencapai target tersebut, telah disusun rencana tindak lanjut berdasarkan 12 poin rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Langkah awal yang dilakukan adalah pemaparan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hal-hal yang diinginkan dalam rekomendasi tersebut. Harapannya, seluruh program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengimplementasikan aplikasi E-SAKIP. Aplikasi ini memudahkan proses perencanaan kinerja, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja serta keuangan. Dengan sistem ini, setiap OPD dapat secara transparan dan akuntabel mengelola serta melaporkan kinerjanya. Adapun capaian kinerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125.
Nilai Evaluasi SAKIP
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP	60,17 (CC)	60,35 (CC)	62,59 (B)	63,53 (B)	64,03 (B)

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial menghubungkan tiga pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berkeadilan merujuk pada sistem hukum yang tidak hanya menjamin penegakan aturan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Prinsip utama dari hukum yang berkeadilan meliputi: Imparsialitas: Hukum berlaku sama bagi semua tanpa diskriminasi. Progresivitas: Menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat agar relevan dan responsif terhadap kebutuhan. Hak Asasi Manusia (HAM): Mengutamakan perlindungan terhadap martabat dan hak setiap individu. Penerapan hukum yang berkeadilan menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap institusi negara, yang berkontribusi pada stabilitas sosial.

Keamanan nasional adalah kondisi stabilitas dan kedaulatan negara yang meliputi berbagai aspek, seperti: Pertahanan: Kesiapan militer untuk menghadapi ancaman eksternal. Keamanan Publik: Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman internal, termasuk kejahatan, terorisme, dan konflik sosial. Keamanan Ekonomi: Ketahanan dalam menghadapi tantangan global, seperti sanksi ekonomi atau krisis pangan. Keamanan nasional yang tangguh memerlukan sinergi antara kekuatan militer, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat sipil.

Demokrasi substansial menekankan pada implementasi nilai-nilai demokrasi secara esensial, bukan hanya prosedural. Unsur-unsur penting dari demokrasi substansial meliputi: Partisipasi Warga Negara: Ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas Pemerintah: Transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Perlindungan Minoritas: Penjaminan hak kelompok minoritas agar tidak terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Demokrasi substansial memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sinergi ini diperlukan untuk membangun negara yang kuat, adil, dan sejahtera.

2.1.4.2.1. Persentase Perempuan terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan mampu memperkuat representasi kepentingan masyarakat secara lebih luas, khususnya terkait isu-isu perempuan, anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi tolok ukur sejauh mana keterwakilan perempuan dapat terwujud dalam ranah politik daerah. Meskipun secara regulasi telah diatur melalui kebijakan afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon

legislatif, pada praktiknya persentase keterpilihan perempuan seringkali masih berada di bawah angka ideal tersebut.

Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dari sisi partisipasi politik, dukungan partai politik, maupun kesadaran masyarakat dalam memberikan ruang yang lebih luas kepada calon legislatif perempuan. Ke depan, Pemerintah Daerah akan mendorong penguatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan politik, peningkatan peran organisasi perempuan, serta kolaborasi dengan partai politik untuk mendorong tercapainya target keterwakilan perempuan di DPRD.

Peningkatan persentase perempuan di lembaga legislatif diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan angka kuota semata, tetapi juga berdampak pada kualitas perumusan kebijakan publik yang lebih responsif gender, sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun data Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Tabel 2.126.
Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	Persen	14,29	14,29	14,29	14,29	8,50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.2.2. Persentase Perempuan Pengurus Politik

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Persentase perempuan sebagai pengurus politik menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana partai politik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam struktur organisasi mereka.

Keterbatasan jumlah kader perempuan yang aktif disebabkan masih kuatnya budaya politik maskulin, serta minimnya dukungan dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan. Hal ini berdampak pada rendahnya persentase perempuan yang menduduki posisi strategis dalam struktur partai.

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik melalui berbagai langkah, antara lain fasilitasi

pendidikan politik perempuan, penguatan organisasi perempuan, serta kerja sama dengan partai politik untuk membuka akses lebih luas bagi kaderisasi perempuan. Dengan demikian, peningkatan persentase perempuan pengurus politik diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan aspek formal, tetapi juga mampu mewujudkan kepemimpinan politik yang lebih responsif, representatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Keterlibatan aktif perempuan dalam struktur partai politik akan menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.127.
Persentase Perempuan Pengurus Politik
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perempuan Pengurus Politik	Persen	n/a	n/a	36,95	36,36	36,68

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.2.3. Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Perda adalah produk hukum yang disusun untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, serta pembangunan daerah secara kontekstual sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Pelaksanaan Perda yang efektif tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sosial.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, persentase penegakan hukum terhadap Perda menunjukkan tren yang cukup baik selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 92,11%, sedikit menurun menjadi 88,88% pada tahun 2021, namun berhasil mencapai 100% pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Capaian ini mencerminkan meningkatnya komitmen dan kapasitas aparat pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menegakkan aturan-aturan daerah secara konsisten dan menyeluruh.

Tabel 2.128.
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	92,11	88,88	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.3. Perda yang merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari inisiatif DPRD merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi legislasi lembaga perwakilan rakyat daerah. Melalui perda inisiatif, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki ruang untuk merumuskan regulasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan dinamika pembangunan daerah. Keberadaan perda inisiatif ini menjadi cerminan partisipasi aktif DPRD dalam mendorong kebijakan publik yang lebih responsif, aspiratif, dan akuntabel.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Perda yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi daerah. Ke depan, keberadaan perda inisiatif diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.4. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan pada level daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas lokal yang sekaligus memengaruhi stabilitas nasional dan regional. Di tingkat daerah, diplomasi memainkan peran kunci dalam menjembatani hubungan antarwilayah, baik dalam satu negara maupun lintas batas negara. Kerja Sama Perbatasan: Daerah yang berada di perbatasan negara sering kali menjadi aktor utama dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga melalui: Kerja sama ekonomi lintas batas, seperti perdagangan perbatasan. Kerja sama budaya untuk memperkuat hubungan masyarakat lintas negara. Mekanisme penanganan bersama terhadap ancaman seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan konflik perbatasan. Pemerintah daerah dapat menjadi pelaksana diplomasi sub-nasional dengan menjalin hubungan langsung dengan pemerintah daerah negara lain melalui konsep "sister city" atau forum kerja sama wilayah tertentu.

Daerah, terutama yang strategis secara geografis seperti perbatasan, pulau terluar, atau wilayah kaya sumber daya alam, memiliki peran penting dalam pertahanan berdaya gentar. Penempatan pangkalan militer di daerah strategis untuk memastikan pengawasan wilayah perbatasan. Modernisasi fasilitas pelabuhan dan bandara untuk mendukung logistik militer dan pengawasan. Partisipasi masyarakat lokal, mendorong peran masyarakat dalam sistem pertahanan semesta melalui pelatihan bela negara dan penguatan identitas nasional. Kolaborasi dengan komunitas lokal dalam menjaga keamanan wilayah, seperti patroli perbatasan bersama antara TNI dan warga setempat.

Daerah pesisir memiliki peran dalam pengawasan jalur laut yang menjadi jalur perdagangan internasional. Teknologi seperti radar, drone, dan satelit lokal dapat dioptimalkan untuk menjaga keamanan daerah.

2.1.4.4.1. Kerjasama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City)

Kerja sama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas jejaring pembangunan daerah melalui pertukaran pengalaman, teknologi, dan peluang investasi. Sampai saat ini, jumlah kerja sama Sister City yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih sangat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kolaborasi internasional maupun antar daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan daya saing, pengembangan ekonomi lokal, serta promosi potensi unggulan daerah. Ke depan, Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan jumlah dan kualitas kerja sama Sister City yang lebih terarah dan strategis, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City) tidak hanya terbatas pada lingkup pemerintah daerah semata, tetapi juga mencakup kolaborasi lintas sektor. Melalui fasilitasi pemerintah daerah, kerja sama ini dapat melibatkan dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas budaya, hingga masyarakat luas. Dengan demikian, Sister City menjadi instrumen strategis untuk memperluas jejaring pembangunan, memperkuat daya saing ekonomi, mendorong inovasi pendidikan dan teknologi, serta mempromosikan potensi unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Lingkup kerja sama yang luas ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.129.
Jumlah Kerjasama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kerjasama Kabupaten Kembar/Bersaudara (Sister City)	6	15	29	38	54

Sumber: Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

2.1.4.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan dalam rangka memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD mengacu kepada global competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing yaitu;

- Pilar 1: Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal
- Pilar 2: infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah.
- Pilar 3: adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah
- Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro
- Pilar 5: Kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup.
- Pilar 6: Keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah
- Pilar 7: Pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar.
- Pilar 8: Tenaga kerja dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja.
- Pilar 9: Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran
- Pilar 10: Ukuran pasar memengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi
- Pilar 11: Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan
- Pilar 12: Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Adapun realisasi capaian dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan dalam tabel berikut:

Capaian indeks daya saing daerah menjadi gambaran sejauh mana potensi dan keunggulan lokal dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks daya saing, semakin besar pula peluang daerah untuk menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

Untuk perolehan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pilar yang masih relatif lemah, yaitu pilar sistem keuangan dan pilar pasar produk. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, keterbatasan akses layanan perbankan di wilayah kepulauan dan perdesaan, serta belum optimalnya peran lembaga keuangan mikro dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya intermediasi keuangan, keterbatasan modal usaha bagi UMKM, serta lambatnya pertumbuhan sektor-sektor produktif. Sementara itu, lemahnya pilar pasar produk disebabkan oleh skala usaha yang masih kecil, keterbatasan jaringan distribusi, kurangnya diversifikasi produk lokal, serta rendahnya daya saing produk dalam menghadapi persaingan regional maupun nasional.

Oleh karena itu, penguatan daya saing daerah perlu menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta dukungan terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah yang lebih kompetitif, maju, dan berkelanjutan.

Tabel 2.130.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lingkungan Pendukung					
Pilar 1 (Institusi)	1,12	3,9	4,17	4,24	4,63
Pilar 2 (Infrastruktur)	3,25	3,16	2,37	3,14	4,12
Pilar 3 (Adopsi TIK)	4,00	1,5	3,28	4,47	4,60
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	2,25	2,05	2,93	2,91	3,39
SDM					
Pilar 5 (Kesehatan)	2,5	2,62	3,62	3,62	3,53
Pilar 6 (Keterampilan)	1,95	2,87	3,2	3,29	3,94
Pilar 7 (Pasar Produk)	0,33	3,08	1,39	1,33	1,50
Pasar					
Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	3,49	3,5	2,35	2,57	2,97
Pilar 9 (Sistem Keuangan)	2,00	2,00	3,29	0,82	1,34
Pilar 10 (Ukuran Pasar)	0,33	3,00	1,15	4,37	4,40

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekosistem Inovasi					
Pilar 11 (Dinamisme Bisnis)	2,2	2,00	5,00	2,65	3,76
Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	2,00	2,14	1,23	2,46	2,65
Skor IDSD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,56	2,64	2,83	2,99	3,46

Sumber: IDSD BRIN Tahun 2025

2.1.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.131.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDIDIKAN						
1.1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	87,17%	80,93%	97,45%	96,63%	96,37%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,20%	18,41%	62,24%	76,45%	93,29%
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	53,04%	50,68%	87,94%	85,61%	98,95%
2.	KESEHATAN						
2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	89,78%	93,65%	95,04%	92,93%	97,81%
2.2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	92,60%	97,15%	95,66%	95,92%	94,82%
2.3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	96,76%	97,75%	101,24%	96,22%	97,98%
2.4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	75,27%	82,39%	85,78%	89,62%	92,22%
2.5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	28,10%	77,36%	106,62%	96,58%	100
2.6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	36,37%	63,73%	94,44%	93,71%	98,90%
2.7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	54,31%	68,67%	100,04%	94,25%	94,94%
2.8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	24,46%	56,90%	80,09%	90,54%	87,61%
2.9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	68,23%	74,52%	108,05%	96,50%	100%
2.10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	77,82%	85,43%	120,97%	93,73%	100%
2.11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	33,20%	64,40%	110,06%	97,33%	100%
2.12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	89,05%	92,28%	91,15%	95,83%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					
3.	PEKERJAAN UMUM						
3.1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	49,96%	100%	88,46%	100%	100%
3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,94%	100%	80%	39,94%	100%
4.	PERUMAHAN RAKYAT						
4.1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
4.2.	Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
5.	TRANTIBUMLINMAS						
5.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	94,99%	90,98%	100%	93,33%
5.2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	63,92%	96,30%	94,16%	100%	96,33%
5.3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	63,92%	90,16%	87,50%	100%	100%
5.4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	84,21%	98,40%	100%	97,55%
5.5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	96,30%	95,99%	100%	93,44%
6.	SOSIAL						
6.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	31,03%	75,86%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	11,05%	100%	100%	100%	100%
6.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
6.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
6.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RKPD Tahun 2025

2.1.6. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah

Kinerja setiap urusan pemerintahan adalah gambaran keberhasilan daerah dalam menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui indikator kinerja masing-masing urusan, dan dilaporkan dalam Laporan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sampai tahun 2020 -2024 dijabarkan dalam 2 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek Pelayanan umum dan masing-masing aspek didukung dengan bidang urusan dan indikator capaian. Pada aspek kesejahteraan masyarakat terbagi dalam 2 urusan yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan 6 indikator kinerja pembangunan sedangkan untuk urusan kesejahteraan social dengan 11 indikator kinerja pembangunan. Untuk aspek pelayanan umum terbagi dalam 4 bidang urusan yaitu:

- Pelayanan Urusan wajib Dasar terdiri dari 8 urusan;
- Pelayanan Urusan wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari 18 urusan;
- Pelayanan Urusan Pilihan terdiri dari 8 urusan; dan
- Penunjang urusan terdiri dari 6 urusan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus berupaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan serta menjawab isu-isu strategis yang dihadapi wilayah kepulauan, pesisir, dan daratan.

1. Bidang Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep menunjukkan tren positif dengan dukungan sektor perikanan, industri semen dan marmer, serta perdagangan dan jasa. Upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan potensi wisata bahari dan kuliner juga mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Bidang Infrastruktur dan Konektivitas

Pemerintah daerah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi laut guna memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya antara daratan dan pulau-pulau. Pembangunan sarana prasarana dasar seperti irigasi, air bersih, serta listrik juga terus didorong untuk menunjang produktivitas masyarakat dan pemerataan pembangunan.

3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Capaian signifikan ditunjukkan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana pendidikan di berbagai jenjang. Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas Puskesmas, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan program kesehatan berbasis masyarakat.

4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah daerah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir, bantuan sosial, serta penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Upaya perlindungan sosial juga diwujudkan melalui berbagai program untuk kelompok rentan, perempuan, dan anak.

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pangkep menunjukkan peningkatan dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik. Selain itu, pengembangan sistem berbasis digital juga mulai diterapkan untuk mempercepat layanan administrasi kepada masyarakat.

6. Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian pencemaran laut. Selain itu, penguatan kelembagaan kebencanaan melalui BPBD telah meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi bencana alam maupun bencana hidrometeorologi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup. Meski masih terdapat sejumlah tantangan seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur di pulau-pulau kecil, serta isu perubahan iklim, arah

kebijakan pembangunan yang ditempuh telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Pencapaian kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 – 2024 dengan berbagai indikator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	Capaian 2022	2023	2024	Ket
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	79,16	77,61	78,64	79,47	81,00	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	9,84	6,60	6,15	4,17	4,00	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	638,91	1.179,45	1.847,16	1.852,22	1.184,30	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	61,65	63,68	65,31	66,39	67,87	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	67,43	68,04	67,69	66,39	75,44	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0.59	1.80	2.50	2.97	3,72	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	6.80	16,16	11,62	11,79	28,62	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	0,39	0,98	1,04	11,69	
9	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	60.920,01	
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	168,40	168,40	168,40	165,66	159,47	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	0,27	0,37	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,21	0,53	0,81	0,84	1,14	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	311	316	317	321,72	325,27	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,69	3,46	4,93	4,75	5,00	

No.	Indikator	Satuan	Capaian					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25.662,25	27.574,71	30.481,86	32.667,18	34.607,22	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99	
5	Rasio Gini	Angka	0,345	0,363	0,334	0,325	0,317	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,31	71,81	72,41	73,23	73,87	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,12	72,25	72,62	72,87	73,11	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,20	0,22	0,24	0,38	0,44	
9	Persentase Persalinan Difasilitasi Kesehatan	Persen	61,57	89,9	94,55	97,46	98,87	
10	Prevalensi Balita Stunting	Persen	14.53	12.14	10.6	10.0	9.32	
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (<i>Treatment Coverage</i>)	Persen	n/a	62	62	64	66	
12	Proporsi Kasus Tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	88	88	88	87	85	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	89,29	73,63	96,60	100,22	99,22	
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,66	7,92	8,05	8,31	8,47	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	12,77	12,78	12,8	12,81	
16	Indeks Literasi SD	Angka	N/A	N/A	58,43	70,72	72,22	
	Indeks Literasi SMP	Angka	N/A	N/A	43,49	54,85	64,87	
	Indeks Numerasi SD	Angka	N/A	N/A	44,86	67,87	71,78	
	Indeks Numerasi SMP	Angka	N/A	N/A	28,01	56,84	64,49	
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12,32	11,91	83,22	93,66	93,99	
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	22,68	33,43	31,04	28,59	24,91	

No.	Indikator	Satuan	Capaian					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
19	Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh Pemda	Persen	100	100	100	100	100	
20	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	2,56	13,22	17,95	
21	Indeks Perlindungan Anak	Persen	61,36	58,25	60,37	57,67	73,49	
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	N/A	54,19	51,7	61,55	61,20	
23	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,499	0,513	0,456	0,440	0,424	
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,85	89,97	90,61	90,76	91,35	
25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	59,44	59,94	64,12	66,36	58,40	
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	Persen	47,77	47,04	46,43	45,95	45,65	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	45,86	42,85	42,44	45,66	42,44	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,39	0,39	0,44	0,42	0,43	
4	Persentase Pertumbuhan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Persen	11,55	14,59	42,41			
5	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Angka	3.025	3.032	3.042	3.984	4.148	
6	Persentase Koperasi Sehat	Persen	25,15	11,66	23,93	25,93	26,83	
7	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	1,27	1,64	-26,91	-22,50		
8	Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,40	6,55	6,65	6,94	6,50	
9	Nilai Tukar Nelayan	Persen	n/a	n/a	107,62	105,8	104,03	
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,85	64,43	74,66	69,98	71,17	

No.	Indikator	Satuan	Capaian					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	2.276 (Sangat Inovatif)	60,02 (Sangat Inovatif)	56,90 (Inovatif)	62,48 (Sangat Inovatif)	65,82 (Sangat Inovatif)	
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	59,25	56,67	61,67	65	76,33	
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	78,53	81,84	82,54	76,31	76,61	
11	Indeks Ekonomi Biru	Persen	n/a	n/a	n/a	87,45	-	
12	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online	Persen	100	100	100	100	100	
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	80	80	39	39	60	
14	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	n/a	n/a	5,92	6,01	n/a	
15	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	348.739.340.598	204.402.173.148	4.406.422.739.596	5.534.270.221.683	4.472.021.692.243	
16	Net Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rupiah	9.230,68	9.959,48	10.725,94	11.120,90	11.383,73	
17	Indeks Infrastruktur	Angka	n/a	3,25	3,03	3,46	3,76	
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	43,31	47,49	50,32	49,50	53,07	
17	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	Persen	50,70	51,98	24,99	28,55	27,51	
18	Persentase Desa Mandiri	Persen	0	1,54	3,08	9,23	20	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,31	0,33	0,30	0,29	0,39	
20	Tingkat Inflasi	Persen	2,13	2,26	5,81	2,89	1,77	
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	76,81	74,1197	77.707	83,6261		
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N/A	N/A	65,75	96,86	96,52	

No.	Indikator	Satuan	Capaian					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	n/a	2,11 (cukup)	2,12 (cukup)	2,31 (cukup)	2,64 (Baik)	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,49	3,51	3,60	3,65	3,71	
4	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	n/a	72,1	70,77	74,41	69,4	
5	Persentase Penilaian MCP KPK	Persen	82	84	85,6	76,12	74,76	
6	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,96 (Level 2)	3,24 (Level 3)	2,82 (Level 2)	3,00 (Level 3)	3,10 (Level 3)	
7	Nilai Evaluasi SAKIP	Angka	60,17 (CC)	60,35 (CC)	62,59 (B)	63,53 (B)	64,03 (B)	
8	Persentase Penegakan Perda	Persen	92,11	88,88	100	100	100	
9	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Anggota DPRD	Persen	14,29	14,29	14,29	14,29	8,5	
10	Persentase Tindak Kriminal yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	2,56	2,64	2,83	2,99	3,40	

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
I.	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	n/a	47.12	75.21	68.46	86.01	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	n/a	99	99.73	99.03	99.16	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	n/a	92.48	91.71	91.75	92.93	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	n/a	0	9.34	10.07	15.24	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	n/a	100	100	100	100	
6	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	n/a	n/a	43.95	41.2	60.12	
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV/S1	Persen	n/a	78.36	79.75	80.88	89.08	
8	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dilestarikan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
II.	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,75	0,73	0,72	0,64	0,76	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	33,3	33,30	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	89,78	94,42	95,04	95,05	97,81	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	92,60	97,81	95,66	97,49	94,82	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	96,76	99,05	100	100	97,98	
6	Presentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	75,27	84,05	85,78	92,34	92,22	
7	Presentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	28,10	75,49	100	100	100	
8	Presentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	36,37	61,57	94,44	99,13	98,9	
9	Presentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,31	68,35	100	97,63	94,94	
10	Presentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	24,46	57,70	79,59	93,44	87,61	
11	Presentase warga negara diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	62,23	100	100	100	100	
12	Presentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	77,82	85,44	100	100	100	
13	Presentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	33,20	62,64	100	100	100	
14	Presentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	89,05	96,03	91,15	97,17	100	
15	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	
16	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	
17	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
18	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	
19	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
III.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	62,05	63,05	40,04	40,19	40,35	
2	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Sampah Yang dikelola di TPA	Persen	0	0	0	10,61	0	
4	Persentase peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	51,786	78,39	100	100	100	
5	Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	Persen			177,81	47,27	48,21	
6	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi Baik	Persen			103,1	50,40	49,06	
7	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi Baik	Persen			26,32	19,44	32,70	
8	Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen			45,02	32,30	35,50	
9	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	Persen	73,68	74,90	69,86	62,41	57,31	
10	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi terampil, operator dan analis	Persen			23,57	34,15	53,50	
11	Persentase pemanfaatan Lahan sesuai rencana wilayah	Persen			89	79	66	
IV.	Perumahan Rakyat							
1	Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persen	3,74	4,21	4,77	17,13	28,25	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	87,5	89,18	91,92	89,85	90,32	
V.	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	90	93	95	98	100	
2	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persen	90	95	98	100	100	
VI.	Sosial							
1	Persentase potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan sosial	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen					65,56	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen					24,29	
5	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persen			100	100	100	
6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen			100	100	100	
VII.	Tenaga Kerja							
2	Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen			66,67	63,64	69,23	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	70,05	91,32	83,27	80,20	86,93	
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	5,15	30,76	27,59	38,55	40,97	
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen	5,08	2,83	2,70	2,21	2,21	
II.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	0	0	3,89	26,62	29,78	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	48,71	46,55	61,3	55,64	58,16	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	0,56	0,28	0,27	0,24	0,66	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	0	0	48,16	72,40	73,92	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	60,46	56,25	58,08	56,85	58,68	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	1,15	1,26	0,7	0,89	1,24	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	66,00	66,86	68,93	61,88	62,74	
VIII.	Pangan							
1	Presentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	0	0	0	9,93	25,45	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,0	89,1	89,3	81,4	84,3	
3	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	39,92	51,46	20,39	20,39	5,83	
4	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	0	94,73	100	96,7	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
IX.	Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	
X.	Lingkungan Hidup							
1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen		16,56	16,91	26,40	26,41	
4	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persen	100	100	100	100	100	
7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen						
8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
XI.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Persentase Kepemilikan Identis Kependudukan Digital (IKD)	Persen	n/a	n/a	n.a	n/a	11,97	
2.	persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	26,79	79,20	171,60	196	54,5	
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	persen	160,85	148,53	3.407	152	69,5	
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	persen	94,63	93,35	93,91	109	96,5	
5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	persen	55,40	56,29	3,00	127	62	
6.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	62	
7.	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	99,97	99,95	92,46	63	
8.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	n/a	100	99,79	99,29	100	
XII.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	0	0	0	0	20,00	
2	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	Desa	0	0	6,15	9,23	21,54	
3	Persentase Fasilitas Tata kelola Desa	Persen	0	0	6,15	9,23	10,77	
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	0	1,54	3,08	9,23	20,00	
XIII.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen						
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	48,71	46,55	61,3	55,64	58,16	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	0,56	0,28	0,27	0,24	0,66	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	0	0	48,16	72,40	73,92	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	60,46	56,25	58,08	56,85	58,68	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	1,15	1,26	0,7	0,89	1,24	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	66,00	66,86	68,93	61,88	62,74	
XIV.	Perhubungan							
1	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	n/a	2,42	11,96	13,59	13,59	
2	Persentase Peningkatan Kualitas dan kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	n/a	0,04	12,37	2,19	2,23	
XV.	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentasi Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentasi Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	Persen	100	100	100	100	100	
XVI.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	1,30	1,30	3,10	3,70	8,70	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	44,79	47,86	42,95	40,12	49,4	
3	Persentase Koperasi Aktif	Persen	78,69	26,96	26,87	29,22	30,12	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	18,81	18,81	18,75	18,07	0	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	9,71	10,97	12,5	13,25	15,06	
6	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Infomal ke Formal	Persen	0,05	0,09	0,09	0,07	0,06	
7	2. Pertumbuhan Wirausaha	Persen	34	9	5,8	1,9	1,8	
8	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	0,05	0,09	0,11	0,08	0,09	
XVII.	Penanaman Modal							
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rupiah	348.739.340.598	204.402.173.148	4.406.422.739.596	5.534.270.221.685	4.472.021.692.243	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	27,03	38,30	35,38	18,18	18,06	
3	Persentase Pelaku USaha yang memperoleh Izin sesuatu Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dna Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	82,98	87,69	56,82	61,11	47,06	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	98,53	
XVIII	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	100	100	100	100	107,5	
XIX.	Statistik							
1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
XX.	Persandian							
1	Persentase Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100	100	100	100	
XXI.	Kebudayaan							
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	n/a	n/a	50	75	75	
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	n/a	n/a	18,52	28,7	39,81	
5	Persentase cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	n/a	n/a	17,67	4,57	7,28	
6	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
XXII.	Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	0	0	43	66,2	72,38	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100	
XXIII.	Kearsipan							
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase Cakupan perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
XXIV	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18194	20714,6	22114,2	21706,3	22146,11	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	599149	472963,2	427486,3	311560,7	417612,10	
3	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten terhadap Perundang - Undangan	Persen	n/A	10	18,66	33	46,66	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	46,49	47	58	54	56,5	
XXV	Pariwisata							
1	Persentase berkembangnya ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persen	0%	0,12	0,12	0,12	0,12	
2	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	n/a	0,44	0,44	0,44	0,44	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang aktif dan Tervalidasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Persentase Peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
XXVI	Pertanian							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen						
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	196.245,00	1,01	1,01	0,93	1,01	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	24.033,30	1,00	1,23	1,65	1,01	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	2.741,00	1,00	1,00	1,13	0,36	
5	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	6004,83	1,02	1.005	1,01	1,00	
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS)	Persen	13.156,41	13.192,41	13.192,41	13.192,41	13.192,41	
7	Presentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Control Veteriner)	Persen	1,06	11,76	52,00	0,86	1,25	
8	Presentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	0	0	0	0	0	
9	Presentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100	100	100	100	98,48	
10	Presentase Izin Usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	
11	Presentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persen	0	0	0	0	0	
XXVI I.	Perdagangan							
1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen	11%	22%	38%	50%	61%	
2	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	86%	84,9%	87,4%	83,8%	82,8%	
3	Nilai Ekspor Barang	Persen	35,98%	36,34%	35,19%	34,34%	32,89%	
4	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Promosi Produk Lokal yang DI Fasilitasi/Dilaksanakan	Persen	38,09	31,84	40,52	22,80	28,84	
XXVIII.	Perindustrian							
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	232,49	136,27	1.762,57	22.137,08	91,32	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	0,29	1,25	24,81	40,84	36,57	
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	0,09	0,13	0,26	1,97	3,59	
XXIX	Perencanaan dan Keuangan							
1	persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	
2	persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	
3	persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	
4	persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	
5	persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang ekonomi dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	
XXX.	Keuangan							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	39,19	36,31	34,06	33,17	8,39	
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	37,79	33,16	37,09	38,74	33,84	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib pelayanan Dasar	Persen	92,27	95,11	95,13	95,1	93,35	
4	Persentase Penurunan SILPA	Persen	3,02	2,49	0,94	0,74	3,8	
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Persen	-	-	-	-	-	
XXXI	Kepegawaian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persen	N/A	93,17	87,32	89,64	99,17	
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	N/A	N/A	398,51	98,20	81,47	
3	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	N/A	N/A	71,18	68,48	25,48	
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	N/A	N/A	20,17	35,85	5,41	
XXXII	Sekretariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Laporan						
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen						
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen						
XXXIII	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	persentase	55	0	58	60,02	10	
2	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	persentase	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	persentase	100	100	100	100	100	
4	persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan	persentase	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan							
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	persentase	100	100	100	100	100	
xxxiv.	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Persen	94,12	97,15	100	100	100	
2	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	Persen	46	38	40,47	84		
xxxv.	Sekretariat Daerah							
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	
4	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	
6	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang Dilaksanakan Sesuai SOP Protokol	Persen	100	100	100	100	100	
xxxvi.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
1	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Satuan	Realisasi Tahun					K e t
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	
4	persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	
XXXV II.	URUSAN KEWILAYAHAN							
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	



Tabel 2.134.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/ *SDGs*)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1								
	Indikator 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrem.	Sosial	%	N/A	5,01	3,51	1,53	0,97
	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Sosial	%	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41
	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesehatan	%	89,29	73,63	96,6	96,85	99,67
	Indikator 1.3.1(b) Cakupan Kepesertaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	%	22,68	33,43	31,04	28,59	24,91
2								
	Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	Pangan	%	9,84	6,6	6,15	4,17	4,00
	Indikator 2.1.2* Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Pangan	%	39,92	51,46	20,39	20,39	5,83
	Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Kesehatan	%	n/a	33,1	34,2	30	25,51
	Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Kesehatan	%	5,8	4,9	3,9	4,86	3,91
	Indikator 2.2.2(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	Angka	89	89,1	89,3	81,4	84,3
	Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Kesehatan	%	14,6	14,5	10,6	9,2	7,2
3								
	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup.	Kesehatan	Per 100.000	1,05	1,46	1,48	1,09	0,97
	Indikator 3.1.2* (a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	%	90,82	90,73	94,96	96,31	98,38

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator 3.1.2* (b) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kesehatan	%	89,4	89,87	94,55	96,425	99
	Indikator 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	Per 1.000	0,19	1,09	0,92	1,46	0,75
	Indikator 3.2.1* (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	Per 1.000	3,17	2,37	1,40	2,37	0,75
	Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Kesehatan	Per 1.000	7,23	6,6	7,77	8,76	7,2
	Indikator 3.3.1. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Kesehatan	Per 1.000	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03
	Indikator 3.3.2. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk).	Kesehatan	Per 1.000	169	195	239	231	281
	Indikator 3.3.3* Angka kejadian Malaria	Kesehatan	Per 1.000	3,12	13,34	0,25	0,23	0,02
	Indikator 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kesehatan						
	Indikator 3.3.5* (a) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).	Kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Indikator 3.3.5* (b) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).	Kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Kesehatan	%	0,78	0,58	1,91		
	Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kesehatan	%	8,69	7,85	10,08	8,80	6,8
	Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Kesehatan	%	0,48	2,99	5,13	4,24	3,35
	Indikator 3.7.1* Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraception (mCPR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	31,3	9,6	31,3	25,1	26,8
	Indikator 3.7.2* Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).	Pengendalian Penduduk dan	%	31,3	9,6	31,3	25,1	26,8

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Keluarga Berencana						
	Indikator 3.7.2.(a) Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2,15	2,24	2,15	2,11	2,14
	Indikator 3.8.1(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	%	99,5	99,8	100	100	100
	Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan	%	89,29	73,63	96,6	96,85	99,67
	Indikator 3.c.1* Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Kesehatan	Per 1.000	2,56	2,8	1,64	1,69	4,3
4								
	Skor Literasi SD	Pendidikan	Nilai	N/A	41,76	47,4	53,11	55,52
	Skor Numerasi SD	Pendidikan	Nilai	N/A	27,08	37,33	45,17	51,85
	Skor Literasi SMP	Pendidikan	Nilai	N/A	49,21	46,1	49,81	62,4
	Skor Numerasi SMP	Pendidikan	Nilai	N/A	36,29	34,95	55,24	58,72
	Angka Kelulusan SD/MI	Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs	Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Tidak Sekolah (ATS) SD/MI	Pendidikan						
	Angka Tidak Sekolah (ATS) SMP/MTs	Pendidikan						
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	Pendidikan	%	0,1	0,36	0,35	0,27	0,25
	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	Pendidikan	%	0,3	1,19	1,23	0,73	0,9
	Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat (a) Perempuan/Laki-laki,	Pendidikan	%	98,6	80,93	88,89	88,97	87,84
	Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat.	Pendidikan	%	71,16	70,55	75,43	75,92	76,07
	Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (Angka melek huruf)	Pendidikan	%	109,91	63,1	98,61	97,39	98,04

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB			Urusan	Satuan	2020	2021	Capaian 2022	2023	2024
	Indikator 4.c.1* Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV/S1			Pendidikan	%	77,7	75,77	95,15	94,67	97,46
5										
	Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagn Anak	%	11,43	14,29	14,29	14,29	18,58
	Indikator 5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,04	10,38	25,01	11,56	6,88
6										
	Indikator 6.2.1* Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum			Kesehatan						67,87
	Indikator 6.2.1* (b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman			Kesehatan	SR	n/a	n/a	n/a	n/a	53,42
	Indikator 6.3.2(a) Indeks Kualitas Air (IKA)			Lingkungan Hidup	Nilai	57,5	56,67	61,67	58,33	68,33
7										
	Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita			PLN	kWh/jiwa	638,91	1.179,45	1.847,16	1.852,22	1.184,30
8										
	Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita			BPS	%	-1,69	3,46	4,93	4,75	5
	Indikator 8.1.1.(a) PDRB per kapita			BPS	Juta Rupiah	75,88	79,19	86,74	91,86	96,33
	Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka			Tenaga Kerja/BPS	Angka	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99
	Indokator 8.9.1* PAD Sektor Pariwisata			Pariwisata	Persen	11,99	1,08	1,18	69,77	3,26
	Indikator 8.9.1.(a) Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara			Pariwisata	Jumlah	10	0		59	
	Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara			Pariwisata	Jumlah	692	14,385		71,461	

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	2020	2021	Capaian 2022	2023	2024
9								
	Indikator 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Perhubungan	Jumlah	6	6	6	6	6
	Indikator 9.2.1.(a) Rasio PDRB Industri Pengolahan	BPS						
	Indikator 9.2.1.(a) Pertumbuhan PDRB industri Manufaktur	BPS						
10								
	Indikator 10.1.1.(a) Rasio Gini	BPS	Nilai	0,345	0,363	0,334	0,325	0,317
	Indikator 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persen	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41
	Indikator 10.1.1.(d) Persentase Desa Mandiri		%	0	1,00	3,08	9,23	20,00
	Indikator 10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	%	22,68	33,43	31,04	28,59	24,91
11								
	Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Perkimtan						
	Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	Lingkungan Hidup	%	n/a	6,09	6,04	4,29	11,69
	Indikator 11.6.1.(b) Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Lingkungan Hidup	Persen	52,43	52,43	54,12	55,45	52,81
	Indikator 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Nilai	78,53	81,84	82,54	76,31	76,61
12								
	Indikator 12.5.1.(a) Persentase timbunan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Lingkungan Hidup	Persen	6,8	16,16	11,62	11,79	28,62
	Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Lingkungan Hidup	Jumlah	1	1	1	1	1
13								
	Indikator 13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Lingkungan Hidup	Ton CO2 eq	975,12	1.332,96	975,12	59.539,66	37944,01142

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator 13.2.2.[a] Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Lingkungan Hidup	Ton CO2 eq	n/a	n/a	n/a	n/a	60.920,01
	Indikator 13.2.2.[b] Persentase Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Lingkungan Hidup	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	38,38
14	Tujuan TPB: Ekosistem Lautan							
	Indikator 14.7.1.(a) Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .	BPS		n/a	n/a			
16								
	Indikator 16.6.1.[a] Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indikator 16.6.1.[b] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Bag. ORTALA	Persen	60,17 (B)	60,35 (B)	62,59 (B)	63,53 (B)	64,03 (B)
	Indikator 16.6.1.[c] Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Bag. ORTALA	Persen	43,01 (C)	50,09 (CC)	53,76 (CC)	58,34 (CC)	69,62 (B)
	Indikator 16.6.2.(a) Persentase Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Bag. ORTALA	Jumlah	N/A	78,21	77,43	70,67	86,40
	Indikator 16.7.1.(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	11,43	14,29	14,29	14,29	18,58
	Indikator 16.9.1* Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	Catatan Sipil dan Kependudukan	%	94,63	93,35	93,91	109	96,5
17	Tujuan TPB: Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
	Indikator 17.1.1.[a] Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Bapenda	%	0,31	0,33	0,30	0,29	0,39

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

2.1.7. Kerjasama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga serta kerja sama dengan badan atau pemerintah luar negeri.

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Melalui kolaborasi stakeholder pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pembentukan BUMD pada era 2000-an bertujuan untuk mengembangkan investasi daerah, memanfaatkan potensi daerah dan menangkap peluang usaha serta menggali sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung pembangunan daerah dan akses permodalan bagi UMKM di Pangkajene dan Kepulauan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat BUMD keuangan dan BUMD non keuangan meliputi:

1. Bank Perkreditan Rakyat BPS Citra Mas;
2. Perseroan Daerah Mappatuwo;
3. Perusahaan Air Minum Daerah.

Permodalan BUMD yang dimaksud pada bagian ini adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham. Modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas terbagi atas saham dan pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100%. BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham. BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah. Bila pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari satu Pemerintah Daerah maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan pertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah, diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka kerangka pendanaan keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2026 – 2030 disusun berdasarkan pada analisis kapasitas fiskal daerah dan kinerja keuangan daerah tahun 2020-2024.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Salah

satu keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD meliputi realisasi penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, serta realisasi pengeluaran daerah yang mencakup belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020-2024.

Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 2020-2024 secara garis besar disajikan dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.135.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	1.348.749.080.525,93	1.319.962.741.096,01	1.380.654.053.103,44	1.504.637.511.317,91	1.545.080.230.884,74	3,92
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	196.530.900.657,27	159.407.687.393,01	163.602.765.323,44	176.623.383.839,89	228.702.852.036,76	7,74
Pendapatan Transfer	1.099.474.044.868,66	1.084.187.692.533,00	1.195.601.934.142,00	1.302.581.577.370,02	1.293.446.561.885,00	4,81
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52.744.135.000,00	76.367.361.170,00	21.449.353.638,00	25.432.550.108,00	22.910.816.962,98	-1,15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

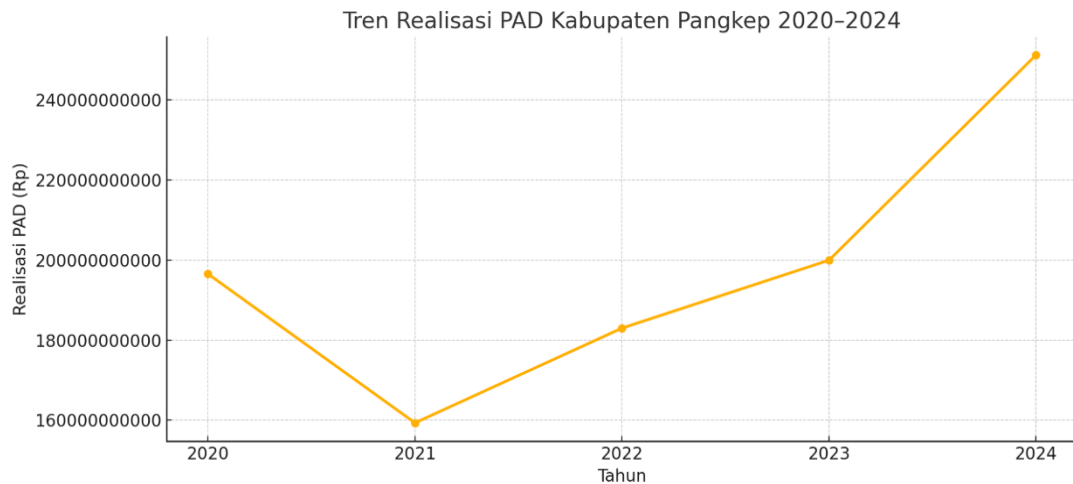
Berdasarkan diatas diperoleh gambaran bahwa Secara umum, realisasi PAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Penurunan ini merupakan respon langsung dari terjadinya pandemi COVID-19, yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, pembatasan sosial, serta penurunan daya beli yang secara otomatis berimplikasi pada menurunnya kinerja pemungutan PAD, khususnya dari sektor jasa, perdagangan, dan perizinan.

Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya pemulihan fiskal yang progresif. Pada tahun 2022, PAD mulai meningkat kembali sebesar Rp 182,9 miliar dan terus naik hingga mencapai Rp 251,2 miliar pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan upaya-upaya pemulihan pendapatan melalui:

1. Reaktivasi sektor ekonomi lokal
2. Optimalisasi pemungutan PAD
3. Peningkatan digitalisasi layanan
4. Perluasan cakupan objek pajak dan retribusi

Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi indikator penting bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki tren pertumbuhan yang positif, dan menjadi sinyal bahwa target-target pembangunan ke depan dapat didesain dengan lebih optimis, tentunya dengan tetap mempertimbangkan skenario yang realistis dan berkelanjutan.

Grafik 2.24.
Tren Realisasi PAD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan dinamika fiskal daerah yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi lokal, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan pengelolaan pendapatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Grafik di atas secara visual memperlihatkan perubahan arah pertumbuhan PAD, yang terbagi dalam dua fase utama: fase kontraksi akibat krisis dan fase pemulihan fiskal yang progresif.

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah di jelaskan disebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terutama didukung oleh pendapatan BLUD, disusul pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

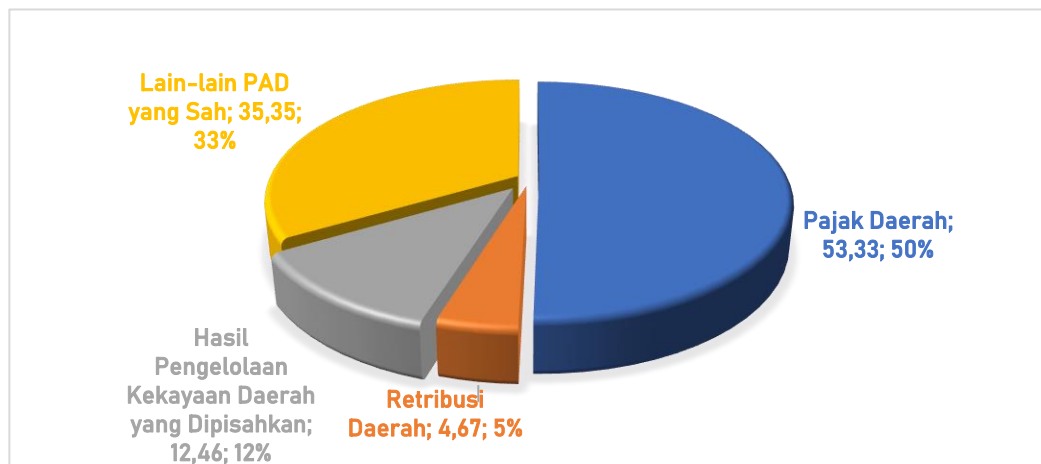
Tabel 2.136.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	196.530.900.657,27	159.407.687.393,01	163.602.765.323,44	176.623.383.839,89	228.702.852.036,76	7,74
Pendapatan Pajak daerah	80.514.014.162,05	90.323.492.905,46	90.906.902.478,70	94.937.575.968,44	136.543.303.074,16	15,32
Pendapatan Retribusi daerah	6.960.700.326,00	6.805.580.681,00	7.907.748.822,16	9.440.950.198,00	12.095.295.508,00	15,05
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.432.941.608,00	11.056.424.297,00	13.034.044.163,00	12.927.838.786,00	13.009.057.431,00	3,60
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	97.623.244.561,22	51.222.189.509,55	51.754.069.859,58	59.317.018.887,45	67.055.196.023,60	4,09

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terbesar berasal dari Pajak Daerah yaitu sebesar 53,33%. Sisanya terdiri dari Retribusi Daerah sebesar 4,67%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 12,46%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 35,35%.

Grafik 2.25.
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah dari LRA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020-2024

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat;

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer Antar-Daerah;

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Tujuan pendapatan transfer dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan transfer ini biasanya berasal dari pemerintah pusat atau provinsi dan bertujuan untuk

mendukung pembiayaan program-program prioritas daerah yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan adanya pendapatan transfer, diharapkan daerah dapat lebih optimal dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.137.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

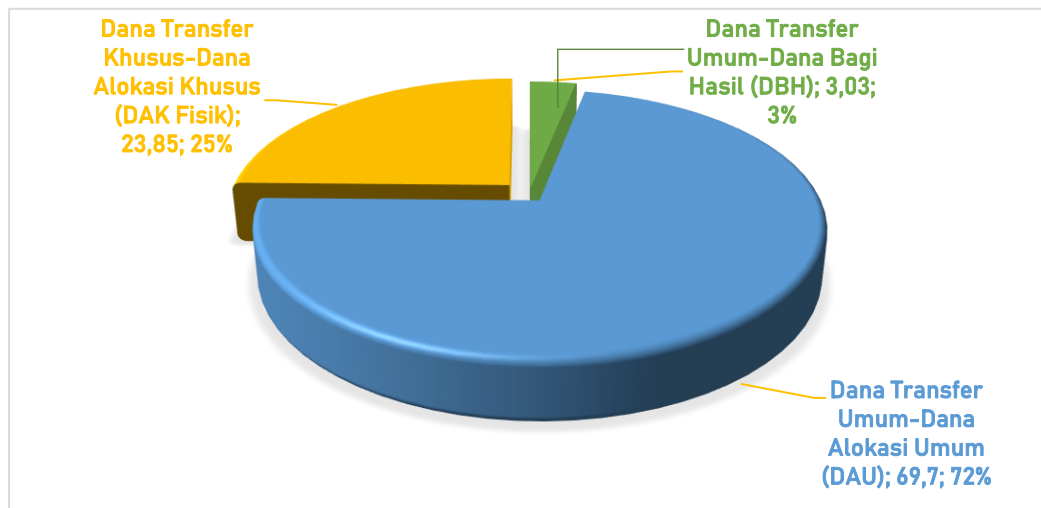
URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN TRANSFER	1.099.474.044.868,66	1.084.187.692.533,00	1.195.601.934.142,00	1.302.581.577.370,02	1.293.466.561.885,00	4,28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.873.226.496,00	1.023.786.376.321,00	1.124.565.769.140,00	1.200.455.079.345,00	1.232.775.662.031,00	4,60
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.647.150.589,00	34.757.511.226,00	46.455.568.309,00	27.085.286.494,00	25.613.641.664,00	6,89
Dana Alokasi Umum	713.388.948.000,00	701.116.154.000,00	700.159.706.297,00	746.290.902.260,00	787.431.926.000,00	2,56
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.962.940.153,00	60.250.995.002,00	134.366.736.585,00	134.234.092.286,00	124.338.989.980,00	26,05
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.669.915.933,00	148.197.640.679,00	175.589.527.949,00	209.945.327.315,00	217.489.168.427,00	11,75
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	14.675.995.821,00	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	0	7.803.305.000,00	5.757.231.000,00	17.797.293.000,00	0	-
Dana Desa	71.528.276.000,0	71.660.770.414,00	62.236.999.000,00	65.102.177.990,00	66.353.379.960,00	-1,61
Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.600.818.372,66	60.401.316.212,00	71.036.165.002,00	102.126.498.025,02	60.670.899.854,00	2,87
Pendapatan Bagi Hasil	49.130.449.372,66	48.574.545.212,00	63.247.888.002,00	76.123.891.525,02	53.106.576.104,00	4,80
Bantuan Keuangan	17.470.369.000,00	11.826.771.000,00	7.788.277.000,00	26.002.606.500,00	7.564.323.750,00	24,13
Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya						

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dari Tahun 2020 – 2024, juga mengalami fluktuasi disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022 – 2024 pertumbuhan sudah mulai stabil. Tidak bisa dipungkiri bahwa proporsi dana transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 75% bahkan menyentuh 80%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya dana transfer ke daerah sangat besar, sehingga perlu mendapatkan perhatian agar dapat dilebih dioptimalkan lagi utamanya dana bagi hasil pajak dan non pajak, seiring dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2020-2024 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 50,69% dan Dana Alokasi Umum Sebesar 26,18%, sedangkan sisanya sebesar 23,13% merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Grafik 2.26.
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah dari LRA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020-2024

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari;

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan FKTP JKN. Namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa Dana BOS masuk dalam klasifikasi Dana Alokasi Khusus maka mulai Tahun Anggaran 2022 untuk Dana BOS masuk dalam Pendapatan Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pendapatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada kategori "Lain-lain Pendapatan yang Sah" adalah pendapatan yang diperoleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, dari program JKN. Pendapatan ini berasal dari klaim pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN. Pendapatan ini diakui sebagai bagian dari pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan digunakan untuk mendukung operasional serta peningkatan layanan kesehatan di daerah.

Tabel 2.138.
Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

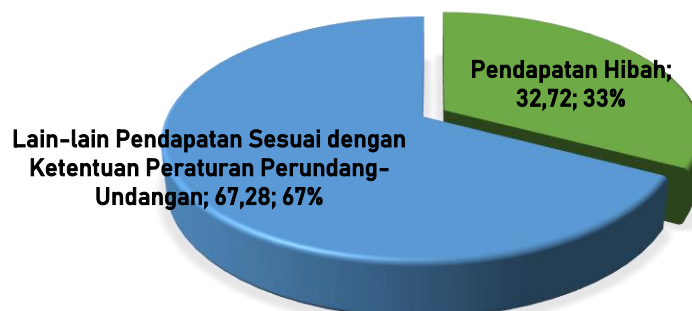
URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.744.135.000,00	76.367.361.170,00	21.449.353.638,00	25.432.550.108,00	22.910.816.962,98	-1,15
Pendapatan Hibah	52.744.135.000,00	8.373.650.000,00	1.956.000.000,00	2.002.555.272,00	100.001,98	-64,59
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	67.993.711.170,00	19.493.353.638,00	23.429.994.836,00	22.910.716.961,00	-13,34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dari tahun 2020 – 2024, pertumbuhannya sangat kecil yakni 0,25%, meskipun nilai pertumbuhannya sangat kecil namun demikian, sangat membantu menopang beberapa program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga juga perlu mendapatkan perhatian dan mengoptimalkan potensi – potensi lainnya pada lain lain pendapatan daerah yang sah.

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 67,28%. sisanya sebesar 32,72% berupa Pendapatan Hibah.

Grafik 2.27.
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: Diolah dari LRA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020-2024

2.2.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga.
- 4) Belanja Transfer yang didalamnya terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.139.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	1.355.935.703.352,36	1.340.077.005.415,47	1.400.977.711.403,52	1.510.627.332.239,25	1.490.658.527.213,49	2,47
Belanja Operasi	995.139.348.509,36	992.446.588.059,95	988.610.806.694,52	1.059.765.505.490,79	1.104.456.760.541,12	2,69
Belanja Modal	196.626.541.814,80	184.757.276.358,52	261.199.067.980,00	297.442.205.431,46	234.323.375.005,37	7,00
Belanja Tak Terduga	19.031.388.502,20	7.505.100.480,00	3.210.321.337,00	3.970.415.183,00	1.958.577.900,00	-36,20
Belanja Transfer	145.138.424.526,00	155.368.040.517,00	147.957.515.392,00	149.449.206.134,00	149.919.813.767,00	0,90

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pertumbuhan belanja daerah sangat tergantung pada pertumbuhan kapasitas fiskal daerah, bila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 3,92% maka ada selisih 1,45%, hal ini diketahui bahwa sumber penerimaan daerah selain pendapatan daerah juga terdapat penerimaan pembiayaan daerah.

Rata – rata pertumbuhan belanja daerah proporsi pertumbuhan terbesarnya ada pada belanja modal yakni sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja publik sangat menjadi perhatian pada alokasi belanja daerah.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai
Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- 2) Belanja Barang Dan Jasa
Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja Bunga
Digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja hibah
Diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Tabel 2.140.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Operasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA OPERASI	995.139.348.509,36	992.446.588.059,95	988.610.806.694,52	1.059.765.505.490,79	1.104.456.760.541,12	2,69
Belanja Pegawai	573.700.807.294,00	586.160.994.270,00	586.986.972.381,00	611.642.239.921,00	660.312.992.167,00	3,62
Belanja Barang dan Jasa	318.861.432.678,36	359.451.457.391,95	342.952.781.207,52	366.587.257.014,79	379.281.519.837,12	4,62
Belanja Bunga	514.316.875,00				215.000.000,00	-
Belanja Hibah	84.799.951.912,00	31.886.176.104,00	48.885.622.771,00	64.547.861.642,00	61.888.921.596,00	4,71
Belanja Bantuan Sosial	17.262.839.750,00	14.947.960.294,00	9.785.430.335,00	16.988.146.913,00	2.758.326.941,00	-14,53

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Proporsi terbesar dari pertumbuhan belanja operasi pada belanja Hibah sebesar 4,71%, Belanja bantuan hibah bertujuan untuk membantu masyarakat, mendukung program pemerintah, dan penanggulangan bencana.

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:

1) Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Contoh: biaya pengadaan tanah, dan lainlain.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Contoh: pengadaan kendaraan, alat pengolah data, jaringan, meubelur, dll

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak kontraktual).

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan dan Jembatan digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya. Belanja Modal Modal Jaringan, digunakan untuk

mencatat memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Belanja irigasi digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan atau Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.

Tabel 2.141.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Modal
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA MODAL	196.626.541.814,80	184.757.276.358,52	261.199.067.980,00	297.442.205.431,46	234.323.375.005,37	7,00
Belanja Modal Tanah	3,067,238,000.00	540,362,200.00	2,518,997,887.00	4,390,301,200.00	465.430.000,00	67,17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,505,380,907.80	56,831,197,768.52	65,666,679,354.00	55,003,140,097.00	54.607.117.769,37	2,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41,116,937,363.00	51,443,802,916.00	70,106,140,665.00	110,546,633,594.54	99.027.835.883,00	27,16
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	91,637,334,823.00	70,689,668,719.00	113,146,881,994.00	118,039,776,751.92	70.691.907.253,00	0,35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,299,650,721.00	5,252,244,755.00	9,676,519,580.00	9,404,188,287.00	8.829.456.200,00	7,95
Belanja Modal Aset Lainnya			83,848,500.00	58,165,501.00	701.627.900,00	268,91

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Proporsi pertumbuhan tertinggi terdapat pada belanja modal tanah sebesar 67,17%, belanja modal tanah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi – fungsi belanja modal bangunan baik berupa bangunan irigasi, bangunan gedung dan bangunan jalan dan jembatan serta jaringannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan bidang pengelolaan barang milik negara dan daerah bahwa setiap asset bangunan, harus memiliki asset sudah *clear* dan *clean*.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk keperluan mendesak yang meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Tabel 2.142.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA TAK TERDUGA	19.031.388.502,20	7.505.100.480,00	3.210.321.337,00	3.970.415.183,00	1.958.577.900,00	-36,20
Belanja Tak Terduga	19.031.388.502,20	7.505.100.480,00	3.210.321.337,00	3.970.415.183,00	1.958.577.900,00	-36,20

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Tabel 2.143.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Transfer
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA TRANSFER	145,138,424,526.00	155,368,040,517.00	147,957,515,392.00	149,449,206,134.00	149,919.813.767,00	0,90
Belanja Bagi Hasil	-	10,538,317,003.00	11,779,888,510.00	8,247,786,841.00	4.452.525.707,00	-16,05
Belanja Bantuan Keuangan	145,138,424,526.00	144,829,723,514.00	136,177,626,882.00	141,201,419,293.00	145.467.288.060,00	0,13

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel 2.144.
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penerimaan Pembiayaan	96,046,512,437.97	53,975,428,969.54	33,840,323,401.08	21,516,665,101.00	11.026.844.179,66	-41,57
Pengeluaran Pembiayaan	34,885,147,142.00	-	-	4,500,000,000.00	8.000.000.000,00	19,44
Pembiayaan Netto	61.161.365.295,97	53.975.428.969,54	33.840.323.401,08	17.016.665.101,00	3.026.844.179,66	-45,25

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Tabel 2.145.
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penerimaan Pembiayaan	96,046,512,437.97	53,975,428,969.54	33,840,323,401.08	21,516,665,101.00	11.026.844.179,66	-41,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70,361,236,275.97	53,975,428,969.54	33,840,323,401.08	13,516,665,101.00	11.026.844.179,66	34,77
Penerimaan Pinjaman Daerah	25,685,276,162.00	-	-	8,000,000,000.00	-	25,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening kas umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 2.146.
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi (Tahun)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengeluaran Pembiayaan	34,885,147,142.00	-	-	4,500,000,000.00	8.000.000.000,00	19,44
Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	-	-	4,500,000,000.00	-	-25,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	33,385,147,142.00	-	-	-	8.000.000.000,00	-

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode pencatatan 2020-2024, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.147.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	a. Aset Lancar	104.252.605.574,57	91.613.446.945,24	70.043.602.255,27	72.470.134.354,09	125.129.767.891,11
	b. Investasi Jangka Panjang	44.280.428.712,25	44.289.788.673,00	39.721.837.694,70	41.853.015.898,97	39.528.791.312,05
	c. Aset Tetap	1.908.861.518.986,02	1.849.617.571.111,86	1.861.035.349.475,38	1.891.767.588.278,29	1.861.549.996.727,17

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	d. Aset Lainnya	11.407.428.554,46	11.370.807.808,49	17.357.657.297,86	13.566.324.647,72	13.594.632.843,63
	JUMLAH ASET	2.068.801.981.827,30	1.996.891.614.538,58	1.988.158.446.723,21	2.019.657.063.179,07	2.039.803.188.773,96
2	KEWAJIBAN					
	a. Kewajiban Jangka Pendek	50.406.690.528,84	58.622.930.213,74	50.749.809.546,26	61.021.104.551,19	57.557.292.119,22
	b. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	50.406.690.528,84	58.622.930.213,74	50.749.809.546,26	61.021.104.551,19	57.557.292.119,22
3	EKUITAS	2.018.395.291.298,46	1.938.268.684.324,84	1.937.408.637.176,95	1.958.635.958.627,88	1.982.245.896.654,74
	JUMLAH EKUITAS	2.018.395.291.298,46	1.938.268.684.324,84	1.937.408.637.176,95	1.958.635.958.627,88	1.982.245.896.654,74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.068.801.981.827,30	1.996.891.614.538,58	1.988.158.446.723,21	2.019.657.063.179,07	2.039.803.188.773,96

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene, 2025

2.2.2.1. Aset

Aset Daerah Merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aset Daerah terdiri dari:

1. Aset Lancar
 - Terjadi Penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemudian meningkat pada tahun 2023 dan 2024.
2. Investasi Jangka Panjang
 - Nilai investasi jangka panjang relatif stabil di setiap periode, hal ini menunjukkan komitmen dalam menjaga investasi jangka panjangnya.
3. Aset Tetap
 - Aset tetap menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan di tahun 2024. Ini menunjukkan tidak ada perubahan besar dari tahun ke tahun.
4. Aset Lainnya
 - Terjadi sedikit fluktuasi pada aset lainnya, tetapi nilainya cenderung meningkat pada tahun 2023 dan 2024.

Secara umum, struktur Aset Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan relatif stabil dengan nilai yang relatif besar pada Aset Tetap. Pertumbuhan aset daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.148.
Pertumbuhan Aset Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	2.068.801.981.827,30	1.996.891.614.538,58	1.988.158.446.723,21	2.019.657.063.179,07	2.037.926.562.439,95
ASET LANCAR	104.252.605.574,57	91.613.446.945,24	70.043.602.255,27	72.470.134.354,09	122.862.718.514,11
Kas dan Setara Kas	53.974.742.469,54	33.861.164.650,08	13.516.665.101,00	11.026.844.179,66	57.448.191.230,91

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029



URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kas di Kas Daerah	48.359.056.648,34	31.352.708.758,86	13.147.546.520,30	8.342.507.349,12	51.192.990.140,33
Kas di Bendahara Penerimaan	12.628.000,00	74.324.150,00	50.762.600,00	576.290.600,00	37.794.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	385.762.679,00	55.759.541,00	4.173.000,00	6.900.001,00	600.100,19
Kas di BLUD	1.056.698.036,20	-	267.917.187,31	514.530.737,97	5.182.497.148,03
Kas Dana BOS	-	1.271.801.924,22	14.080.888,00	14.299.000,00	42.527.576,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.160.597.106,00	1.106.570.276,00	32.184.905,39	67.189.850,00	990.990.120,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	-	-	-	1.505.126.641,57	791.946,36
Setara Kas	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Investasi dalam Saham	-	-	-	-	-
Investasi dalam Deposito	-	-	-	-	-
Investasi dalam SUN	-	-	-	-	-
Investasi dalam SBI	-	-	-	-	-
Investasi dalam SPN	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek BLUD	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
Piutang	110.665.668.160,45	116.838.834.677,74	117.991.332.364,70	124.343.614.547,40	127.451.490.749,24
Piutang Pajak Daerah	86.686.068.074,89	87.220.698.405,18	84.990.475.662,28	86.387.139.424,84	87.154.824.781,68
Piutang Retribusi Daerah	2.347.362.901,86	2.101.938.601,86	3.027.039.237,86	4.735.902.043,86	4.924.221.232,86
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	441.724.772,00	563.744.044,00	563.744.044,00	563.744.044,00	563.744.044,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.502.580.099,00	4.012.037.749,00	4.055.163.757,86	9.633.100.649,00	9.637.390.612,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	12.668.011.209,00	21.920.494.774,00	24.334.988.559,00	22.003.807.282,00	24.153.388.975,00
Piutang Lainnya	1.019.921.103,70	1.019.921.103,70	1.019.921.103,70	1.019.921.103,70	1.017.921.103,70
Penyisihan Piutang	(69.888.163.471,47)	(72.073.453.307,01)	(74.276.648.290,40)	(76.722.197.806,61)	(78.305.609.909,84)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(69.124.630.276,10)	(71.195.969.930,16)	(73.399.164.913,55)	(75.702.276.702,91)	(77.287.688.806,14)
Penyisihan Piutang Lainnya	(763.533.195,37)	(877.483.376,85)	(877.483.376,85)	(1.019.921.103,70)	(1.017.921.103,70)

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beban Dibayar dimuka	72.081.449,86	95.512.057,62	85.898.937,46	80.846.584,03	104.539.248,65
Persediaan	9.428.276.966,19	12.891.388.866,80	12.726.354.142,51	13.741.026.849,61	16.164.107.195,15
INVESTASI JANGKA PANJANG	44.280.428.712,25	44.289.788.673,00	39.721.837.694,70	41.853.015.898,97	39.906.382.373,04
Investasi Non-Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Investasi Non-Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Permanen	44.280.428.712,25	44.289.788.673,00	39.721.837.694,70	41.853.015.898,97	39.906.382.373,04
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.280.428.712,25	44.289.788.673,00	39.721.837.694,70	41.853.015.898,97	39.906.382.373,04
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
ASET TETAP	1.908.861.518.986,02	1.849.617.571.111,86	1.861.035.349.475,38	1.891.767.588.278,29	1.861.562.828.709,17
Aset Tetap Tanah	197.279.759.302,34	198.214.127.162,71	200.681.048.915,25	207.933.654.592,45	212.073.758.071,18
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	545.887.292.178,47	599.363.564.501,03	663.023.106.187,28	725.415.924.885,92	788.986.333.945,36
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.042.186.207.198,42	1.087.540.037.291,24	1.136.822.209.884,37	1.254.724.273.673,74	1.337.305.112.904,15
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.111.026.702.280,27	2.193.888.440.641,45	2.306.154.243.075,43	2.440.488.664.108,83	2.514.619.243.433,95
Aset Tetap Lainnya	18.473.568.042,73	19.675.148.263,81	20.037.944.013,81	19.557.668.713,81	20.202.107.113,81
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.438.438.649,86	42.123.150.783,00	83.647.061.273,69	52.594.442.830,63	64.040.113.681,69
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.049.430.448.666,07)	(2.291.186.897.531,38)	(2.549.330.263.874,45)	(2.808.947.040.527,09)	(3.075.663.840.440,97)
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	11.407.428.554,46	11.370.807.808,49	17.357.657.297,86	13.566.324.647,72	13.594.632.843,63
Tagihan Jangka Panjang	102.840.874,00	101.260.874,00	3.764.144.998,00	99.260.874,00	94.760.874,00

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Tidak Berwujud	3.568.157.155,17	4.128.496.630,17	5.303.464.834,45	5.768.117.595,45	6.466.292.636,45
Aset Lain - Lain	10.278.455.144,52	9.980.162.098,15	11.559.105.473,49	11.545.175.827,81	11.581.425.827,81
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.542.024.619,23)	(2.839.111.793,83)	(3.269.058.008,08)	(3.846.229.649,54)	(4.547.846.494,63)

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.2.2. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten pangkajene dan kepulauan selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif.

Secara umum, entitas ini lebih berfokus pada kewajiban jangka pendek dan tidak memiliki utang jangka panjang. Peningkatan dan penurunan pada beberapa periode menunjukkan adanya penyesuaian operasional dalam hal pembayaran atau penambahan utang jangka pendek.

Tabel 2.149.
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	50.406.690.528,84	58.622.930.213,74	50.749.809.546,26	61.021.104.551,19	57.559.088.035,89
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	50.406.690.528,84	58.622.930.213,74	50.749.809.546,26	61.021.104.551,19	57.559.088.035,89
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	153.208.312,50	256.484.250,00	152.586.102,20	137.457.666,70	131.366.375,00
Utang Belanja dan Transfer	32.898.986.460,34	46.067.144.815,74	26.402.306.272,14	52.883.646.884,49	57.427.721.660,89
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.354.495.756,00	12.299.301.148,00	24.194.917.171,92	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.2.3. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Pemerintah Daerah Kabpaten Pangkajene dan Kepulauan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sampai 2022, Hal ini bisa disebabkan oleh Penurunan nilai aset tetap atau investasi jangka Panjang. Pada

tahun 2023 mengalami kenaikan sampai tahun 2024 yang disebabkan oleh penambahan Jumlah aset, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.150.
Ekuitas Dana
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
JUMLAH ASET	2.068.801.981.827,30	1.996.891.614.538,58	1.988.158.446.723,21	2.019.657.063.179,07	2.037.926.562.439,95
KEWAJIBAN					
JUMLAH KEWAJIBAN	50.406.690.528,84	58.622.930.213,74	50.749.809.546,26	61.021.104.551,19	57.559.088.035,89
EKUITAS					
JUMLAH EKUITAS	2.018.395.291.298,46	1.938.268.684.324,84	1.937.408.637.176,95	1.958.635.958.627,88	1.980.367.474.404,06
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.068.801.981.827,30	1.996.891.614.538,58	1.988.158.446.723,21	2.019.657.063.179,07	2.037.926.562.439,95

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan masa lalu merupakan langkah untuk menggambarkan bagaimana suatu kebijakan diterapkan di masa sebelumnya, termasuk tujuan, strategi, implementasi, serta hasil yang dicapai. Analisis ini membantu memahami efektivitas kebijakan tersebut, mengidentifikasi kekurangan atau tantangan yang dihadapi, dan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan atau penyusunan kebijakan baru yang lebih baik di masa depan.

2.2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenang. Selama periode tahun 2020 sampai 2024 pendapatan daerah kabupaten pangkajene dan Kepulauan terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain – lain Pendapata Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Proporsi Realisasi Pendapatan masa lalu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.151.
Proporsi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

KOD E	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		%	%	%	%	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14,57%	12,08%	11,85%	11,74%	14,80%
4.1.0	Pajak Daerah	5,97%	6,84%	6,58%	6,31%	8,84%
4.1.0	Retribusi Daerah	0,52%	0,52%	0,57%	0,63%	0,78%
4.1.0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,85%	0,84%	0,94%	0,86%	0,84%
4.1.0	Lain-lain PAD yang Sah	7,24%	3,88%	3,75%	3,94%	4,34%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	81,52%	82,14%	86,60%	86,57%	83,72%
4.2.0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,58%	77,56%	81,45%	79,78%	79,79%
4.2.0	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,94%	4,58%	5,15%	6,79%	3,93%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,91%	5,79%	1,55%	1,69%	1,48%
4.3.0	Pendapatan Hibah	3,91%	0,63%	0,14%	0,13%	0,00%
4.3.0	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	5,15%	1,41%	1,56%	1,48%

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan data dari tabel di atas, diketahui jika selama lima tahun terakhir proporsi struktur pendapatan daerah di dominasi oleh pendapatan transfer di komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dengan persentasi rata-rata 80 %, pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 15 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 5%. Besarnya kontribusi pada pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah dapat di artikan bahwa kemampuan keuangan fiskal kabupaten pangkajene dan kepulauan masih sangat kecil karena masih tergantung pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat.

2.2.3.2. Proporsi Belanja Daerah

Proporsi Belanja Daerah terdiri dari empat kategori utama, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Berikut adalah analisis umum untuk masing-masing kategori:

1. Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah dimulai dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bunga.

2. Belanja Modal

Proporsi Realisasi Anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah dimulai dari Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga relatif kecil dalam struktur belanja, hanya sekitar 0,56% pada 2021 dan 2022, kemudian menurun lagi pada 2023 dan 2024.

4. Belanja Transfer

Proporsi Realisasi Anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah dimulai dari Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil.

Secara keseluruhan, belanja daerah didominasi oleh Belanja Operasi, terutama pada Belanja Pegawai dan Barang Jasa. Sementara itu, Belanja Modal fokus pada pengembangan infrastruktur. Tabel Proporsi Belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.152.
Proporsi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA DAERAH	99,31%	99,61%	99,31%	99,38%	99,41%
5,1	BELANJA OPERASI	73,39%	74,06%	70,57%	70,15%	74,09%
5.1.01	Belanja Pegawai	42,31%	43,74%	41,90%	40,49%	44,30%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,52%	26,82%	24,48%	24,27%	25,44%
5.1.03	Belanja Bunga	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
5.1.05	Belanja Hibah	6,25%	2,38%	3,49%	4,27%	4,15%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,27%	1,12%	0,70%	1,12%	0,19%
5,2	BELANJA MODAL	13,82%	13,40%	17,95%	19,07%	15,13%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,23%	0,04%	0,18%	0,29%	0,03%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,80%	4,24%	4,69%	3,64%	3,66%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,03%	3,84%	5,00%	7,32%	6,64%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6,76%	5,28%	8,08%	7,81%	4,74%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,40%	0,56%	0,23%	0,26%	0,13%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,40%	0,56%	0,23%	0,26%	0,13%
5,4	BELANJA TRANSFER	10,70%	11,59%	10,56%	9,89%	10,06%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,79%	0,84%	0,55%	0,30%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10,70%	10,81%	9,72%	9,35%	9,76%

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.3.3. Analisis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan pembiayaan daerah proporsi terbesar adalah SiLPA sebagai sumber utama, kecuali pada tahun 2023 di mana terdapat kontribusi dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar 37,18%. Tidak ada aktivitas penerimaan dari Penerimaan Kembali Piutang dan Pembiayaan Lainnya dalam periode tersebut.

Tabel 2.153.
Proporsi Jenis Penerimaan Pembiayaan Terhadap Total Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73,26%	100,00%	100,00%	62,82%	100,00%
6.1.02	Pinjaman Dalam Negeri	26,74%	0,00%	0,00%	37,18%	0,00%
6.1.03	Penerimaan Kembali Piutang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu: Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tahun 2020, 2023, dan 2024 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan dengan fokus berbeda: Tahun 2020 lebih dominan untuk pelunasan pinjaman, Tahun 2023 fokus pada penyertaan modal, Tahun 2024 kembali fokus pada pembayaran pokok pinjaman.

Tabel 2.154.
Proporsi Jenis Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	4,30%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	95,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.2.04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.4. Analisis Keuangan Daerah

Analisis Keuangan Daerah merupakan proses evaluasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja, kesehatan fiskal, dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama.

2.2.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio kemandirian ini diukur dari perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah secara keseluruhan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Tahun 2020: Rasio kemandirian berada di angka 14,57%, yang merupakan salah satu rasio tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021: Terjadi penurunan menjadi 12,08%, yang diiringi dengan penurunan pada PAD dari Rp 196,5 Miliar menjadi Rp 159,4 Miliar. Tahun 2022: Rasio kemandirian sedikit menurun lagi menjadi 11,85%, walaupun terjadi peningkatan pada PAD sebesar Rp 163,6 Miliar. Ini menandakan pertumbuhan total pendapatan daerah lebih besar dibanding pertumbuhan PAD. Tahun 2023: Rasio tetap rendah di 11,74% meskipun ada peningkatan PAD ke Rp 176,6 Miliar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak cukup signifikan dibandingkan peningkatan total pendapatan daerah. Tahun 2024: Rasio kemandirian melonjak signifikan ke 14,80%, didorong oleh peningkatan drastis pada PAD yang mencapai Rp 228,7 Miliar.

Tabel 2.155.
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2020	96.530.900.657,27	1.348.749.080.525,93	14,57
2021	159.407.687.393,01	1.319.962.741.096,01	12,08
2022	163.602.765.323,44	1.380.654.053.103,44	11,85
2023	176.623.383.839,89	1.504.637.511.317,91	11,74
2024	228.702.852.036,76	1.545.080.230.884,74	14,80

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.4.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Secara umum, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih memiliki tingkat likuiditas yang stabil namun belum ideal. Rasio kas terhadap utang jangka pendek yang kurang dari 100% mengindikasikan bahwa kas saja tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjaga kestabilan arus kas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan utang jangka pendek untuk menjaga kesehatan keuangan jangka pendek.

Rasio Keuangan Likuiditas, solvabilitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.156.
Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

Rasio Lancar (Tahun)	Kas	Utang Jangka Pendek	Persentase (%)
2020	53.974.742.470	50.406.690.529	1,07
2021	33.861.164.650	58.622.930.214	0,58
2022	13.516.665.101	50.749.809.546	0,27
2023	11.026.844.180	61.021.104.551	0,18
2024	57.448.191.231	57.559.088.036	1,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.4.3. Dana Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa adalah pengeluaran pemerintah kabupaten yang diberikan kepada desa-desa di wilayahnya, sebagai bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa sejak tahun 2021 sesuai dengan alokasi target pendapatan pajak dan retribusi daerah. Realisasi Penyaluran Dana Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Pemerintah Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.157.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Pemerintah Desa
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bagi Hasil	0,00	10.538.317.003,00	11.779.888.510,00	8.247.786.841,00	4.452.525.707,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	9.400.742.203,00	10.295.280.450,00	7.310.298.051,00	3.932.848.999,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	1.137.574.800,00	1.484.608.060,00	937.488.790,00	519.676.708,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.5. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasari asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial tertentu daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas fiskal daerah yang dapat dialokasikan untuk alokasi belanja langsung daerah ke depan. Pada poin kapasitas fiskal riil ini, penganggaran sudah harus ditunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kerangka Pendanaan pada proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang dirancang secara ilmiah dan berbasis data untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dapat

dibiayai dengan baik dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan rasional dan sistematis dalam menyusun rencana pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan berdasarkan periode sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasi potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

Tabel 2.158.
Indikator Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,87	74,25	74,73	75,67	76,22	76,94	77,58
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,41	12,31	11,55 – 10,84	11,05	10,54	9,16- 8,16	8,49- 7,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,99	3,69	3,81	3,10	2,80	2,50	2,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,19	5,89	6,25	6,38	6,51	6,62
5	Rasio Gini	Angka	0,317	0,311	0,304	0,30	0,29	0,286	0,279
6	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	96,36	101,36	107,33	112,80	118,16	132,32	142,76
7	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Persen		4,99	5,01	5,04	5,06	5,09	5,11
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	38,38	39,00	40,62	40,88	41,05	47,51	49,85
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	75,44	73,91	74,12	74,33	74,54	74,76	74,97

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2025

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, Rasio Gini, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Ketujuh indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya

berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi dan sosial ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan.

Melalui capaian indikator Makro Ekonomi dan sosial daerah yang menjadi asumsi dasar, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia akan terus membaik. Indikator makro ekonomi dan sosial daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik.

2.2.5.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.5.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk pencapaian target Pendapatan Tahun 2026-2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah komponen dan analisis proyeksi pendapatan. Komponen Pendapatan Mengalami kenaikan dari tahun 2026 sampai tahun 2030 khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk Pendapatan dana Transfer diproyeksikan stagnan karena sulitnya memproyeksikan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan peraturan dana transfer yang sering berubah-ubah, juga perhitungannya berdasarkan formulasi pemerintah pusat yang penyalurannya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan lain-lain juga tidak bergantung pada kinerja daerah. Meskipun tidak memerlukan usaha langsung dalam perolehannya, Pemerintah Daerah tetap dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut, efektifitas dan efisiensi serta laporan dan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Pusat.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelumnya bersumber dari pendapatan BLUD dan Dana BOS. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan terkait pungutan atas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dicatat dalam kompone Pendapatan Asli Daerah. Dana BOS berdasarkan peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pendapatan transfer pemerintah pusat.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.159.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASLINE TAHUN	ANGGARAN TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	Pendapatan Asli Daerah	228.702.852.036,76	238.525.852.484,00	229.053.940.882,00	239.730.865.107,00	247.224.896.600,00	255.043.064.537,00	263.298.719.735,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.543.303.074,16	123.238.374.614,00	118.035.687.614,00	126.884.578.945,00	133.228.807.893,00	139.890.248.286,00	146.884.760.701,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.095.295.508,00	7.498.235.394,00	7.498.235.394,00	7.524.825.529,00	7.760.373.467,00	7.993.703.859,00	8.322.215.518,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.009.057.431,00	13.820.192.225,00	13.257.475.000,00	13.257.475.000,00	13.257.475.000,00	13.257.475.000,00	13.257.475.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.055.196.023,60	93.969.050.251,00	90.262.542.874,00	92.063.985.633,00	92.978.240.240,00	93.901.637.392,00	94.834.268.516,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.293.466.561.885,00	1.228.514.834.818,00	1.176.488.802.818,00	1.260.831.216.922,00	1.260.831.216.922,00	1.260.831.216.922,00	1.260.831.216.922,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.232.795.662.031,00	1.168.441.538.000,00	1.128.323.973.000,00	1.208.668.112.000,00	1.208.668.112.000,00	1.208.668.112.000,00	1.208.668.112.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.670.899.854,00	60.073.296.818,00	48.164.829.818,00	52.163.104.922,00	52.163.104.922,00	52.163.104.922,00	52.163.104.922,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan	22.910.816.962,98	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN	ANGGARAN TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah Yang Sah							
4.3.0 1	Pendapatan Hibah	100.001,98	-	-	-	-	-	-
4.3.0 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.910.716.961,00	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.545.080.230.884,74	1.467.040.687.302,00	1.405.542.743.700,00	1.500.562.082.029,00	1.508.056.113.522,00	1.515.874.281.459,00	1.524.129.936.657,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.5.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah mengalami kenaikan anggaran setiap tahun sesuai dengan kenaikan Pendapatan Daerah. Kelompok belanja daerah terdiri dari:

- Belanja operasi merupakan belanja terbesar dalam belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja modal merupakan belanja infrastruktur yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
- Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah jenis pengeluaran dalam anggaran daerah yang dialokasikan untuk keperluan yang sifatnya mendesak, tidak biasa, dan belum dapat diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan anggaran. Belanja tidak terduga mengalami kenaikan pada tahun 2028 dan 2029 untuk mempersiapkan pilkada serentak.
- Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke desa berdasarkan dengan proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Belanja bantuan keuangan terdiri dari belanja dana desa dan belanja alokasi dana desa.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.160.
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASLINE TAHUN	ANGGARAN TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA DAERAH							
5.1	BELANJA OPERASI	1.104.456.760.541,12	1.180.642.187.320,00	1.130.269.828.856,00	1.148.525.092.868,84	1.141.492.375.296,77	1.135.388.007.442,27	1.169.832.554.812,42
5.1.01	Belanja Pegawai	660.312.992.167,00	716.583.821.163,00	704.042.772.664,00	721.123.735.606,23	729.701.313.567,46	738.459.613.005,98	747.407.596.326,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.281.519.837,12	434.578.563.157,00	396.480.980.192,00	400.832.554.690,16	386.023.811.386,07	371.923.400.618,51	396.103.496.823,67
	Belanja Bunga	215.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	61.888.921.596,00	27.079.803.000,00	27.810.076.000,00	24.290.939.004,56	23.558.107.471,95	22.861.202.644,74	24.064.803.748,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.758.326.941,00	2.400.000.000,00	1.936.000.000,00	2.277.863.567,90	2.209.142.871,30	2.143.791.173,04	2.256.657.913,35
5.2	BELANJA MODAL	234.323.375.005,37	163.198.465.044,00	102.909.249.799,00	172.728.489.312,76	172.797.260.689,23	172.880.319.402,23	172.909.124.822,68
5.2.01	Belanja Modal Tanah	465.430.000,00	834.548.575,00	8.200.000.000,00	561.557.091,61	553.738.123,82	546.302.477,07	559.144.334,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.607.117.769,37	56.340.184.682,00	21.327.770.799,00	45.751.002.234,01	45.113.977.756,27	44.508.183.090,20	45.554.430.870,75
5.2.03	Belanja Modal	99.027.835.883,00	40.447.269.859,00	22.143.427.000,00	33.200.529.471,12	32.738.254.353,33	32.298.642.045,79	33.057.881.812,70

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN	ANGGARAN TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gedung dan Bangunan							
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.691.907.253,00	54.640.643.128,00	44.127.735.800,00	85.268.944.164,20	86.555.478.395,06	87.796.599.737,53	85.825.353.781,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.829.456.200,00	10.511.818.800,00	6.760.316.200,00	7.344.926.503,28	7.242.657.749,78	7.145.402.671,61	7.313.368.676,23
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	701.627.900,00	424.000.000,00	350.000.000,00	601.529.848,54	593.154.310,98	585.189.380,03	598.945.346,86
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.958.577.900,00	23.273.957.186,00	16.000.000.000,00	15.000.000.000,00	28.800.000.000,00	41.950.000.000,00	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1.958.577.900,00	23.273.957.186,00	16.000.000.000,00	15.000.000.000,00	28.800.000.000,00	41.950.000.000,00	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	149.919.813.767,00	157.374.625.602,00	156.363.665.045,00	159.308.499.847,40	159.966.477.536,00	160.655.954.614,50	161.388.257.021,90
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.452.525.707,00	13.073.661.002,00	12.246.832.345,00	13.440.940.447,40	14.098.918.136,00	14.788.395.214,50	15.520.697.621,90

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN	ANGGARAN TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.0 2	Belanja Bantuan Keuangan	145.467.288.060,00	144.300.964.600,00	144.116.832.700,00	145.867.559.400,00	145.867.559.400,00	145.867.559.400,00	145.867.559.400,00
	JUMLAH BELANJA	1.490.658.527.213,4 9	1.524.489.235.152,0 0	1.405.542.743.700, 00	1.495.562.082.029, 00	1.503.056.113.522, 00	1.510.874.281.459, 00	1.519.129.936.657, 00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.2.5.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2025-2029 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.0 (nol rupiah). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) setiap tahunnya.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.161.
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	Penerimaan Pembiayaan	11.026.844.179,66	57.448.547.850,00	-	-	-	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.026.844.179,66	57.448.547.850,00	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	8.000.000.000,00		-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	3.026.844.180	57.448.547.850	-	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	57.448.547.850,91	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal. Sementara itu, analisis isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Isu strategis yang merupakan bagian dari tantangan ataupun peluang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan semakin efektif. Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; (5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah

dan pelayanan publik kepada masyarakat. Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

- 1) Permasalahan aspek geografi dan demografi;
- 2) Permasalahan aspek kesejahteraan sosial;
- 3) Permasalahan aspek daya saing.
- 4) Permasalahan aspek pelayanan umum; dan

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

a. Tingginya Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Kawasan pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai KP2B seluas 13.326,96 Ha. Kawasan ini tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi lahan pertanian cukup luas, terutama pada wilayah daratan yang didominasi oleh persawahan, ladang, serta kawasan hortikultura. Sebelum adanya penetapan dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), luas lahan pertanian di Pangkajene dan Kepulauan masih relatif besar dan menjadi tulang punggung produksi pangan daerah seluas 13.326,96 Ha. Namun, tekanan alih fungsi lahan akibat pembangunan permukiman, industri, serta infrastruktur turut mengurangi ketersediaan lahan produktif dari tahun ke tahun menjadi 11.808,93 Ha.

Pada periode sebelum penetapan KP2B, luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperkirakan masih mencukupi kebutuhan produksi beras dan komoditas utama. Namun, belum adanya kepastian hukum dan tata ruang yang mengikat menyebabkan konversi lahan pertanian ke sektor non-pertanian sulit dikendalikan.

Setelah adanya kebijakan dan penetapan KP2B melalui RTRW serta integrasi ke dalam RPJMD, terjadi upaya perlindungan lahan pertanian agar tidak semakin menyusut. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai mempertegas zonasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, melakukan pendataan dan pemetaan lahan, serta mendorong peningkatan produktivitas melalui teknologi dan diversifikasi usaha tani.

Meskipun demikian, dalam kondisi sesudah penetapan KP2B, masih terlihat adanya tantangan berupa:

- Laju konversi lahan yang tetap terjadi pada titik-titik tertentu, khususnya di sekitar kawasan perkotaan dan jalur strategis.

- Terbatasnya sumber daya dalam pengawasan dan penegakan aturan perlindungan lahan pertanian.
- Kebutuhan sinkronisasi antara dokumen RTRW, RDTR, serta kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, secara umum dapat digambarkan bahwa sebelum KP2B, luas kawasan pertanian masih relatif besar, namun rentan terhadap alih fungsi karena lemahnya perlindungan hukum dan tata ruang. Sesudah KP2B terdapat penetapan kawasan yang lebih jelas, upaya perlindungan lebih kuat, meski tekanan alih fungsi tetap menjadi tantangan utama yang harus dikelola secara berkelanjutan.

b. Rendahnya Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman

Rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercermin dari rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman. Permasalahan akses sanitasi aman bagi rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi kurangnya fasilitas sanitasi yang layak, seperti kloset leher angsa dan tangki septik yang terawat, serta adanya kebiasaan membuang sampah di saluran pembuangan yang menyebabkan banjir saat musim hujan. Disisi lain belum adanya pengelolaan biopori di wilayah kepulauan untuk resapan air tanah.

c. Masih Rendahnya Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Air Siap Minum

Rendahnya rumah tangga dengan akses air siap minum perpipaan tercermin dari data pada tahun 2024 yang baru mencapai 67,87%. Akses air minum di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Pangkajene dan Kepulauan. Sebagian besar pulau di Pangkajene dan Kepulauan tidak memiliki sumber air tawar yang memadai. Sumur gali yang digunakan oleh masyarakat sering kali menghasilkan air dengan kadar garam tinggi, terutama saat musim kemarau, akibat intrusi air laut. Banyak desa di wilayah kepulauan belum terlayani oleh jaringan air minum. Hal ini menyebabkan masyarakat mengandalkan sumber air alternatif yang sering kali tidak memenuhi standar kesehatan. Beberapa pulau mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, fasilitas penampungan yang ada sering kali tidak terawat dengan baik, bocor, atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau.

d. Belum Optimal Cakupan Layanan Pengumpulan Sampah

Cakupan layanan pengumpulan sampah yang masih rendah dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan sampah belum memadai serta rumah tangga yang masih membuang sampah secara tidak terkontrol. Data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini belum tersedia. Begitupun untuk wilayah kepulauan yaitu belum ada tatakelola penanganan sampah di wilayah kepulauan.

e. Masih Tingginya Kerentanan Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilihat dari kondisi geografis, geologi, demografi, ekonomi, topografi, hidrologi dan klimatologi menjadikan daerah ini rawan terhadap berbagai bencana. Berdasarkan data kejadian bencana yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - BNPB dan data BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang tahun 2015-2024, terdapat 5 (lima) jenis kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kelima bencana tersebut adalah cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, dan gempa. bencana cuaca ekstrim dan banjir merupakan bencana dengan intensitas tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terlebih pada 10 tahun terakhir yaitu masing-masing sebanyak 212 kali kejadian dan 80 kali kejadian bencana. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang maka bencana yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpotensi menimbulkan dampak baik berupa korban jiwa, kerugian ekonomi, kerugian fisik, hingga kerusakan lingkungan. Belum adanya mitigasi bencana yang responsif gender dan inklusif. Dengan demikian, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membutuhkan upaya perencanaan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis yang dapat meminimalkan risiko bencana.

f. Belum Optimalnya Penurunan Emisi GRK

Belum optimalnya upaya pembangunan rendah karbon untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tercermin dari transportasi dan industri masih bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil, belum ada sistem transportasi massal terintegrasi antar moda untuk mereduksi dampak emisi gas buang kendaraan, serta belum adanya rencana pentahapan penurunan emisi GRK secara menyeluruh dan terintegrasi yang didukung ketersediaan data total emisi.

2.3.1.2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Belum optimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi tercermin dari ketidakadilan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya antar 17 sektor lapangan usaha. Sektor-sektor tertentu mengalami kelebihan kapasitas disisi lain beberapa sektor tidak berkembang secara optimal, yang menyebabkan ketimpangan dalam kontribusi terhadap perekonomian kabupaten serta menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan peningkatan sebesar 5% pada tahun 2024, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp20,19 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat akselerasi dan pemerataan ekonomi di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pertumbuhan ekonomi Pangkajene dan Kepulauan masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, yang menyumbang sekitar 42,85% terhadap PDRB. Ketergantungan ini membuat

ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi di sektor tersebut dan kurangnya diversifikasi dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan.

b. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan salah satu tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah kurang efektifnya penanganan kemiskinan sebagai dampak beragamnya data kemiskinan dari berbagai sumber otoritas yang mempunyai parameter dan metodologi pengukuran kemiskinan berbeda satu sama lain, belum optimalnya intervensi penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berdasarkan strategi penanganan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, belum optimalnya aksesibilitas layanan sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi kondisi geografis, serta belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan dengan basis data yang tepat dan terupdate harus menjadi komitmen nyata oleh seluruh pemangku tanggungjawab, baik pemerintah maupun non pemerintah.

c. Belum Optimalnya Penanggulangan Pengangguran

Belum optimalnya penanggulangan pengangguran tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada pada angka 3,98 tahun 2024 serta belum turun signifikan. Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi. Begitu juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan TPAK Perempuan yang belum optimal terindikasi dari masih terjadinya ketidaksetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. TPAK secara keseluruhan memiliki selisih 65,29% yakni masing-masing TPAK laki-laki dan perempuan sekitar 85,21% sedangkan TPAK perempuan saja 55,64%. Hal tersebut menunjukkan bahwa TPAK laki-laki adalah dua kali lebih tinggi daripada TPAK perempuan.

d. Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang belum optimal ditandai oleh pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang cenderung meningkat namun dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di urutan ke 21 dari 24 Kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, serta masih

menyisakan kesenjangan UHH penduduk laki-laki dan perempuan, dimana UHH perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Indikasi lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) 134/100.000 kelahiran hidup lebih tinggi dari target nasional, Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi mencapai 10/1000 kelahiran hidup, kasus TBC yang terus meningkat, dan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional yang baru mencapai 81,68 persen. Disamping itu, faktor kebiasaan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang juga berpengaruh terhadap UHH.

Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh kasus kematian ibu di Pangkajene dan Kepulauan sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, infeksi, dan komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, kasus kematian bayi disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, berat badan lahir rendah dan berbagai penyebab lainnya, serta prevalensi stunting yang cenderung meningkat turut berkontribusi terhadap capaian UHH di Pangkajene dan Kepulauan. Faktor aksesibilitas juga mempengaruhi kedua hal tersebut. Meningkatnya kasus stunting diantaranya disebabkan oleh asupan makanan bergizi yang kurang dan penyakit infeksi yang berulang. Kasus TBC yang terus meningkat disebabkan lingkungan hidup yang padat, sanitasi yang kurang memadai, pelacakan dan screening belum merata serta kepatuhan pengobatan yang belum optimal. Faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan masyarakat, kemudahan memperoleh informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan, seringkali menjadi penyebab kebiasaan atau gaya hidup tidak sehat.

Mencermati kondisi tersebut penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana kesehatan Rumah Sakit Rujukan terutama di kepulauan dan wilayah sulit akses maupun pemerataan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

e. Kualitas Pendidikan Masih Rendah dan Layanan Pendidikan Belum Merata

Permasalahan kualitas pendidikan yang rendah dan pelayanan pendidikan yang tidak merata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor yang menyebabkan meliputi ketidakmerataan infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan juga keterbatasan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil.

Belum Optimalnya RLS dan HLS tersebut dipengaruhi oleh capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang terlihat dari masih banyaknya anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 13 tahun, sementara disisi lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan capaian layanan pendidikan adalah 100 % pada semua kelompok usia/jenjang pendidikan. Beberapa kondisi yang berpengaruh terhadap capaian kinerja aspek layanan pendidikan antara lain kuantitas dan kualitas pendidik yang belum merata dan memadai; sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah termasuk penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, sistem pendidikan yang dinamis, keterbatasan ekonomi serta

kondisi sosial budaya; link and match antara tenaga kerja dari dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) masih relatif kurang; masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, dan rendahnya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/ penyandang disabilitas.

Hal yang turut mempengaruhi kondisi tersebut yaitu kurangnya peningkatan kompetensi pendidik, tingkat adaptivitas terhadap perubahan sistem pendidikan yang relatif rendah, rendahnya motivasi anak untuk bersekolah yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal keluarga dan lingkungan, sistem pendidikan vokasi/kurikulum vokasi masih belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, biaya pendidikan tinggi yang masih relatif tinggi, siswa lulusan pendidikan menengah lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan tinggi.

f. Masih Rendahnya Tingkat Numerasi SD dan SMP

Siswa/murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP kabupaten pangkajene dan kepulauan kemampuan numerasinya masih rendah. Ini dapat dilihat dari nilai indeks numerasi tingkat SD sebesar 27,08 atau kategori sedang. Sedangkan pada tingkat SMP sebesar 36,29 atau kategori kurang.

g. Belum Optimalnya Perwujudan Keluarga dan Generasi Berkualitas, serta Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Pembangunan keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi program-program yang telah dirancang. Meskipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan, beberapa permasalahan utama masih perlu mendapat perhatian serius. Pembangunan keluarga yang belum optimal tercermin dari dari angka Indeks Pembangunan Keluarga yang pada tahun 2021 sebesar 54,19 dan pada tahun 2024 sebesar 61,20. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan adanya penurunan jumlah akseptor KB dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa program KB belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya program KB dan pembangunan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan, serta minimnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung program-program tersebut.

Belum optimalnya perlindungan anak terindikasi dari angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 yang masih berada pada angka 57,67. Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum mencapai tingkat optimal, yang mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dapat dilihat dari masih Tingginya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta minimnya layanan pendukung. Praktik pernikahan anak di Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan masih cukup tinggi, meskipun telah terjadi penurunan. Dispensasi pernikahan anak menurun dari 165 kasus pada tahun 2022 menjadi 68 kasus pada tahun 2024. Faktor-faktor yang mendorong praktik ini meliputi kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, serta perjudian.

Kesetaraan gender di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian keadilan dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 sebesar 0,424, turun 0,089 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,513 dan jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami penurunan yang fluktuatif. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 8–9% anggota parlemen di Pangkajene dan Kepulauan adalah perempuan, sementara laki-laki mendominasi dengan 91–92% keterwakilan. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik di tingkat daerah. Perempuan di wilayah pedesaan Pangkajene dan Kepulauan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan berbayar dan tidak berbayar dibandingkan laki-laki. Mereka juga memikul tanggung jawab utama dalam pekerjaan domestik dan perawatan keluarga, yang sering kali tidak dihargai secara ekonomi serta terbatasnya akses perempuan pada lapangan dan peluang kerja. Dalam konteks pembangunan kedepan, optimalisasi peningkatan kualitas keluarga dan generasi, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial patut menjadi perhatian.

2.3.1.3. Permasalahan dari Aspek daya Saing Daerah

a. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kedua konsep tersebut. Ekonomi hijau di Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Namun, tantangan masih ada, termasuk keterbatasan infrastruktur ramah lingkungan, kurangnya integrasi lintas sektor, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi hijau. Dengan wilayah pesisir dan kepulauan yang luas, Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Namun, penerapan ekonomi biru masih menghadapi hambatan seperti kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan akses pasar, dan perlunya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Strategi penerapan ekonomi biru juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sambil memanfaatkan potensi ekonomi laut secara optimal.

2.3.1.4. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan dari aspek pelayanan umum disebabkan oleh pendahnya kualitas pelayanan publik tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 menempati IPP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada kategori “cukup”, yang merupakan kategori sebesar 70,67 atau masuk dalam zona kuning. IPP yang masih rendah dari sisi standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi. Begitupula dengan akses layanan publik belum ramah terhadap perempuan dan disabilitas, akses layanan publik masih sulit dijangkau bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan pegunungan serta belum meratanya layanan umum berbasis digital di wilayah Kepulauan dan wilayah pegunungan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi optimalisasi layanan digital dan tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum maksimal tercermin dari penilaian indeks SPBE yang pada tahun 2024 masuk kategori “BAIK” dengan nilai 2,64. Indeks SPBE yang masih rendah yang juga diindikasikan dari belum dilakukannya proses reviu dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan SPBE secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti. Sebagai daerah kepulauan, Pangkajene dan Kepulauan menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Sistem informasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terintegrasi secara menyeluruh, menyebabkan duplikasi data dan proses yang tidak efisien.

Hal tersebut dapat dilihat dari capaian pada tahun 2024, nilai SAKIP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat menjadi 64,03 dengan kategori “B” dari sebelumnya 63,53 dengan kategori “B”. Nilai ini menginterpretasikan, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Masih rendahnya integritas tercermin dari nilai Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tahun 2024, indeks SPI turun 5,41 poin menjadi 69,40 atau masuk dalam kategori “waspada”. Rendahnya penilaian integritas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercermin dalam nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.3.1.5. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan gambaran umum serta permasalahan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, berikut merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat

1) Pendidikan

1. Masih terdapat sarana dan prasarana lembaga PAUD yang kurang optimal.
2. Masih belum meratanya keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Masih terdapat sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah yang belum sesuai standar.
4. Rendahnya angka partisipasi sekolah di kepulauan (putus sekolah) khususnya perempuan dan disabilitas.
5. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi.
6. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Anak Usia Dini
7. Kurangnya motivasi untuk menyelesaikan pendidikan kesetaraan
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/SMP/MTs yang masih rendah.
9. Angka Pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/SMP/MTs yang belum optimal.
10. Angka Partisipasi Sekolah (APT) SD yang belum tercapai Angka Putus Sekolah (APTs) SD/SMP/MTs yang masih rendah
11. Angka Melek Huruf yang belum tercapai Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, dan jenjang SMP/MTs/Paket B yang belum tercapai.

2) Kesehatan

1. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
3. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
5. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal.
6. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain, HIV/AIDS, TB, dll., dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll.
7. Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif).
8. Terbatasnya layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang layak dan aksesibel bagi perempuan dan penyandang disabilitas
9. Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan masih belum inklusif untuk penyandang disabilitas

10. Jumlah tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga (pasien) yang dilayani.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
2. Belum terpenuhinya capaian pengelolaan sumberdaya air dan kinerja sistem drainase perkotaan;
3. Belum terpenuhinya capaian kualitas jasa konstruksi;
4. Belum terpenuhinya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari;
5. Belum terpenuhinya capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
6. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan bangunan gedung;
7. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.
8. Belum maksimalnya fasilitas pendukung bagi disabilitas di beberapa gedung pemerintah dan swasta

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman.
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni.
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi.
4. Meningkatnya potensi bencana/bahaya kebakaran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta aktifitas pada kawasan permukiman, perdagangan, dan industri.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
2. Masih terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Masih kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan disabilitas
4. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
5. Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

6) Sosial

1. Perlunya update pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi serta update pendataan masyarakat, agar bantuan sosial tepat sasaran.
2. Masih ditemukannya PMKS yang bukan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum memproduksi.
5. Belum maksimalnya pelibatan perempuan miskin dan disabilitas dalam pendataan dan pemanfaatan program-program layanan sosial kemasyarakatan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

7) Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran.
2. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.
3. Kurangnya soft skill tenaga kerja lokal Pangkajene dan Kepulauan dalam dunia kerja.
4. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja.
5. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama);
6. Masih adanya perusahaan yang belum diperiksa dan belum mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3, sementara kewenangan pengawasan tersebut di Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Belum maksimalnya peningkatan *life skill* bagi perempuan dan disabilitas sesuai kebutuhannya;
8. Belum maksimalnya pendataan pencari kerja bagi usia kerja di wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan;
9. Minimnya perlindungan sosial bagi perempuan pekerja dan penyandang disabilitas pekerja.

8) Penanaman Modal

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Masih kurang optimalnya pertumbuhan izin realisasi investasi.
3. Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK, yang terintegrasi secara nasional.

9) Kepemudaan dan Olahraga

1. Organisasi pemuda yang aktif belum optimal;
2. Masih kurangnya wirausaha muda;
3. Belum Optimalnya pembinaan pada seluruh cabang olahraga;
4. Kurangnya pelatih yang bersertifikasi;
5. Masih kurangnya pembinaan atlet muda;
6. Kurangnya atlet yang berprestasi;
7. Masih kurangnya prestasi dari semua cabang olahraga;
8. Kurangnya dukungan untuk penguatan perempuan muda dalam pengembangan lifeskill;
9. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga di wilayah kepulauan dan pegunungan.

10) Kebudayaan

1. Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
2. Masih kurangnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi;
3. Masih kurangnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu;
4. Masih kurangnya partisipasi dan pelibatan perempuan dan disabilitas dalam kegiatan kebudayaan.

11) Perpustakaan

1. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat;
2. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
3. Masih minimnya fasilitas umum baca tulis/literasi di wilayah kepulauan.

12) Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

13) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro khususnya UMKM perempuan dan disabilitas;
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan ijin edar Badan POM;
3. Masih ada koperasi belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;
4. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan sebuah lembaga koperasi;
5. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional;
6. Kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

14) Statistik

1. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.

15) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan trafficking, perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kekerasan seksual;
2. Rendahnya keterwakilan perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan pembangunan;
3. Kesadaran terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih rendah;
4. Tingkat pendidikan dan putus sekolah perempuan masih tinggi;
5. Masih tingginya pekerja anak;

6. Ketersediaan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif gender dan inklusif masih terbatas;
7. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal khususnya anggaran untuk pelaku UMKM perempuan dan perijinan usaha.

16) Pangan

1. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama;
2. Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita;
3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, belum optimal;
4. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.

17) Pertanian

1. Persentase luas lahan bersertifikat dari jumlah luas wilayah masih rendah;
2. Penyelesaian izin lokasi yang belum optimal;
3. Penyediaan tanah dan / atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain Pemerintah Propinsi, BPN, dll) terkait proses pengumpulan dan verifikasi data;
4. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

18) Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, mengingat masih adanya tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif;
6. Masih adanya kegiatan /usaha yang belum menerapkan konservasi energi;
7. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi.

19) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran;
2. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian;
3. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Belum semua warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang wajib ber-KTP memiliki KTP;
5. Masih adanya kecamatan yang memproses dokumen administrasi kependudukan tidak sesuai dengan SOP;
6. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan masih kurang;
7. Layanan administrasi dan kependudukan masih sulit dijangkau bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan pegunungan;

8. Belum meratanya layanan umum berbasis digital di wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan.

20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kualitas tata kelola pemerintahan desa belum merata.
2. Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan masih terbatas.
3. Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya efektif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan.
4. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pengawasan masih rendah.
5. Kelembagaan desa, BUMDes, dan lembaga kemasyarakatan desa belum berjalan optimal.
6. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah masih lemah.
7. Inovasi desa dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal belum berkembang secara signifikan.

21) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi;
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun;
4. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah;
5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi belum optimal;
6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB masih rendah;
7. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB masih rendah;
8. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB masih rendah;
9. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan belum optimal;
10. Minimnya informasi terkait dengan keamanan dan keselamatan penggunaan alat kontrasepsi.

22) Perhubungan

1. Arus penumpang angkutan umum yang semakin menurun;
2. Kurangnya izin trayek;
3. Orang/ barang yang terangkut pada angkutan umum yang semakin menurun;
4. orang/ barang yang melalui dermaga/ bandara/ terminal yang semakin menurun;
5. Masih kurangnya fasilitas dermaga untuk wilayah kepulauan;
6. Belum ada infrastruktur dermaga yang mudah di akses terhadap disabilitas, perempuan, anak dan Lansia.

23) Komunikasi dan Informatika serta Persandian

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan maupun di pegunungan dan kepulauan.
2. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta. Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung data skala kota

yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih).

3. Belum maksimalnya infrastruktur TI di wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan.

Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar

24) Pariwisata

1. Masih terbatasnya kunjungan wisata
2. Masih rendahnya capaian PAD sektor pariwisata
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata.
4. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.
5. Masih rendahnya individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang diperoleh dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion, rumah kreatif handicraft, dan rumah kreatif kuliner.
6. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan legalisasi usaha khususnya perempuan dan disabilitas.

25) Pertanian

1. Masih kurangnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB.
2. Masih kurangnya kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB.
3. Masih kurangnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.
4. Masih kurangnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB.
5. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan.
6. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan.
7. Masih terdapat pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang belum mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses budidaya.
8. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.
9. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.

26) Kelautan dan Perikanan

1. Masih kurangnya produksi perikanan;
2. Konsumsi ikan yang masih rendah;
3. Belum optimalnya jumlah kelompok nelayan yang dibina;
4. Nilai tukar nelayan yang masih rendah;
5. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;
6. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan;
7. Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam.

27) Perdagangan

1. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.
2. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.
3. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran terhadap produk-produk tersebut;
4. Kurangnya koordinasi dan peran PD Pasar sebagai BUMD yang mengelola sebagian besar pasar tradisional dalam hal pemantauan harga pasar dan peningkatan kualitas pasar tradisional.

28) Perindustrian

1. Kelompok pengrajin yang dibina masih belum optimal;
2. Belum maksimalnya pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Perempuan dan disabilitas.

29) Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase rumah tangga pengguna listrik yang masih perlu ditingkatkan;
2. Rasio ketersediaan daya listrik yang belum optimal;
3. Kurangnya pemanfaatan energi terbarukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

30) Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

1. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama.
2. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas
4. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kabupaten dan kondisi masyarakat.
5. Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar.
6. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.

31) Keuangan

1. Masih adanya piutang pendapatan daerah yang belum tertagih.
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pendapatan dari dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.

32) Pengawasan

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

33) Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal.
3. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.
4. Persentase Implementasi rencana kelitbangan yang masih perlu ditingkatkan.
5. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal dimanfaatkan oleh OPD.
6. Kurangnya PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

34) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

1. Masih rendahnya ASN yang mengikuti Pelatihan formal
2. Masih rendahnya Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
3. Masih rendahnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.
4. Masih rendahnya Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan adalah masalah atau kondisi yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan rencana pembangunan. Isu strategis akan membantu untuk fokus pada masalah yang krusial sehingga pengambilan kebijakan/ keputusan akan tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efektif, dan pencegahan risiko pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, dengan memperhatikan kondisi isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 dirumuskan melalui pengelompokan isu sebagai berikut

1. Kemiskinan dan Kesenjangan

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih relatif tinggi. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk menjadi persoalan utama kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu, perlu pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kelembagaan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah. Paling utama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penyediaan data kemiskinan yang update secara berkala. Validasi terhadap data kemiskinan masih sering menjadi persoalan mendasar untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang cenderung tidak kembali menurun sejak tahun 2020 menunjukkan tingginya kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk. Beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara lain kualitas pendidikan

dan kepemilikan keterampilan penduduk yang tidak merata. Orang dengan pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, sementara itu juga sebaliknya. Kemudian juga termasuk kemampuan mengakses terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan teknologi. Sementara itu, dari sisi pengangguran masih relatif tinggi jika melihat total jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengangguran memiliki dampak yang luas dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik pada individu, keluarga, masyarakat, maupun ekonomi secara keseluruhan. Secara ekonomi, pengangguran menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada permintaan barang dan jasa, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara sosial, lebih ekstrem pengangguran berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan, karena individu yang putus asa mungkin mencari cara ilegal untuk mendapatkan pendapatan. Lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu memperluas akses penduduk usia kerja, terutama pada lulusan baru terhadap program pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga meningkatkan kerjasama dengan Industri. Pelibatan sektor swasta menjadi penting dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan untuk memastikan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Memperluas akses terhadap layanan dasar, memastikan akses universal terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan dan pendampingan kepada UMKM dan sektor informal untuk meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja. Menerapkan kebijakan afirmatif melalui penerapan kebijakan afirmatif untuk membantu kelompok marginal dan prasejahtera agar mendapatkan akses yang lebih luas kepada peluang ekonomi dan pembangunan.

2. Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Global

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel-variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, dan Ekspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan) mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan.

Isu strategis ketidakstabilan ekonomi makro dan global dapat berdampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sebagai daerah dengan sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata bahari, dan pertanian, ketidakstabilan ini memengaruhi berbagai aspek ekonomi lokal. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga komoditas global memengaruhi daya saing produk ekspor Pangkajene dan Kepulauan, seperti hasil laut dan tambang. Harga bahan baku impor untuk kebutuhan produksi juga menjadi lebih mahal. Penurunan permintaan global dapat berdampak langsung pada penjualan produk perikanan Pangkajene dan Kepulauan di pasar internasional. Ketidakstabilan

ekonomi global sering kali menyebabkan gangguan pada rantai pasok barang dan jasa, yang memengaruhi ketersediaan bahan baku atau barang penting untuk sektor produksi lokal. Inflasi yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi makro mengurangi daya beli masyarakat, sehingga memengaruhi konsumsi domestik dan permintaan terhadap produk lokal.

Tingkat stabilitas ekonomi makro Pangkajene dan Kepulauan relatif rendah, terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

3. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar

Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dan pendidikan dasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah. Sementara itu, pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pada Bidang Kesehatan, penyelesaian permasalahan difokuskan pada penurunan kasus kematian ibu, bayi dan balita, pengelolaan kesehatan lingkungan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan pertama, peningkatan cakupan TTU yang memenuhi syarat *higiene* sanitasi, peningkatan pengendalian DBD, optimalisasi upaya KIE baik dari WPA, LSM, KDS dan stakeholder, meningkatkan PHBS dan meningkatkan jaminan kesehatan pangan yang dimiliki oleh pelaku usaha/ industri makanan. Bidang Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan fokus pada penyelesaian anak putus sekolah pada satuan pendidikan dasar, peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini, peningkatan ketersediaan bersertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan PAUD dan pendidikan non formal serta pemerataan sarana prasarana pada satuan pendidikan. Selain itu, perlu memperhatikan terkait pengembangan literasi masyarakat, karena literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman dan kemampuan menggunakan informasi dalam konteks kehidupan sehari-hari.

4. Pengelolaan dan Pelestarian Budaya Daerah

Pengembangan budaya dan pariwisata daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi isu strategis dalam lima tahun ke depan karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik kunjungan ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pencapaian pengelolaan kebudayaan yang

belum optimal terutama dalam pengembangan obyek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, peningkatan daya tarik museum dan pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengacu pada kekayaan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengembangan pada 10 obyek pemajuan kebudayaan pada generasi muda penting terus dilakukan karena menjadi bagian penting dari identitas suatu daerah dan membantu memperkuat rasa kebanggaan terhadap daerah itu sendiri. Upaya pemajuan kebudayaan seperti pengenalan tradisi lisan, pengetahuan tradisional, kesenian, permainan tradisional tidak hanya sebatas pada event sendiri, tapi juga dapat dipadukan dengan berbagai event lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengembangan kegiatan pemajuan kebudayaan dapat lebih ditekankan pada berbagai aktivitas di kelompok satuan pendidikan. Hal tersebut guna membantu mendidik generasi muda tentang sejarah dan tradisi, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang akar budaya daerah.

Pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dikolaborasikan dengan berbagai penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Kolaborasi tersebut sebagai bagian dari mempromosikan kekayaan budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Pemaduan kebudayaan dan pariwisata dapat dilakukan melalui kegiatan festival budaya dan kesenian, pengembangan desa wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya dan kerjasama dengan para seniman lokal.

5. Kesenjangan Gender, Belum Optimalnya Perlindungan Anak dan Perempuan serta Penyandang Disabilitas

Isu kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan, serta penyandang disabilitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan tantangan sosial yang signifikan. Isu-isu ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek kebijakan, infrastruktur, dan kesadaran publik. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi tantangan serius dalam memastikan pembangunan yang adil dan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, khususnya yang berada di wilayah kepulauan dan pegunungan. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi masih nyata. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan belum memadai, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum tertangani secara sistematis. Layanan dasar seperti kesehatan reproduksi dan kesehatan mental belum inklusif, dan peran perempuan serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan masih terpinggirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan pendekatan pembangunan yang responsif gender dan disabilitas untuk memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas pengendalian penduduk menjadi isu pembangunan ke depan karena menjadi bagian dari upaya penting untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkelanjutan terutama dalam menghadapi bonus demografi. Mengacu pada persoalan yang dihadapi saat ini, kualitas pengendalian

penduduk fokus pada penurunan pernikahan di bawah umur, kesehatan reproduksi remaja, penuruanan stunting, peningkatan balita aktif hadir di posyandu, implementasi penggunaan alat kontrasepsi, penurunan unmetneed, dan optimalisasi peran PLKB. Sementara itu, isu peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak fokus pada komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan peran perempuan dibidang ekonomi dan penurunan terhadap tingkat kekerasan. Kesenjangan Gender berdampak pada ketidak setaraan ekonomi, yang diakibatkan Perempuan cenderung memiliki akses terbatas ke peluang kerja dan sumber daya ekonomi, terutama di sektor formal. Begitupula dengan ketimpangan pendidikan masih terdapat anak perempuan yang putus sekolah akibat keterbatasan akses dan pandangan tradisional mengenai peran perempuan. Minimnya Kepemimpinan Perempuan merupakan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan politik masih rendah. Belum optimalnya perlindungan anak berdampak pada eksploitasi anak, anak-anak rentan terhadap pekerja anak, terutama di sektor informal seperti perikanan atau pertanian. Begitu pula pada sektor kesehatan dan pendidikan, Tidak semua anak memiliki akses merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penyandang Disabilitas juga mengalami diskriminasi, penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas publik yang disebabkan minimnya Infrastruktur Ramah Disabilitas, banyak fasilitas umum yang belum inklusif untuk penyandang disabilitas.

6. Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Ekonomi Lokal

Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi membantu dalam diversifikasi ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi. Ini membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi, pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi juga meningkat. Pendapatan ini bisa digunakan untuk pembangunan lebih lanjut dan penyediaan layanan publik yang lebih baik. Daya saing ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal dengan mendorong pada peningkatan UKM, industri dan pusat-pusat perdagangan. Akses permodalan UKM semakin dipermudah melalui pinjaman dengan bunga rendah, program hibah, dan inisiatif lainnya. Untuk mendukung pengembangan UKM, semakin diperluas pelatihan dan pendidikan bagi pemilik UKM untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan teknologi. Pusat-pusat perdagangan seperti pasar rakyat lima tahun ke depan perlu ditingkatkan standarnya dengan mengacu pada peraturan yang ada. Selain itu, pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu ditingkatkan. Hal ini tidak terlepas bahwa pedagang kaki lima memiliki peran signifikan dalam menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka

dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Selain itu, penataan lokasi masih perlu terus dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun masyarakat sekitarnya.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu strategis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun menjadi isu nasional dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim. Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kegiatan manusia dengan ekosistem alam. Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas pengelolaan lingkungan hidup dilihat berdasarkan 3 komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun ke depan untuk menjaga kualitas air masih perlu peningkatan terhadap konservasi sumber mata air dan pemantauan kualitas air sungai. Terhadap pengelolaan Kualitas Udara, pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri. Sementara itu, untuk mendukung kualitas tutupan lahan, fokus pada ketersediaan ruang terbuka hijau untuk mencapai pemenuhan luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk rendah, untuk itu penanganan persampahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan. Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan yang harus di atasi. Lima tahun ke depan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai fokus untuk mengembangkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan guna pengelolaan yang lebih baik.

8. Pemenuhan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur

Isu peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan fokus pada optimalisasi kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur transportasi, pemenuhan sarana dan prasarana dasar, penyediaan fasilitas umum dan dukungan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Optimalisasi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap masih perlu diupayakan lagi agar tercapai 100% dalam lima tahun terakhir, termasuk peningkatan seperti trotoar dan drainase. Infrastruktur pendukung untuk transportasi masyarakat antara lain penyediaan halte atau tempat pemberhentian sementara yang aman dan nyaman, peningkatan sarana dan prasarana pendukung terminal C dan pemerataan kualitas rambu lalu lintas. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar difokuskan pada pencapaian SPM untuk air minum dan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan menurunkan luasan kawasan kumuh. Dukungan terhadap penyediaan fasilitas umum dapat difokuskan pada penyediaan fasilitas

kreatif dan rekreatif, antara lain meningkatkan jumlah sarana dan prasarana olahraga masyarakat dan taman bermain. Sementara itu, pengembangan infrastruktur guna mendukung perekonomian masyarakat fokus pada peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan.

9. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Fokus terhadap isu tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif lima tahun ke depan yaitu pada penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, penguatan basis data pemerintahan, peningkatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan, inovasi dalam pelayanan publik dan peningkatan pengawasan internal. Penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yaitu penerapan e-government secara menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah. Penguatan basis data pemerintahan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efektif. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti dan data yang akurat.

Peningkatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi para pegawai pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas yang terus berkembang. Kemudian inovasi dalam Pelayanan Publik dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Selanjutnya terkait peningkatan pengawasan internal dengan memperkuat audit dan evaluasi, pengelolaan risiko, dan menjaga kepatuhan serta integritas.

10. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman global yang dikenal dengan *Triple Planetary Crisis* yaitu perubahan iklim, berkurangnya biodiversitas serta penumpukan limbah dan polusi. Perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sudah menjadi perhatian serius hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim seperti, cuaca ekstrem, kenaikan suhu dan permukaan laut, meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir, meningkatnya kegagalan panen dan bencana kelaparan serta meningkatnya risiko penyakit.

Indonesia termasuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga terdampak secara nyata dan signifikan pada kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim dapat mengancam posisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah produksi pangan dan mengganggu suplai pangan baik skala domestik, regional dan internasional. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi pantai dan bencana hidrometeorologi lainnya juga meningkatkan kerentanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan pula terhadap sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun

budidaya. Dampak ini dapat bersifat langsung, seperti kenaikan suhu air laut dan perubahan pola arus, maupun tidak langsung, seperti peningkatan frekuensi badai dan degradasi ekosistem pesisir. Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif dari pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan risiko tersebut. Oleh karena itu penguatan kapasitas pada level lokal/komunitas, kabupaten/kota dan provinsi dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

11. Alih Fungsi Lahan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah dengan potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta sumber daya alam lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi fenomena alih fungsi lahan yang cukup signifikan, baik dari lahan pertanian produktif ke non-pertanian, maupun dari kawasan lindung ke kawasan budidaya.

Isu alih fungsi lahan di Pangkajene dan Kepulauan tidak hanya soal pergeseran penggunaan tanah, tetapi berkaitan erat dengan ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi daerah. Penanganan isu ini membutuhkan kebijakan yang integratif, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar tetap memperoleh manfaat dari pembangunan.

Isu alih fungsi lahan ini menjadi tantangan serius karena berdampak pada keberlanjutan pembangunan daerah, ketahanan pangan, serta kelestarian lingkungan. Beberapa aspek penting yang menjadi isu strategis antara lain:

- 1) Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang permukiman, kawasan industri, serta infrastruktur telah mendorong konversi lahan pertanian produktif. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
- 2) Ancaman terhadap Ekosistem dan Lingkungan Hidup. Alih fungsi kawasan hutan, pesisir, dan lahan basah menjadi lahan industri maupun tambang berdampak pada degradasi lingkungan, meningkatnya risiko banjir, abrasi pantai, serta hilangnya keanekaragaman hayati.
- 3) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW. Masih terdapat praktik pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan sosial masyarakat.
- 4) Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang Rentan. Perubahan fungsi lahan pertanian dan pesisir berdampak pada berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Petani dan nelayan tradisional berisiko kehilangan lahan garapan maupun akses terhadap sumber daya.
- 5) Keterbatasan Pengendalian dan Penegakan Regulasi. Lemahnya pengawasan serta implementasi kebijakan tata ruang mengakibatkan alih fungsi lahan sulit dikendalikan, terutama pada kawasan strategis ekonomi dan pesisir.

- 6) Kebutuhan Pembangunan Ekonomi yang Tetap Tinggi. Di sisi lain, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membutuhkan ruang untuk investasi, industri, dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hal ini seringkali berbenturan dengan kebutuhan mempertahankan lahan pertanian dan kawasan lindung.

12. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan kombinasi daratan, kepulauan, dan laut yang luas. Kondisi ini menjadikan Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta ekonomi hijau (*green economy*) yang menekankan pada pembangunan berwawasan lingkungan, rendah emisi, dan berketahanan iklim. Namun, dalam pengembangannya terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- 1) Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan, Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, dan pariwisata bahari di wilayah kepulauan Pangkajene dan Kepulauan sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan agar tidak terjadi overfishing, degradasi ekosistem pesisir, maupun kerusakan habitat laut seperti terumbu karang dan mangrove.
- 2) Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Biru dan Hijau, masih terbatasnya infrastruktur transportasi laut, cold storage, dermaga, jalan produksi, hingga jaringan energi ramah lingkungan di kawasan kepulauan menjadi hambatan dalam mendorong nilai tambah dan distribusi hasil produksi.
- 3) Begitu pula dengan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Produk hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan masih memiliki nilai tambah yang rendah. Diperlukan industrialisasi berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan ramah lingkungan agar produk daerah memiliki daya saing di pasar regional dan global.
- 4) Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah pesisir dan kepulauan rentan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam mengakibatkan rawan abrasi, rob, dan dampak perubahan iklim. Hal ini berpengaruh pada keberlanjutan aktivitas ekonomi biru dan hijau, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
- 5) Kelembagaan nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro masih terbatas. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan adaptasi terhadap model ekonomi hijau-biru masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan.
- 6) Integrasi Kebijakan dan Kolaborasi Pengembangan ekonomi biru dan hijau membutuhkan integrasi lintas sektor, baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Sinergi ini penting agar program yang dijalankan konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.



BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan, potensi, masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, serta sesuai Visi kepala daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi Misi yang diserahkan ke KPUD, maka visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025- 2029, yaitu:

**“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah,
Terampil dan Berkelanjutan”.**

Penjabaran Visi adalah sebagai berikut:

Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdaya Saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil: mengandung makna kondisi sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Berkelanjutan: Suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik terus dilanjutkan, disertai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk secara bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menerapkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Dengan demikian, visi "Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan" memiliki makna yang sangat komprehensif dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keharmonisan, semangat, kemampuan, kepercayaan, keterampilan, dan keberlanjutan.

Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengusung Nilai Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil, dan Berkelanjutan secara nyata sejalan dengan visi Sulawesi Selatan maju dan Berkarakter, serta mendukung visi nasional Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, sehingga menciptakan senengi strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing dan berkarakter kuat di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Keselarasan visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan visi RPJMD Sulawesi Selatan dengan visi RPJMN tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029,
Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional
Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Visi Kabupaten Pangkep Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER	Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan

3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Intelekt, Kreatif, Inovatif, Dan Berbudaya Yang Dijiwai Nilai-Nilai Keagamaan.

Misi ini mencakup upaya umum untuk mewujudkan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi disemua kelompok usia, diseluruh wilayah daratan dan kepulauan, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Pelayanan pendidikan ditingkatkan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai, serta tata kelola pendidikan yang sesuai standar nasional, guna menghasilkan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

Di bidang kesehatan, fokus pada upaya peningkatan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan terakreditasi, perluasan akses layanan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM). Pembangunan sumber daya manusia juga mencakup peningkatan kualitas hidup keluarga, pemberdayaan pemuda melalui pelatihan, ruang kreativitas, dan akses pendanaan, serta penguatan karakter sosial yang harmonis dan religius.

Seluruh upaya tersebut tetap menjaga keluhuran budaya lokal, memperkuat jati diri masyarakat, serta memastikan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sehingga pembangunan SDM berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan”.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.

Misi ini mencakup upaya untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju, berdaya saing, dan inklusif dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis berbasis potensi unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan dilakukan melalui hilirisasi, industrialisasi berbasis sumber daya lokal, dan transformasi sektor ekonomi yang berproduktivitas rendah menjadi sektor dengan produktivitas tinggi. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan akses permodalan, pembinaan usaha, serta penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi. Pengembangan ekonomi lokal juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat iklim usaha, meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas kemitraan dengan sektor swasta, serta memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing daerah. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi ini juga ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas kesempatan kerja secara merata di seluruh wilayah daratan dan kepulauan.”

3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.

Memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas infrastruktur yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan spasial. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air bersih, perumahan dan telekomunikasi dilakukan secara terintegrasi, termasuk dengan penuntasan

RDTR kecamatan, penguatan konektivitas wilayah, serta penguatan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, serta penguatan dukungan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global. Memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (*Good Governance*).

Menciptakan sistem pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan mendukung kemajuan daerah dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, sementara transparansi dan akuntabilitas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

5. Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) daerah, dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak ekosistem penopang kehidupan.

Misi ini juga dimaksudkan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan melalui formulasi penataan ruang yang terintegrasi, penguatan mitigasi bencana, dan pengembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah serta keberlanjutan sumber daya. Sinergi berbagai aspek pembangunan diarahkan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan nyaman dalam lingkungan yang lestari.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025 -2029 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 – 2029

No.	Pokok Visi	Misi
1.	Harmonis	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.
2.	Energik	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3.	Berdaya saing	Misi 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
4.	Amanah	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).
5.	Terampil	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelektual, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.
6.	Berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana berikut:

Tabel 3.3.
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dengan
Astacita/Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kabupaten Pangkep 2025-2029	Misi RPJMN /Asta Cita
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan Pemerataan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong

Misi RPJMD Kabupaten Pangkep 2025-2029	Misi RPJMN /Asta Cita
pembangunan prasarana dan sarana daerah.	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Moda Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Misi 5: Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3.4.

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kabupaten Pangkep 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.	Misi 1: Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing
Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan
Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan Pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.	Misi 4: Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).	Misi 3: Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani
Misi 5: Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Misi 4: Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Selain itu misi dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2045 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.
Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2045 dengan
Misi pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Kabupaten Pangkep 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Pangkep 2025-2029
Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.
Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman	
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan.	Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
Misi 8. Mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan.	
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan.	Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan Pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
Misi 7. Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan.	
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh.	Misi 5: Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi;
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan sumberdaya lokal;

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dalam menunjang aktivitas masyarakat;
4. Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Meningkatkan pengelolaan ruang kota dengan lingkungan sehat, adaptif dan berkelanjutan.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang dirumuskan dalam rangkain ingin tercapainya tujuan, yang mana adalah berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Selanjutnya, 5 (lima) tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 14 (empat belas) sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Secara Merata;
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Secara Merata dan Inklusif;
3. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Penerapan Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal;
5. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah dan Kemandirian Ekonomi Lokal;
6. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja;
7. Meningkatnya Ketersediaan Dan Kecukupan Pangan Daerah;
8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah;
9. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Mendukung Daya Saing Wilayah;
10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kemandirian Desa;
11. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
12. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital;
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat;
14. Meningkatnya Pengelolaan Risiko Bencana Didukung Dengan Masyarakat Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim.

Target, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	2025	2026	Target Tahun					
					2027	2028	2029	2030				
T.1	Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi		IT.1.1	IPM	73,87	74,4	74,73	75,67	76,31	76,94	77,58	
		S.1.1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Secara Merata	IS.1.1.1	Indeks Kesehatan	81,71	82,12	82,52	82,92	83,33	83,73	84,13
		S.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan secara Merata dan Inklusif	IS.1.2.1	Indeks Pendidikan	63,82	64,58	65,28	65,99	66,70	67,40	68,11
		S.1.3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	IS.1.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	61,20	63,00	64,55	66,10	67,65	69,20	70,75
				IS.1.3.2	Indeks Ketimpangan Gender	0,424	0,408	0,392	0,376	0,36	0,344	0,328
				IS.1.3.3	Indeks Perlindungan Anak	73,49	76,52	79,56	82,59	85,62	88,65	91,69
		S.1.4.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat	IS.1.4.1	Indeks Kerukunan	85,30	85,50	86,50	87,50	88,70	89,70	90,80

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	2025	2026	Target Tahun				2027	2028	2029	2030
			Berlandaskan Penerapan Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal.		Umat Beragama											
T.2	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Dengan Memperhatikan Sumberdaya Lokal			IT.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,00	5,97	6,11	6,25	6,38	6,51	6,62				
				IT.2.2	PDRB Per Kapita	96,36	102,08	107,33	112,80	118,16	123,53	128,89				
				IT.2.3	Rasio Gini	0,317	0,31	0,304	0,30	0,29	0,28	0,28				
		S.2.1.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Lokal	IS.2.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhdap PDRB	6.073,70	6.362,04	6.661,11	6.969,20	7.286,98	7.615,14	7.954,85				
		S.2.2	Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja.	IS.2.2.1	Tingkat Kemiskinan	12,41	12,31	11,55–10,84	11,05	10,54	9,86	9,53				
				IS.2.2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,99	3,69	3,81	3,10	2,80	2,50	2,21				
		S.2.3	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kecukupan Pangan Daerah	IS.2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,00	81,46	81,92	82,38	82,84	83,30	83,76				
		S.2.4	Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	IS.2.4.1	Tingkat Inflasi	1,19	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0				
				IS.2.4.2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,00	4,07	4,10	4,13	4,16	4,20	4,21				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				IS.2.4.3	Persentase PAD terhadap Total APBD	15,34	15,65	15,63	16,03	16,45	16,88	17,33
T.3	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan Dalam Menunjang Aktivitas Masyarakat			IT.3.1	Indeks Infrastruktur Daerah	4,12	4,26	4,41	4,57	4,73	4,90	5,08
		S.3.1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Mendukung Daya Saing Wilayah.	IS.3.1.1	Nilai Pilar Infrastruktur Indeks daya Saing Daerah	4,12	4,27	4,42	4,58	4,74	4,91	5,00
		S.3.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kemandirian Desa	IS.3.2.1	Rasio Desa dengan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Merata	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0
				IS.3.2.2	Indeks Desa	-	79,13	79,43	79,63	79,93	80,14	80,41
T.4	Terciptanya Transformasi Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Profesional, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel.			IT.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		S.4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah.	IS.4.1.1	Nilai SAKIP	64,03 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
		S.4.2	Meningkatnya Kualitas Layanan	IS.4.2.1	Indeks Pelayanan Publik	B	B	B	B	B	B	B

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator	Baseline	Target Tahun						
					Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Publik berbasis Digital									
T.5	Meningkatkan pengelolaan ruang kota dengan lingkungan sehat, adaptif dan berkelanjutan			IT.5.1	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	60.920,01	60.307,05	58.705,46	58.448,41	58.280,34	57.578,41	57.360,91
		S.5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	IS.5.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	75,44	75,65	75,86	76,07	76,28	76,49	76,71
		S.5.2	Meningkatnya Pengelolaan Risiko Bencana Didukung Dengan Masyarakat Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim	IS.5.2.1	Indeks Resiko Bencana (IRB)	159,47	157,24	155,01	152,77	150,54	148,31	146,08

3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 serta menciptakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun ke depan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Arah Kebijakan Pembangunan dan Strategi Pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan tersebut yaitu metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) serta melihat integrasi kepada perencanaan kewilayahan. Dengan metode ini, berbagai potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

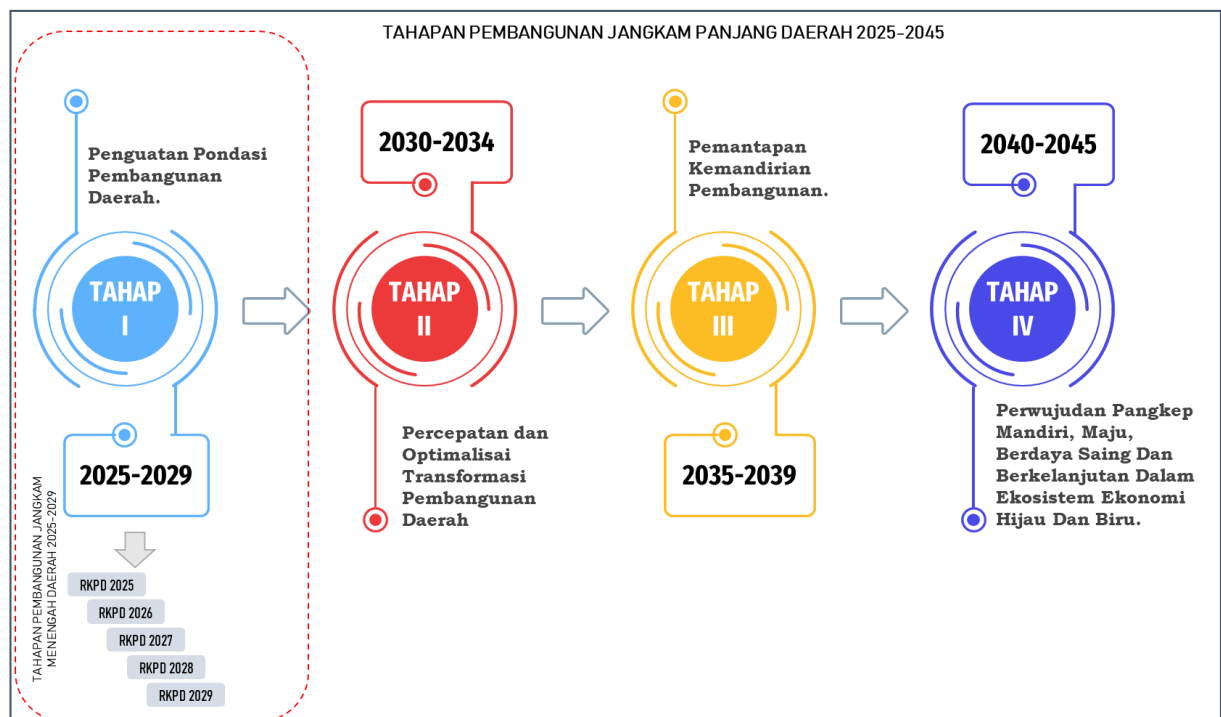
3.2.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan Pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan pertama dari RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada periode Tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Pondasi Pembangunan”. Periode pertama ini dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; penguatan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram; peningkatan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan

ekologi yang tangguh; peningkatan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan; peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1.
Posisi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan Penjabarannya ke RKPD



Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah sebagai prioritas pembangunan tahunan. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2026-2030



Dalam kerangka pencapaian misi yang ditata melalui tahapan pembangunan diatas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Arah kebijakan merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan misi yang menjadi pedoman umum dalam menetapkan fokus dan prioritas yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan. Untuk itu dirumuskan arah kebijakan sebagai arahan umum kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan setiap misi pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan Berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.		
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan secara merata	Memperluas akses dan layanan kesehatan berkualitas dan perkuatan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan pusat kesehatan di wilayah terpencil, penambahan tenaga medis, serta pengadaan fasilitas kesehatan seperti klinik dan puskesmas. Penanganan penyakit menular dan tidak menular, termasuk penanganan gizi buruk dan stunting serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan tenaga medis.
	Sasaran 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan secara merata dan inklusif	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah dengan program beasiswa, pelatihan guru, dan pembangunan sekolah-sekolah modern serta peningkatan satuan layanan pendidikan yang inklusif di semua jenjang fokus pada kompetensi, karakter, dan kearifan lokal.
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Penerapan Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal.	Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Budaya yang Harmonis dan Toleran.
Misi 2 Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.		
Tujuan 2 :	Sasaran 5 :	Mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan sumberdaya lokal	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Lokal	sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah agar tumbuh menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan didukung penerapan ekonomi hijau dan biru.
	Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja.	Mendorong usaha kecil berbasis komunitas atau koperasi melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal (<i>demand-driven training</i>).
	Sasaran 7 : Meningkatnya Ketersediaan Dan Kecukupan Pangan Daerah	Meningkatkan fasilitas penyimpanan seperti gudang pangan, silo, dan cold storage yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, terutama di masa paceklik atau ketika ada gangguan distribusi.
	Sasaran 8 : Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif, dan penguatan sektor ekonomi daerah.
MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah		
Tujuan 3: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan Dalam Menunjang Aktivitas Masyarakat	Sasaran 9 : Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Infrastruktur Daerah.	Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Konektivitas dan Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar serta Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Digital
	Sasaran 10 : Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dalam rangka perwujudan perdesaan sebagai pusat pengembangan pertumbuhan ekonomi skala lokal.
MISI 4 : Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah		
Tujuan 4 : Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.	Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Akuntabel, Memperkuat Kapasitas dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah, Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik
	Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Digital	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Digital, Transformasi Layanan Publik menuju Digitalisasi, Peningkatan Literasi dan Kapasitas Digital Aparatur, serta Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		Partisipasi dan Kemudahan Akses Masyarakat.
MISI 5 : Mewujudkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		
Tujuan 5 : Meningkatkan pengelolaan ruang kota dengan lingkungan sehat, adaptif dan berkelanjutan.	Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, Program rehabilitasi mangrove, pelestarian terumbu karang, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan darat, pembangunan fasilitas daur ulang di kawasan pesisir, dan kampanye pengurangan penggunaan plastik.
	Sasaran 14 : Meningkatnya Pengelolaan Risiko Bencana Didukung Dengan Masyarakat Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta perubahan iklim, melalui peningkatan kualitas lingkungan serta pengelolaan hutan hingga lingkungan, peningkatan pengelolaan irigasi, peningkatan pengelolaan EBT, dan yang terpenting pemanfaatannya yang berkelanjutan tanggap terhadap bencana

Adapun pilihan strategi pembangunan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Strategi Pembangunan Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan Berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan secara merata	Memperluas akses dan layanan kesehatan berkualitas dan perkuatan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan pusat kesehatan di wilayah terpencil, penambahan tenaga medis, serta pengadaan fasilitas kesehatan seperti klinik dan puskesmas. Penanganan penyakit menular dan tidak menular, termasuk penanganan gizi buruk dan stunting serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan tenaga medis.	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi.
				Penggunaan layanan kesehatan mobile seperti ambulans keliling dan klinik bergerak untuk menjangkau wilayah terpencil.
				Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) ke daerah terpencil melalui insentif khusus.
				Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala.
				Pemberian sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulant dalam upaya percepatan penanganan stunting dan gizi buruk;
				Penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan.
				Kampanye kesehatan masyarakat melalui penciptaan kesadaran menggunakan media sosial dan kampanye publik

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Mengembangkan sistem rujukan yang efisien untuk mempermudah akses pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. • Mengaktifkan posyandu untuk memberikan layanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu dan anak. • Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. • Mendorong kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperluas cakupan layanan kesehatan.
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan secara merata dan inklusif	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah dengan program beasiswa, pelatihan guru, dan pembangunan sekolah-sekolah modern serta peningkatan satuan layanan pendidikan yang inklusif di semua jenjang fokus pada kompetensi, karakter, dan kearifan lokal.	• Pemerataan dan penguatan akses dan infrastruktur pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah. • Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan pendidikan • Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan • Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi masyarakat • Peningkatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang baik untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah • Peningkatan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan. • Pengembangan multidimensi dalam meningkatkan literasi digital pada dunia pendidikan dan komunitas masyarakat. • Pengembangan Minat Baca dan Pengelolaan Perpustakaan Desa. • Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam menciptakan masyarakat Pangkep sebagai kabupaten cerdas.
		Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.	• Mengadakan program pelatihan dan edukasi bagi orang tua mengenai pola asuh anak yang baik, kesehatan keluarga, dan perencanaan keuangan. • Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan pengaduan, konseling, dan pendampingan • Memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses modal untuk meningkatkan pendapatan keluarga. • Meningkatkan fasilitas ramah disabilitas di tempat umum dan layanan publik. • Menyediakan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. • Memperluas cakupan jaminan sosial dan bantuan langsung bagi kelompok rentan. • Mendorong partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan di komunitas mereka.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan di sektor publik, swasta, dan politik. • Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses modal bagi perempuan untuk memulai atau mengembangkan usaha. • Meningkatkan akses perempuan ke teknologi, sumber daya, dan pasar. • Mengadakan kampanye kesetaraan gender di sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk mengurangi stereotip gender. • Bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan LSM untuk melaksanakan program yang mendukung keluarga, pemuda, dan kelompok rentan. • Memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendanai program pemberdayaan dan kesetaraan gender
		Sasaran 4 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Penerapan Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal.	Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Budaya yang Harmonis dan Toleran.	• Pelaksanaan kegiatan lintas agama yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. • Mendukung program yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman yang maslahat, seperti zakat, wakaf, atau kegiatan sosial lainnya. • Meningkatkan frekuensi festival budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. • Mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keberagaman budaya dan agama.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Memasukkan muatan lokal budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan informal untuk menanamkan identitas budaya sejak dini. • Memberikan ruang bagi seniman dan kreator untuk mengeksplorasi seni modern tanpa melupakan akar tradisi, termasuk melalui festival budaya dan pameran seni. • Mengoptimalkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga dan memajukan lingkungan sosial yang sehat serta budaya yang maju.
MISI 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Tujuan 3 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan sumberdaya lokal	Sasaran 5 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Lokal	Mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah agar tumbuh menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan didukung penerapan ekonomi hijau dan biru.	• Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terutama di perdesaan • Pengembangan sentra pertanian, perikanan, pariwisata dan penguatan kelembagaan usaha • Membangun jejaring antara produsen lokal, pemasok, dan pasar. • Menyediakan fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk sektor perikanan atau gudang untuk sektor pertanian • Membangun sentra produksi atau kawasan industri kecil yang dilengkapi dengan teknologi modern. • Menyediakan akses ke mesin dan peralatan yang meningkatkan efisiensi produksi. • Mengadakan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan manajemen usaha untuk pelaku UMKM dan koperasi. • Memberikan pendampingan intensif untuk UMKM lokal dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, dan inovasi produk.



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Mendirikan inkubator bisnis untuk mendukung start-up berbasis sektor unggulan daerah. • Mengintegrasikan teknologi digital untuk proses produksi, manajemen, dan pemasaran dalam rangka membantu UMKM masuk ke platform <i>e-commerce</i> untuk memperluas akses pasar • Mendukung inovasi produk berbasis potensi lokal melalui kerja sama dengan universitas dan lembaga riset. • Mempermudah akses pelaku usaha lokal ke kredit mikro, koperasi simpan pinjam, atau program pembiayaan dari pemerintah • Meningkatkan kualitas produk dengan fokus pada desain, kemasan, dan branding. • Mendorong hilirisasi produk, misalnya dengan memproses bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. • Membentuk kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan skala produksi dan daya tawar. • Mendorong koperasi sebagai alat penggerak ekonomi lokal. • Memanfaatkan sektor pariwisata untuk menciptakan peluang ekonomi, seperti homestay, kuliner lokal, dan kerajinan tangan. • Mengoptimalkan program CSR perusahaan untuk pengembangan sektor unggulan dan melibatkan universitas dalam pengembangan teknologi dan pelatihan. • Penyediaan akses pembiayaan berbunga rendah melalui program kredit mikro.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				- Diversifikasi sumber pendapatan melalui sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata. - Peningkatan nilai tambah produk lokal melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas pengolahan.
		Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja.	Mendorong usaha kecil berbasis komunitas atau koperasi melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal (demand-driven training).	- Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi agar tenaga kerja memiliki daya saing sesuai kebutuhan pasar - Mengembangkan pendidikan vokasi dan politeknik dengan fokus pada keterampilan praktis yang relevan dengan industri. - Mendorong investasi pada sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata. - Menyelenggarakan pameran kerja secara rutin serta mengembangkan platform digital untuk memudahkan pencari kerja mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. - Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, pendampingan UMKM, peningkatan akses ke pembiayaan, inovasi dan pengembangan produk, peningkatan branding dan pemasaran serta pengembangan dukungan digitalisasi UMKM: - Pemberdayaan koperasi melalui pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi, penguatan sistem pembiayaan dan permodalan koperasi, kolaborasi antar koperasi dan UMKM, digitalisasi koperasi dan peningkatan peran koperasi dalam ekonomi lokal.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
		Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan daerah	Meningkatkan fasilitas penyimpanan seperti gudang pangan, silo, dan cold storage yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, terutama di masa paceklik atau ketika ada gangguan distribusi.	• Peningkatan jaringan distribusi melalui penguatan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen. • Peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar. • Pemanfaatan teknologi dalam pertanian melalui pengembangan irigasi pintar, penggunaan pupuk organik, dan sistem pertanian berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. • Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan diversifikasi tanaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. • Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas. • Peningkatan promosi dan sosialisasi potensi investasi daerah melalui menggandeng lembaga lembaga nasional dan internasional untuk mempromosikan daerah ini di kancah global, penargetan investor yang tepat dan mengembangkan brand Pangkep sebagai destinasi Investasi: Mengembangkan sektor ekonomi hijau seperti energi terbarukan, ecotourism, atau produk ramah lingkungan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif
		Sasaran 8 : Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif, dan penguatan sektor ekonomi daerah.	- Meningkatkan kontribusi sektor unggulan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi yang efisien. - Memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan pajak dari sektor informal dengan tetap menjaga inklusivitas. - Memastikan anggaran daerah disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas berbasis kinerja. - Memprioritaskan belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi belanja tidak produktif dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah. - Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok melalui kerja sama antar daerah.
MISI 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Tujuan 4: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dalam menunjang aktivitas masyarakat	Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Mendukung Daya Saing Wilayah.	Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Konektivitas dan Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar serta Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Digital	- Meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan pedesaan, sentra produksi, dan pusat-pusat perekonomian. - Mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi perpindahan barang dan orang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				- Mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil untuk mendukung transformasi digital. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sanitasi aman melalui identifikasi wilayah dengan sanitasi buruk dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat; - Peningkatan ketersediaan air minum layak melalui peningkatan akses layanan air minum perpipaan. - Peningkatan jumlah rumah layak huni melalui pemberian bantuan sosial untuk pemugaran rumah keluarga miskin dan peningkatan efektivitas pemanfaatan dana CSR.
		Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kemandirian Desa	Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dalam rangka perwujudan perdesaan sebagai pusat pengembangan pertumbuhan ekonomi skala lokal	- Meningkatkan peran dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat desa; - Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan - Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan - Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa - Menguatkan pengembangan kerja sama desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan; - Memper memudahkan akses permodalan bagi UMKM desa melalui bank desa atau koperasi.
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan 5 : Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah.	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Transparan dan Akuntabel,	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD) yang berbasis data, evidence-based, serta selaras dengan RPJPN dan RPJMN.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance)	yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.		Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	• Mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).
				• Peningkatan kualitas dan transparansi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi;
				• Peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah agar mencapai level 3 (integrated) atau lebih.
				• Memperkuat peran pengawasan intern secara preventif, detektif, dan represif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip good governance.
				• Mendorong keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan e-governance.
				• Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat yang responsif dan berbasis digital.
				• Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan.
				• Penyelarasan target kinerja OPD dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah
				• Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi ASN dalam penyusunan perencanaan, pelaporan, serta tata kelola keuangan.
				• Melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Meningkatkan kualitas forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan inklusif.
		Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Digital	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah, Digitalisasi Proses Layanan Publik, Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	• Memperluas jaringan internet yang merata hingga ke wilayah kepulauan dan pedesaan. • Penyediaan sarana prasarana TIK yang mendukung transformasi digital pelayanan publik. • Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan layanan publik berbasis aplikasi digital. • Integrasi sistem layanan publik daerah melalui satu pintu (one stop service) dengan platform terpadu. • Meningkatkan nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui penerapan tata kelola TIK yang terstandar. • Integrasi layanan digital dengan data nasional serta sistem informasi lintas sektor. • Pelatihan dan bimbingan teknis untuk ASN dalam pengelolaan sistem digital layanan publik. • Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat agar mudah mengakses layanan berbasis digital. • Penerapan standar keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam layanan digital pemerintah daerah. • Mengembangkan kanal aduan dan aspirasi masyarakat berbasis aplikasi digital yang terintegrasi.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
				• Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk transparansi informasi serta peningkatan kepercayaan publik. • Kemitraan dengan penyedia layanan digital, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk mempercepat transformasi pelayanan publik. • Peningkatan inovasi layanan publik berbasis digital melalui kompetisi, inovasi daerah, dan smart governance.
MISI 5 : Mewujudkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Tujuan 6 ; Meningkatkan pengelolaan ruang kota dengan lingkungan sehat, adaptif dan berkelanjutan	Sasaran 13: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, Program rehabilitasi mangrove, pelestarian terumbu karang, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan darat, pembangunan fasilitas daur ulang di kawasan pesisir, dan kampanye pengurangan penggunaan plastik	• Mengurangi emisi melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan;
				• Meningkatkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan pengelolaan sampah organik dan anorganik.
				• Mendorong penggunaan energi surya, angin, hidro, dan biomassa di masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari.
				• Melindungi kawasan hutan, lahan basah, terumbu karang, dan ekosistem penting lainnya.
				• Menggalakkan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan yang mengalami degradasi.
				• Memastikan ketersediaan air bersih dengan mengelola sumber daya air secara efisien.
		Sasaran 14 : Meningkatnya pengelolaan risiko bencana didukung dengan masyarakat	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta perubahan	• Melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dengan menggunakan teknologi GIS dan data berbasis lokasi serta mengintegrasikan data risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah;



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Daerah
		yang adaptif terhadap perubahan iklim	iklim, melalui peningkatan kualitas lingkungan serta pengelolaan hutan hingga lingkungan, peningkatan pengelolaan irigasi, peningkatan pengelolaan EBT, dan yang terpenting pemanfaatannya yang berkelanjutan tanggap terhadap bencana.	• Mengembangkan sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. • Memberikan pelatihan mitigasi bencana dan adaptasi iklim kepada masyarakat, terutama di daerah rawan bencana. • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

3.2.2. Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Perumusan prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan daerah, prioritas Pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Untuk menindaklanjutinya, maka dibuat prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikemas kedalam 12 PAS atau 12 Program Aksi Strategis Pangkep Hebat terdiri dari:

1. Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya;

Pembangunan pusat kesehatan di wilayah terpencil, penambahan tenaga medis, serta pengadaan fasilitas kesehatan seperti klinik dan puskesmas terapung. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah terpencil dengan program beasiswa, pelatihan guru, dan pembangunan sekolah-sekolah modern.

2. Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata;

Pengembangan pengetahuan dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan lokal. Optimalisasi potensi wisata bahari di kepulauan seperti Taman Laut, Pantai, dan Ekowisata berbasis masyarakat untuk menarik investasi dan wisatawan.

3. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan;

Pembangunan jalan, jembatan, dermaga, dan fasilitas umum di wilayah daratan dan pulau-pulau terpencil untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.

4. Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;

Pengembangan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.

5. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan.

Kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta ketersediaan sumberdaya alam yang menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Keberlanjutan ini

dilandasi oleh semakin menguatnya komitmen dan implementasi dalam penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

6. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat,

Peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), melalui dukungan permodalan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan;

Membangun pusat-pusat ekonomi yang akan menjadi motor penggerak pembangunan lokal. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan didesain untuk mengembangkan potensi kawasan secara maksimal, baik dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekayaan alam masing-masing wilayah.

8. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

Program ini berfokus pada upaya terpadu untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pelayanan dasar, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif dan sejahtera;

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat agar mampu beradaptasi dan berinovasi di era modern. Dengan SDM yang unggul dan berdaya saing, kabupaten ini dapat memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan sosial.

10. Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, Program rehabilitasi mangrove, pelestarian terumbu karang, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan darat, pembangunan fasilitas daur ulang di kawasan pesisir, dan kampanye pengurangan penggunaan plastik.

11. Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;

Melalui Penyediaan akses internet dan listrik yang merata di wilayah kepulauan dan pegunungan, untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik berbasis teknologi;

12. Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah;

Membangun fasilitas penyimpanan seperti gudang pangan, silo, dan cold storage yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, terutama di masa paceklik atau ketika ada gangguan distribusi.

Tabel 3.9.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

No.	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Misi – 1 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan Berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan	Pas 1 : Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya Pas 9 : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	Misi – 2 Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Pas 2 : Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 6 : Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat. Pas 8 : Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pas 12 : Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah
3.	Misi – 3 Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah.	Pas 3 : Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan. Pas 7 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11. Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi
4.	Misi – 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).	Pas 4 : Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
5.	Misi – 5 Mewujudkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pas 5 : Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 10 : Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 juga selaras dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Nasional
1. Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Nasional
		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
	2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Nasional
	berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
7. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
6. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
8. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
10. Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
11. Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
12. Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Nasional
rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Rumusan Program Prioritas RPJMD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek, kreatif, inovatif, dan Berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.	T.1 Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi			T.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		S.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan secara merata	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan		PAS 1 : Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya;
			Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Parvelensi stunting		
		S.2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan secara merata dan inklusif	Terwujudnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang inklusif, berkeadilan, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.	Indeks Pendidikan		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Meningkatnya Angka Partispasi Sekolah dan rata-rata lama sekolah	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Rata-rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya Indeks Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Program Pembinaan Perpustakaan	
		S.3. Meningkatkan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berdaya, serta adanya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak-hak anak melalui sistem perlindungan yang komprehensif.	Indeks Pembangunan Keluarga		PAS 9 : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
			Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	
		S.4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang	Indeks Kerukunan Umat Beragama		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
		Berlandaskan Penerapan Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal	harmonis, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam kehidupan sosial, budaya, dan pembangunan daerah.			
			Menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan toleran dalam keberagaman	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
				Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Misi 2 Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing	T.2 Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
				PDRB Perkapita		
				Rasio Gini		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
berbasis pada potensi keunggulan lokal.	dengan memperhatikan sumberdaya lokal					
		S.5. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Lokal	Meningkatnya daya saing daerah serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB		PAS 2 : Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Yang Merata; PAS 6: Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat PAS 7 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				2. Peningkatan Produksi Holtikultura.		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.		
			Meningkatnya Distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya penggunaan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
		S.6. Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup dan bertambahnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.	Tingkat Kemiskinan		PAS 8: Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial PAS 9: Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemenadiriran ekonomi		
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatkn desa (LKD).	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya,	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		S.7. Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan daerah	Tersedianya pangan yang memadai, menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		PAS 12 : Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah;
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		S.8. Meningkatkan Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya daya tarik Investasi dan Stabilitas fiskal	Tingkat Inflasi		PAS 7 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
				Persentase PAD terhadap Total APBD		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Meningktanya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Peresentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
MISI 3 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah	T.3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dalam menunjang aktivitas masyarakat		Meningkatnya infrastruktur yang memadai, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah		
		S.9. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Mendukung Daya Saing Wilayah.	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan	Nilai Pilar Infrastruktur Indeks daya Saing Daerah		PAS 3 : Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			konektivitas, pelayanan dasar, serta daya saing wilayah.			Pengembangan Ekonomi, Sosial, Dan Kemasyarakatan;
			Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	PAS 7 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PAS 11 : Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				Persentase luas layanan Irigasi Multikomuditas		
			Meningkatnya sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan Drainase Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap istem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Program kawasan permukiman	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Meningkatnya penyediaan PSU Pemukiman	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		
		S.10 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Kemandirian Desa	Terwujudnya desa yang mandiri melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, sarana prasarana ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang berkelanjutan	Rasio Desa dengan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Merata		
				Indeks Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya efektifitas kerjasama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance)	T.4. Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.		Mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi		
		S.11. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP		
			Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PAS 4 : Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Resntra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PAS 11 : Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		S.12. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik berbasis Digital	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			terhadap Layanan Publik			
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
MISI 5 : Mewujudkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	T.5. Meningkatkan pengelolaan ruang kota dengan lingkungan sehat, adaptif dan berkelanjutan		Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan infrastruktur dalam menghadapi risiko bencana alam, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
dan berwawasan lingkungan			maupun faktor lainnya			
		S.13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kapasitas lingkungan dalam mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem, serta menjaga keseimbangan ekologi daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		PAS 10 : Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan bidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
		S.14. Meningkatnya pengelolaan risiko bencana didukung dengan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana (IRB)		PAS 5: Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan.
			Meningkatnya kualitas layanan	Persentase cakupan penvebaran informasi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			pencegahan dan kesiapsiagaan terhdap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan pasca bencana Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 3.12.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM Urusan Pendidikan				
A	1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Kesetaraan 3. Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar 2. Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan 3. Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SPM Urusan Kesehatan				
B	1. Kesehatan Ibu Hamil 2. Kesehatan Ibu Bersalin 3. Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Kesehatan Balita 5. Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 6. Kesehatan Pada Usia Produktif 7. Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	8. Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Kesehatan Diabetes Melitus 10. Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh			
SPM Urusan Pekerjaan Umum				
C	1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum" 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman				
D	Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SPM Urusan Sosial				
E	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	1. Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	DINAS SOSIAL

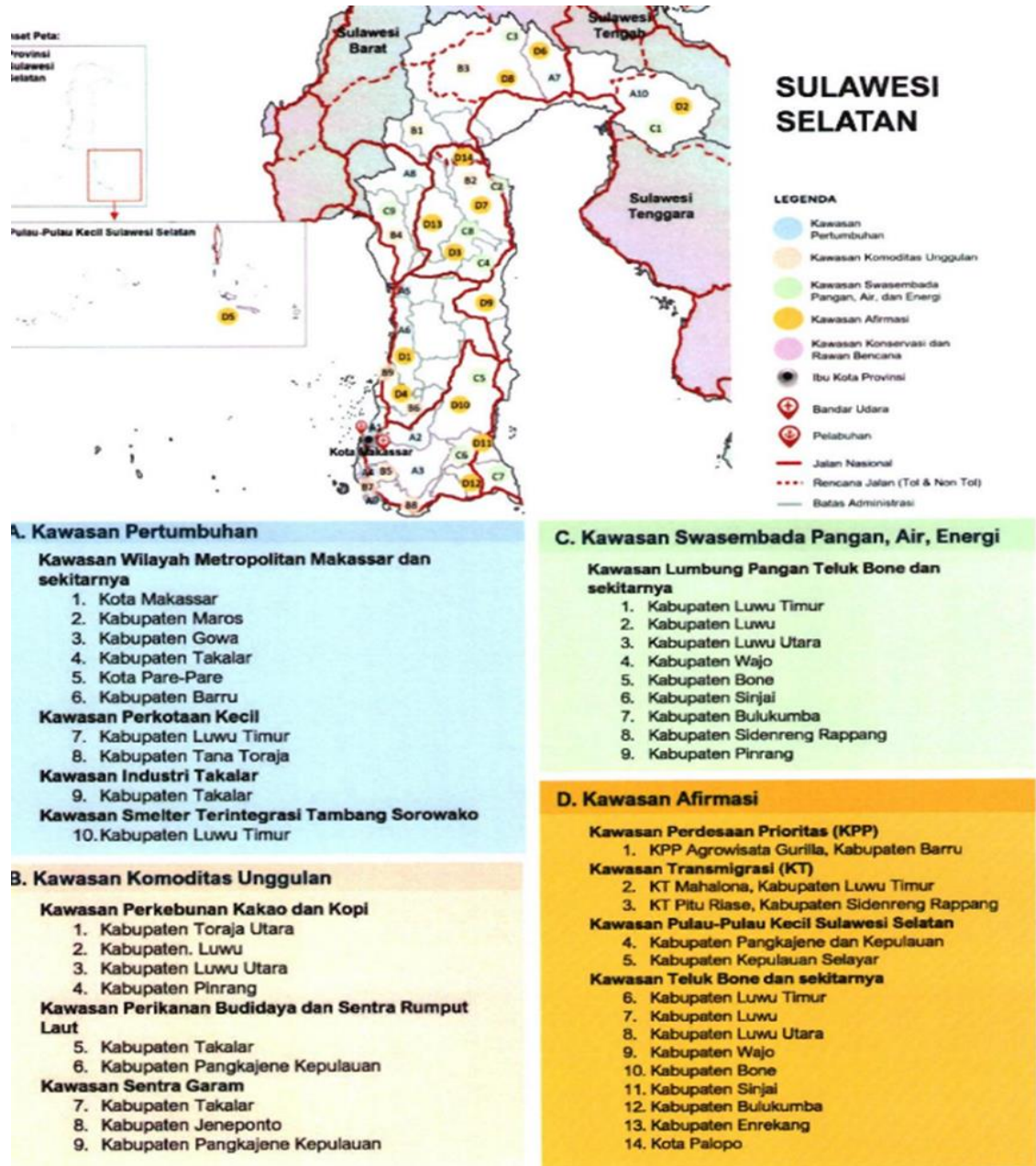
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	gelandangan dan pengemis diluar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	2. Program Penanganan Bencana	2. Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
F	1. Pelayanan informasi rawan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 2. Persentase Jumlah Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

3.3.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menegaskan komitmen pembangunan transformatif melalui delapan prioritas nasional, termasuk pembangunan wilayah sebagai salah satu fokus utama. Selain itu, pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah seperti kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia serta memperkuat pemerataan, daya saing, dan kemandirian daerah yang akan diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dengan menetapkan sasaran, tema dan arah kebijakan pembangunan wilayah.

Gambar 3.3.
Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam RPJMN 2025-2029



Sumber: Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam konteks RPJMN 2025-2029 dapat dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan nasional, potensi lokal, serta isu-isu strategis di daerah tersebut. Dalam RPJMN 2025-2029, pendekatan pembangunan biasanya berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Berikut beberapa poin potensial yang dapat menjadi arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada pengembangan kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Afirmasi:

Kawasan Perikanan Budidaya Dan Sentra Rumput Laut

Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, melalui:

- Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut.
- Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan output; peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur kawasan budidaya rumput laut – *Ocean for Prosperity-Infrastucture for Coral Reef Areas*.
- Hilirisasi, peningkatan rantai nilai promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output*: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi dan tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan didekat sentra rumput laut.
- Pengembangan input produksi rumput laut;
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut.

Kawasan Sentra Garam

Pengembangan kawasan Sentra Garam melalui:

- Pengembangan korporasi petambak garam, dengan output; bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB);
- Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan output: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam, dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri;
- Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan output: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi.

Kawasan Afirmasi – Kawasan Pulau-pulau Kecil

Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui:

- Pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah, dan sanitasi, dengan output: pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten dan

- permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan pemenuhan akses sanitasi aman.
- Pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik hingga pedesaan serta penguatan implementasi transisi energi, dengan output; pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, peningkatan penyediaan dan layanan listrik pintar untuk layanan yang akurat 24 jam/hari, PLTS.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir, dengan output; fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, pemantauan dan informasi sampah laut, peningkatan pemahaman masyarakat terkait persampahan, pemenuhan dan pembinaan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- Penguatan konektivitas laut, dengan output; peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas pelabuhan laut.
- Pengelolaan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan output; sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, *Oceans for Prosperity Project – LAUTRA*;
- Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan output; terpenuhinya sarana dan prasana bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta implementasi layanan *telemedicine*.

Tabel 3.13.

Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029.

No.	Lokasi Prioritas RPJMN	Intervensi / Kecamatan	Highlight Intervensi
1.	Kawasan Perikanan Dan Sentra Rumput Laut. B.6. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kawasan perikanan budidaya dengan luas 11.997,29 (sebelas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) hektare meliputi: 1. Kecamatan Balocci dengan luas 3,99 (tiga koma Sembilan puluh sembilan) hektare; 2. Kecamatan Bungoro dengan luas 1.124,22 (seribu seratus dua puluh empat koma dua puluh dua) hektare; 3. Kecamatan Labakkang dengan luas 3.101,90 (tiga ribu seratus satu koma Sembilan puluh) hektare; 4. Kecamatan Liukang Tangaya dengan luas 2,46 (dua koma empat puluh enam) hektare;	1. Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut. 2. Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan output; peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur kawasan budidaya rumput laut – Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reef Areas’. 3. Hilirisasi, peningkatan rantai nilai promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan output: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan

No.	Lokasi Prioritas RPJMN	Intervensi / Kecamatan	Highlight Intervensi
		5. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan luas 51,75 (lima puluh satu koma tujuh puluh lima) hektare; 6. Kecamatan Mandalle dengan luas 756,84 (tujuh ratus lima puluh enam koma delapan puluh empat) hektare; 7. Kecamatan Ma'rang dengan luas 3.199,74 (tiga ribu seratus Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh empat) hektare; 8. Kecamatan Minasatene dengan luas 902,08 (Sembilan ratus dua koma nol delapan) hektare; 9. Kecamatan Pangkajene dengan luas 1.942,22 (seribu Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh dua) hektare; dan 10. Kecamatan Segeri dengan luas 912,29 (Sembilan ratus dua belas koma dua puluh sembilan) hektare.	kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi dan tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan didekat sentra rumput laut. 4. Pengembangan input produksi rumput laut. 5. Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut.
2.	Kawasan Sentra Garam. B.9 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kawasan pergaraman, seluas kurang lebih 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di: 1. kecamatan bungoro; 2. kecamatan labakkang; dan 3. kecamatan ma'rang.	1. Pengembangan korporasi petambak garam, dengan output; bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB); 2. Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan output: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam, dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri; 3. Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan output: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi.
3.	Kawasan Afirmasi – Kawasan Pulau-pulau Kecil. D.4 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1. Pengembangan jaringan perpipaan air minum dan prasarannya di Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Ma'rang; 2. Pembangunan sumur, bak penampungan air hujan, dan terminal air pada kawasan rawan air bersih di wilayah	Pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah, dan sanitasi, dengan output: pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis

No.	Lokasi Prioritas RPJMN	Intervensi / Kecamatan	Highlight Intervensi
		pesisir dan kepulauan; dan pembangunan unit-unit pengolahan air dengan teknologi desalinasi di wilayah kecamatan pesisir dan kepulauan diantaranya: • Kecamatan Pangkajene; • Kecamatan Minasatene; • Kecamatan Bungoro; • Kecamatan Labakkang; • Kecamatan Ma'rang; • Kecamatan Segeri; • Kecamatan liukang kalmas; • Kecamatan liukang tangaya; • Kecamatan liukang tupabbiring; dan • Kecamatan liukang tupabbiring utara. 3. SPAL domestik meliputi: • IPAL domestik sistem kluster di Kawasan Perkotaan; dan • IPAL komunal skala Kawasan di Kecamatan Labakkang, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, dan Kecamatan Ma'rang.	masyarakat, dan pemenuhan akses sanitasi aman.
		1. kecamatan liukang kalmas; 2. kecamatan liukang tangaya; 3. kecamatan liukang tupabbiring; dan; 4. kecamatan liukang tupabbiring utara.	Pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik hingga pedesaan serta penguatan implementasi transisi energi, dengan output; pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, peningkatan penyediaan dan layanan listrik pintar untuk layanan yang akurat 24 jam/hari, PLTS.
		Sistem jaringan persampahan Wilayah terdiri atas: a. Tempat penampungan sementara (TPS); b. Tempat pemrosesan akhir (TPA); dan c. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). TPA meliputi: a. TPA Bontoa terletak di Kecamatan Minasatene; b. TPA Taraweang terletak di Kecamatan Labakkang; dan c. Pengembangan TPA Segeri terletak di Kecamatan Segeri. TPST meliputi: a. TPST Pangkajene terletak di Kecamatan Pangkajene;	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir, dengan output; fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, pemantauan dan informasi sampah laut, peningkatan pemahaman masyarakat terkait persampahan, pemenuhan dan pembinaan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

No.	Lokasi Prioritas RPJMN	Intervensi / Kecamatan	Highlight Intervensi
		b. TPST Bungoro terletak di Kecamatan Bungoro; c. TPST Mandalle terletak di Kecamatan Mandalle; dan d. TPST Segeri terletak di Kecamatan Segeri.	
		a. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan kelas III meliputi: • Pelabuhan penyeberangan Pulau Pamantauang di Kecamatan Liukang Kalmas; dan • pelabuhan penyeberangan Pulau Matalaang di Kecamatan Liukang Tangaya. b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Maccini Baji di Kecamatan Labakkang. c. Pelabuhan pengumpan lokal meliputi: • Pelabuhan Bawasalo terletak di Kecamatan Ma'rang; • Pelabuhan Pulau Kalukalukuang, Pelabuhan Pulau Pamantauang, dan Pelabuhan Pulau Dewakang Lompo, dan Pelabuhan Pulau Doang-Doangan Lompo terletak di Kecamatan Liukang Kalmas; • Pelabuhan Pulau Badi, dan Pelabuhan Pulau Gondong Bali, dan Pelabuhan Pulau Balang Lompo terletak di Kecamatan Liukang Tupabbiring; • Pelabuhan Pulau Sabutung, Pelabuhan Pulau Karangrang, Pelabuhan Pulau Kulambing, Pelabuhan Pulau Salemo, dan Pelabuhan Pulau Samatellu terletak di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara; dan • Pelabuhan Pulau Sailus, Pelabuhan Pulau Sapuka, Pelabuhan Pulau Balo-Baloang Lompo, Pelabuhan Pulau Kapoposang Bali, Pelabuhan Pulau Langkoitang, dan Pelabuhan Pulau Matalaang terletak di Kecamatan Liukang Tangaya.	Penguatan konektivitas laut, dengan output; peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas pelabuhan laut.

No.	Lokasi Prioritas RPJMN	Intervensi / Kecamatan	Highlight Intervensi
		a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. dengan luas 42,15 (empat puluh dua koma lima belas) hectare, terdapat di perairan : Kecamatan Liukang Tangaya dengan luas 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) hektare; Kecamatan Tupabbiring dengan luas 7,20 (tujuh koma dua puluh) hectare; Kecamatan Tupabbiring Utara dengan luas 23,69 (dua puluh tiga koma enam puluh Sembilan) hektare b. Kawasan Konservasi Perairan. dengan luas 63.415.181 (enam puluh tiga ribu empat ratus lima belas koma seratus delapan puluh satu) hektare merupakan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) terletak di Kecamatan Liukang Tupabiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.	Pengelolaan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan output; sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA;
		Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan output; terpenuhinya sarana dan prasana bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>

3.3.2. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Makassar yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi, untuk itu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Makassar yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan difokuskan melalui melalui:

Pertama, peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan

layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan antara lain melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, dan kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan serta penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga di kota Makassar, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, dan pengembangan teknologi tradisional.

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru pengembangan komoditas unggulan pangan sebagai pendukung IKN berbasis prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, melalui swasembada pangan yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang diarahkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya dan sentra rumput laut di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pengembangan kawasan sentra garam di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri yang diprioritaskan pada pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut serta peningkatan produktivitas budidaya rumput laut di kabupaten Pangkajene Kepulauan; percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan berorientasi ekspor serta aglomerasi industri yang diarahkan pada peningkatan investasi di kawasan industri. Selain itu pengembangan kawasan Makassar, juga diprioritaskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi termasuk pengembangan seaplane yang didukung pengembangan keterampilan SDM

dan layanan pariwisata serta pengembangan industry, usaha masyarakat dan investasi utamanya di kawasan UNESCO Global GeoPark sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi, penguatan logistic, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan.

Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan pulau pulau kecil yang diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pengembangan dan diversifikasi ekonomi lolal, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi.

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan MAMMINASATA dan Kawasan Metropolitan Makassar DSK diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan smart city; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata, fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan, fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan. Selain itu sebagai dukungan

terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Makassar juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan di Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar DSK diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional yang diprioritaskan pada penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diprioritaskan pada kota Makassar dan kabupaten Maros serta kabupaten Pangkajene Kepulauan, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi transportasi darat, laut dan udara yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa penyelenggaraan layanan kereta api lintas Makassar-Parepare, pengembangan angkutan umum massal perkotaan, pembangunan dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu melalui pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan bandar udara perairan (*sea plane*) yang diprioritaskan di Kota Makassar, dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta penguatan konektivitas darat dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

Kedelapan, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan, pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian,

penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
	Semua Kecamatan	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar dan pengembangan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM transportasi melalui dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane), peningkatan dan preservasi jalan daerah, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pengembangan simpul transportasi, dukungan penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; penanganan permukiman kumuh; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan cakupan layanan, keberfungsian, kualitas infrastruktur SPALD; penanganansampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat; fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan; fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM. Penguatan regulasi dan lembaga pengelola, kolaborasi multi sektor, pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman, penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi.
	Semua Kecamatan	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan,



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta, pengendalian penyakit rabies, penguatan intervensi spesifik stunting dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan. Pengembangan layanan unggulan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyediaan dan optimalisasi sarana rumah sakit. Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi, penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri.
	Semua Kecamatan	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan	Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		pemberantasan kemiskinan		
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marginal	Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep) melalui pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan; peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; pengendalian daya rusak air; dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui penguatan industri transportasi laut, pengembangan industri produk olahan hasil laut, penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology.



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dan dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak.
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat,	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; Penguatan ekosistem fesyen dan kriya; Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan penguatan ekosistem kuliner.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi	Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik,

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
				penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
	- Kecamatan Balocci - Kecamatan Bungoro - Kecamatan Labakkang - Kecamatan Lk. Tangaya - Kecamatan Lk. Tuppabiring Utara - Kecamatan mandalle - Kecamatan Ma'rang - Kecamatan Minasatene - Kecamatan Pangkajene - Kecamatan Segeri	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata; Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan	Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut melalui: pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut; hilirisasi komoditas unggulan perikanan dan rumput laut, peningkatan rantai nitai, promosi dan penguatan sumber daya manusia; pengembangan input produksi rumput laut; dan pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut. Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui dukungan dan fasilitasi pengembangan korporasi petambak garam, dukungan dan fasilitasi pengembangan garam industri terintegrasi, serta dukungan penguatan sarana dan prasarana industri garam.
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan. Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi	Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kawasan Pulau Pulau Kecil Sulawesi Selatan, melalui pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dasar dan pesisir daru hulu hingga hilir, penguatan konektivitas laut, pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan.

Sumber: Lampiran IV Peppres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

3.3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Arah kebijakan pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Pangkajene dan Kepulauan yaitu mewujudkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur wilayah terintegrasi dengan potensi sumber daya alam menuju masyarakat maju dan mandiri. dicapai melalui kebijakan penataan ruang, meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan sebagai gerbang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berhirarki, berkarakter dan berdaya saing;
- b. pengembangan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan;
- c. pengembangan jaringan transportasi wilayah yang bersinergi dan berdayaguna bagi pembangunan wilayah;
- d. pengembangan jaringan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi wilayah;
- e. peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan;
- g. pengembangan potensi industri dan pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. peningkatan fungsi Kawasan Lindung;
- i. pengelolaan sumber daya kepariwisataan yang inovatif dan responsif terhadap kecenderungan perkembangan pasar wisata; dan
- j. penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala kabupaten. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan

penataan ruang Pangkajene dan Kepulauan. Kebijakan penataan ruang wilayah Pangkajene dan Kepulauan yang diterapkan sebagai pendekatan spasial meliputi:

1. **Pengembangan sistem perkotaan sebagai gerbang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berhirarki, berkarakter dan berdaya saing**, antara lain dengan a). penetapan pusat-pusat pelayanan yang telah berkembang dan pusat-pusat pelayanan baru yang memiliki keunggulan komparatif dan potensi pertumbuhan yang dapat menjadi keseimbangan perkembangan wilayah secara merata; dan b). menetapkan fungsi-fungsi pelayanan primer dan sekunder pada setiap pusat pertumbuhan yang dibarengi dengan pengembangan infrastruktur penunjangnya agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.
2. **Pengembangan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan**, antara lain dengan; a). Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan sub-sub pusat pertumbuhan yang berbasis pertanian dan perkebunan melalui konsep pembangunan agropolitan; b). Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan sub-sub pusat pertumbuhan yang berbasis perikanan melalui konsep pembangunan minapolitan; c). Peningkatan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan; d). Pengembangan kelembagaan perdesaan dalam menunjang kegiatan ekonomi perdesaan; e). Pengembangan industrialisasi sektor unggulan serta peningkatan sentra-sentra perdagangan/jasa dan potensi UMKM di kawasan perdesaan; dan f). Pengembangan usaha perikanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis dan industri.
3. **Pengembangan jaringan transportasi wilayah yang bersinergi dan berdayaguna bagi pembangunan wilayah**, antara lain dengan; a). Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut yang terpadu dan bersinergi dengan rencana pengembangan jaringan transportasi nasional dan regional; b). Peningkatan fungsi ruang disekitar simpul-simpul jaringan transportasi (pelabuhan, terminal, rencana stasiun kereta api) yang berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat; c). membuka akses antar pusat pelayanan yang berpotensi terhadap perkembangan wilayah perdesaan; dan d). mendukung pengembangan pusat pelayanan baru yang berpotensi terhadap pembangunan sistem transportasi nasional dan regional di Daerah.
4. **Pengembangan jaringan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi wilayah**, antara lain dengan; a). pengembangan potensi sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; b). Pengembangan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian; c). pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku untuk pelayanan kebutuhan penduduk yang menyeluruh; d). penggunaan teknologi pengolahan air baku di kepulauan melalui sistem desalinasi dan pemanenan air hujan yang dilengkapi dengan prasarana sarana penunjangnya; e). peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan infrastruktur sanitasi yang berkualitas sesuai ketentuan perundangan; f). Peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dengan pengembangan jaringan *fiber optic* serta penyediaan tower BTS bersama yang

dapat menjangkau ke seluruh wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya; g). Peningkatan pelayanan dan penyaluran energi kelistrikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam (industri, pertambangan); dan h). Pengembangan kemandirian pengelolaan persampahan melalui pengembangan konsep-konsep pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

5. **Peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan**, antara lain dengan; a). Pengembangan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; b). mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan budi daya di kawasan pesisir dan laut; dan, c). Pengembangan kawasan permukiman pesisir dan kepulauan yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang seimbang serta mempertimbangkan aspek kebencanaan.
6. **Peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan**, antara lain dengan ; a). Menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian pangan berkelanjutan melalui penetapan LP2B, dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan kawasan permukiman di perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan; b). Pengembangan insentif dan disinsentif untuk mendukung LP2B; c). Pengembangan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana sebagai sentra-sentra produksi untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan d). penggunaan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian dan perkebunan.
7. **Pengembangan potensi industri dan pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup**, antara lain dengan; a). Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; b). Penetapan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri yang teraglomerasi; c). pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui pengawasan yang ketat sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup; dan d). optimalisasi pengolahan lahan pasca penambangan dengan cara penjenjangan bertahap proses pengembalian rona alam menjadi peruntukan budidaya lainnya yang potensial dan bersifat konservasi terhadap tanah dan air.
8. **Peningkatan fungsi kawasan lindung**, antara lain dengan; a). Pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan melalui koordinasi lintas kewenangan dalam meningkatkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat; b). Penegasan dan pengendalian fungsi Kawasan sepanjang pantai, sungai, waduk dan mata air sebagai fungsi lindung dengan penanaman kembali (reboisasi); c). Pengembangan ekosistem mangrove dengan

fungsi pencegahan terhadap potensi bencana tsunami; d). menjaga eksistensi dan fungsi ruang terbuka hijau eksisting dalam kawasan perkotaan dan mengembangkan potensi ruang terbuka hijau dalam rangka mencapai persentase minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan e). melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

- 9. Pengelolaan sumber daya kepariwisataan yang inovatif dan responsif terhadap kecenderungan perkembangan pasar wisata,** antara lain dengan; a). pengembangan destinasi pariwisata yang dinamis terhadap perkembangan pasar pariwisata pada setiap potensi daya tarik wisata dan unsur destinasi pariwisata lainnya; b). menciptakan branding destinasi wisata unggulan di daerah sesuai karakteristik wilayah yang terpadu agar tercipta pemanfaatan sumber daya pariwisata yang menyeluruh; c). pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai industri pariwisata pada wilayah-wilayah pengaruh kegiatan wisata; d). pengembangan struktur perwilayahan dan kawasan pariwisata strategis sebagai referensi bagi penyediaan paket-paket wisata yang terintegrasi dengan pusat pelayanan wilayah; dan e). mengembangkan sistem informasi pariwisata daerah yang handal sebagai media komunikasi kepariwisataan secara menyeluruh.
- 10. Penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana,** antara lain dengan; a). pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di daerah terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat permukiman penduduk di pesisir dan perdesaan; b). mengembangkan sistem pengendalian banjir yang terpadu dengan sistem pengelolaan sumber daya air serta penyediaan prasarana penanggulangan banjir; dan c). perencanaan dan penataan permukiman perkotaan dengan dukungan sarana dan prasarana kebencanaan yang fungsional dan terintegrasi dengan rencana struktur ruang wilayah.

Tabel 3.15.
Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kecamatan Pangkajene	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan administrasi, koordinasi lintas desa/kelurahan, serta akuntabilitas kinerja. • Pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan layanan publik berbasis digital di tingkat kecamatan. • Optimalisasi fungsi kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui; • Penguatan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) melalui unit pelayanan di kecamatan. • Fasilitasi layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. • Pengembangan sistem pengaduan masyarakat di kecamatan sebagai wujud transparansi pelayanan.
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM melalui; • Dukungan terhadap UMKM, perdagangan lokal, dan sentra ekonomi di wilayah Kecamatan Pangkajene. • Fasilitasi akses permodalan, pemasaran digital, dan pelatihan kewirausahaan masyarakat. • Penguatan kemitraan dengan BUMD, koperasi, dan swasta dalam menggerakkan ekonomi berbasis potensi lokal.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah melalui; • Peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan, drainase, serta sarana prasarana publik di wilayah perkotaan kecamatan. • Peningkatan infrastruktur konektivitas ke wilayah perdesaan dan kepulauan untuk memperlancar arus barang dan jasa. • Pengembangan fasilitas publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat (taman, ruang terbuka hijau, pasar rakyat).
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang Kecamatan melalui; • Pengendalian alih fungsi lahan di kawasan perkotaan Kecamatan Pangkajene. • Penguatan program kebersihan, pengelolaan sampah terpadu, dan penghijauan wilayah. • Mitigasi bencana banjir/rob melalui pembangunan drainase perkotaan dan normalisasi sungai.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaiki Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui; • Penguatan forum Musrenbang Kecamatan yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. • Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagai mitra pemerintah kecamatan. • Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sosial masyarakat.
2.	Kecamatan Minasate'ne	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	Pas 4; Perbaiki Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui;

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		• Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan administrasi publik. • Digitalisasi layanan publik berbasis SPBE Kecamatan. • Optimalisasi fungsi kecamatan sebagai koordinator desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan.
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pertanian Produktif melalui; • Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura melalui dukungan teknologi dan akses pasar. • Fasilitas UMKM, koperasi, dan usaha rumah tangga dengan pendekatan ekonomi kreatif dan pemasaran digital. • Dukungan pengembangan usaha perikanan darat (kolam/tambak) yang menjadi potensi wilayah.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas melalui; • Perbaikan jalan penghubung desa-kecamatan serta akses ke pusat kabupaten. • Penyediaan sarana prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. • Pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup melalui;

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		• Pengendalian alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman. • Program penghijauan, konservasi lahan kritis, dan perlindungan daerah tangkapan air. • Pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Layanan Dasar melalui; • Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu. • Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah, serta dukungan terhadap literasi masyarakat. • Perlindungan sosial bagi kelompok rentan (lansia, anak, difabel).
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Penguatan forum Musrenbang Kecamatan yang inklusif dan berbasis data. • Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. • Pengembangan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat (tani, nelayan, UMKM) sebagai mitra pembangunan.
3.	Kecamatan Bungoro	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan administrasi, perencanaan, dan koordinasi pembangunan. • Pemanfaatan sistem digital (SPBE Kecamatan) untuk mempercepat pelayanan publik. • Optimalisasi peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pembangunan desa/kelurahan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata.	Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Lokal melalui; • Fasilitasi pengembangan kawasan industri Bungoro sebagai motor pertumbuhan ekonomi.



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	• Dukungan bagi UMKM lokal agar terintegrasi dengan rantai pasok industri. • Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi, kelompok usaha) berbasis potensi lokal.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas melalui; • Peningkatan kualitas jalan penghubung kawasan industri, perdesaan, dan pusat kota Pangkajene. • Penyediaan infrastruktur dasar: air bersih, listrik, drainase, dan sanitasi lingkungan. • Pengembangan fasilitas publik (pasar rakyat, terminal, ruang terbuka hijau).
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Dampak Industri melalui; • Pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas industri dan tambang. • Program penghijauan dan konservasi daerah resapan air. • Penguatan mitigasi bencana lingkungan (longsor, banjir, pencemaran).

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
4.	Kecamatan Balocci	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan SDM melalui; • Peningkatan mutu layanan kesehatan melalui puskesmas dan layanan kesehatan keliling. • Penguatan mutu pendidikan, termasuk sekolah vokasi berbasis industri. • Peningkatan kapasitas SDM lokal agar terserap dalam sektor industri dan jasa.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Dukungan pemberdayaan pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). • Penguatan peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah kecamatan.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan publik dan koordinasi pembangunan desa. • Digitalisasi layanan administrasi berbasis SPBE di kecamatan. • Optimalisasi forum musyawarah pembangunan untuk memperkuat partisipasi masyarakat.
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat,	Pengembangan Ekonomi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan melalui; • Dukungan teknologi pertanian (alat mesin, pupuk, bibit unggul). • Peningkatan akses pasar hasil pertanian dan perkebunan (kopi, kakao, sayuran, buah-buahan). • Penguatan kelompok tani, koperasi, dan usaha peternakan rakyat.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui; • Program konservasi hutan lindung dan reboisasi lahan kritis. • Edukasi masyarakat tentang kelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. • Mitigasi bencana longsor, banjir, dan kebakaran hutan di kawasan pegunungan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	Pengembangan Pariwisata Alam dan Ekowisata melalui; • Pengembangan destinasi wisata pegunungan, air terjun, dan hutan wisata. • Penyediaan infrastruktur wisata sederhana (akses jalan, homestay, fasilitas umum). • Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku wisata lokal.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah melalui; • Perbaikan jalan desa-kecamatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian. • Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan listrik di perdesaan. • Pembangunan fasilitas publik (pasar desa, ruang terbuka, balai pertemuan).
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Layanan Dasar melalui; • Penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan keliling. • Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta dukungan literasi masyarakat. • Perlindungan sosial untuk kelompok rentan di daerah pedalaman.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Pemberdayaan kelompok tani, pemuda, dan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. • Penguatan lembaga adat dan sosial sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa. • Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
5.	Kecamatan Tondong Tallasa	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif,	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan publik yang menjangkau desa-desa pegunungan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		dan melayani berbasis digital		- Pemanfaatan teknologi digital untuk administrasi dan koordinasi pembangunan. - Optimalisasi Musrenbang Kecamatan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa.
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Ekonomi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan melalui; - Penguatan sektor pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi, kakao, cengkeh). - Fasilitasi akses pupuk, bibit unggul, serta penyuluhan teknologi tepat guna. - Dukungan pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan (KTH) dan koperasi.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana melalui; - Rehabilitasi lahan kritis melalui program penghijauan dan reboisasi. - Edukasi masyarakat terkait konservasi tanah, air, dan hutan. - Penguatan sistem mitigasi bencana longsor dan banjir bandang di wilayah pegunungan.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas melalui; - Pembangunan dan peningkatan jalan desa-kecamatan untuk membuka isolasi wilayah. - Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan listrik pedesaan.



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Pembangunan pasar desa dan fasilitas publik sebagai pusat aktivitas ekonomi.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Layanan Dasar melalui; - Penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, puskesmas keliling, dan tenaga medis di daerah terpencil. - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di pedesaan. - Penyediaan sarana pendidikan nonformal (kursus, pelatihan keterampilan).
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Potensi Ekowisata dan Agrowisata melalui; - Identifikasi dan promosi destinasi wisata alam (air terjun, pegunungan, panorama hutan). - Pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola ekowisata berbasis desa. - Pembangunan fasilitas dasar pendukung wisata ramah lingkungan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; - Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat adat dalam usaha ekonomi produktif. - Penguatan kelembagaan desa sebagai mitra pembangunan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
6.	Kecamatan Labakkang	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan publik berbasis digital. • Optimalisasi koordinasi pembangunan lintas desa/kelurahan. • Penguatan peran musrenbang sebagai wadah aspirasi masyarakat.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan	Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Tambak melalui; • Peningkatan produktivitas pertanian (padi, jagung, hortikultura) melalui teknologi dan sarana produksi. • Dukungan pengembangan tambak udang dan bandeng yang ramah lingkungan. • Fasilitasi sarana prasarana nelayan dan kelompok pembudidaya rumput laut dan penambak garam. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM • Pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil pertanian dan perikanan (olahan bandeng, ikan kering, kerupuk).

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	- Dukungan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran UMKM. - Penguatan koperasi dan kelompok usaha bersama masyarakat pesisir.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Wilayah Pesisir dan Pedesaan melalui; - Peningkatan kualitas jalan tani, jalan desa, dan akses ke sentra produksi. - Penyediaan infrastruktur dasar: air bersih, listrik, sanitasi di kawasan pesisir dan pedesaan. - Pembangunan dermaga kecil sebagai sarana transportasi dan distribusi hasil laut.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana melalui; - Rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove. - Program mitigasi abrasi pantai, banjir rob, dan intrusi air laut. - Edukasi masyarakat tentang pengelolaan tambak dan laut yang berkelanjutan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar dan SDM melalui; - Peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu. - Dukungan peningkatan mutu pendidikan, termasuk sekolah berbasis kelautan dan perikanan. - Pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda, khususnya di sektor perikanan dan pariwisata.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Pariwisata Pesisir dan Budaya Lokal melalui; • Promosi destinasi wisata pantai, kuliner, dan budaya khas Labakkang. • Fasilitasi pembangunan sarana pendukung wisata (akses jalan, homestay, fasilitas umum). • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis desa.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Pemberdayaan perempuan dan pemuda pesisir dalam usaha ekonomi produktif. • Penguatan kelompok masyarakat dalam pengawasan lingkungan pesisir. • Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
7.	Kecamatan Ma'rang	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan publik dan administrasi kependudukan. • Pemanfaatan aplikasi digital untuk mempercepat layanan masyarakat. • Optimalisasi koordinasi pembangunan desa/kelurahan dengan partisipasi masyarakat.
				Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan melalui;

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	• Fasilitas sarana prasarana nelayan (perahu, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage). • Peningkatan kapasitas budidaya perikanan (rumput laut, bandeng, udang). • Penguatan kelembagaan nelayan, koperasi, dan kelompok usaha perikanan. Penguatan Industri dan Ekonomi Lokal melalui; • Pengembangan industri rumah tangga dan pengolahan hasil perikanan (ikan asin, abon, kerupuk ikan). • Fasilitas UMKM pesisir agar terhubung dengan pasar regional/nasional. • Pengembangan sentra logistik dan distribusi hasil perikanan.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Wilayah Pesisir melalui; • Perbaikan dan pembangunan jalan penghubung pesisir-kecamatan-kabupaten. • Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di permukiman pesisir. • Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan kecil untuk nelayan.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Pesisir melalui; • Konservasi ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang). • Program penanggulangan abrasi dan intrusi air laut.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaiki Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	• Penguatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana pesisir (banjir rob, gelombang pasang). Peningkatan Layanan Dasar dan SDM melalui; • Penguatan layanan kesehatan pesisir dengan puskesmas dan layanan keliling. • Peningkatan mutu pendidikan dasar dan vokasi berbasis kelautan. • Pemberdayaan pemuda pesisir melalui pelatihan keterampilan produktif.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Potensi Wisata Bahari melalui; • Identifikasi dan promosi destinasi wisata pesisir dan laut (pantai, kuliner ikan, budaya nelayan). • Fasilitasi homestay dan sarana wisata berbasis masyarakat. • Integrasi wisata bahari dengan ekowisata kepulauan.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif,	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya;	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Pemberdayaan kelompok nelayan, perempuan pesisir, dan UMKM melalui pendampingan usaha.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		dan melayani berbasis digital	Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	• Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. • Penguatan kelembagaan desa pesisir untuk mendukung pembangunan inklusif.
8.	Kecamatan Segeri	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan; melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam layanan administrasi publik berbasis digital. • Optimalisasi koordinasi pembangunan lintas desa/kelurahan untuk perencanaan terpadu. • Penguatan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan melalui; • Peningkatan produktivitas pertanian (padi, jagung, hortikultura) dengan teknologi tepat guna. • Dukungan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya (ikan, rumput laut). • Pengembangan peternakan kuda, sapi, dan kambing sebagai potensi ekonomi lokal. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM melalui; • Pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. • Dukungan permodalan, pelatihan, dan akses pemasaran produk UMKM. • Penguatan kelembagaan koperasi masyarakat pedesaan dan pesisir.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur,	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas melalui; • Pembangunan dan peningkatan jalan desa-kecamatan untuk mendukung akses produksi.



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	• Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan listrik pedesaan. • Pembangunan pasar rakyat dan fasilitas publik sebagai pusat aktivitas ekonomi.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana melalui; • Konservasi ekosistem pesisir, sungai, dan kawasan pertanian. • Mitigasi abrasi, banjir rob, serta penanggulangan kekeringan di musim kemarau. • Program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Kualitas Layanan Dasar melalui; • Penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas, posyandu, dan tenaga medis keliling. • Peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, dan vokasi berbasis potensi lokal. • Pemberdayaan pemuda dengan pelatihan keterampilan kerja
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat,	Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya melalui; • Promosi potensi wisata budaya dan tradisi khas Segeri. • Pengembangan wisata alam (pegunungan, pantai, dan panorama pesisir). • Penyediaan sarana pendukung wisata berbasis masyarakat (homestay, jalur wisata, kuliner lokal).

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam usaha ekonomi produktif. • Penguatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. • Dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
9.	Kecamatan Mandalle	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaiki Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan administrasi publik berbasis digital. • Optimalisasi musrenbang kecamatan untuk menjaring aspirasi masyarakat pesisir dan desa. • Penguatan koordinasi pembangunan desa/kelurahan dalam sektor perikanan dan pertanian.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan	Pengembangan Sektor Perikanan, Budidaya, dan Tambak melalui; • Peningkatan fasilitas sarana nelayan (alat tangkap ramah lingkungan, kapal kecil, cold storage). • Dukungan pengembangan tambak udang, bandeng, dan budidaya rumput laut secara berkelanjutan. • Penguatan kelembagaan nelayan dan kelompok pembudidaya. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM melalui; • Pengembangan usaha pengolahan hasil laut (ikan kering, abon, kerupuk ikan, terasi). • Dukungan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi UMKM pesisir.



No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	• Penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat nelayan dan petani.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas melalui; • Pembangunan dan perbaikan jalan penghubung desa–kecamatan–kabupaten untuk akses distribusi hasil produksi. • Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan listrik di desa-desa pesisir. • Pembangunan dermaga kecil untuk mendukung aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Pesisir melalui; • Penanaman mangrove dan konservasi ekosistem pesisir. • Program pengendalian abrasi pantai dan intrusi air laut. • Edukasi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar dan SDM melalui; • Penguatan layanan kesehatan masyarakat pesisir melalui puskesmas keliling dan posyandu. • Peningkatan mutu pendidikan dasar dan vokasi berbasis perikanan dan kelautan. • Pelatihan keterampilan produktif untuk pemuda dan perempuan pesisir.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	Pengembangan Pariwisata Bahari dan Budaya Pesisir melalui; • Identifikasi dan promosi destinasi wisata pantai serta wisata budaya lokal. • Penyediaan sarana pendukung wisata berbasis masyarakat (homestay, pusat kuliner, jalur wisata). • Pengembangan wisata bahari terintegrasi dengan ekowisata mangrove.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Pemberdayaan kelompok nelayan, perempuan, dan pemuda dalam usaha ekonomi produktif. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian pesisir. • Dorongan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan.
10.	Kecamatan Tuppabiring	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan melalui; • Peningkatan kapasitas aparaturnya kecamatan dan desa dalam pelayanan publik di wilayah kepulauan. • Pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan administrasi jarak jauh. • Optimalisasi forum musyawarah pembangunan desa/kelurahan berbasis kebutuhan kepulauan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata.	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut melalui; • Dukungan sarana prasarana nelayan (kapal kecil, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage).

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	• Pengembangan budidaya rumput laut, ikan kerapu, dan lobster sebagai komoditas unggulan. • Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan koperasi maritim. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM Kepulauan melalui; • Pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil laut (ikan kering, kerupuk ikan, abon, terasi). • Fasilitasi permodalan, pelatihan, dan pemasaran produk UMKM kepulauan. • Penguatan jejaring pemasaran hasil laut ke daratan dan pasar regional.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas melalui; • Peningkatan transportasi laut (kapal rakyat, dermaga, dan pelabuhan kecil). • Penyediaan air bersih, listrik tenaga surya, dan sanitasi di pulau-pulau. • Pengembangan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung pelayanan publik.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kepulauan melalui; • Konservasi ekosistem laut (terumbu karang, mangrove, padang lamun). • Program mitigasi abrasi pantai, gelombang pasang, dan kenaikan muka air laut. • Edukasi masyarakat kepulauan tentang pengelolaan laut berkelanjutan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar melalui; • Penguatan layanan kesehatan dengan puskesmas terapung dan tenaga medis keliling. • Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di pulau-pulau kecil. • Dukungan beasiswa dan pelatihan vokasi bagi pemuda kepulauan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata melalui; • Identifikasi dan promosi destinasi wisata laut, pantai, dan budaya nelayan. • Fasilitas pengembangan homestay, pusat kuliner laut, dan jalur wisata maritim. • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis ekowisata.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kepulauan melalui; • Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam usaha ekonomi produktif berbasis kelautan. • Penguatan kelompok masyarakat dalam pengawasan sumber daya laut. • Peningkatan partisipasi masyarakat kepulauan dalam perencanaan pembangunan.
11.	Kecamatan Tuppabiring Utara	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Kepulauan melalui;

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		• Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan dalam pelayanan publik kepulauan. • Digitalisasi layanan administrasi berbasis SPBE dengan memperhatikan keterbatasan infrastruktur jaringan. • Penguatan koordinasi lintas OPD untuk mempercepat pembangunan layanan dasar di wilayah kepulauan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Perikanan melalui; • Pemberdayaan nelayan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, permodalan, dan akses pasar. • Peningkatan kapasitas pengolahan hasil laut (ikan, rumput laut, kerang) menjadi produk bernilai tambah. • Penguatan kelembagaan nelayan dan koperasi perikanan sebagai motor ekonomi lokal. Pengembangan Pariwisata Bahari dan Pulau-Pulau Kecil melalui; • Promosi potensi wisata bahari, pantai, dan ekowisata berbasis masyarakat. • Penyediaan sarana prasarana wisata sederhana (dermaga, homestay, pusat informasi). • Peningkatan kapasitas SDM pariwisata lokal untuk mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan	Peningkatan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kepulauan melalui; • Penyediaan sarana transportasi laut reguler yang aman dan terjangkau antar-pulau. • Pembangunan sarana air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan (PLTS). • Peningkatan infrastruktur pendidikan (sekolah terpadu) dan kesehatan (puskesmas/pustu) di pulau-pulau.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana melalui; • Perlindungan ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun). • Pengendalian penangkapan ikan yang merusak (bom, racun, trawl). • Penguatan mitigasi bencana pesisir (abrasi, banjir rob, gelombang tinggi).
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial melalui; • Dukungan terhadap pendidikan kepulauan (beasiswa, guru kontrak, sekolah digital jarak jauh). • Penguatan layanan kesehatan melalui tenaga medis keliling dan telemedicine. • Perlindungan sosial bagi keluarga miskin, nelayan kecil, dan kelompok rentan.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui; • Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. • Dukungan terhadap kelompok perempuan dan pemuda dalam usaha mikro berbasis hasil laut. • Penguatan forum musyawarah kepulauan yang partisipatif dalam perencanaan pembangunan.
12	Kecamatan Liukang Kalmas	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kepulauan melalui; • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan dalam pelayanan publik di pulau-pulau terluar. • Pemanfaatan teknologi digital (layanan daring, SPBE) untuk pelayanan administrasi kependudukan. • Penguatan koordinasi pembangunan antar pulau melalui forum musyawarah kepulauan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut melalui; • Penyediaan sarana prasarana perikanan (kapal nelayan, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage). • Pengembangan budidaya rumput laut, lobster, dan ikan kerapu sebagai komoditas unggulan ekspor. • Penguatan kelembagaan koperasi nelayan dan kelompok pembudidaya laut. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM Kepulauan melalui; • Pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil laut (ikan asin, kerupuk ikan, abon, terasi). • Fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran produk UMKM. • Dukungan jejaring distribusi hasil laut ke daratan (hub logistik perikanan).
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Kepulauan melalui; • Pembangunan dan peningkatan dermaga rakyat serta transportasi laut antar pulau. • Penyediaan air bersih (desalinasi, sumur bor), listrik energi terbarukan (solar panel), dan sanitasi. • Pengembangan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung pelayanan publik dan pendidikan.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Pesisir melalui; • Konservasi ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun) untuk menjaga keberlanjutan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
				• Program mitigasi abrasi pantai, gelombang pasang, dan kenaikan muka air laut. • Edukasi masyarakat kepulauan tentang adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan laut berkelanjutan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar di Kepulauan Terluar melalui; • Penguatan layanan kesehatan dengan puskesmas terapung, telemedicine, dan tenaga medis keliling. • Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di pulau kecil, termasuk dukungan guru kontrak. • Fasilitas beasiswa dan pelatihan vokasi untuk pemuda kepulauan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Kepulauan melalui; • Promosi destinasi wisata laut, pantai, dan budaya nelayan kepulauan. • Pengembangan fasilitas wisata berbasis masyarakat (homestay, pusat kuliner laut, jalur wisata bahari). • Integrasi wisata bahari dengan konservasi lingkungan (diving, snorkeling, ekowisata mangrove).
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya;	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kepulauan melalui; • Pemberdayaan perempuan pesisir dalam usaha olahan hasil laut dan kerajinan. • Penguatan kelompok pemuda kepulauan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
13	Kecamatan Liukang Tangaya		Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta pengawasan program pemerintah.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 4; Perbaikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kepulauan Terluar melalui; - Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital untuk masyarakat kepulauan yang terpencil. - Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan dalam tata kelola kepulauan. - Penguatan koordinasi antar desa dan antar pulau melalui forum musyawarah kepulauan
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata. Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pas 12; Pengelolaan Distribusi dan Penyimpanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut melalui; - Dukungan sarana dan prasarana nelayan (kapal kecil, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage, BBM nelayan). - Pengembangan budidaya rumput laut, kerapu, lobster, dan komoditas ekspor lainnya. - Penguatan kelembagaan kelompok nelayan, koperasi maritim, dan akses permodalan.
				Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM Pesisir melalui; - Pemberdayaan UMKM berbasis hasil laut (pengolahan ikan asin, abon, kerupuk, terasi, dan produk olahan). - Fasilitasi akses pemasaran ke daratan melalui sistem logistik perikanan.

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
				• Pendampingan kewirausahaan untuk pemuda dan perempuan pesisir.
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pas 3; Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Mobilitas Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 11; Peningkatan Konektivitas Digital dan Elektrifikasi;	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Pulau melalui; • Pembangunan dermaga rakyat, kapal penyeberangan antar pulau, dan transportasi laut reguler. • Penyediaan listrik berbasis energi terbarukan (solar cell, hybrid system). • Pembangunan sarana air bersih (desalinasi, sumur bor) dan sanitasi sehat. • Perluasan jaringan internet dan komunikasi di pulau-pulau terluar.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pas 10; Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup;	Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Pesisir melalui; • Konservasi ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun) untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. • Program mitigasi abrasi, gelombang pasang, dan kenaikan muka air laut. • Edukasi masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim dan pemanfaatan laut berkelanjutan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 4; Perbaiki Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Peningkatan Layanan Dasar di Kepulauan Terluar melalui; • Penguatan layanan kesehatan (puskesmas terapung, telemedicine, tenaga medis keliling). • Peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan guru kontrak kepulauan dan sekolah berasrama. • Beasiswa dan pelatihan vokasi berbasis keterampilan maritim untuk pemuda kepulauan.
		2. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pas 2; Penguatan Keunggulan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif yang Merata.	Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata melalui; • Identifikasi dan promosi potensi wisata bahari (diving, snorkeling, ekowisata mangrove).

No.	Kecamatan	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Highlight Indikasi Intervensi
			Pas 5; Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam berkelanjutan. Pas 6; Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat, Pas 7; Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kawasan Pas 8; Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	• Fasilitas homestay, pusat kuliner laut, dan jalur wisata kepulauan. • Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan wisata.
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pas 1; Jaminan Akses Dan Pemerataan Terhadap Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, Sosial Budaya; Pas 9; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kepulauan melalui; • Pemberdayaan perempuan nelayan dalam usaha olahan hasil laut. • Penguatan peran pemuda kepulauan sebagai agen perubahan dan inovasi lokal. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih, Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah,
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM),
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup,
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten,

Rencana program Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Periode 2025-2029 berjumlah **164 program**. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah,

Program Tahun 2025 disusun sesuai dengan program RKPD dan APBD Tahun 2025 yang ditetapkan pada Tahun 2024, Sementara program perangkat daerah Tahun 2026 sampai dengan 2030 mengalami penyesuaian dengan struktur organisasi dan arsitektur kinerja RPJMD dan perangkat daerah sehingga terbentuk cascade kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2026-2030,

Keseluruhan program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program perangkat daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah berdasarkan urusan, selengkapnya disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Program Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					449.526.277.581,30		463.797.420.131,00		466.404.222.072,00		469.516.860.051,00		473.701.750.790,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					373.647.794.381,30		385.157.911.831,00		388.699.713.772,00		392.312.351.751,00		395.997.242.490,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	373.647.794.381,30	100	385.157.911.831,00	100	388.699.713.772,00	100	392.312.351.751,00	100	395.997.242.490,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					75.878.483.200,00		74.089.008.300,00		74.204.508.300,00		73.704.508.300,00		74.204.508.300,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	86,01	88,98	91,95	75.878.483.200,00	94,50	74.089.008.300,00	97,05	74.204.508.300,00	99,60	73.704.508.300,00	100	74.204.508.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,99	99,99	99,99		99,99		99,99		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	91,98	93,13	94,27		95,42		96,56		97,71		98,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	15,24	16,20	17,16		18,12		19,08		20,03		20,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	0,00	100	25.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0,00		4.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang PAUD (%)	18,48	24,36	30,24	0,00	36,11	4.500.000.000,00	41,99	3.500.000.000,00	47,86	3.500.000.000,00	53,74	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang SD (%)	68,52	71,83	75,14		78,45		81,76		85,07		88,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang SMP (%)	68,19	72,76	77,33		81,90		86,47		91,04		95,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,00		25.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	10	20	0,00	30	25.500.000,00	40	0,00	50	0,00	60	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					297.569.859.020,00		343.292.562.954,00		343.138.394.065,00		344.031.994.920,00		348.974.229.447,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					219.137.235.306,00		234.250.640.297,00		237.096.471.408,00		239.990.072.263,00		242.932.306.790,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	219.137.235.306,00	100	234.250.640.297,00	100	237.096.471.408,00	100	239.990.072.263,00	100	242.932.306.790,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					77.501.319.414,00		107.827.942.057,00		104.827.942.057,00		102.827.942.057,00		104.827.942.057,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	97,81	100	100	77.501.319.414,00	100	107.827.942.057,00	100	104.827.942.057,00	100	102.827.942.057,00	100	104.827.942.057,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	94,82	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	97,98	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	92,22	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	98,90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Usia Lanjut	94,94	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)													menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	87,61	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					428.644.300,00		744.475.800,00		744.475.800,00		744.475.800,00		744.475.800,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	20	22,5	25,00	428.644.300,00	29,62	744.475.800,00	29,97	744.475.800,00	30,32	744.475.800,00	30,68	744.475.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					329.675.000,00		295.489.800,00		295.489.800,00		295.489.800,00		295.489.800,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman (%)	95	98	98	329.675.000,00	98	295.489.800,00	98	295.489.800,00	99	295.489.800,00	100	295.489.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					172.985.000,00		174.015.000,00		174.015.000,00		174.015.000,00		174.015.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	80	90	100	172.985.000,00	100	174.015.000,00	100	174.015.000,00	100	174.015.000,00	100	174.015.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					57.427.935.563,00		70.093.922.359,00		67.188.043.948,00		55.682.797.282,00		68.280.720.836,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.083.170.163,00		11.443.178.379,00		11.537.299.968,00		11.632.053.302,00		11.729.976.856,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.083.170.163,00	100	11.443.178.379,00	100	11.537.299.968,00	100	11.632.053.302,00	100	11.729.976.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.003.895.400,00		6.361.375.300,00		6.361.375.300,00		3.361.375.300,00		6.361.375.300,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Pengelolaan sumber daya air (%)	100	100	100	6.003.895.400,00	100	6.361.375.300,00	100	6.361.375.300,00	100	3.361.375.300,00	100	6.361.375.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					200.000.000,00		1.853.220.000,00		1.853.220.000,00		853.220.000,00		1.853.220.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	persentase akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	1.853.220.000,00	100	1.853.220.000,00	100	853.220.000,00	100	1.853.220.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					0,00		617.000.000,00		617.000.000,00		617.000.000,00		617.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah (%)	100	100	100	0,00	100	617.000.000,00	100	617.000.000,00	100	617.000.000,00	100	617.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.573.000.000,00		2.022.660.000,00		2.022.660.000,00		1.022.660.000,00		2.022.660.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase kualitas sistem drainase perkotaan (%)	100	100	100	8.573.000.000,00	100	2.022.660.000,00	100	2.022.660.000,00	100	1.022.660.000,00	100	2.022.660.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.100.000.000,00		2.268.630.000,00		2.268.630.000,00		268.630.000,00		2.268.630.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	32,70	60,27	61,64	1.100.000.000,00	63,01	2.268.630.000,00	64,38	2.268.630.000,00	65,75	268.630.000,00	67,12	2.268.630.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					11.195.500.000,00		9.455.340.000,00		6.455.340.000,00		1.855.340.000,00		7.355.340.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (%)	100	100	100	11.195.500.000,00	100	9.455.340.000,00	100	6.455.340.000,00	100	1.855.340.000,00	100	7.355.340.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					20.202.770.000,00		35.465.451.480,00		35.465.451.480,00		35.465.451.480,00		35.465.451.480,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	57,31	57,55	58,31	20.202.770.000,00	58,93	35.465.451.480,00	59,71	35.465.451.480,00	60,15	35.465.451.480,00	60,79	35.465.451.480,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					240.000.000,00		279.117.200,00		279.117.200,00		279.117.200,00		279.117.200,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	53,50	35,21	36,45	240.000.000,00	37,70	279.117.200,00	37,90	279.117.200,00	38,75	279.117.200,00	40	279.117.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					829.600.000,00		327.950.000,00		327.950.000,00		327.950.000,00		327.950.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/kota (%)	100	100	100	829.600.000,00	100	327.950.000,00	100	327.950.000,00	100	327.950.000,00	100	327.950.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN					5.982.331.155,00		8.462.856.709,00		8.496.652.084,00		8.531.123.366,00		8.566.284.075,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.322.331.155,00		4.578.913.208,00		4.612.708.583,00		4.647.179.865,00		4.682.340.574,00	
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinnerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.322.331.155,00	100	4.578.913.208,00	100	4.612.708.583,00	100	4.647.179.865,00	100	4.682.340.574,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					400.000.000,00		787.743.101,00		787.743.101,00		787.743.101,00		787.743.101,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	787.743.101,00	100	787.743.101,00	100	787.743.101,00	100	787.743.101,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.050.000.000,00		884.210.000,00		884.210.000,00		884.210.000,00		884.210.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	28,25	10,00	14,27	1.050.000.000,00	21,41	884.210.000,00	28,55	884.210.000,00	35,68	884.210.000,00	42,82	884.210.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					60.000.000,00		247.395.500,00		247.395.500,00		247.395.500,00		247.395.500,00	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mencegah kawasan dan perumahan kumuh	Persentase peningkatan rumah layak huni (%)	90,32	90,50	90,58	60.000.000,00	90,72	247.395.500,00	90,85	247.395.500,00	90,99	247.395.500,00	91,13	247.395.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA					1.150.000.000,00		1.964.594.900,00		1.964.594.900,00		1.964.594.900,00		1.964.594.900,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	52,78	52,99	53,50	1.150.000.000,00	54,00	1.964.594.900,00	54,50	1.964.594.900,00	56,00	1.964.594.900,00	56,50	1.964.594.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.152.632.725,00		17.651.645.132,00		16.771.181.411,00		16.862.460.850,00		16.955.565.878,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.819.021.125,00		9.391.319.715,00		9.480.809.361,00		9.572.088.800,00		9.665.193.828,00	
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.704.990.643,00	100	6.403.300.122,00	100	6.465.746.663,00	100	6.529.442.135,00	100	6.594.411.516,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya Layanan Untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.114.030.482,00	100	2.988.019.593,00	100	3.015.062.698,00	100	3.042.646.665,00	100	3.070.782.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					375.037.700,00		2.527.057.850,00		2.527.057.850,00		2.527.057.850,00		2.527.057.850,00	
Meningkatnya layanan ketentaraman dan ketertiban umum	Persentase meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	375.037.700,00	100	2.527.057.850,00	100	2.527.057.850,00	100	2.527.057.850,00	100	2.527.057.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					508.573.900,00		2.266.193.367,00		1.296.240.000,00		1.296.240.000,00		1.296.240.000,00	
Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	508.573.900,00	100	2.266.193.367,00	100	1.296.240.000,00	100	1.296.240.000,00	100	1.296.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.450.000.000,00		3.467.074.200,00		3.467.074.200,00		3.467.074.200,00		3.467.074.200,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, penanggulangan bencana dan penyelamatan	Persentase layanan pencegahan kebakaran, penanggulangan bencana dan penyelamatan yang ditingkatkan (%)	100	100	100	1.450.000.000,00	100	3.467.074.200,00	100	3.467.074.200,00	100	3.467.074.200,00	100	3.467.074.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.670.290.322,00		4.520.171.122,00		4.551.508.638,00		4.583.472.904,00		4.616.076.456,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.656.375.422,00		3.117.333.449,00		3.188.577.689,00		3.270.117.920,00		3.355.102.462,00	
Terpenuhinya Layanan Untuk Menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.656.375.422,00	100	3.117.333.449,00	100	3.188.577.689,00	100	3.270.117.920,00	100	3.355.102.462,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					281.197.700,00		412.000.000,00		412.000.000,00		416.000.000,00		412.000.000,00	
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan sosial	Persentase potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan social (%)	100	100	100	281.197.700,00	100	412.000.000,00	100	412.000.000,00	100	416.000.000,00	100	412.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					201.654.400,00		278.328.973,00		319.000.000,00		276.846.284,00		299.465.294,00	
Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	100	100	100	201.654.400,00	100	278.328.973,00	100	319.000.000,00	100	276.846.284,00	100	299.465.294,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					285.064.200,00		456.508.700,00		436.508.700,00		411.508.700,00		366.508.700,00	
Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	100	100	100	285.064.200,00	100	456.508.700,00	100	436.508.700,00	100	411.508.700,00	100	366.508.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	70,40	86,76	86,92		87,08		87,24		87,40		87,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					158.000.000,00		184.000.000,00		164.000.000,00		164.000.000,00		164.000.000,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	158.000.000,00	100	184.000.000,00	100	164.000.000,00	100	164.000.000,00	100	164.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					87.998.600,00		72.000.000,00		31.422.249,00		45.000.000,00		19.000.000,00	
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	87.998.600,00	100	72.000.000,00	100	31.422.249,00	100	45.000.000,00	100	19.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.377.758.384,00		8.056.194.259,00		8.124.306.188,00		8.193.780.355,00		8.264.644.006,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.935.770.384,00		5.550.932.859,00		5.619.044.788,00		5.688.518.955,00		5.759.382.606,00	
Terpenuhinya Layanan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.935.770.384,00	100	5.550.932.859,00	100	5.619.044.788,00	100	5.688.518.955,00	100	5.759.382.606,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					15.000.200,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Efektivitas Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (%)	69,23	66,67	73,33	15.000.200,00	75,00	15.000.000,00	76,47	15.000.000,00	77,78	15.000.000,00	77,78	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					239.987.800,00		308.079.200,00		308.079.200,00		308.079.200,00		308.079.200,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	69,87	71,28	71,84	239.987.800,00	72,83	308.079.200,00	73,43	308.079.200,00	75,01	308.079.200,00	75,51	308.079.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					115.000.000,00		233.673.400,00		233.673.400,00		233.673.400,00		233.673.400,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri (%)	40,97	40,98	41,17	115.000.000,00	47,54	233.673.400,00	48,56	233.673.400,00	49,29	233.673.400,00	51,32	233.673.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.072.000.000,00		1.948.508.800,00		1.948.508.800,00		1.948.508.800,00		1.948.508.800,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	38,61	51,11	51,15	1.072.000.000,00	51,81	1.948.508.800,00	52,18	1.948.508.800,00	52,54	1.948.508.800,00	52,9	1.948.508.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					960.660.200,00		551.580.000,00		551.580.000,00		551.580.000,00		551.580.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					68.500.000,00		21.260.000,00		21.260.000,00		21.260.000,00		21.260.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	29,78	34,78	39,78	68.500.000,00	44,78	21.260.000,00	49,78	21.260.000,00	54,78	21.260.000,00	59,78	21.260.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan peran perempuan dalam pembangunan														Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	58,16	60,52	62,89		65,25		67,61		69,97		72,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					92.692.500,00		70.552.500,00		70.552.500,00		70.552.500,00		70.552.500,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	92.692.500,00	100	70.552.500,00	100	70.552.500,00	100	70.552.500,00	100	70.552.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	73,92	81,67	84	200.000.000,00	86,33	50.000.000,00	88,67	50.000.000,00	91	50.000.000,00	93	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					31.500.000,00		29.660.000,00		29.660.000,00		29.660.000,00		29.660.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	31.500.000,00	100	29.660.000,00	100	29.660.000,00	100	29.660.000,00	100	29.660.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					110.000.200,00		53.389.500,00		53.389.500,00		53.389.500,00		53.389.500,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konfrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	58,68	60,51	62,34	110.000.200,00	64,17	53.389.500,00	66	53.389.500,00	67,83	53.389.500,00	69,66	53.389.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					457.967.500,00		326.718.000,00		326.718.000,00		326.718.000,00		326.718.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	457.967.500,00	100	326.718.000,00	100	326.718.000,00	100	326.718.000,00	100	326.718.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	62,74	64,81	66,88		68,95		71,02		73,09		73,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.611.036.797,00		4.112.203.392,00		4.156.853.634,00		4.202.396.881,00		4.248.850.993,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.112.038.537,00		3.672.476.692,00		3.717.126.934,00		3.762.670.181,00		3.809.124.293,00	
Terpenuhinya Layanan Untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.112.038.537,00	100	3.672.476.692,00	100	3.717.126.934,00	100	3.762.670.181,00	100	3.809.124.293,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0,00		19.950.000,00		19.950.000,00		19.950.000,00		19.950.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	25,45	45,18	54,15	0,00	63,12	19.950.000,00	72,09	19.950.000,00	81,06	19.950.000,00	90,03	19.950.000,00	Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan														menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					415.000.200,00		364.826.500,00		364.826.500,00		364.826.500,00		364.826.500,00	
Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	84,3	88,2	92,2	415.000.200,00	96,1	364.826.500,00	98,2	364.826.500,00	99,1	364.826.500,00	100	364.826.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					33.999.900,00		7.360.000,00		7.360.000,00		7.360.000,00		7.360.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,83	5	5	33.999.900,00	4,8	7.360.000,00	4,8	7.360.000,00	3,88	7.360.000,00	3,88	7.360.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					49.998.160,00		47.590.200,00		47.590.200,00		47.590.200,00		47.590.200,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	98	49.998.160,00	98	47.590.200,00	98	47.590.200,00	98	47.590.200,00	98	47.590.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					8.219.000.000,00		589.110.000,00		589.110.000,00		589.110.000,00		589.110.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					19.000.000,00		63.074.200,00		63.074.200,00		63.074.200,00		63.074.200,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	19.000.000,00	100	63.074.200,00	100	63.074.200,00	100	63.074.200,00	100	63.074.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					8.200.000.000,00		518.939.900,00		518.939.900,00		518.939.900,00		518.939.900,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	100	100	100	8.200.000.000,00	100	518.939.900,00	100	518.939.900,00	100	518.939.900,00	100	518.939.900,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tanah untuk pembangunan	Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)													Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	10	10		20		20		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	10	10		20		20		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					0,00		7.095.900,00		7.095.900,00		7.095.900,00		7.095.900,00	
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat (%)	100	100	100	0,00	100	7.095.900,00	100	7.095.900,00	100	7.095.900,00	100	7.095.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	10	10		20		20		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.231.957.657,00		10.624.022.675,00		10.667.390.519,00		10.711.690.850,00		10.756.926.747,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.649.493.464,00		8.692.455.575,00		8.735.823.419,00		8.780.123.750,00		8.825.359.647,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.649.493.464,00	100	8.692.455.575,00	100	8.735.823.419,00	100	8.780.123.750,00	100	8.825.359.647,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					28.350.700,00		28.350.700,00		28.350.700,00		28.350.700,00		28.350.700,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	28.350.700,00	100	28.350.700,00	100	28.350.700,00	100	28.350.700,00	100	28.350.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					246.551.500,00		246.551.500,00		246.551.500,00		246.551.500,00		246.551.500,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	246.551.500,00	100	246.551.500,00	100	246.551.500,00	100	246.551.500,00	100	246.551.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					184.930.600,00		184.930.600,00		184.930.600,00		184.930.600,00		184.930.600,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	26,40	26,41	26,42	184.930.600,00	26,42	184.930.600,00	26,43	184.930.600,00	64,94	184.930.600,00	26,44	184.930.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					4.526.600,00		4.526.600,00		4.526.600,00		4.526.600,00		4.526.600,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	4.526.600,00	100	4.526.600,00	100	4.526.600,00	100	4.526.600,00	100	4.526.600,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					14.175.500,00		14.175.500,00		14.175.500,00		14.175.500,00		14.175.500,00	
Peningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	14.175.500,00	100	14.175.500,00	100	14.175.500,00	100	14.175.500,00	100	14.175.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					13.390.600,00		13.390.600,00		13.390.600,00		13.390.600,00		13.390.600,00	
Peningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	13.390.600,00	100	13.390.600,00	100	13.390.600,00	100	13.390.600,00	100	13.390.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					5.001.600,00		5.001.600,00		5.001.600,00		5.001.600,00		5.001.600,00	
Peningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	5.001.600,00	100	5.001.600,00	100	5.001.600,00	100	5.001.600,00	100	5.001.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					4.450.300,00		4.450.300,00		4.450.300,00		4.450.300,00		4.450.300,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	4.450.300,00	100	4.450.300,00	100	4.450.300,00	100	4.450.300,00	100	4.450.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.081.086.793,00		1.430.189.700,00		1.430.189.700,00		1.430.189.700,00		1.430.189.700,00	
Peningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	63	63	64	1.081.086.793,00	65	1.430.189.700,00	67	1.430.189.700,00	70	1.430.189.700,00	72	1.430.189.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.773.196.350,00		6.290.549.571,00		6.345.004.570,00		6.400.548.669,00		6.457.203.649,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.251.195.750,00		5.579.900.871,00		5.634.355.870,00		5.689.899.969,00		5.746.554.949,00	
Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.251.195.750,00	100	5.579.900.871,00	100	5.634.355.870,00	100	5.689.899.969,00	100	5.746.554.949,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					422.000.100,00		477.708.600,00		477.708.600,00		477.708.600,00		477.708.600,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda penduduk (KTP-EI) (%)	98,28	98,47	98,66	422.000.100,00	98,85	477.708.600,00	99,04	477.708.600,00	99,24	477.708.600,00	99,43	477.708.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	11,09	12,99	15,22		17,81		20,8		24,40		28,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	81,04	81,70	82,36		83,03		83,71		84,39		85,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					50.000.200,00		80.035.200,00		80.035.200,00		80.035.200,00		80.035.200,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan (%)	99,67	100	100	50.000.200,00	100	80.035.200,00	100	80.035.200,00	100	80.035.200,00	100	80.035.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran Balita (0-5) Tahun yang diterbitkan (%)	99,79	99,91	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Layanan Penerbitan Akta Kematian (%)	100,50	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Layanan Penerbitan Akta Perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan penerbitan akta perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					16.767.600,00		92.732.600,00		92.732.600,00		92.732.600,00		92.732.600,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)	33,33	33,33	35,71	16.767.600,00	38,10	92.732.600,00	40,48	92.732.600,00	42,86	92.732.600,00	45,24	92.732.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					33.232.700,00		60.172.300,00		60.172.300,00		60.172.300,00		60.172.300,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	33.232.700,00	100	60.172.300,00	100	60.172.300,00	100	60.172.300,00	100	60.172.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.530.251.428,17		4.215.208.763,00		4.251.800.309,41		4.289.123.687,19		4.327.193.532,31	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.730.251.428,17		3.097.488.811,00		3.190.289.200,00		3.297.371.907,82		3.370.646.778,77	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.730.251.428,17	100	3.097.488.811,00	100	3.190.289.200,00	100	3.297.371.907,82	100	3.370.646.778,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					7.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	20,00	24,62	30,77	7.000.000,00	36,92	29.000.000,00	43,08	29.000.000,00	49,23	29.000.000,00	53,85	29.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					43.000.000,00		18.026.400,00		18.026.400,00		18.026.400,00		18.026.400,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Desa (%)	21,54	24,62	30,77	43.000.000,00	40	18.026.400,00	60	18.026.400,00	80	18.026.400,00	100	18.026.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					650.000.000,00		89.000.000,00		79.000.000,00		89.000.000,00		79.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (%)	0	35,38	41,54	650.000.000,00	47,59	89.000.000,00	53,85	79.000.000,00	60	89.000.000,00	66,15	79.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.100.000.000,00		981.693.552,00		935.484.709,41		855.725.379,37		830.520.353,54	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (%)	0	47,69	56,92	1.100.000.000,00	67,69	981.693.552,00	78,46	935.484.709,41	87,69	855.725.379,37	100	830.520.353,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase BUMDES Maju (Bumdes)	1,54	1,54	4,62		7,69		12,31		15,38		23,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.641.192.807,00		10.825.354.615,00		10.866.884.157,00		10.909.244.289,00		10.952.451.623,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.941.066.807,00		3.913.838.215,00		3.955.367.757,00		3.997.727.889,00		4.040.935.223,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.941.066.807,00	100	3.913.838.215,00	100	3.955.367.757,00	100	3.997.727.889,00	100	4.040.935.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					472.705.000,00		286.200.000,00		286.200.000,00		286.200.000,00		286.200.000,00	
Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,14	2,04	1,94	472.705.000,00	1,84	286.200.000,00	1,74	286.200.000,00	1,64	286.200.000,00	1,54	286.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	26,8	25,3--	23,8--		22,3--		20,8--		19,3--		17,8--		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.933.570.000,00		4.381.186.400,00		4.381.186.400,00		4.381.186.400,00		4.381.186.400,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	66,63	68,13	69,63	2.933.570.000,00	71,13	4.381.186.400,00	72,63	4.381.186.400,00	74,13	4.381.186.400,00	75,63	4.381.186.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalence Rate/mCPR (%)													Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,88	6,18	5,48		4,78		4,08		3,38		2,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.293.851.000,00		2.244.130.000,00		2.244.130.000,00		2.244.130.000,00		2.244.130.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	73,92	81,67	84	2.293.851.000,00	86,33	2.244.130.000,00	88,67	2.244.130.000,00	91	2.244.130.000,00	93	2.244.130.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					17.727.308.633,00		19.083.216.902,00		19.128.935.298,00		19.175.321.574,00		19.222.983.707,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.408.518.633,00		4.798.959.602,00		4.844.677.998,00		4.891.064.274,00		4.938.726.407,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.408.518.633,00	100	4.798.959.602,00	100	4.844.677.998,00	100	4.891.064.274,00	100	4.938.726.407,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					12.020.000.000,00		11.730.287.300,00		11.730.287.300,00		11.730.287.300,00		11.730.287.300,00	
Persentase peningkatan penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	16,63	26,33	53,89	12.020.000.000,00	64,92	11.730.287.300,00	77,29	11.730.287.300,00	88,33	11.730.287.300,00	100	11.730.287.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					298.790.000,00		2.553.970.000,00		2.553.970.000,00		2.553.970.000,00		2.553.970.000,00	
Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan pelayaran	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas Pengelolaan Pelayaran (%)	11,86	11,99	24,79	298.790.000,00	39,99	2.553.970.000,00	57,59	2.553.970.000,00	77,59	2.553.970.000,00	100	2.553.970.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.517.993.443,00		7.171.237.572,00		6.624.917.533,00		6.679.671.093,00		7.335.519.724,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.546.053.243,00		5.084.329.872,00		5.138.009.833,00		5.192.763.393,00		5.248.612.024,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.546.053.243,00	100	5.084.329.872,00	100	5.138.009.833,00	100	5.192.763.393,00	100	5.248.612.024,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.576.940.200,00		1.205.527.500,00		605.527.500,00		605.527.500,00		1.205.527.500,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	1.576.940.200,00	100	1.205.527.500,00	100	605.527.500,00	100	605.527.500,00	100	1.205.527.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					395.000.000,00		881.380.200,00		881.380.200,00		881.380.200,00		881.380.200,00	
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	70	70	70	395.000.000,00	75	881.380.200,00	75	881.380.200,00	80	881.380.200,00	80	881.380.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.028.693.565,25		7.482.744.090,00		7.543.457.261,00		7.606.040.905,00		7.672.534.538,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.448.693.565,25		6.539.244.090,00		6.599.957.261,00		6.662.540.905,00		6.729.034.538,00	
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.448.693.565,25	100	6.539.244.090,00	100	6.599.957.261,00	100	6.662.540.905,00	100	6.729.034.538,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					12.521.100,00		5.782.500,00		5.782.500,00		5.782.500,00		5.782.500,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	1	1	1	12.521.100,00	2	5.782.500,00	2	5.782.500,00	2	5.782.500,00	2	5.782.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					14.200.000,00		6.367.600,00		6.367.600,00		6.367.600,00		6.367.600,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	-	8	12	14.200.000,00	13	6.367.600,00	13	6.367.600,00	14	6.367.600,00	14	6.367.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					13.650.000,00		5.421.000,00		5.421.000,00		5.421.000,00		5.421.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	15,06	46,90	47,36	13.650.000,00	47,82	5.421.000,00	48,28	5.421.000,00	48,74	5.421.000,00	49,20	5.421.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					105.628.900,00		42.428.900,00		42.428.900,00		42.428.900,00		42.428.900,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	6	24	105.628.900,00	16	42.428.900,00	18	42.428.900,00	14	42.428.900,00	14	42.428.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	15,06	20,46	21,15	4.000.000,00	21,84	5.000.000,00	22,53	5.000.000,00	23,22	5.000.000,00	23,91	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					333.903.500,00		765.046.600,00		765.046.600,00		765.046.600,00		765.046.600,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0,06	0,06	333.903.500,00	0,06	765.046.600,00	0,06	765.046.600,00	0,06	765.046.600,00	0,06	765.046.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					96.096.500,00		113.453.400,00		113.453.400,00		113.453.400,00		113.453.400,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi Jumlah UKM (Persentase)	0	0,16	0,17	96.096.500,00	0,16	113.453.400,00	0,16	113.453.400,00	0,16	113.453.400,00	0,16	113.453.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.767.626.768,00		6.301.025.031,00		6.358.994.440,00		6.418.123.237,00		6.478.434.611,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.604.684.768,00		6.048.960.031,00		6.126.929.440,00		6.246.058.237,00		6.266.369.611,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.604.684.768,00	100	6.048.960.031,00	100	6.126.929.440,00	100	6.246.058.237,00	100	6.266.369.611,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					94.660.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-7,10	0,48	0,60	94.660.000,00	0,83	60.000.000,00	1,16	50.000.000,00	1,61	30.000.000,00	2,20	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0,00		55.000.000,00		45.000.000,00		10.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	18,06	3,53	4,55	0,00	5,43	55.000.000,00	6,19	45.000.000,00	7,77	10.000.000,00	8,11	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					18.282.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	63,15	65,65	68,16	18.282.000,00	70,65	25.000.000,00	73,15	30.000.000,00	75,65	30.000.000,00	78,15	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		109.065.000,00		104.065.000,00		99.065.000,00		104.065.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	47,06	39,77	29,35	50.000.000,00	20,62	109.065.000,00	12,62	104.065.000,00	7,21	99.065.000,00	5,00	104.065.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0,35	97,70	97,72	0,00	97,82	3.000.000,00	97,92	3.000.000,00	98,02	3.000.000,00	98,04	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.620.821.057,00		8.888.271.360,00		7.945.421.031,00		7.953.472.196,00		8.778.415.419,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.750.821.057,00		4.530.438.760,00		4.407.588.431,00		4.370.582.819,00		4.370.582.819,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.750.821.057,00	100	4.530.438.760,00	100	4.407.588.431,00	100	4.370.582.819,00	100	4.370.582.819,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					270.000.000,00		977.832.600,00		977.832.600,00		977.832.600,00		977.832.600,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	9,1	9,56	10,01	270.000.000,00	10,47	977.832.600,00	10,92	977.832.600,00	11,38	977.832.600,00	11,83	977.832.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.450.000.000,00		3.330.000.000,00		2.510.000.000,00		2.555.056.777,00		3.380.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	16,07	16,49	16,82	4.450.000.000,00	17,16	3.330.000.000,00	17,50	2.510.000.000,00	17,86	2.555.056.777,00	18,22	3.380.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN					150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	3,12	3,28	3,61	150.000.000,00	3,97	50.000.000,00	4,36	50.000.000,00	4,80	50.000.000,00	5,28	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					34.999.200,00		32.065.000,00		32.065.000,00		32.065.000,00		32.065.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					34.999.200,00		32.065.000,00		32.065.000,00		32.065.000,00		32.065.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (%)	100	100	100	34.999.200,00	100	32.065.000,00	100	32.065.000,00	100	32.065.000,00	100	32.065.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					14.994.900,00		74.910.100,00		47.960.100,00		74.960.100,00		74.960.600,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					14.994.900,00		74.910.100,00		47.960.100,00		74.960.100,00		74.960.600,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	0	40	14.994.900,00	40	74.910.100,00	50	47.960.100,00	50	74.960.100,00	50	74.960.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					225.000.000,00		1.039.700.000,00		974.700.000,00		974.700.000,00		974.700.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					191.000.000,00		292.700.000,00		292.700.000,00		292.700.000,00		292.700.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	50	60	191.000.000,00	70	292.700.000,00	80	292.700.000,00	90	292.700.000,00	100	292.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Prosentase Kesenian Tradisional yang	100	100	100	0,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengembangan kesenian tradisional	Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)													menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					34.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	75,00	77,50	80,00	34.000.000,00	82,50	40.000.000,00	85,00	40.000.000,00	87,50	40.000.000,00	89,00	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					0,00		327.000.000,00		577.000.000,00		577.000.000,00		577.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	39,81	50,00	60,19	0,00	70,37	327.000.000,00	80,56	577.000.000,00	90,74	577.000.000,00	100	577.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan (%)	7,28	10,40	13,51		16,63		19,75		22,87		25,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0,00		315.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	5	0,00	12,50	315.000.000,00	22,50	0,00	35,00	0,00	50,00	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.772.838.555,15		4.688.738.372,00		4.732.016.092,59		4.782.911.883,81		4.834.653.717,69	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.120.852.455,15		3.886.270.872,00		4.306.102.798,59		4.438.749.883,81		4.570.891.034,69	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.120.852.455,15	100	3.886.270.872,00	100	4.306.102.798,59	100	4.438.749.883,81	100	4.570.891.034,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					630.884.400,00		779.049.200,00		409.154.994,00		320.002.000,00		239.344.383,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	72,38	75,5	75,8	630.884.400,00	76,2	779.049.200,00	76,5	409.154.994,00	77,2	320.002.000,00	77,9	239.344.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					21.101.700,00		23.418.300,00		16.758.300,00		24.160.000,00		24.418.300,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	25	25	25	21.101.700,00	25	23.418.300,00	27	16.758.300,00	27	24.160.000,00	27	24.418.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					67.442.000,00		42.204.900,00		46.605.700,00		44.342.000,00		42.204.900,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					57.799.300,00		26.895.900,00		31.296.700,00		29.033.000,00		26.895.900,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	75,00	75,2	75,4	57.799.300,00	75,60	26.895.900,00	75,8	31.296.700,00	76,00	29.033.000,00	76,2	26.895.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					9.642.700,00		15.309.000,00		15.309.000,00		15.309.000,00		15.309.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2,38	2,38	2,38	9.642.700,00	2,38	15.309.000,00	2,38	15.309.000,00	4,76	15.309.000,00	4,76	15.309.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.850.659.045,00		9.145.287.053,00		7.189.988.385,00		7.235.758.243,00		8.282.538.999,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.655.088.495,00		5.247.287.053,00		5.141.999.619,00		5.141.999.619,00		5.694.495.405,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan	100	100	100	3.655.088.495,00	100	5.247.287.053,00	100	5.141.999.619,00	100	5.141.999.619,00	100	5.694.495.405,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penunjang Perangkat Daerah (%)													Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.021.399.700,00		1.018.000.000,00		637.988.766,00		683.758.624,00		928.043.594,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	22.146,11	24.000	24.416,08	1.021.399.700,00	25.636,89	1.018.000.000,00	26.918,73	637.988.766,00	28.264,67	683.758.624,00	2.967.790	928.043.594,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.894.170.750,00		2.445.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.350.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton)	417.612,10	480.000	460.417,34	1.894.170.750,00	483.438,21	2.445.000.000,00	507.610,12	1.100.000.000,00	532.990,62	1.100.000.000,00	559.640,15	1.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					50.000.100,00		175.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Ketaatan Usaha Perikanan dalam Kabupaten terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Terhadap Perundang-Undangan (%)	46,66	47,37	57,89	50.000.100,00	68,42	175.000.000,00	78,95	100.000.000,00	89,47	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					230.000.000,00		260.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	56,5	58	60	230.000.000,00	62	260.000.000,00	64	210.000.000,00	66	210.000.000,00	68	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					428.420.000,00		930.140.000,00		920.120.000,00		960.140.000,00		1.184.233.165,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					30.000.000,00		560.000.000,00		460.000.000,00		510.000.000,00		734.093.165,00	
Meningkatnya daya tarik Destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan	-51,58	30	32	30.000.000,00	33,56	560.000.000,00	35,56	460.000.000,00	37,56	510.000.000,00	39,46	734.093.165,00	Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)													menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	0,42	0,42	0,42		0,42		0,42		0,42		0,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan (%)	89,83	47,32	48,74		50,20		51,71		53,26		54,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	6,27	6,89	7,03		8,14		8,77		9,39		10,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	3,26	3,39	3,53		3,67		3,82		3,97		4,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					250.000.000,00		210.000.000,00		299.980.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	-16,67	20	20	250.000.000,00	33,33	210.000.000,00	37,5	299.980.000,00	45,45	290.000.000,00	45,45	290.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					52.520.000,00		60.140.000,00		60.140.000,00		60.140.000,00		60.140.000,00	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0,46	1,06	1,66	52.520.000,00	2,26	60.140.000,00	2,86	60.140.000,00	3,46	60.140.000,00	4,06	60.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					95.900.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	3,5	3,8	5,1	95.900.000,00	6,4	100.000.000,00	7,7	100.000.000,00	9,0	100.000.000,00	10,3	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					19.792.444.786,57		20.435.027.719,00		15.270.922.913,00		14.809.533.011,00		20.850.912.310,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.523.901.186,57		11.255.885.619,00		11.391.780.813,00		11.530.390.911,00		11.671.770.210,00	
Tersedianya Layanan Perangkat Daerah Untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	10.523.901.186,57	100	11.255.885.619,00	100	11.391.780.813,00	100	11.530.390.911,00	100	11.671.770.210,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.855.836.600,00		319.899.900,00		319.899.900,00		319.899.900,00		319.899.900,00	
Meningkatnya distribusi dan Kualitas sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	5	5	5	4.855.836.600,00	5	319.899.900,00	5	319.899.900,00	5	319.899.900,00	5	319.899.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1,01	1,01	1,02		1,02		1,03		1,03		1,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Produksi Perkebunan (%)	0,16	17	17		17		17		17		17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	1,01	1,01	1,02		1,02		1,01		1,01		1,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.760.978.400,00		8.700.290.000,00		3.400.290.000,00		2.800.290.000,00		8.700.290.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	12.000	15.000	15.000	2.760.978.400,00	15.000	8.700.290.000,00	15.000	3.400.290.000,00	15.000	2.800.290.000,00	15.000	8.700.290.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					200.000.000,00		83.158.000,00		83.158.000,00		83.158.000,00		83.158.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	90	90	90	200.000.000,00	90	83.158.000,00	90	83.158.000,00	90	83.158.000,00	90	83.158.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					41.455.900,00		49.867.600,00		49.867.600,00		49.867.600,00		49.867.600,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	90	90	90	41.455.900,00	90	49.867.600,00	90	49.867.600,00	90	49.867.600,00	90	49.867.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.410.272.700,00		25.926.600,00		25.926.600,00		25.926.600,00		25.926.600,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10	10	10	1.410.272.700,00	10	25.926.600,00	10	25.926.600,00	10	25.926.600,00	10	25.926.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.325.000.000,00		226.374.000,00		226.374.000,00		226.374.000,00		226.374.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					119.115.300,00		148.751.000,00		148.751.000,00		148.751.000,00		148.751.000,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan pendapatan daerah (%)	0	0	0	119.115.300,00	0	148.751.000,00	0	148.751.000,00	0	148.751.000,00	0	148.751.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					5.529.700,00		3.140.300,00		3.140.300,00		3.140.300,00		3.140.300,00	
Meningkatnya Kemudahan proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	98,98	99,04	99,10	5.529.700,00	99,21	3.140.300,00	99,26	3.140.300,00	99,32	3.140.300,00	99,41	3.140.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.000.000.000,00		6.873.000,00		6.873.000,00		6.873.000,00		6.873.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	61,60	66	72	1.000.000.000,00	75	6.873.000,00	77,77	6.873.000,00	80,55	6.873.000,00	83,33	6.873.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					195.355.000,00		16.859.700,00		16.859.700,00		16.859.700,00		16.859.700,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	82,8	81,64	81,19	195.355.000,00	80,16	16.859.700,00	80,36	16.859.700,00	79,65	16.859.700,00	78,83	16.859.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	0	0	0,00	30,00	10.000.000,00	31,50	10.000.000,00	33,00	10.000.000,00	34,50	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN					5.000.000,00		30.750.000,00		30.750.000,00		30.750.000,00		30.750.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	30.750.000,00	100	30.750.000,00	100	30.750.000,00	100	30.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	28,84	0	0	0,00	31,09	10.000.000,00	33,34	10.000.000,00	37,78	10.000.000,00	41,24	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					875.000.000,00		1.419.961.900,00		1.419.961.900,00		1.419.961.900,00		1.419.961.900,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					841.060.000,00		1.396.681.900,00		1.396.681.900,00		1.396.681.900,00		1.396.681.900,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	39,02	38,44	841.060.000,00	39,15	1.396.681.900,00	39,61	1.396.681.900,00	39,90	1.396.681.900,00	41,44	1.396.681.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,00		3.280.000,00		3.280.000,00		3.280.000,00		3.280.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	0,65	0,99	0,00	1,53	3.280.000,00	2,33	3.280.000,00	2,78	3.280.000,00	3,16	3.280.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					33.940.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	33.940.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					53.159.436.186,00		51.235.439.332,00		51.742.146.137,00		50.902.152.798,00		52.065.359.733,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.597.912.836,00		35.350.160.489,00		35.809.608.930,00		34.920.939.475,00		36.034.010.010,00	
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak (Skor)	65,8	70	71	35.597.912.836,00	72	35.350.160.489,00	73	35.809.608.930,00	74	34.920.939.475,00	75	36.034.010.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Suvey Kepuasan Masyarakat (Skor)	83,06	83,06	84		85,5		86,5		87,5		88,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Skor)	86,4	86,5	87		87,5		88,5		89,5		90,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3	3,22	3,5		3,55		4		4,25		4,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Penyusunan LAKIP Daerah yang Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	99,27	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					17.196.017.300,00		15.327.595.680,00		15.358.123.548,00		15.389.567.253,00		15.421.954.272,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan LKPj Bupati Tepat Waktu (%)	100	100	100	17.196.017.300,00	100	15.327.595.680,00	100	15.358.123.548,00	100	15.389.567.253,00	100	15.421.954.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Skor)	3,1478	3,2017	3,2726		3,3933		3,4093		3,6237		3,7147		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	82,6	82,7	87,6		90,8		95,6		97,6		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kualitas Kebijakan (Skor)	-	80	80		85		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					365.506.050,00		557.683.163,00		574.413.659,00		591.646.070,00		609.395.451,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,00	4,07	4,10	365.506.050,00	4,13	557.683.163,00	4,16	574.413.659,00	4,20	591.646.070,00	4,21	609.395.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Nilai)	71,61	73	74		75		77		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan UKPBJ (Nilai)	77,7	77,7	77,7		88,8		88,8		88,8		88,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					41.633.212.521,00		49.859.424.641,00		49.902.477.007,00		49.946.390.422,00		49.991.182.104,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.826.593.817,00		31.244.165.680,00		30.773.650.580,00		30.653.651.580,00		31.240.454.104,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	26.826.593.817,00	100	31.244.165.680,00	100	30.773.650.580,00	100	30.653.651.580,00	100	31.240.454.104,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.806.618.704,00		18.615.258.961,00		19.128.826.427,00		19.292.738.842,00		18.750.728.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (%)	95	95	95	14.806.618.704,00	96	18.615.258.961,00	97	19.128.826.427,00	98	19.292.738.842,00	100	18.750.728.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					10.079.965.096,00		9.194.264.267,00		9.229.133.054,00		9.188.534.549,00		9.151.312.653,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.135.271.596,00		7.790.300.590,00		7.781.565.564,00		7.844.357.555,00		7.918.480.642,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.135.271.596,00	100	7.790.300.590,00	100	7.781.565.564,00	100	7.844.357.555,00	100	7.918.480.642,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					944.693.500,00		753.963.677,00		797.567.490,00		794.176.994,00		732.832.011,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	944.693.500,00	100	753.963.677,00	100	797.567.490,00	100	794.176.994,00	100	732.832.011,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					1.000.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	500.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					243.874.499.036,00		235.460.473.902,00		250.952.281.935,00		265.855.879.929,00		240.733.680.334,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.606.909.891,00		55.233.047.145,00		56.266.877.489,00		57.330.998.404,00		58.426.496.402,00	
Terpenuhinya Layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	53.738.889.480,00	100,00	41.737.288.421,00	100,00	42.378.605.666,00	100,00	43.032.749.256,00	100,00	43.699.975.718,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	12.868.020.411,00	100	13.495.758.724,00	100	13.888.271.823,00	100	14.298.249.148,00	100	14.726.520.684,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					174.219.328.645,00		177.589.884.847,00		192.047.862.536,00		205.887.339.615,00		179.669.642.022,00	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100,00	100,00	100,00	172.769.328.645,00	100,00	175.256.484.597,00	100,00	189.714.462.286,00	100,00	203.553.939.365,00	100,00	177.336.241.772,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang	35,91	37,16	35,00	1.276.301.800,00	30,00	1.898.400.250,00	30,00	1.897.400.250,00	30,00	1.895.400.250,00	30,00	1.895.400.250,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dialokasikan melalui TKD (Persentase)													Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	33,84	20,00	21,00		25,00		30,00		35,00		40,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	93,35	94,00	95,00	173.698.200,00	96,00	435.000.000,00	97,00	436.000.000,00	98,00	438.000.000,00	99,00	438.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	3,80	2,25	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					200.000.000,00		335.253.510,00		335.253.510,00		335.253.510,00		335.253.510,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	7,00	7,03	9,03	200.000.000,00	11,03	335.253.510,00	13,03	335.253.510,00	15,03	335.253.510,00	15,03	335.253.510,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.848.260.500,00		2.302.288.400,00		2.302.288.400,00		2.302.288.400,00		2.302.288.400,00	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	0	100	100	2.848.260.500,00	100	2.302.288.400,00	100	2.302.288.400,00	100	2.302.288.400,00	100	2.302.288.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.565.006.091,26		6.240.732.907,00		6.300.412.831,00		6.361.286.353,00		6.423.377.346,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.064.906.291,26		5.757.944.307,00		5.817.624.231,00		5.878.497.753,00		5.940.588.746,00	
Terpenuhinya Layanan Untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	99,82	99,50	99,50	5.064.906.291,26	99,50	5.757.944.307,00	99,50	5.817.624.231,00	99,50	5.878.497.753,00	99,50	5.940.588.746,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					500.099.800,00		482.788.600,00		482.788.600,00		482.788.600,00		482.788.600,00	
Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	2,13	84,16	2,08	500.099.800,00	2,12	482.788.600,00	2,17	482.788.600,00	2,22	482.788.600,00	2,27	482.788.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2,57	4,27	5,77		7,27		8,77		10,27		11,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	10,39	18,97	6,23		5,61		9,50		2,71		4,63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	93	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.001.222.600,00		226.078.500,00		226.078.500,00		226.078.500,00		226.078.500,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.001.222.600,00		226.078.500,00		226.078.500,00		226.078.500,00		226.078.500,00	
Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	15,41	17,91	20,41	1.001.222.600,00	22,91	226.078.500,00	25,41	226.078.500,00	27,91	226.078.500,00	30,41	226.078.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					498.000.500,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					498.000.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya implementasi kajian pembangunan daerah dan Persentase Peningkatan Inovasi					498.000.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					11.905.080.633,00		18.992.373.901,00		19.180.686.056,00		19.270.764.453,00		19.462.644.419,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.235.818.233,00		12.618.655.101,00		12.706.967.256,00		12.797.045.653,00		12.888.925.619,00	
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.235.818.233,00	100	12.618.655.101,00	100	12.706.967.256,00	100	12.797.045.653,00	100	12.888.925.619,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.593.269.400,00		5.493.062.600,00		5.593.062.600,00		5.593.062.600,00		5.693.062.600,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	2.593.269.400,00	100	5.493.062.600,00	100	5.593.062.600,00	100	5.593.062.600,00	100	5.693.062.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					75.993.000,00		880.656.200,00		880.656.200,00		880.656.200,00		880.656.200,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3	3	3	75.993.000,00	3	880.656.200,00	3	880.656.200,00	4	880.656.200,00	4	880.656.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					74.961.472.718,00		78.220.333.124,00		78.841.411.832,00		79.530.123.956,00		80.251.765.436,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.219.456.273,00		47.957.758.524,00		48.611.951.875,00		49.336.428.066,00		50.089.305.336,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.173.236.568,00	100	6.383.680.493,00	100	6.469.082.846,00	100	6.556.193.246,00	100	6.645.045.855,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.156.207.455,00	100	2.368.463.424,00	100	2.394.931.936,00	100	2.421.929.820,00	100	2.449.467.660,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.207.266.141,00	100	1.213.905.965,00	100	1.226.383.827,00	100	1.239.111.246,00	100	1.252.093.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.855.483.923,00	100	2.029.108.878,00	100	2.077.287.400,00	100	2.131.909.493,00	100	2.185.984.028,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.918.928.606,00	100	1.940.140.610,00	100	1.961.776.855,00	100	1.983.845.824,00	100	2.006.356.172,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.409.788.935,00	100	2.593.982.390,00	100	2.629.966.888,00	100	2.666.671.076,00	100	2.704.109.347,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.006.780.613,00	100	8.958.765.938,00	100	9.063.597.574,00	100	9.170.525.843,00	100	9.279.592.678,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.872.492.678,00	100	3.291.944.224,00	100	3.326.257.963,00	100	3.359.262.977,00	100	3.390.223.092,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.031.931.459,00	100	4.196.409.132,00	100	4.250.372.247,00	100	4.305.414.624,00	100	4.361.557.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.433.882.627,00	100	4.335.416.787,00	100	4.431.914.353,00	100	4.577.166.810,00	100	4.738.955.628,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.294.121.325,00	100	4.339.982.883,00	100	4.395.543.116,00	100	4.452.214.553,00	100	4.510.019.419,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.234.412.959,00	100	4.533.047.755,00	100	4.590.518.688,00	100	4.651.702.072,00	100	4.721.794.367,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan untuk menunjang kinerja Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.624.922.984,00	100	1.772.910.045,00	100	1.794.318.182,00	100	1.820.480.482,00	100	1.844.106.028,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.005.482.700,00		4.209.453.400,00		4.205.703.400,00		4.204.548.300,00		4.193.638.900,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	320.073.600,00	100	350.114.500,00	100	345.114.500,00	100	343.709.400,00	100	327.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	453.600.000,00	100	630.240.000,00	100	630.240.000,00	100	630.240.000,00	100	630.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkanya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	6.819.300,00	100	7.377.900,00	100	7.377.900,00	100	7.377.900,00	100	7.377.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	316.855.000,00	100	325.500.000,00	100	325.750.000,00	100	328.000.000,00	100	333.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan ke kecamatan (%)	100	100	100	140.714.000,00	100	147.200.000,00	100	147.200.000,00	100	147.200.000,00	100	147.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan	100	100	100	102.134.600,00	100	96.104.000,00	100	96.104.000,00	100	96.104.000,00	100	96.104.000,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintahan dan pelayanan publik (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	1.198.200.000,00	100	1.195.800.000,00	100	1.195.800.000,00	100	1.195.800.000,00	100	1.195.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mandalle	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	13.000.000,00	100	12.000.000,00	100	13.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	80	80	80	175.600.000,00	80	175.600.000,00	80	175.600.000,00	80	175.600.000,00	80	175.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Peningkatan Kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien,transparan serta mudah diakses bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan ke kecamatan (%)	100	100	100	310.861.200,00	100	307.400.000,00	100	307.400.000,00	100	307.400.000,00	100	307.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan ke kecamatan (%)	70	70	80	314.388.000,00	80	314.880.000,00	80	314.880.000,00	80	314.880.000,00	80	314.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	11.937.000,00	100	3.937.000,00	100	3.937.000,00	100	3.937.000,00	100	3.937.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	641.300.000,00	100	643.300.000,00	100	643.300.000,00	100	643.300.000,00	100	643.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					21.483.695.845,00		21.746.883.700,00		21.717.219.057,00		21.683.610.090,00		21.643.283.700,00	
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	5.056.648.200,00	100	4.439.003.500,00	100	4.439.003.500,00	100	4.439.003.500,00	100	4.439.003.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan	100	100	100	455.907.545,00	100	627.631.300,00	100	627.631.300,00	100	627.631.300,00	100	627.631.300,00	Dinas/Badan yang menangani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat desa dan kelurahan (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	2.221.080.700,00	100	2.369.000.000,00	100	2.369.935.357,00	100	2.368.326.390,00	100	2.359.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	2.427.500.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	2.263.671.500,00	100	2.275.136.600,00	100	2.270.536.600,00	100	2.270.536.600,00	100	2.270.536.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	2.265.000.000,00	100	2.458.000.000,00	100	2.458.000.000,00	100	2.458.000.000,00	100	2.458.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	1.140.985.000,00	100	1.142.500.000,00	100	1.142.500.000,00	100	1.142.500.000,00	100	1.142.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	573.763.300,00	100	592.000.000,00	100	566.000.000,00	100	534.000.000,00	100	503.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	21.181.500,00	100	35.969.800,00	100	35.969.800,00	100	35.969.800,00	100	35.969.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi dan Pelayanan Publik	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	1.686.500.000,00	100	1.840.755.000,00	100	1.840.755.000,00	100	1.840.755.000,00	100	1.840.755.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Meningkatnya	Persentase Pemberdayaan	100	100	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan (%)													menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	3.348.458.100,00	100	3.673.887.500,00	100	3.673.887.500,00	100	3.673.887.500,00	100	3.673.887.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.226.777.700,00		4.277.537.500,00		4.277.537.500,00		4.276.537.500,00		4.297.537.500,00	
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	1.012.000.000,00	100	1.032.000.000,00	100	1.032.000.000,00	100	1.032.000.000,00	100	1.032.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	372.000.000,00	100	372.000.000,00	100	372.000.000,00	100	372.000.000,00	100	372.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	344.000.000,00	100	342.500.000,00	100	342.500.000,00	100	342.500.000,00	100	342.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	434.000.000,00	100	434.000.000,00	100	434.000.000,00	100	434.000.000,00	100	454.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	427.000.000,00	100	442.000.000,00	100	442.000.000,00	100	442.000.000,00	100	442.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	178.227.000,00	100	168.000.000,00	100	168.000.000,00	100	168.000.000,00	100	168.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi	Persentase koordinasi	100	100	100	146.135.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum (%)													menangani Bidang Kecamatan
MeningkatnyaKoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	12.500.000,00	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	21.000.000,00	100	22.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persenatse koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	20.500.000,00	100	20.500.000,00	100	20.500.000,00	100	20.500.000,00	100	20.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	740.500.000,00	100	740.500.000,00	100	740.500.000,00	100	740.500.000,00	100	740.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.915.700,00	100	25.037.500,00	100	25.037.500,00	100	25.037.500,00	100	25.037.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.491.100,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	491.100,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.569.100,00		9.200.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		8.500.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Desa yang diFasilitas (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MeningkatnyaCapaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Desa yang diFasilitas (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	1.700.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase Desa yang diFasilitas (%)	100	100	100	0,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Desa yang diFasilitas (%)	100	100	100	0,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahanÂ desa (%)	100	100	100	569.100,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahanÂ desa (%)	100	100	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahanÂ desa (%)	100	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahanÂ desa (%)	100	100	100	0,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.087.226.376,30		5.689.255.774,00		5.716.114.921,00		5.743.511.252,00		5.771.455.509,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.769.648.176,30		2.564.493.474,00		2.591.352.621,00		2.618.748.952,00		2.646.693.209,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya layanan untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.769.648.176,30	100	2.564.493.474,00	100	2.591.352.621,00	100	2.618.748.952,00	100	2.646.693.209,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.524.798.100,00		1.524.798.100,00		1.524.798.100,00		1.524.798.100,00		1.524.798.100,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	24,24	30,30	45,45	1.524.798.100,00	60,61	1.524.798.100,00	100	1.524.798.100,00	100	1.524.798.100,00	100	1.524.798.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					969.485.500,00		938.210.000,00		938.210.000,00		938.210.000,00		938.210.000,00	
meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	20	40	969.485.500,00	80	938.210.000,00	100	938.210.000,00	100	938.210.000,00	100	938.210.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					47.951.300,00		47.951.300,00		47.951.300,00		47.951.300,00		47.951.300,00	
Meningkatnya ketertiban Organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	50,63	58,23	70,89	47.951.300,00	84,81	47.951.300,00	98,73	47.951.300,00	100	47.951.300,00	100	47.951.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN					123.968.000,00		83.556.800,00		83.556.800,00		83.556.800,00		83.556.800,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial budaya dan masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	20	20	20	123.968.000,00	20	83.556.800,00	20	83.556.800,00	20	83.556.800,00	20	83.556.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					651.375.300,00		530.246.100,00		530.246.100,00		530.246.100,00		530.246.100,00	
meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	651.375.300,00	100	530.246.100,00	100	530.246.100,00	100	530.246.100,00	100	530.246.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.405.542.743.700		1.495.562.082.029		1.503.056.113.522		1.510.874.281.459		1.519.129.936.657	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program, Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program,

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Gini dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Indikator kinerja makro tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Target indikator kinerja makro mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 digambarkan pada Tabel 4.2, Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolak ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan periode 2025-2029, IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, IKU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2.
Indikator Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline			Target Tahun			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,87	74,25	74,73	75,67	76,22	76,94	77,58
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,41	12,31	11,55 – 10,84	11,05	10,54	9,16-8,16	8,49-7,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,99	3,69	3,81	3,10	2,80	2,50	2,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,19	5,89	6,25	6,38	6,51	6,62
5	Rasio Gini	Angka	0,317	0,311	0,304	0,30	0,29	0,286	0,279
6	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	96,36	101,36	107,33	112,80	118,16	132,32	142,76
7	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Persen	4,99	4,99	5,01	5,04	5,06	5,09	5,11
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	38,38	39,00	40,62	40,88	41,05	41,76	41,98
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	75,44	75,65	75,86	76,07	76,28	76,49	76,71

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2025

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	IPM	73,87	74,4	74,73	75,67	76,31	76,94	77,58
2	Indeks Kesehatan	81,71	82,12	82,52	82,92	83,33	83,73	84,13
3	Indeks Pendidikan	63,82	64,58	65,28	65,99	66,70	67,40	68,11
4	Indeks Pembangunan Keluarga	61,20	63,00	64,55	66,10	67,65	69,20	70,75
5	Indeks Ketimpangan Gender	0,424	0,408	0,392	0,376	0,36	0,344	0,328
6	Indeks Perlindungan Anak	73,49	76,52	79,56	82,59	85,62	88,65	91,69
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	85,30	85,50	86,50	87,50	88,70	89,70	90,80
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,00	5,97	6,11	6,25	6,38	6,51	6,62
9	PDRB Per Kapita	96,36	102,08	107,33	112,80	118,16	123,53	128,89
10	Rasio Gini	0,317	0,31	0,304	0,30	0,29	0,28	0,28
11	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	6.073,70	6.362,04	6.661,11	6.969,20	7.286,98	7.615,14	7.954,85
12	Tingkat Kemiskinan	12,41	12,31	11,55-10,84	11,05	10,54	9,86	9,53
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,99	3,69	3,81	3,10	2,80	2,50	2,21
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,00	81,46	81,92	82,38	82,84	83,30	83,76
15	Tingkat Inflasi	1,19	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0
16	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,00	4,07	4,10	4,13	4,16	4,20	4,21
17	Persentase PAD terhadap Total APBD	15,34	15,65	15,63	16,03	16,45	16,88	17,33

No.	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Indeks Infrastruktur Daerah	4,12	4,26	4,41	4,57	4,73	4,90	5,08
19	Nilai Pilar Infrastruktur Indeks daya Saing Daerah	4,12	4,27	4,42	4,58	4,74	4,91	5,00
20	Rasio Desa dengan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Merata	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0
21	Indeks Desa	-	79,13	79,43	79,63	79,93	80,14	80,41
22	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
23	Nilai SAKIP	64,03 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
24	Indeks Pelayanan Publik	B	B	B	B	B	B	B
25	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	60.920,01	60.307,05	58.705,46	58.448,40946	58.280,34	57.578,41	57.360,91
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	75,44	75,65	75,86	76,07	76,28	76,49	76,71
27	Indeks Resiko Bencana (IRB)	159,47	157,24	155,01	152,77	150,54	148,31	146,08

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,44	75,65	75,86	76,07	76,28	76,49	76,71	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	159,47	157,24	155,01	152,77	150,54	148,31	146,08	
3	Rasio Penduduk	%	96,70	96,85	97,00	97,14	97,29	97,44	97,59	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	
5	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	325,27	328,84	332,41	335,97	339,54	343,11	346,68	
6	Persentase Kepemilikan NPWP	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,14	1,81	2,68	3,80	5,16	6,77	8,61	
8	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,14	2,04	1,94	1,84	1,74	1,64	1,54	
9	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,38	39,00	40,62	40,88	41,05	41,76	41,98	
10	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0	0	0	0	0	0	0	
11	Produksi perikanan budidaya	Ton	417.612,10	438.492,71	460.417,34	483.438,21	507.610,12	532.990,62	559.640,15	
12	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	28,62	34,08	39,53	44,99	50,44	55,90	61,35	
13	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1.184,30	1.880,00	2.056,36	2.232,72	2.409,08	2.585,44	2.761,80	
14	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	99,84	99,86	99,87	99,89	99,90	99,92	99,93	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,00	-	-	-	-	-	-	
16	Rate Net Recent Migration	%	-6,00	-6,65	-7,31	-7,96	-8,62	-9,27	-9,93	
17	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	67,87	69,43	70,98	72,54	74,09	75,65	77,20	
18	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	3,72	4,16	4,60	5,03	5,47	5,91	6,35	
19	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	26,8	25,3	23,8	22,3	20,8	19,3	17,8	
20	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,00	81,46	81,92	82,38	82,84	83,30	83,76	
21	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	11,69	13,39	15,39	17,40	19,40	21,40	23,41	
22	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	-	-	-	-	-	-	-	
23	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	28,62	34,08	39,53	44,99	50,44	55,9	61,35	
24	Proporsi sawah irigasi	%	-	-	-	-	-	-	-	
25	Angka Konsumsi Ikan	Angka	56,5	58	60	62	64	66	68	
26	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84,3	88,2	92,2	96,1	98,2	99,1	100	
27	Indeks pertanian (IP) padi	Angka	-	-	-	-	-	-	-	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
28	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	-	-	-	-	-	-	-	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00	5,97	6,11	6,25	6,38	6,51	6,62	
2	PDB per kapita	Rp	93,36	102,08	107,33	112,80	118,16	123,53	128,89	
3	Rasio Gini	Indeks	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	61,20	63,00	64,55	66,10	67,65	69,20	70,75	
5	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,424	0,408	0,392	0,376	0,360	0,344	0,328	
6	Indeks Perlindungan Anak	Angka	73,49	76,52	79,56	82,59	85,62	88,65	91,69	
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	85,30	85,50	86,50	87,50	88,70	89,70	90,80	
8	Tingkat Kemiskinan	%	12,41	12,31	11,55	11,05	10,54	9,86	9,53	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,99	3,69	3,81	3,10	2,80	2,50	2,21	
10	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	-	-	-	-	-	-	-	
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	25,51	23,59	21,67	19,76	17,84	15,92	14,00	
12	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	-	-	-	-	-	-	-	
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,22	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,44	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,47	8,67	8,88	9,08	9,28	9,48	9,69	
16	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	%	41,83	41,93	42,02	42,12	42,21	42,31	42,40	
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,35	91,73	92,10	92,48	92,85	93,23	93,60	
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	93,99	102,85	107,69	114,05	121,93	131,33	142,25	
19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	-	-	-	-	-	-	-	
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58	59,2	60,6	62,2	64	66	68,2	
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81	12,83	12,84	12,86	12,87	12,89	12,90	
22	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	%	9,1	0,35	0,4	0,43	0,46	0,50	0,55	
23	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	67,89	59,88	51,85	43,83	35,80	27,78	19,75	
24	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS	%	89,35	89,69	90,03	90,36	90,70	91,04	91,38	
25	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	66,27	66,6	66,9	67,4	67,9	68,4	68,9	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	24,91	35,2	39,95	42,84	45,73	48,63	51,52	
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58,40	58,90	59,40	59,90	60,40	60,90	61,40	
28	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	1,94	1,95	21,35	40,77	60,19	71,84	83,49	
29	Peningkatan prestasi olahraga	Buah	107,5	97	110	40	45	50	55	
30	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,33	0,58	0,6	0,62	0,64	0,68	0,7	
31	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	39,81	50,00	60,19	70,37	80,56	90,74	100	
32	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	98,87	123,59	148,31	173,02	197,74	222,46	247,18	
33	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	84,6	86,2	87,8	89,4	91	92,6	94,2	
35	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Angka	-	-	-	-	-	-	-	
36	Persentase Pekerja Informal	%	54,38	54,64	54,89	55,15	55,40	55,66	55,91	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
38	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,11	73,37	73,63	73,89	74,15	74,41	74,67	
39	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	
41	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per100.000 kelahiran hidup)	94,76	70,83	52,35	51,61	50,88	33,45	32,99	
42	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,03	105,07	106,12	107,18	108,25	109,34	110,43	
43	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,72	60,22	61,72	63,22	64,72	66,22	67,72	
44	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	-	-	-	-	-	-	-	
45	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	51,85	54,75	57,65	60,55	63,45	66,35	69,25	
46	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99,22	100	100	100	100	100	100	
47	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	119,65	120,85	122,05	123,28	124,51	125,75	127,01	
48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,17	74,88	76,89	78,91	80,96	82,95	84,97	
49	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	-	-	-	-	-	-	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
50	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	55,52	58,02	60,52	63,02	65,52	68,02	70,52	
51	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,40	63,50	64,60	65,70	66,80	67,90	69,00	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,87	74,4	74,73	75,67	76,31	76,94	77,58	
2	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	4,12	4,26	4,41	4,57	4,73	4,90	5,08	
3	Tingkat Inflasi	%	1,19	1.5-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0	
4	Indeks Desa	Nilai	-	79,13	79,43	79,63	79,93	80,14	80,41	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	58,16	60,52	62,89	65,25	67,61	69,97	72,34	
6	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	42,44	44,24	45,44	47,10	49,22	51,80	54,84	
7	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta Rupiah	3.178,31	3.327,60	3.476,90	3.626,20	3.775,50	3.924,80	4.074,10	
9	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	53,07	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	
10	Rasio Kewirausahaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton	10,00	10,18	10,33	10,51	10,68	10,86	11,03	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,39	0,36	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	
14	Kualitas udara (No2)	Angka	76,61	78,11	79,61	81,11	82,61	84,11	85,61	
15	Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	%	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,17	74,88	76,89	78,91	80,96	82,95	84,97	
17	Kualitas air permukaan (BOD)	Angka	76,33	80,60	84,90	89,10	93,40	97,70	102,00	
18	Angka Ketergantungan	%	45,65	45,10	44,60	44,10	43,50	43,00	42,50	
19	Net Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rupiah	11.383,73	11.962,25	12.429,02	12.895,79	13.362,56	13.829,33	14.296,10	
20	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton	15,00	15,26	15,49	15,76	16,03	16,29	16,54	
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	70,00	71,23	72,29	73,54	74,79	76,04	77,21	
22	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0	0	106	107	108	109	110	
23	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	-19,19	3,30	4,25	5,65	7,45	9,65	12,00	
24	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	26,96	20,46	21,15	21,84	22,53	23,22	23,91	
25	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,82	65,85	67,00	67,50	68,00	68,50	70,00	
26	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,75	96,85	96,95	97,06	97,16	97,26	97,36	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
27	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	-	-	-	-	-	-	-	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,00	4,07	4,10	4,13	4,16	4,20	4,21	
2	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	
3	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	69,40	75,88	77,03	78,18	79,34	80,49	81,65	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	
7	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Anggota DPRD	%	18,57	20,58	22,57	24,57	26,57	28,57	30,57	
8	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,52	96,86	97,20	97,54	97,88	98,22	98,56	
9	Persentase Penilaian MCP KPK	%	74,76	75,00	76,56	78,12	79,68	81,24	82,80	
10	Indeks SPBE	Angka	2,64	2,71	2,81	2,91	3,1	3,21	3,3	
11	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
12	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
13	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,46	3,55	3,60	3,70	3,75	3,80	3,85	



Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	86,01	88,98	91,95	94,50	97,05	99,60	100	
2	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang PAUD	%	18,48	24,36	30,24	36,11	41,99	47,86	53,74	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	100,00	
4	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang SD	%	68,52	71,83	75,14	78,45	81,76	85,07	88,38	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,98	93,13	94,27	95,42	96,56	97,71	98,85	
6	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pada Jenjang SMP	%	68,19	72,76	77,33	81,90	86,47	91,04	95,61	
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,24	16,20	17,16	18,12	19,08	20,03	20,99	
8	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	71,80	72,80	73,80	74,80	75,80	76,80	77,80	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,95	72,45	73,95	75,45	76,95	78,45	79,95	
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	77,46	78,36	79,26	80,16	81,06	81,96	82,86	
11	Angka Partisipasi Murni (APM)Â PAUD	%	76,60	78,73	80,87	83,00	85,13	87,27	89,40	
12	Angka Putus Sekolah pada Jenjang SMP	%	0,90	0,76	0,63	0,50	0,37	0,23	0,07	
13	Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD	%	0,25	0,22	0,18	0,14	0,11	0,07	0,03	
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,26	62,76	65,26	67,76	70,26	72,76	75,26	
15	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69,84	70,84	71,84	72,84	73,84	74,84	75,84	
16	Persentase Sekolah SD dengan KondisiÂ Baik	%	94,08	94,54	95,01	95,47	95,94	96,40	96,87	
17	Angka Partisipasi Kasar (APK)Â PAUD	%	87,57	88,55	89,53	90,51	91,48	92,46	93,44	
18	Angka Partisipasi Kasar (APK)Â SMP	%	97,46	98,16	98,86	99,56	100,26	100,95	101,65	
19	Angka Partisipasi Murni (APM)Â SD	%	87,84	90,12	91,27	92,42	93,57	94,72	95,87	
20	Persentase Sekolah SMP dengan KondisiÂ Baik	%	93,76	94,64	95,51	96,39	97,27	98,15	99,03	
21	Persentase Sekolah PAUD dengan KondisiÂ Baik	%	96,15	96,44	96,73	97,02	97,31	97,59	97,88	
22	Angka Partisipasi Murni (APM)Â SMP	%	76,07	78,63	80,27	81,91	83,55	85,19	86,84	
23	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	57,66	57,75	58,54	62,95	68,47	75,10	81,72	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
24	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	88,44	89,20	89,70	90,20	90,70	91,20	91,70	
25	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	98,04	98,37	98,70	99,03	99,35	99,68	100,00	
26	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,01	60,41	62,81	65,21	67,61	70,01	72,41	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	97,81	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	94,82	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	97,98	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	92,22	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	98,90	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	94,94	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	87,61	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase Warga Negara Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	33,30	66,67	66,67	66,67	100	100	100	
14	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang disusun/direvisi dan ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
2	Luas Irigasi Kondisi Ringan	Ha	0	367,245	329,329	291,412	253,496	253,496	253,496	
3	Luas Irigasi Kabupaten	Ha	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	
4	Panjang Jalan yang Rekonstruksi/Ditingkatkan	KM	9	9,38	8	8	9	7	7	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Jumlah Bendung, Embung atau Bangunan Air yang di bangun, direhabilitasi dan ditingkatkan	Unit	1	1	2	2	2	2	2	
6	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Air Bersih	Unit	20.692	20.692	21.192	21.692	22.192	22.692	23.192	
7	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	Jembatan	0	0	3	3	3	3	3	
8	Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi	%	93,10	93,12	93,83	94,52	95,20	95,86	96,50	
9	Panjang Jalan Kabupaten	KM	873,394	873,394	873,394	873,394	873,394	873,394	873,394	
10	Panjang Jalan Kondisi Baik	KM	337,904	345,850	350,750	356,200	364,630	369,870	375,200	
11	Panjang Jalan Kondisi Sedang	KM	162,641	156,830	158,550	158,450	156,850	155,500	155,720	
12	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Unit	0	73.574	75.074	76.574	78.074	79.574	81.074	
13	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	0	60,27	61,64	63,01	64,38	65,75	67,12	
14	Luas Area Layanan Irigasi yang terairi	Ha	0	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	
15	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	3,5	3,87	2,5	1,8	1,8	1,5	1,5	
16	Jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang	Unit	4	4	4	4	4	4	4	
17	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	%	57,31	57,55	58,31	58,93	59,71	60,15	60,79	
18	Rasio Jaringan Irigasi	Angka	31,54	33,20	34,86	37,30	38,42	39,19	39,97	
19	Persentase Rumah Tinggal berakses air bersih	%	26,00	26,19	26,49	26,78	27,06	27,34	27,61	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Panjang Jalan yang Direhabilitasi/dipelihara	KM	11,5	12,71	11	14	14,5	14,5	14,5	
21	Luas Irigasi Kondisi Baik	Ha	0	2.414,503	2.604,084	2.755,749	2.869,498	2.945,330	2.983,247	
22	Jumlah Rumah Tinggal	Unit	78.011	79.011	80.011	81.011	82.011	83.011	84.011	
23	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	0	63,72	63,78	64,12	64,19	64,37	65,22	
24	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Nilai	75.353,4	77.353,4	79.353,4	81.353,4	83.353,4	85.353,4	87.353,4	
25	Luas Irigasi Kondisi Sedang	Ha	0	398,367	360,451	322,534	284,618	246,702	208,786	
26	Jumlah Jembatan yang dibangun	Jembatan	6	6	5	6	4	5	7	
27	Jumlah rekomendasi atau persetujuan PKKPR yang diterbitkan	Unit	50	50	50	50	50	50	50	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	28,25	10,00	14,27	21,41	28,55	35,68	42,82	
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Angka	46,30	48,79	51,29	53,79	56,29	58,79	61,29	
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,77	9,60	9,42	9,28	9,15	9,01	8,87	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase layanan pencegahan kebakaran, penanggulangan bencana dan penyelamatan yang ditingkatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap penangananA kebakaran	Menit	486	450	430	400	350	320	300	
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	280.000	290.000	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	60	70	80	90	100	110	120	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan social	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	70,40	86,76	86,92	87,08	87,24	87,40	87,56	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	40,97	40,98	41,17	47,54	48,56	49,29	51,32	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	69,23	66,67	73,33	75,00	76,47	77,78	77,78	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	2,21	2,21	2,90	3,62	4,35	5,07	5,80	
4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	2,16	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/Orang/Bulan	108,36	110,49	112,65	114,86	117,12	119,41	121,75	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	73,92	81,67	84	86,33	88,67	91	93	
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	29,78	34,78	39,78	44,78	49,78	54,78	59,78	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,68	60,51	62,34	64,17	66	67,83	69,66	
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	62,74	64,81	66,88	68,95	71,02	73,09	73,16	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,83	5	5	4,8	4,8	3,88	3,88	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	8	88,2	92,2	96,1	98,2	99,1	100	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	25,45	45,18	54,15	63,12	72,09	81,06	90,03	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	98	98	98	98	98	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,44	73,91	74,12	74,33	74,54	74,76	74,97	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	61,26	63	64	65	67	70	72	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda penduduk (KTP-El)	%	98,28	98,47	98,66	98,85	99,04	99,24	99,43	
2	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	11,09	12,99	15,22	17,81	20,8	24,40	28,59	
4	Persentase Akta Kelahiran Balita (0-5) Tahun yang diterbitkan	%	99,79	99,91	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	81,04	81,70	82,36	83,03	83,71	84,39	85,09	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Desa	%	21,54	24,62	30,77	40	60	80	100	
2	Persentase Desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	%	0	35,38	41,54	47,59	53,85	60	66,15	
3	Persentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	0	47,69	56,92	67,69	78,46	87,69	100	
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa		20,00	24,62	30,77	36,92	43,08	49,23	53,85	
5	Persentase BUMDES Maju	Bumdes	1,54	1,54	4,62	7,69	12,31	15,38	23,08	
6	Jumlah Desa Mandiri	Desa	13	23	27	31	35	39	43	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	73,92	81,67	84	86,33	88,67	91	93	
2	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,14	2,04	1,94	1,84	1,74	1,64	1,54	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66,63	68,13	69,63	71,13	72,63	74,13	75,63	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,88	6,18	5,48	4,78	4,08	3,38	2,67	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Rasio	0,63	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,49	
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	76,20	80,17	84,14	88,11	92,08	96,05	100	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	80	80	80	85	85	85	90	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0	30	35	40	45	50	55	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	26,96	20,46	21,15	21,8	22,53	23,22	23,91	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,11	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,22	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	-7,10	0,48	0,60	0,83	1,16	1,61	2,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	18,06	3,53	4,55	5,43	6,19	7,77	8,11	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	63,15	65,65	68,16	70,65	73,15	75,65	78,15	
4	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	0,35	97,70	97,72	97,82	97,92	98,02	98,04	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	47,06	39,77	29,35	20,62	12,62	7,21	5,00	
AS 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	16,07	16,49	16,82	17,16	17,50	17,86	18,22	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	9,1	9,56	10,01	10,47	10,92	11,38	11,83	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	3,12	3,28	3,61	3,97	4,36	4,80	5,28	
AT 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50	60	65	70	75	80	80	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	30	30	40	40	45	50	50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	-	-	40	40	50	50	50	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	39,81	50,00	60,19	70,37	80,56	90,74	100	
2	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	7,28	10,40	13,51	16,63	19,75	22,87	25,99	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,38	75,5	75,8	76,2	76,5	77,2	77,9	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	93,93	94,5	95,5	96	96,5	97	97,5	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	75,00	75,2	75,4	75,60	75,8	76,00	76,2	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	46,66	47,37	57,89	68,42	78,95	89,47	100	
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	22.146,11	24.000	24.416,08	25.636,89	26.918,73	28.264,67	2.967.790	
3	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Terhadap Perundang-Undangan	%	46,66	47,37	57,89	68,42	78,95	89,47	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	56,5	58	60	62	64	66	68	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	3,5	3,8	5,1	6,4	7,7	9,0	10,3	
2	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	-51,58	30	32	33,56	35,56	37,56	39,46	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,46	1,06	1,66	2,26	2,86	3,46	4,06	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	-16,67	20	20	33,33	37,5	45,45	45,45	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
6	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	%	89,83	47,32	48,74	50,20	51,71	53,26	54,86	
7	Tingkat Hunian Akomodasi	%	6,27	6,89	7,03	8,14	8,77	9,39	10,01	
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	3,26	3,39	3,53	3,67	3,82	3,97	4,13	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,79	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,8	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	1,24	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18	1,16	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	%	40,02	40,11	40,39	40,63	40,86	41,10	41,33	
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	98,98	99,04	99,10	99,21	99,26	99,32	99,41	
3	Persentase kerja realisasi pupuk	%	41,51	32,87	75,06	75,86	76,26	76,66	77,06	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	4,05	8,43	8,89	9,08	9,35	9,41	10,16	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang di keluarkan oleh Instansi terkait	%	11,83	13,79	16,75	25,51	33,33	47,61	56,62	
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	%	88,52	88,96	89,40	89,85	90,30	90,75	91,50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
BD	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Ber-Akhlak	Skor	65,8	70	71	72	73	74	75	
2	Penyusunan LKPj Bupati Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Suvey Kepuasan Masyarakat	Skor	83,06	83,06	84	85,5	86,5	87,5	88,4	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	71,61	73	74	75	77	79	80	
5	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3,1478	3,2017	3,2726	3,3933	3,4093	3,6237	3,7147	
6	Indeks Kematangan UKPBJ	Nilai	77,7	77,7	77,7	88,8	88,8	88,8	88,8	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	82,6	82,7	87,6	90,8	95,6	97,6	100	
8	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Skor	86,4	86,5	87	87,5	88,5	89,5	90,1	
9	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3	3,22	3,5	3,55	4	4,25	4,51	
10	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	-	80	80	85	85	90	90	
11	Penyusunan LAKIP Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	%	95	95	95	96	97	98	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BF	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
BG	5.02 - KEUANGAN									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	35,91	37,16	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	33,84	20,00	21,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	93,35	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	3,80	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	7,00	7,03	9,03	11,03	13,03	15,03	15,03	
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9,62	8,91	8,93	8,96	9,35	9,76	10,18	
BH	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	2,13	84,16	2,08	2,12	2,17	2,22	2,27	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,41	25	25	25	25	25	25	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	10,39	18,97	6,27	5,61	9,50	2,71	4,63	
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,48	50	50	50	50	50	50	
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	81,47	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	93	98	98	98	98	98	98	
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	2,57	4,27	5,77	7,27	8,77	10,27	11,27	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BI	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	-	-	-	-	-	-	-	
BJ	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level	3,020	3	3	3	3	3	3	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2,874	3	3	3	3	3	3	
4	Kapasitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	68,65	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	
BK	7.01 - KECAMATAN									
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa yang diFasilitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
BL	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	24,24	30,30	45,45	60,61	100	100	100	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	0	20	40	80	100	100	100	
3	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	20	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	50,63	58,23	70,89	84,81	98,73	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Untuk indikator pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar atau SPM sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas 6 (enam) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target Indikator SPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030 tertuang dalam tabel 4.5

Selain pemenuhan target SPM, amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi bagian yang penting untuk diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bahwa tujuan dan sasaran global TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel 4.6



Tabel 4.6.
Indikator Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

No	Jenis Layanan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	BIDANG PENDIDIKAN									
	Pendidikan Dasar	Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	99,71	100	100	100	100	100	100
II	BIDANG KESEHATAN									
	Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Persen	97,81	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Persen	94,82	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Persen	97,98	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	92,22	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Persen	98.90	100	100	100	100	100	100



No	Jenis Layanan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Persen	94,94	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Persen	87,61	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM									
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
IV	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT									
	Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
V	BIDANG TRANTIBUMLINMAS									
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100



No	Jenis Layanan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
VI	BIDANG SOSIAL									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	95.83	100	100	100	100	100	100



Tabel 4.7.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2030

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	Target			
							2027	2028	2029	2030
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
	Indikator 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrem.	Sosial	%	0,97%	0	0	0	0	0	0
	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Sosial	%	12,41%	12,31%	11,55%	11,05%	10,54%	9,86%	9,53%
	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesehatan	%	99,67	100	100	100	100	100	100
	Indikator 1.3.1(b) Cakupan Kepesertaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	%	24,91%	35,2%	39,95%	42,84%	45,73%	48,63%	51,52%
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan									
	Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	Pangan	%	2.30	0.55	0	0	0	0	0
	Indikator 2.1.2* Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Pangan	%	5,83%	5,00%	5,00%	4,80%	4,80%	3,88%	3,88%
	Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Kesehatan	%	25,51%	23,59%	21,67%	19,76%	17,84%	15,92%	14%
	Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Kesehatan	%	3.91	3.53	3.15	2.77	2.39	2.00	1.62
	Indikator 2.2.2(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	Nilai	84,3	88,2	92,2	96,1	98,2	99,1	100
	Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Kesehatan	%	7.2	5.2	3.2	1.2	0	0	0



No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline		Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia									
	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup.	Kesehatan	Per 100.000 kelahiran hidup	0,97	0,79	0,60	0,42	0,23	0,05	0
	Indikator 3.1.2* (a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	%	96,38	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.1.2* (b) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kesehatan	%	99	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	Per 1.000 kelahiran hidup	0,75	1,51	1,18	0,86	0,53	0,2	0
	Indikator 3.2.1* (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	Per 1.000 kelahiran hidup	0,75	0,71	0,69	0,68	0.51	0.51	0,49
	Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Kesehatan	Per 1.000 kelahiran hidup	7,2	7,35	7,06	6,78	6,49	6,21	5,92
	Indikator 3.3.1. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Kesehatan	%	0,4	1,51	1,18	0,86	0,53	0,2	0
	Indikator 3.3.2. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk).	Kesehatan	Per 100.000 penduduk	281	231.0	181	131	81	31	0
	Indikator 3.3.3* Angka kejadian Malaria per 1.000 orang	Kesehatan	Per 1.000 orang	0,02	0,3	0,25	0,22	0,18	0,13	0
	Indikator 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kesehatan	Per 100.000 penduduk							



No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indikator 3.3.5* (a) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).	Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.3.5* (b) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).	Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Kesehatan	%	1,91	3,35	2,71	2,07	1,42	0,78	0,14
	Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kesehatan	%	6,8	4,8	2,8	0,8	0	0	0
	Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Kesehatan	%	3.35	2.46	1.57	0.68	0	0	0
	Indikator 3.7.1* Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraception (mCPR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	66,63	68,13	69,63	71,13	72,63	74,13	75,63
	Indikator 3.7.2* Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) per 1.000 perempuan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per 1.000 perempuan	26,8	25,3	23,8	22,3	20,8	19,3	17,8
	Indikator 3.7.2.(a) Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelahiran	2,14	2,04	1,94	1,84	1,74	1,64	1,54
	Indikator 3.8.1(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan	%	99,67	100	100	100	100	100	100
	Indikator 3.c.1* Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Kesehatan	Per 1.000 penduduk	4,3	4,87	5,36	5,85	6,34	6,83	7,32
	4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline		Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca, (ii) numeras										
	Indeks Literasi SD	Pendidikan	Angka	55.52	58.02	60.52	63.02	65.52	68.02	70.52	
	Indeks Numerasi SD	Pendidikan	Angka	51.85	54.75	57.65	60.55	63.45	66.35	69.25	
	Indeks Literasi SMP	Pendidikan	Angka	62.4	63.5	64.6	65.7	66.8	67.9	69	
	Indeks Numerasi SMP	Pendidikan	Angka	58.72	60.22	61.72	63.22	64.72	66.22	67.72	
	Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat										
	Angka Kelulusan SD/MI	Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Kelulusan SMP/MTs	Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun										
	Angka Tidak Sekolah (ATS) SD/MI	Pendidikan	%								
	Angka Tidak Sekolah (ATS) SMP/MTs	Pendidikan	%								
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	Pendidikan	%	0,25	0,20	0,16	0,12	0,08	0,04	0	
	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	Pendidikan	%	0,9	0,3	0,1	0	0	0	0	
	Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat (a) Perempuan/Laki-laki,	Pendidikan	%	87,84	85,37	90,76	96,15	100	100	100	
	Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat.	Pendidikan	%	97,46	100	100	100	100	100	100	
Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (Angka melek huruf)	Pendidikan	%	98,62	100	100	100	100	100	100		
Indikator 4.c.1* Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV/S1	Pendidikan	%	89.08	92.65	96.22	99.79	100	100	100		
5	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
	Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Pemberdayaan Perempuan dan	%	18,58	20,58	22,57	24,57	26,57	28,57	30,57	



No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline		Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perlindunagn Anak									
	Indikator 5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	6,88	6,18	5,48	4,78	4,08	3,38	2,67	
6	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
	Indikator 6.2.1* Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsmi Air Minum	Kesehatan	%	67,87	69,43	70,98	72,54	74,09	75,65	77,20	
	Indikator 6.2.1* (b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Kesehatan	%	3,72	4,16	4,60	5,03	5,47	5,91	6,35	
	Indikator 6.3.2(a) Indeks Kualitas Air (IKA)	Lingkungan Hidup	%	68,33	76,53	76,73	76,93	77,13	77,33	77,53	
7	Tujuan TPB: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
	Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	PLN	kWh/kapita	1184.30	1880.00	2056.36	2232.72	2409.08	2585.44	2761.80	
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
	Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	5	5,97	6,11	6,25	6,38	6,51	6,62	
	Indikator 8.1.1.(a) PDRB per kapita	BPS	Juta Rupiah	96,33	103,52	131,542	160,909	190,276	220,99	244,74	
	Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tenaga Kerja/BPS	%	3,99	4,8	4,7	4,59	4,48	4,37	4,26	
	Indokator 8.9.1* PAD Sektor Pariwisata	Pariwisata	%	3,26	0,92	0,92	1,1	1,1	1,2	1,3	
	Indikator 8.9.1.(a) Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Pariwisata	Orang								
	Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	Pariwisata	Orang		7949	19969	31990	44011	56032		
9	Tujuan TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indikator 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Perhubungan	Unit	6						
	Indikator 9.2.1.(a) Rasio PDRB Industri Pengolahan	BPS	%	42,44	44,24	45,44	47,10	49,22	51,80	54,84
	Indikator 9.2.1.(a) Pertumbuhan PDRB industry Manufaktur	BPS	%		1,08	1,08	2,15	3,23	4,30	
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara									
	Indikator 10.1.1.(a) Rasio Gini	BPS	Angka	0,317	0,35	0,348	0,346	0,344	0,342	0,34
	Indikator 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	12,41%	12,31%	11,55%	11,05%	10,54%	9,86%	9,53%
	Indikator 10.1.1.(d) Persentase Desa Mandiri	DPMD	%	20,00	24,62	30,77	36,92	43,08	49,23	53,85
	Indikator 10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	%	24,91	35,2	39,95	42,84	45,73	48,63	51,52
11	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
	Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Perkimtan	%	53,07	58	60	62	64	66	68
	Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	Lingkungan Hidup	%	11.69	13.39	15.39	17.40	19.40	21.40	23.41
	Indikator 11.6.1.(b) Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Lingkungan Hidup	%							
	Indikator 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	%	76,61	76,91	77,21	77,51	77,81	78,11	78,41
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan									
	Indikator 12.5.1.(a) Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Lingkungan Hidup	%	28.62	29.00	30.70	34.63	38.56	42.48	46.41



No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Lingkungan Hidup	Unit	1	1	1	1	1	1	1
13	Tujuan TPB: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya									
	Indikator 13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Lingkungan Hidup	Ton CO2 eq	37944.01142	38556.97	40158.57	40415.61	40583.68	41285.62	41503.12
	Indikator 13.2.2.[a] Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Lingkungan Hidup	Ton CO2 eq	60.920,01	60.307,05	58.705,46	58.448,40	58.280,34	57.578,41	57.360,91
	Indikator 13.2.2.[b] Persentase Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Lingkungan Hidup	%	38,38	39,00	40,62	40,88	41,05	41,76	41,98
14	Tujuan TPB: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan									
	Indikator 14.7.1.(a) Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	BPS	%							
16	Tujuan TPB: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan									
	Indikator 16.6.1.[a] Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indikator 16.6.1.[b] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bag. ORTALA	%	64,03 (B)	(60-70) B	(60-70) B	(60-70) B	(60-70) B	(70-80) BB	(70-80) BB
	Indikator 16.6.1.[c] Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. ORTALA	%	69,62 (B)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Indikator 16.6.2.(a) Persentase Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Bag. ORTALA	%	86,40	82,62	84,14	86,19	87,97	89,75	91,63
	Indikator 16.7.1.(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Pemberdayaan Perempuan dan	%	18,58	20,58	22,57	24,57	26,57	28,57	30,57

No. TPB	Tujuan dan Indikator TPB	Urusan	Satuan	Target						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Perlindungan Anak								
	Indikator 16.9.1* Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	Catatan Sipil dan Kependudukan	%	96,5	97	97,5	98	98,5	99	99,5
17	Tujuan TPB: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan									
	Indikator 17.1.1.[a] Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Bapenda	%	0,39	0,36	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029



BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan. Dalam pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJMD harus menjadi bagian dari RKPD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJMD ke RKPD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RKPD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD. Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Mitigasi Fiskal

Mitigasi fiskal adalah langkah-langkah strategis untuk mengelola dan mengurangi risiko fiskal yang dihadapi oleh Pemerintah. Risiko fiskal dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan masalah internal pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan Strategi Mitigasi Fiskal, antara lain:

- Diversifikasi pendapatan: meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi
- Pengelolaan belanja: mengoptimalkan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- Pengawasan dan evaluasi: memantau dan mengevaluasi risiko fiskal secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi masalah
- Sinergi antarpemangku kepentingan: meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat untuk mengatasi risiko fiskal

4. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

5. Masa Transisi dan Sistem Insentif

Masa transisi dan sistem insentif adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks perubahan dan pengembangan organisasi atau sistem. Kaitan antara Masa Transisi dan Sistem Insentif, antara lain:

- Dalam masa transisi, sistem insentif dapat membantu memotivasi pihak-pihak yang terlibat untuk beradaptasi dengan perubahan
- Sistem insentif yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas selama masa transisi

- Namun, sistem insentif juga perlu dirancang dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif, seperti demotivasi atau kecurangan. Dengan demikian, sistem insentif dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung masa transisi dan meningkatkan kinerja.

6. Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan pembangunan adalah konsep yang menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ke dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan. Pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 mencakup lima aspek utama:

- a. Gender dan inklusi sosial, mengintegrasikan perspektif gender dan memastikan partisipasi penuh kelompok rentan dalam proses pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan
- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menjadi kerangka kerja global untuk pembangunan berkelanjutan. Mengadopsi 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di dunia. SDGs meliputi upaya untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kedamaian serta kesejahteraan
- c. Transformasi digital, memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses pembangunan. Fokus pada digitalisasi untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari layanan publik hingga pertumbuhan ekonomi;
- d. Pembangunan rendah karbon, berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong praktik pembangunan yang ramah lingkungan. Mempromosikan ekonomi hijau yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka Panjang; dan
- e. Pembangunan berketahanan iklim, membangun kapasitas untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta mengurangi kerentanan terhadap dampaknya. Menekankan pentingnya membangun sistem yang tangguh terhadap gangguan iklim demi masa depan yang lebih aman dan stabil.

7. Mekanisme Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD atau melalui perubahan RKP sesuai peraturan yang berlaku.

8. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. Selain itu juga hasil evaluasi akan dilaporkan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Hal ini akan memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan,



DR. H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si